

DISERTASI

**PERLAWANAN NELAYAN DAN PETANI TAMBAK
TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL
DI UJUNG PANGKAH GRESIK**

MILIK
TERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



HERI SUHARYANTO

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2009**

**PERLAWANAN NELAYAN DAN PETANI TAMBAK
TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL
DI UJUNG PANGKAH GRESIK**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Kamis
Tanggal : 15 Oktober 2009
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**HERI SUHARYANTO
NIM. 090114538 D**

Lembar Pengesahan

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 25 Oktober 2009

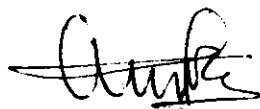
Oleh

Promotor,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Prof. Dr. Sunyoto Usman
NIP. 130530763

Ko Promotor

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'H' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Prof. Dr. Hotman M. Siahaan
NIP. 130701134

Telah diuji pada Ujian Tahap I (Tertutup)

Tanggal 30 Mei 2009

Panitia Penguji Disertasi

K e t u a : Prof. Dr. L. Dyson, Drs., MA

Anggota : 1. Prof. Dr. Sunyoto Usman
2. Prof. Dr. Hotman Siahaan
3. Prof. Dr. Setya Yuwono, MA
4. Prof. Dr. Ida Bagus Wirawan, Drs., SU
5. Daniel Theodore Sparringa, Ph.D

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rektor Universitas Airlangga

Nomor : 1005/H3/KR/2009

Tanggal : 8 Juni 2009



UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih yang telah melimpahkan segala berkat dan karunia-Nya, sehingga disertasi ini bisa diselesaikan. Mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan tingkat doktor di program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan disertasi ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, niscaya disertasi ini bisa diselesaikan. Pertama kepada Prof. Dr. Sunyoto Usman yang telah berkenan menjadi Promotor. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran dan kearifannya, memberikan arahan-arahan, memeriksa tulisan kepada penulis, dan selalu mendorong kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini. Kedua, terima kasih selanjutnya penulis ucapkan kepada Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, yang telah berkenan menjadi Ko-Promotor. Terima kasih atas segala bimbingan, kesabaran dan arahannya, sehingga disertasi ini bisa diselesaikan.

Ketiga, terima kasih penulis ucapkan kepada Rektor dan Pembantu Rektor Universitas Airlangga, Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana. Selain itu, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Ketua Program Studi S-3 Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) Prof. Dr. L. Dyson, MA dan KPS pendahulunya, Prof. Ramlan Surbakti, Drs.,MA.,Ph.D., dan Prof. Dr. Hotman M. Siahaan.

Keempat, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh guru saya di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Soetandyo Wignjosobroto, MPA., Prof. Ramlan Surbakti, Drs.,MA.,Ph.D., Prof. Dr. Hotman M. Siahaan, Prof. Dr. L. Dyson, MA., Daniel T. Sparringa, Ph.D., Dede Oetomo, Ph.D., Dr. Edy Suhardono, yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis. Kelima, terima kasih penulis sampaikan kepada tim penguji proposal: Prof. Dr. Sunyoto Usman, Prof. Ramlan

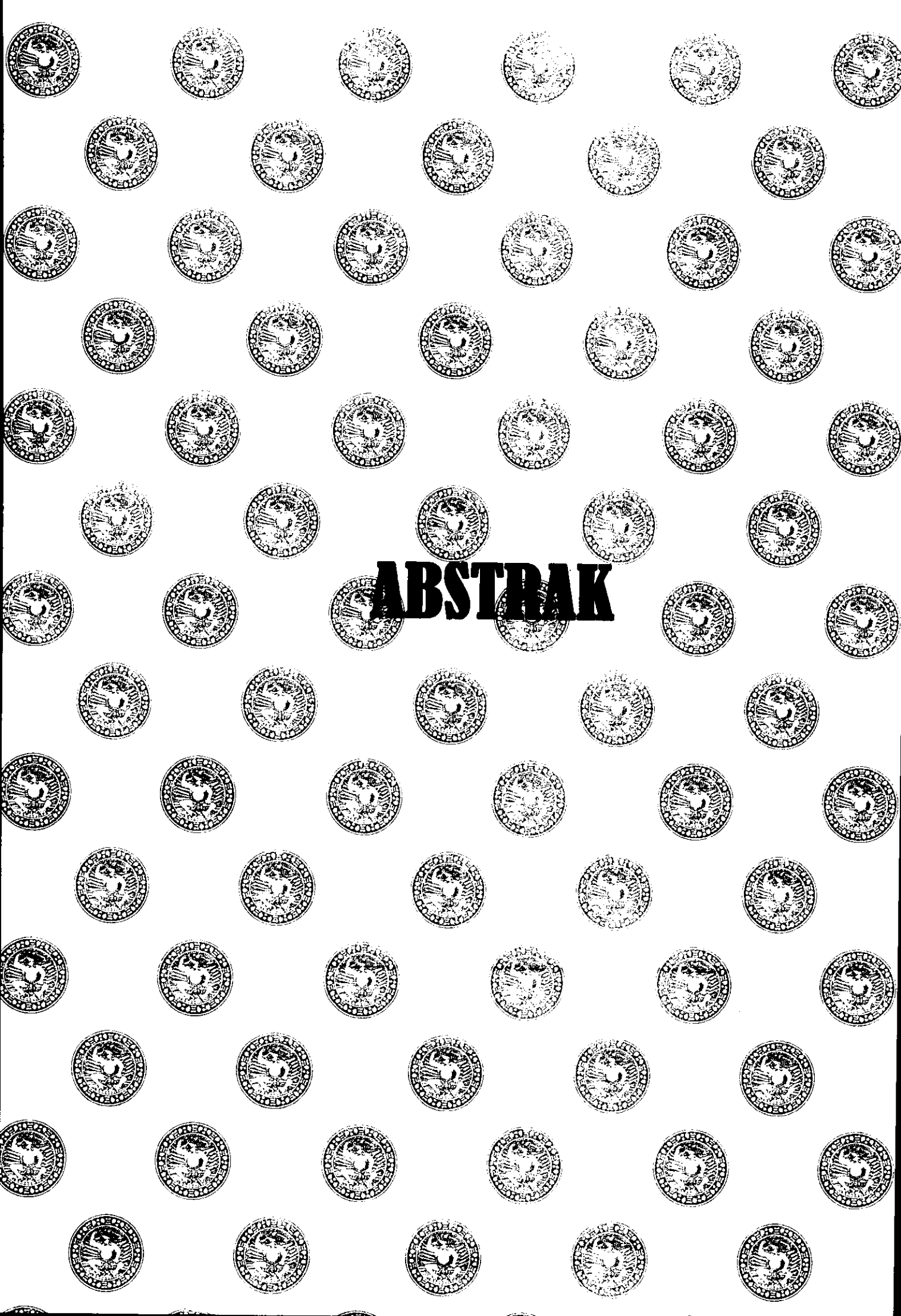
Surbakti, Drs., MA., Ph.D., Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. Dr. L. Dyson, MA., Dr. Armada Ryanto, dan Dr. Edy Suhardono, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan terhadap fokus penelitian yang penulis lakukan. Selain itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD): Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Daniel T. Sparringa, Ph.D., dan Dr. Francis Wahono yang banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga bagi penulis. Kepada teman-teman sejawat, saya ucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Dr. AF Sigit Rochadi, Dr. Sebastianus Fernandes, Dr. Rina Martiara, Prof. Dr. T. Slamet Suparno, Veronica Suprpti, Dra., Med, Dr. Azhari, atas kerjasamanya yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan disertasi ini. Kelima, terima kasih pula saya sampaikan kepada Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Prof. Soegiono, Ir., atas ijin studi yang diberikan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan FMIPA ITS, Hasto Soenarno, Drs, MSc.

Kepada nara sumber penelitian di lapangan Ujung Pangkah, baik dari kalangan tokoh pemuda, nelayan, petani tambak, LSM, pedagang, tokoh masyarakat, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis banyak ucapkan terima kasih, utama kepada: Mohamad Toha, S.Ag, M.Si (Gresik), Ilham (tokoh dan aktivis pemuda), Shohibul Hajjah (pimpinan nelayan), Umar Fachry (pimpinan petani tambak), Khoid (pimpinan Pesatbri), WALHI Jawa Timur, dan LBH Kota Surabaya.

Tak lupa kepada isteri tercinta, Sulastri, Dra., yang telah banyak membantu baik moril maupun materiil, serta selalu berdoa demi selesainya studi penulis. Tak ketinggalan, kepada tiga orang anakku: Heni Astuti, ST., Anton Sukoco, ST. dan Ramtiwi Ginanjar Astuti, ST, terima kasih atas bantuan dan doanya.

Penulis

Heri Suharyanto



ABSTRAK

ABSTRAK

PERLAWANAN NELAYAN DAN PETANI TAMBAK TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI UJUNG PANGKAH GRESIK

Heri Suharyanto

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai perlawanan nelayan dan petani tambak di Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik terhadap kehadiran sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang pertambangan minyak. Ada empat permasalahan yang harus dijawab oleh penelitian ini. Pertama, kondisi sosial apa yang mendorong nelayan dan petani tambak berpartisipasi dalam terjadinya perlawanan. Kedua, mengapa terjadi variasi respons nelayan dan petani tambak untuk mencapai tujuan mereka. Ketiga, bagaimana proses terjadinya perbedaan perlawanan nelayan dan petani tambak terhadap kehadiran industri perminyakan perusahaan multinasional. Keempat, apa implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka.

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di atas, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena sifat dari masalah yang ingin dijelaskan dan diungkapkan tidak mungkin dijelaskan dengan metode kuantitatif. Pemilihan metode kualitatif juga dilakukan dengan mempertimbangkan sifat masalah yang dinamis, yang tidak berhenti, tetapi mengikuti perkembangan sosial, ekonomi dan politik tertentu untuk mendapatkan penjelasan keempat permasalahan tersebut. Hasil yang saya harapkan adalah kegiatan penambangan minyak dan perikanan dapat berjalan bersama dan saling memberikan keuntungan.

Referensi yang dipergunakan untuk menjelaskan perlawanan nelayan dan petani tambak terhadap perusahaan multinasional di Ujung Pangkah tersebut adalah teori-teori gerakan sosial dengan empat perspektif: Pertama, perspektif perilaku kolektif; kedua, perspektif mobilisasi sumberdaya; ketiga, perspektif proses politik dan keempat, perspektif kultural (Gerakan Sosial Baru). Setelah itu perspektif teoritik yang saya gunakan dalam riset ini adalah gabungan dari keempat perspektif di atas, ditambah dengan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum petani—EFPR: *Everydays Forms of Peasant Resistance*. Keempat perspektif/ teori tersebut perlu dilengkapi dengan teori EFPR agar bisa menjelaskan seluruh fenomena sosial yang ada di lokasi penelitian Ujung Pangkah. Teori EFPR diperlukan untuk menjelaskan aksi komunitas nelayan dan petani tambak dalam merespon kehadiran industri perminyakan dengan aksi kolektif tidak langsung dalam bentuk perlawanan tersembunyi. Untuk kepentingan analisis terhadap fenomena perlawanan sosial di Ujung Pangkah, yang memunculkan gerakan kemasyarakatan itu, diperlukan keempat perspektif/ teori di atas, agar ditemukan penjelasan yang lebih lengkap dan komprehensif.

Pada dasarnya, akar masalah munculnya perlawanan adalah ketidakpuasan komunitas nelayan karena termarjinalisasi secara ekonomi. Hasil-hasil penelitian menunjukkan, pertama, kondisi sosial yang mendorong munculnya perlawanan nelayan adalah kondisi sosial ekonomi (termarjinalisasi); kondisi sosial politik yang kondusif yakni adanya keterbukaan politik, akibat jatuhnya pemerintahan otoriter Soeharto, sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik; Kondisi sosial budaya: nilai-nilai kultural membentuk komitmen terhadap *public good*, pesan-pesan kultural membenarkan isu-isu ketidakadilan, kondisi-kondisi yang diinginkan, yang mendorong masyarakat untuk mencapainya, melalui perjuangan.

Kedua, terjadinya variasi respon bagi nelayan dan petani tambak untuk mencapai tujuan mereka, adalah dengan melakukan perlawanan tersembunyi, dengan tujuan menghambat dan mengacaukan aktivitas pertambangan agar tetap bisa eksis secara ekonomi, dan untuk menghindari represi; perlawanan terbuka nir kekerasan, dengan tujuan agar terjadi perubahan kebijakan, agar dipulihkan hak-hak mereka.

Ketiga, proses terjadinya perbedaan perlawanan adalah: dipilihnya perlawanan tersembunyi karena komunitas nelayan takut akan represi dan trauma politik tahun 1965, tidak dimilikinya kepemimpinan yang handal dan tidak adanya peran organisasi. Sedangkan dipilihnya perlawanan terbuka nir kekerasan, karena bentuk perlawanan ini memiliki kepemimpinan yang efektif, berfungsinya organisasi, kondisi politik yang kondusif, yakni sistem politik yang demokratis, dan gerakan ini menginginkan adanya perubahan sosial.

Keempat, implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka: adalah bentuk perlawanan terbuka nir kekerasan lebih efektif daripada bentuk-bentuk perlawanan lainnya.

Kritik terhadap metodologi kualitatif adalah terletak dalam pelaksanaan wawancara. Informan memberikan informasi yang subyektif dan memberikan informasi yang selalu positif akan membuat kesimpulan yang dibuat oleh peneliti akan menjadi bias; untuk itu diperlukan cross check.

Kritik terhadap teori gerakan sosial yang ada adalah pertama, perspektif Perilaku Kolektif (deprivasi relatif) bukannya satu-satunya faktor yang memunculkan gerakan sosial, melainkan masih ada faktor-faktor lain seperti permasalahan sosial, politik dan ekonomi yang menjadi pemicunya. Kedua, perspektif Mobilisasi Sumberdaya, perspektif ini menitikberatkan pada sumberdaya material dan dukungan sosial, tapi mengabaikan lingkungan politik yang berkembang saat itu. Ketiga, perspektif Proses Politik terlalu optimis bahwa peluang politik selalu menguntungkan bagi gerakan sosial, padahal dalam realitanya, menjadi peluang juga bagi lawan-lawannya untuk melemahkan gerakan. Keempat, perspektif gerakan sosial baru adalah gerakan ini kurang mampu melihat keterkaitan gerakan-gerakan sosial yang berlangsung sepanjang masa. Sedangkan kritik terhadap teori EFPR adalah teori ini tidak menginginkan perubahan dan menjelaskan perubahan.

Kata kunci: perlawanan, nelayan dan petani tambak, teori gerakan sosial dan teori EFPR.

Pada dasarnya, akar masalah munculnya perlawanan adalah ketidakpuasan komunitas nelayan karena termarjinalisasi secara ekonomi. Hasil-hasil penelitian menunjukkan, pertama, kondisi sosial yang mendorong munculnya perlawanan nelayan adalah kondisi sosial ekonomi (termarjinalisasi); kondisi sosial politik yang kondusif yakni adanya keterbukaan politik, akibat jatuhnya pemerintahan otoriter Soeharto, sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik; Kondisi sosial budaya: nilai-nilai kultural membentuk komitmen terhadap *public good*, pesan-pesan kultural membenarkan isu-isu ketidakadilan, kondisi-kondisi yang diinginkan, yang mendorong masyarakat untuk mencapainya, melalui perjuangan.

Kedua, terjadinya variasi respon bagi nelayan dan petani tambak untuk mencapai tujuan mereka, adalah dengan melakukan perlawanan tersembunyi, dengan tujuan menghambat dan mengacaukan aktivitas pertambangan agar tetap bisa eksis secara ekonomi, dan untuk menghindari represi; perlawanan terbuka nir kekerasan, dengan tujuan agar terjadi perubahan kebijakan, agar dipulihkan hak-hak mereka.

Ketiga, proses terjadinya perbedaan perlawanan adalah: dipilihnya perlawanan tersembunyi karena komunitas nelayan takut akan represi dan trauma politik tahun 1965, tidak dimilikinya kepemimpinan yang handal dan tidak adanya peran organisasi. Sedangkan dipilihnya perlawanan terbuka nir kekerasan, karena bentuk perlawanan ini memiliki kepemimpinan yang efektif, berfungsinya organisasi, kondisi politik yang kondusif, yakni sistem politik yang demokratis, dan gerakan ini menginginkan adanya perubahan sosial.

Keempat, implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka: adalah bentuk perlawanan terbuka nir kekerasan lebih efektif daripada bentuk-bentuk perlawanan lainnya.

Kritik terhadap metodologi kualitatif adalah terletak dalam pelaksanaan wawancara. Informan memberikan informasi yang subyektif dan memberikan informasi yang selalu positif akan membuat kesimpulan yang dibuat oleh peneliti akan menjadi bias; untuk itu diperlukan cross check.

Kritik terhadap teori gerakan sosial yang ada adalah pertama, perspektif Perilaku Kolektif (deprivasi relatif) bukannya satu-satunya faktor yang memunculkan gerakan sosial, melainkan masih ada faktor-faktor lain seperti permasalahan sosial, politik dan ekonomi yang menjadi pemicunya. Kedua, perspektif Mobilisasi Sumberdaya, perspektif ini menitikberatkan pada sumberdaya material dan dukungan sosial, tapi mengabaikan lingkungan politik yang berkembang saat itu. Ketiga, perspektif Proses Politik terlalu optimis bahwa peluang politik selalu menguntungkan bagi gerakan sosial, padahal dalam realitanya, menjadi peluang juga bagi lawan-lawannya untuk melemahkan gerakan. Keempat, perspektif gerakan sosial baru adalah gerakan ini kurang mampu melihat keterkaitan gerakan-gerakan sosial yang berlangsung sepanjang masa. Sedangkan kritik terhadap teori EFPR adalah teori ini tidak menginginkan perubahan dan menjelaskan perubahan.

Kata kunci: perlawanan, nelayan dan petani tambak, Multinational Corporation, teori gerakan sosial dan teori EFPR.

ABSTRACT

THE RESISTANCE OF FISHERMEN AND SHRIMP FARMERS AGAINST MULTINATIONAL CORPORATION IN UJUNG PANGKAH GRESIK

Heri Suharyanto

The purpose of this research is to investigate thoroughly the resistance of fishermen and shrimp farmers in Ujung Pangkah, Gresik regency against the presence of US Multinational Corporation specializing in oil mining. The research tries to answer four questions. Firstly, what social conditions become driving factor for the fishermen and shrimp farmers to engage in protest movement against the corporation? Second, why do the fishermen and shrimp farmers have varying responses to achieve their objectives? Third, how the fishermen and shrimp farmers engage in different resistances against the corporation? And fourth, what implication of different forms of the resistances to accomplishment of the objectives?

To answer these questions, the research uses qualitative approach since some issues raised in the research are unlikely to be disclosed using quantitative method. The choice of qualitative method is also done by taking into consideration of the issues which, are of dynamic in nature, never stops progressing in line with developments in social, economic and political worlds to make clear of the several issues as mentioned above. The expected result is that the oil mining activity and fishing activity can take place harmoniously.

Theories employed to elucidate the resistance among fishermen and shrimp farmers against the corporation present in Ujung Pangkah are theories of social movement with four perspectives. The first is collective behavior perspective; second, resource mobilization perspective; third, political process perspective; and fourth, cultural perspective (new social movement). Additionally, I also employ a combination of the four perspectives above, completed with *Everyday Forms of Peasant Resistance* (EFPR). I intentionally add EFPR theory to the four perspectives to account for the overall social phenomena existing in research setting. EFPR is used to explicate action of the shrimp farmers and fishermen in response to a presence of the foreign mining company in which they engage in indirect collective action in the form of hidden resistance. The four perspectives above are required to analyze social resistances occurring in Ujung Pangkah, resulting in social movement with a view of obtaining more complete and comprehensive accounts about the resistance.

In essence, the resistance emerges because of the discontent as they are economically marginalized. The results suggest that in the first place, the involvement of fishermen and shrimp farmers in protest movement is mainly caused by the facts that they are subject to economic marginalization or social and economic loses; the existing social and political condition is also conducive to their involvements in the protest, they engage in the protest in a presence of political openness and greatly relaxed political system, particularly since the collapse of Soeharto regime; sociocultural condition; cultural values build up their commitment to *public good*; cultural messages justify social injustice issues,

desirable conditions, encouraging people to accomplish their shared goals through robust fight against the MNC.

Second, the results indicate that fisherman and farmers initiate varying responses for accomplishing their goals in line with their resistances to the MNC. Those who are acquiescent to their fate such as subsistence peasants, involve in hidden resistance to disturb their mining activity through which they can still exist economically. To avoid repression from the authority, they attempt to engage in non-violent open resistance with the purpose of making a change in policy or of restoring their neglected rights.

Third, the shrimp farmers and fishermen are involved in different resistances or protests; they decide to launch hidden resistance due to the afraid of repression from the authority and political trauma in 1965; they engage in hidden protest due to an absence of the reliable leadership and vibrant organization. Conversely, they try to involve in nonviolent open protest because this protest type has effective leadership, functional organization and conducive political condition, namely democratic political system in which in such protest they want to initiate social change.

Fourth, implication of the varying resistances or protests for achievement of their goals indicates that the nonviolent open resistance is more effective than other resistances.

Criticism on qualitative method lies on interview execution. In general, informants may give subjective information. They also tend to provide positive information, which may generate bias in conclusion drawn by the researcher. Thus, crosscheck is required here.

Several criticisms on theories of social movement can be summarized below. First, the collective behavior (relative deprivation) is not the only factor triggering social movement, but there are other factors including social, political and economic issues, which underlie the social movement. Second, the resource mobilization perspective places a prominent emphasis on material resource and social support, but ignores political climate that develops at the time. Third, the political process perspective is too optimistic, saying that political opportunities are always favorable to social movement, but in the fact, their opponents also take an advantage of such political opportunities for debilitating the social movement. Fourth, the new social movement perspective cannot observe a interrelation of the social movements taking place throughout the times. And finally, criticism on EFPR lies on an absence of the desire to initiate change and account for the change.

Key words: resistance, fishermen and shrimp farmers, Multinational Corporation, theories of social movement, EFPR theory



RINGKASAN

RINGKASAN

PERLAWANAN NELAYAN DAN PETANI TAMBAK TERHADAP PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI UJUNG PANGKAH GRESIK

Heri Suharyanto

Sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan minyak gas (2002) mendapat izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan minyak di lepas pantai Ujung Pangkah Gresik. Pada tahap pra operasi, pihak perusahaan penambangan tidak melakukan sosialisasi terencana, sehingga mengagetkan komunitas nelayan dan petani tambak.

Dampak yang diakibatkan pada fase berikutnya, *drilling* atau pengeboran, adalah komunitas nelayan dan petani tambak mengeluhkan berubahnya tingkat kekeruhan air, terjadinya pencemaran, tumpukan *cutting*, ceceran lumpur pemboran, lampu sorot serta suara bising dari *rig*, sehingga masyarakat nelayan dan petani tambak berkesimpulan bahwa hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya migrasi ikan dan pencemaran tambak. Akibatnya, nelayan terancam mata pencahariannya, karena daerah tangkapan ikan (*fishing ground*) mereka digusur untuk area penambangan.

Oleh karena mata pencaharian nelayan dan petani tambak terancam, mereka memberi respon berbeda-beda. Ada sekelompok nelayan dan petani tambak yang pasrah, ada sekelompok nelayan yang mencari alternatif pekerjaan lain dan adanya sekelompok nelayan yang merespon secara radikal, yakni dengan perlawanan, baik secara tersembunyi, sampai kepada perlawanan secara terbuka nir kekerasan maupun secara kekerasan.

Penelitian ini menjawab empat rumusan masalah. Pertama, kondisi sosial apa yang mendorong nelayan dan petani tambak berpartisipasi dalam terjadinya perlawanan. Kedua, mengapa terjadi variasi respons bagi nelayan dan petani tambak untuk mencapai tujuan mereka. Ketiga, bagaimana proses terjadinya perbedaan perlawanan terhadap kehadiran industri perminyakan perusahaan multinasional. Keempat, apa implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka.

Untuk membaca fenomena yang terjadi di lokasi penelitian digunakan empat perspektif dalam gerakan sosial, yang meliputi perspektif perilaku kolektif (Le Bon 1960); perspektif mobilisasi sumberdaya (Anthony Oberschall, 1973, 1978); perspektif proses politik (Mc Adam, 1982) dan perspektif kultural (Gerakan Sosial Baru), (Claus Offe, 1985); dan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum petani—EFPR: *Everydays Forms of Peasant Resistance*, James C. Scott (1985).

Kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya perlawanan adalah ketidakpuasan akibat termarginalisasi secara ekonomi (kondisi sosial ekonomi); adanya keterbukaan politik yang longgar akibat perubahan

konstelasi politik dari otoritarian ke sistem politik demokratis, pasca kejatuhan Soeharto (kondisi sosial politik), dan pesan-pesan kultural yang mendorong masyarakat untuk keluar dari tekanan isu-isu sentral, seperti ketidakadilan. Kehadiran industri pertambangan milik asing direspons secara berbeda: ada yang menerima karena diuntungkan secara ekonomi dan ada yang menolak karena dirugikan secara ekonomi. Bagi mereka yang dirugikan secara ekonomi, respons mereka juga berbeda, ada yang melakukan perlawanan secara pasif, secara tersembunyi, secara terbuka nir kekerasan dan terbuka dengan kekerasan. Terjadinya perbedaan perlawanan disebabkan, perbedaan strategi yang dipilih. Perlawanan tersembunyi dengan cara konservatif, gaya alami pedesaan, sedangkan perlawanan terbuka nir kekerasan dipilih secara konvensional dan menginginkan adanya perubahan sosial. Implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka, dengan mengikuti referensi Tarrow, bentuk perlawanan terbuka nir kekerasan lebih efektif daripada bentuk perlawanan yang lain.

SUMMARY

THE RESISTANCE OF FISHERMEN AND SHRIMP FARMERS AGAINST MULTINATIONAL CORPORATION IN UJUNG PANGKAH GRESIK

Heri Suharyanto

A foreign company specializing in gas and oil mining (2002) obtained a license from government to perform mining activity in offshore area in Ujung Pangkah Gresik. At pre-operation phase, the company has not performed adequate socialization to a community of the shrimp farmers and fishermen regarding its mining activity.

When the company has begun undertaking drilling activity around the coast, which of course results great vibration, the farmers and fishermen launched their complaints related to turbid and dirty seawater, pollution, cutting piles, spilled drilling mud, too bright spotlight and noises of the rigs. They then inferred that such drilling activity has brought about fish migration and pollution. Consequently, the livelihood of fishermen is greatly threatened because their *fishing ground* is already displaced and destroyed by mining activity.

Regarding the livelihoods of the farmers and fishermen under threat by a presence of the MNC, they introduce varying responses to such MNC. Some of farmers and fishermen are acquiescent to their fate with respect to the presence of MNC around their area. Some look for another jobs and some give radical responses, including hidden resistance and open resistance with and without violence.

This research tries to answer four questions. In the first place, what is social condition driving them to engage in resistance or protest against the presence of MNC? Second, why do the fishermen and shrimp farmers have varying responses to achieve their objectives? Third, how do the fishermen and shrimp farmers engage in different resistances against the corporation? And fourth, what are the implications of different forms of the resistances to accomplishment of the objectives?

The social phenomena happening in the research setting are analyzed using four perspectives in social movement, encompassing collective behavior (Le Bon 1960); resource mobilization (Anthony Oberschall, 1973; 1978); political process (McAdam, 1982) and cultural perspectives (new social movement) (Claus Offe 1985); and *Everyday Forms of Peasant Resistance* (EFPR) from James C. Scott (1985).

Several social conditions underlying the resistance in the research are discontent due to economic marginalization (socioeconomic condition); greatly relaxed political system and political openness as a result of the

shifting political constellation from authoritarian to democratic political system following the breakdown of Soeharto regime (sociopolitical condition); and cultural aspects strongly driving people to escape from oppression and central issues such as social injustice.

Here, the farmers and fishermen give varying response to a presence of foreign mining company. Some are willing to accept a presence of the company because of the economic advantage and some reject it due to the economic loss. Those experiencing economic loss in associated with the company demonstrate different responses. For example, some instigate passive resistance, hidden resistance, nonviolent open resistance and violent open resistance. A difference in resistance or protest they engage in is mainly caused by different strategies. Hidden resistance is carried out through conservative way characteristic of the rural people, while nonviolent open resistance is done with an attention of introducing change in policy and social situation. Regarding a contribution of several forms of the resistances to accomplishment of the goals, by following Tarrow's theory, the nonviolent open resistance is in fact more effective in comparison to another resistances.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	ii
HALAMAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN.....	xi
SUMMARY.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	14
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
4. Studi Penelitian Terdahulu	16
4.1 Gerakan petani di Indonesia	16
4.2 Gerakan petani di luar Indonesia	32
5. Konseptualisasi Teori	43
5.1 Teori gerakan sosial	43
5.2 Aksi kolektif dan gerakan sosial	62
5.3 Beberapa kekuatan gerakan menurut teori Sidney Tarrow	64
6. Metode Penelitian	78
6.1 Lokasi	79
6.2 Sumber data	80
6.3 Pengumpulan data	81
6.3.1 Interview	81
6.3.2 Observasi	82
6.3.3 Analisis isi (konten analisis).....	83
6.3.4 Guide interview.....	83
6.4. Data yang dibutuhkan	84
6.5. Analisis data	89

BAB II.	KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT UJUNG PANGKAH	90
1.	Karakteristik Masyarakat Pesisir	90
1.1	Ekosistem Pesisir	92
1.2	<i>Estuaria</i>	93
1.3	Potensi mangrove	95
1.4	Potensi padang lamun	96
2.	Penggolongan Pekerjaan di Kalangan Petani Tambak dan Nelayan	97
2.1	Masyarakat Petambak	97
2.2	Masyarakat Nelayan	99
2.3	Karakteristik nelayan dan petani tambak dan potensi sumber daya	101
BAB III.	KEHADIRAN PERUSAHAAN MULTI NASIONAL DI UJUNG PANGKAH	110
1.	Perusahaan Multinasional	110
2.	Tujuan produksi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Gas Lapangan.....	123
3.	Program Pengembangan Masyarakat	126
4.	Premier Oil dan Amerada Hess	132
5.	Industri Perminyakan: proyek yang bersifat padat modal dan teknologi	141
6.	Penolakan Nelayan dan Petani Tambak terhadap Kehadiran Perusahaan Multinasional	145
BAB IV.	KONDISI SOSIAL YANG MENDORONG NELAYAN DAN PETANI TAMBAK MELAKUKAN PERLAWANAN	159
1.	Partisipasi Nelayan dan Petani Tambak dalam Perlawanan	159
2.	Munculnya Gerakan Perlawanan Nelayan dan Petani Tambak	163
2.1	Akar perlawanan	163
2.2	Kondisi sosial ekonomi	165
2.3	Kondisi sosial politik.....	168
2.4	Kondisi sosial budaya.....	171

BAB V.	VARIASI RESPONS NELAYAN DAN PETANI TAMBAK GUNA MENCAPAI TUJUAN GERAKAN.....	173
1.	Elemen-elemen Masyarakat yang Menjadi Korban Industrialisasi.....	174
2.	Aktor-aktor Gerakan Perlawanan	180
3.	Kelompok yang Dirugikan dan yang Diuntungkan.....	186
3.1	Industrialisasi dan lingkungan	186
3.2	Pro dan kontra terhadap industri pertambangan..	191
3.3.	Respons nelayan dan petani tambak.....	196
BAB VI.	PROSES TERJADINYA PERBEDAAN PERLAWANAN TERHADAP KEHADIRAN INDUSTRI MULTINASIONAL	204
1.	Bentuk-bentuk Perlawanan	204
1.1	Perlawanan Tersembunyi	204
1.2	Perlawanan terbuka nir kekerasan	208
1.3	Perlawanan terbuka dengan kekerasan	212
2.	Proses Perlawanan Nelayan dan Petani Tambak	214
3.	Bentuk-bentuk Perlawanan dan Hasil-hasilnya	223
3.1	Perlawanan tersembunyi dan implikasi sosialnya	223
3.2	Perlawanan terbuka nir kekerasan dan hasil- hasilnya	224
3.3	Perlawanan terbuka dengan kekerasan dan hasil-hasilnya.....	225
BAB VII.	IMPLIKASI BENTUK-BENTUK PERLAWANAN TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN GERAKAN.....	227
1.	Tujuan Gerakan	227
2.	Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial.....	230
3.	Hasil-hasil Gerakan Perlawanan.....	237
4.	Mengukur Kekuatan Gerakan.....	243
4.1	Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus organisasi lokal untuk memperkuat gerakan perlawanan	243
4.1.1	Memperkuat jaringan sosial.....	244
4.1.2	Mobilisasi pengikut.....	245

4.1.3 Merancang/ membingkai aksi kolektif	247
4.1.4 Melakukan kampanye dan koalisi.....	248
BAB VIII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK.....	257
1. Kesimpulan	257
2. Implikasi Teoritik	267
DAFTAR PUSTAKA	275



PERUSAHAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2002, sebuah perusahaan multinasional America Amerada Hess, mendapat izin usaha dari negara. Perusahaan multinasional ini (Multinational Corporation atau MNC) bergerak di bidang pengeboran minyak.

Di sepanjang garis pantai semenanjung Ujung Pangkah hampir seluruhnya ditutupi oleh vegetasi mangrove dengan ketebalan jalur hijau yang berkisar antara 10-20 meter. Mangrove adalah salah satu jenis hutan rawa yang terdapat di daerah pasang surut. Vegetasi mangrove ini selain berfungsi sebagai tempat pemijahan berbagai jenis ikan, udang dan rajungan juga berfungsi sebagai pelindung dari ancaman abrasi.

Ujung Pangkah merupakan daerah *nursery ground*, karena daerah itu selain tempat bertemunya air tawar dan air asin (*estuary*) juga dikelilingi oleh vegetasi mangrove. Di tempat inilah, sungai Bengawan Solo yang memiliki muara sebanyak 11 (sebelas) buah itu, ikan-ikan akan melakukan pemijahan yang akhirnya berkembang biak, hal inilah yang menyebabkan daerah ini menjadi daerah yang paling produktif dari seluruh daerah produsen ikan di Jawa Timur. Selain itu belum termasuk hasil budidaya yang terdapat di tambak-tambak yang luasnya mencapai 50% dari total luas tambak yang ada di kabupaten Gresik atau 56.000 hektar.

Dari potensi laut dan tambak inilah masyarakat menggantungkan kekuatan ekonominya secara turun temurun. Mulai dari penangkapan, budidaya sampai pada pemasaran hasil perikanan yang menembus pasar luar negeri, dimana negara-negara yang menjadi tujuan adalah Jepang, Hongkong, Singapore, dan Amerika Serikat.

Hadirnya proyek pertambangan migas di Ujung Pangkah Gresik, ternyata telah mendatangkan gejolak sosial di kalangan warga Ujung Pangkah yang mayoritas penduduknya nelayan¹ dan petani tambak. Gejolak masyarakat sebenarnya diawali sejak pengoperasian penambangan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan Inggris yang bernama Premiere Oil pada tahun 1998. Premiere Oil adalah rekanan dengan Amerada Hess sebuah perusahaan penambangan migas *Multinational Corporation* milik Amerika-Kanada, yang sekarang menjadi pengendali utama atas anjungan Ujung Pangkah.

Terjadinya gejolak masyarakat itu dipicu setidaknya dua hal: Pertama, ketika Premiere Oil melakukan pengeboran dangkal (*seismic*),²

¹ Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti para penebar dan pemakai jaring) maupun secara tidak langsung (seperti juru mudi perahu layar, nahkoda ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkap ikan) sebagai mata pencaharian (Ensiklopedi Indonesia, 1999). Sementara petani tambak adalah orang yang memelihara ikan, udang atau binatang air lainnya pada lahan yang tidak jauh dari laut dan airnya asin atau payau.

² *Seismic* adalah gelombang atau getaran mekanis yang merambat dalam bumi (contoh seperti gempa bumi, getaran mesin). Penelitian bawah permukaan bumi dengan memanfaatkan sifat rambatan gelombang seismik buatan yang berasal dari sumber getar. Tujuannya untuk mengetahui gambaran atau kondisi bawah permukaan bumi. Tahapan pekerjaan seismik meliputi survey seismik (bisa di darat, pantai/ transisi dan di laut), kemudian dilakukan pengolahan data seismik, dilanjutkan penafsiran hasil pengolahan data seismik setelah itu baru dilakukan pengeboran.

Premiere Oil tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat (nelayan dan petani tambak), yang dampaknya amat merugikan masyarakat pemakai laut tersebut. Kedua, adanya perbedaan kepentingan antara pihak perusahaan dan masyarakat. Di satu pihak masyarakat berusaha untuk mempertahankan laut dan tambaknya dari ancaman penggusuran yang diakibatkan oleh rencana penambangan, sedang di sisi lain Premiere Oil berusaha untuk bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang dinilai potensial tersebut. Perbedaan kepentingan inilah yang menjadi sumber terjadinya konflik di dalam masyarakat Ujung Pangkah.

Dari pengamatan di lapangan, sejak awal pelaksanaan survey, hingga medio September 2002, atau dari hadirnya Premiere Oil sampai Amerada Hess, isu pro-kontra atas proyek masih tetap ada. Bagi yang setuju dengan kegiatan proyek terkesan adanya harapan bahwa kehadiran proyek akan dapat membuka lapangan kerja bagi mereka, yang berarti peningkatan penghasilan dan taraf hidup. Bagi yang tidak setuju, mengetengahkan isu pencemaran lingkungan dan pelestarian alam yang mengkhawatirkan masa depan usaha mereka sebagai nelayan dan petambak.

Kekhawatiran nelayan dan petani tambak itu bisa dituturkan sebagai berikut: pada awalnya, Premiere Oil melakukan pemboran (*seismic*), dan terjadi kebocoran sehingga limbahnya itu mengganggu aktivitas nelayan Ujung Pangkah Kulon dalam menangkap ikan. Aktivitas nelayan terganggu disebabkan oleh dua hal: pertama, area pengeboran adalah wilayah yang

menjadi daerah penangkapan ikan bagi nelayan dari desa sekitar; kedua, bocoran limbah mengakibatkan migrasi ikan.

Padahal hari-hari sebelum terjadinya pemboran, para nelayan dalam menangkap ikan di laut selalu mendapatkan hasil tangkapan yang bervariasi, misalnya dapat 60 kg, 10 kg, atau 40 kg ikan perhari. Namun, setelah pemboran dilakukan Premiere Oil, dan terjadi tumpahan limbah yang mengganggu aktivitas nelayan, semua nelayan tidak mendapat hasil tangkapan ikan sama sekali. Akhirnya semua nelayan Ujung Pangkah Kulon sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke institusi yang berwenang. Mereka secara perwakilan melapor ke Kecamatan, Kepolisian Sektor dan Komando Daerah Militer Kecamatan Ujung Pangkah. Namun tidak ada tanggapan. Di hari berikutnya, Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Danramil mendatangi rumah Shohibul Hajjah Ketua Persatuan Nelayan Ujung Pangkah Kulon untuk diajak mendatangi atau melihat lokasi pemboran. Namun ketiga pejabat tersebut tidak dapat mengatasi persoalan. Akhirnya komunitas nelayan Ujung Pangkah Kulon merasa kecewa. Kekecewaan nelayan itu diwujudkan dalam aksi kolektif secara tersembunyi, dengan cara memotong, dan mencabut kabel-kabel seismik yang sebesar jari-jari tangan yang berwarna hitam itu untuk dibuang ke laut. Kabel-kabel itu ditanam di bawah dasar laut sampai kedalaman 40 meter dan dihubungkan dengan anjungan untuk dilakukan peledakan di tengah malam. Bila dilakukan peledakan, maka air laut yang menyembur ke atas mencapai ketinggian 25 meter. Kabel-kabel semacam inilah yang dirusak

oleh para nelayan, mereka memotong-motong kabel itu dan kemudian membuangnya ke laut. Mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi baik di malam hari maupun di siang hari. Aksi kolektif yang mereka lakukan telah mendapat persetujuan dari komunitas nelayan. Menurut penuturan Shohibul Hajjah ketua Nelayan Pangkah Kulon, aksi perusakan kabel dilakukan secara bergantian dengan menggunakan kapal. Tercatat mereka menggunakan 13 kapal secara bergantian, dan setiap kapal diawaki sebanyak 10 orang. Ini berarti melibatkan 130 orang nelayan belum terhitung orang-orang yang melakukan pemotongan dan perusakan kabel melalui kelompok-kelompok kecil dengan kapal yang diawaki 3-4 orang. Akibat aksi kolektif yang dilakukan oleh nelayan itu, kegiatan *seismic* menjadi lumpuh.

Selanjutnya komunitas nelayan Ujung Pangkah Kulon belum berhenti dengan perlawanan tersembunyi tersebut. Mereka melakukan demo di laut berbondong-bondong berkumpul dengan dipelopori oleh kelompok pemuda Ujung Pangkah untuk mendatangi anjungan milik Premiere Oil. Permasalahan ini kemudian diselesaikan oleh kedua belah pihak antara masyarakat nelayan dan petani tambak di satu pihak dan pihak Premiere Oil di pihak lain bertempat di rumah makan Podotrisno Surabaya.

Isi kesepakatan adalah:

Pertama, setelah jangka waktu 26 hari terhitung mulai 10 Januari 2001 sampai 5 Februari 2001, semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dihentikan untuk selama-lamanya, kecuali ada persetujuan dari semua elemen masyarakat Ujung Pangkah dan kedua, jika sampai batas waktu yang ditentukan kesepakatan di atas dilanggar, maka masyarakat dibenarkan untuk membersihkan kapal, *rig* atau yang lainnya yang berhubungan dengan pertambangan migas dengan caranya sendiri.

Perjanjian ini diketahui oleh Camat Ujung Pangkah dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur.

Pada waktu Premiere Oil masuk di Ujung Pangkah, perusahaan ini memiliki rekanan Amerada Hess yang memiliki saham sebesar 36%. Data pelaksanaan proyek pertambangan di Ujung Pangkah sewaktu dioperasikan PT Premiere Oil sebagai berikut: pertama, Premiere Oil Ltd (Inggris) dengan saham sebesar 40% dan sekaligus menjadi operator awal proyek pertambangan Ujung Pangkah; kedua, Amerada Hess Ltd (Amerika) dengan saham 36%; ketiga, Dana Petroleum LLC (Indonesia) dengan saham 12% dan keempat, Gulf Indonesia Ltd dengan saham 12%.

Munculnya keresahan masyarakat lokal disebabkan oleh karena pertama, pihak perusahaan kurang aktif dalam mensosialisasikan proyek kepada masyarakat, dan yang kedua, perusahaan telah gagal dalam menjembatani berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Ini dapat dibaca dari timbulnya pertentangan antara perusahaan dan masyarakat, di satu sisi masyarakat bersikeras mempertahankan tambak dan lautnya terhadap ancaman penggusuran dan pengrusakan yang diakibatkan oleh rencana eksplorasi, sedang di sisi lainnya perusahaan bersikukuh untuk bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dinilai potensial tersebut (yang akan berproduksi dari tahun 2004/ 2005 sampai 2021).

Setelah peristiwa penyanderaan karyawan Premiere Oil selama 24 jam oleh pihak nelayan setempat, dan telah diselesaikan oleh kedua belah

pihak melalui sebuah perjanjian, maka akhirnya Premiere Oil mengundurkan diri dari kegiatan penambangan di Ujung Pangkah. Selanjutnya Premiere Oil menjual sahamnya kepada Amerada Hess. Pengalihan interest di wilayah kerja Blok Pangkah dari Premiere Oil (Pangkah) Limited kepada Amerada Hess (Indonesia-Pangkah) Limited dan Dana Petroleum (Indonesia) LLC) telah disetujui oleh Direktur Pertamina Baihaki Hakim pada tanggal 25 Februari 2002. Susunan interest setelah pengalihan:

Amerada Hess (Indonesia-Pangkah) Limited	66% (operator)
Gulf Resources (Pangkah) Limited	22%
Dana Petroleum (Indonesia) LLC	12%

dengan demikian Amerada Hess kini menjadi pengendali utama proyek pengembangan migas di Ujung Pangkah.

Belajar dari pengalaman terdahulu yang telah dilakukan oleh Premiere Oil, maka Amerada Hess tidak ingin mengalami kegagalan serupa. Untuk itu Amerada Hess mencoba untuk membentuk sebuah wadah yang diharapkan dapat menjembatani kepentingan Amerada Hess dengan masyarakat nelayan setempat. Wadah bentukan Amerada Hess itu dinamakan Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah. Namun cara pembentukan wadah itu dianggap tidak representatif masyarakat nelayan dan petani tambak. Orang yang direkrut oleh Amerada Hess itu tidak tahu apa-apa, tidak pernah dihubungi tahu-tahu namanya sudah dicantumkan

dalam daftar anggota Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah. Akhirnya hal ini menimbulkan gejolak lagi.

Hal yang dipersoalkan masyarakat adalah sebuah kekhawatiran, yang hingga kini belum ditemukan pemecahannya. Persoalannya adalah bagaimana bila perikanan disandingkan dengan industri pertambangan ini belum ditemukan solusinya. Kekhawatiran itu berupa: pertama, para nelayan merasa dirugikan, karena daerah penangkapan ikan mereka digusur untuk dipakai kegiatan produksi pertambangan minyak. Kedua, apabila nelayan harus pindah tempat dari daerah penangkapan ikan tersebut, berarti para nelayan lokal akan menderita kerugian luar biasa, karena daerah penangkapan ikan tersebut adalah daerah pertemuan air tawar dan air asin (*estuary*) yang kaya akan plankton, yang ditumbuhi hutan bakau, hal inilah yang menyebabkan berbagai jenis ikan yang berkualitas ekspor seperti rajungan, dorang putih, kakap dan bawal berada disitu. Jangan heran jika nelayan yang mencari ikan itu tidak hanya nelayan lokal Ujung Pangkah, tetapi dari berbagai daerah pantai lain seperti Weru, Paciran, Lamongan, Rembang dan Bangkalan. Kalau area penangkapan ikan (*fishing ground*) ini dipakai pertambangan, maka jelas nelayan akan tergusur. Oleh karena itulah daerah ini menjadi ajang rebutan antara nelayan dengan perusahaan Amerada Hess. Perebutan ruang publik (*public sphere*) ini sama-sama beralasan. Nelayan mengklaim bahwa muara Bengawan Solo beserta lautnya merupakan hak mereka, karena secara turun-temurun merupakan

warisan nenek moyang tempat mencari nafkah menghidupi keluarga, sementara pihak perusahaan Amerada Hess harus mengeksploitasi sumber daya kelautan berupa minyak gas karena telah mengantongi izin dari Pemerintah RI. Konsekwensi tergusur, nelayan harus pindah tempat, lebih jauh ke tengah. Apabila nelayan jauh ke tengah, maka harus ganti perahu, dan ganti alat tangkap, karena daerah penangkapan ikan berbeda dan ikan yang ditangkap juga berbeda. Hingga sampai penelitian ini dilakukan persoalan seperti itu belum ada solusinya, yang paling sering terjadi adalah banyaknya jaring nelayan yang terseret kapal-kapal perusahaan yang digunakan untuk eksplorasi. Meskipun sudah diberikan ganti rugi, namun ternyata masih tersisa 7 jaring milik nelayan yang belum mendapatkan ganti rugi akibat rusak terseret kapal maupun tersangkut kabel *seismic*. Dari semua alat nelayan yang mengalami kerusakan, kerugian diperkirakan \pm Rp 34.000.000. (Ilham, Forum Komunikasi Pemuda Ujung Pangkah, 2005).

Aksi kolektif yang dilakukan oleh para nelayan dengan cara tersembunyi ini, untuk sementara bisa menghambat aktivitas pengeboran minyak (*seismic*), yang dilakukan oleh Premiere Oil. Kabel-kabel *seismic* yang dipotong-potong oleh nelayan semua dibuang ke laut, sedikitpun mereka tidak membawa pulang, takut dijadikan barang bukti. Akibat aksi pemotongan kabel ini, kegiatan *seismic* menjadi terganggu.

Di pihak lain, sekelompok orang yang terdiri dari nelayan, anggota-anggota Persatuan Pengesat dan Pemburi, dan petani tambak menjadi marah akibat pengeboran yang menyebabkan pencemaran laut itu, yang berdampak pada pindahnya ikan di daerah penangkapan mereka. Dengan ditambah dari unsur pemuda, yang sebenarnya adalah anak-anak kandung dari nelayan dan petani tambak sendiri, mereka merencanakan demo di laut. Tercatat mereka menggunakan tiga belas perahu bermotor untuk aksi demo tersebut. Setiap kapal dimuati sebanyak sepuluh hingga sebelas orang. Mereka bersama-sama menuju anjungan yang berada di tengah laut untuk menyampaikan protes penolakan terhadap penambangan migas. Protes yang dilakukan oleh nelayan tersebut tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan.

Selanjutnya upaya penyelesaian masalah antara kedua belah pihak dilaksanakan di sebuah hotel di Surabaya, dan hasilnya berupa kesepakatan bersama, dimana semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Premiere Oil dihentikan untuk selama-lamanya, kecuali ada persetujuan dari semua elemen masyarakat Ujung Pangkah.

Mendapat tekanan yang berat tersebut, akhirnya Premiere Oil berkehendak untuk menjual sahamnya kepada mitra usahanya yang bernama Amerada Hess. Pengalihan nama operator di wilayah kerja blok Ujung Pangkah Jawa Timur, dari Premiere Oil Pangkah Limited kepada

Amerada Hess (Indonesia Pangkah) Limited diajukan mulai tanggal 1 Oktober 2001 kepada Direktur Utama Pertamina.

Sejak disetujuinya pengalihan interest dari Premiere Oil ke Amerada Hess oleh Pertamina, maka mulailah era baru pengeboran minyak di Ujung Pangkah, dimana Amerada Hess menjadi operatornya dalam eksplorasi dan eksploitasi. Dalam upaya untuk mencari dukungan terhadap masyarakat lokal, dan sebelum membentuk sebuah lembaga yang mewadahi berbagai kepentingan dari unsur-unsur masyarakat setempat, telah terjalin sebuah kesepakatan yang isinya, agar pihak Amerada Hess melakukan sosialisasi ke segenap unsur masyarakat, petani tambak, nelayan, pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, ulama, kiai, pemilik sarang walet, dan lain-lain agar supaya masyarakat mengerti dan memahami adanya rencana pertambangan dan dampak yang akan ditimbulkannya secara benar.

Sosialisasi, sebenarnya sudah dilaksanakan pihak Amerada Hess, namun berjalan alot. Hal ini disebabkan karena adanya pertentangan antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat berupaya untuk mempertahankan laut dan tambaknya yang secara turun temurun menjadi tempat untuk mendapatkan nafkahnya dari ancaman pengrusakan akibat pengeboran, di sisi lain perusahaan Amerada Hess bersikukuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi karena pertama: telah mendapatkan izin dari Pemerintah RI dan kedua blok Ujung Pangkah adalah daerah yang potensial untuk pertambangan minyak. Daerah inilah yang dipersengketakan antara

nelayan dan petani tambak di satu pihak dan perusahaan Amerada Hess di pihak lain.

Meskipun sosialisasi tetap berjalan, tetapi tetap saja kepentingan nelayan dan petani tambak belum terakomodasi. Bahkan kesepakatan-kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak mengalami jalan buntu. Namun pihak perusahaan tetap saja melakukan kegiatan *seismic*, dengan memasang patok-patok di sepanjang pantai, serta memasang kabel-kabel *seismic* yang mengganggu aktivitas nelayan. Inilah yang membuat masyarakat Ujung Pangkah menjadi resah.

Keresahan menjadi meningkat lagi karena pihak Amerada Hess membentuk sebuah wadah yang diberi nama Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah, yang ternyata tidak mewakili masyarakat Ujung Pangkah, dimana pengurusnya mayoritas yang pro terhadap kehadiran Amerada Hess. Hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat, karena masyarakat tidak merasa punya wakil dan terwakili serta menitipkan hak-haknya untuk menyetujui adanya pertambangan migas Amerada Hess.

Oleh karena itulah, pada tanggal 28 Maret 2002, terjadi aksi kolektif besar-besaran dari semua elemen masyarakat Ujung Pangkah, nelayan, petani tambak, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pesatbri dan dipelopori oleh pemuda ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Gresik dan Pemerintah Daerah Tingkat II Gresik, dalam aksi tersebut elemen

masyarakat Ujung Pangkah menolak kehadiran pertambangan migas PT Amerada Hess.

Merasa ditolak kehadirannya oleh masyarakat Ujung Pangkah, pihak Amerada Hess mengundang “para wakil rakyat” yang dibentuk dalam Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah untuk mengadakan rapat di Gresik. Mendengar akan diselenggarakan rapat di Gresik, masyarakat berusaha untuk mencegahnya. Masyarakat menginginkan agar rapat diselenggarakan di pendopo Pemerintah Desa Ujung Pangkah Wetan atau Kulon agar bisa didengar langsung dan transparan oleh masyarakat. Namun, anggota Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah yang mengaku wakil rakyat ini menolak tuntutan masyarakat dan bersikukuh ingin mengikuti rapat di Gresik. Masyarakat menjadi marah. Sementara itu kian banyak saja masyarakat yang datang di pusat kota Ujung Pangkah, bahkan sudah menjadi ribuan orang. Pihak masyarakat memblokir mobil anggota Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah, agar tidak bisa keluar menuju Gresik. Ketegangan pun terjadi. Ketika sedang terjadi pertengkaran antara anggota Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah dengan anggota masyarakat terjadi pemukulan terhadap anggota Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah. Keributan pun terjadi. Akhirnya massa menjadi emosional. Mereka menuju Ujung Pangkah Wetan dan mendatangi fasilitas-fasilitas milik Amerada Hess. Amuk massa terjadi. Semua harta kekayaan Amerada Hess dibakar. Tercatat empat mobil

dibakar, kantor dan gudang dibakar, *speedboat* juga dibakar. Sementara sebagian melakukan amuk massa di Pangkah Wetan, ratusan warga lainnya menuju Pangkah Kulon untuk melakukan hal yang sama. Semua fasilitas Amerada Hess dibakar. Kerugian ditaksir 9 miliar.

Aksi kolektif dengan kekerasan ini, akhirnya bisa diatasi oleh aparat keamanan. Pihak keamanan segera melakukan penangkapan, dan kemudian diusut, hingga pengadilan. Empat orang dipenjarakan masing-masing empat bulan, dan tujuh orang lainnya menjalani wajib lapor selama dua bulan setiap minggu dua kali. Setiap hari Senin dan Kamis di Kepolisian Resort Gresik.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa hal yang menarik yang ingin penulis teliti, khususnya yang bersangkutan dengan penetrasi perusahaan multinasional ke dalam komunitas nelayan tradisional yang mengakibatkan perlawanan masyarakat lokal terhadap kehadiran perusahaan multinasional.

2. Rumusan Masalah

Masalah yang hendak dijawab melalui studi ini adalah:

- 1) Kondisi sosial apa yang mendorong nelayan dan petani tambak berpartisipasi dalam terjadinya perlawanan?
- 2) Mengapa terjadi variasi respons bagi nelayan dan petani tambak untuk mencapai tujuan mereka?

- 3) Bagaimana proses terjadinya perbedaan perlawanan terhadap kehadiran industri perminyakan perusahaan multinasional?
- 4) Apa implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perlawanan nelayan dan petani tambak Ujung Pangkah Kabupaten Gresik terhadap kehadiran perusahaan pengeboran minyak asing. Penelitian ini bertujuan untuk memahami: pertama, kondisi sosial apa yang mendorong nelayan dan petani tambak untuk berpartisipasi dalam terjadinya perlawanan; kedua, mengapa terjadi variasi respon bagi nelayan dan petani tambak untuk mencapai tujuan mereka atau dengan kata lain penelitian ini bertujuan ingin mencari jawaban atas pertanyaan: mengapa nelayan dan petani tambak memilih berbagai bentuk perlawanan seperti perlawanan tersembunyi, perlawanan terbuka nir kekerasan dan bahkan melakukan perlawanan dengan menggunakan kekerasan; ketiga, bagaimana proses terjadinya perbedaan perlawanan terhadap kehadiran industri perminyakan perusahaan multinasional; dan keempat, apa implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka dengan mendasarkan pada teorinya Sydney Tarrow, 1994.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat atau dapat memberikan sumbangn terhadap khazanah ilmu pengetahuan, utamanya di

bidang ilmu-ilmu sosial, khususnya di bidang kajian gerakan sosial dengan fokus kajian perlawanan rakyat terhadap elite/ penguasa.

4. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berfokus pada gerakan petani *vis-à-vis* elite tuan tanah sudah cukup banyak jumlahnya, baik dari segi teoritik maupun faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Berikut ini akan diuraikan pedebatan tersebut dengan maksud untuk mendekati permasalahan penelitian ini.

4.1 Gerakan petani di Indonesia

Sartono Kartodirdjo (1966), dalam penelitiannya mengenai studi kasus gerakan sosial yang terjadi di Banten pada tahun 1888, menjelaskan bahwa munculnya gerakan petani dilatarbelakangi oleh adanya keresahan petani, yang kemudian meletus menjadi sebuah pemberontakan atau gerakan radikal. Faktor-faktor penyebabnya: pertama, masyarakat memiliki tradisi untuk memberontak; kedua, di wilayah tersebut terdapat sebuah ketegangan yang berlangsung terus-menerus, akibat terjadinya marjinalisasi politik dan kehilangan hak-hak mereka; ketiga, dominasi elit semakin mendesak sendi-sendi kehidupan keagamaan; keempat, adanya tokoh revolusioner yang memberikan landasan rasional kepada gerakan perlawanan itu; dan kelima, dibentuknya organisasi yang mampu berubah menjadi aksi kolektif serta memobilisasi sumber daya manusia dan material.

Selanjutnya Sartono (1973: 5-6), dalam penelitiannya mengenai gerakan petani di Jawa, menghubungkan pemberontakan petani dengan ideologi *Millenarianisme*, dalam bentuk Ratu Adilisme. Cara yang ditempuh dalam melakukan gerakan petani, menurut Sartono, adalah dengan mengadakan gerakan-gerakan sosial yang disebut sebagai gerakan protes. Aksi-aksi protes sebagai ledakan ketegangan dan permusuhan ini dimungkinkan guna menggugah kesadaran bersama untuk membentuk solidaritas rakyat pedesaan dalam aksi-aksi kolektif.

Menurut Sartono, beberapa ideologi yang banyak mempengaruhi gerakan rakyat pedesaan selama ini adalah sebagai berikut: pertama, *Millenarianisme*; kedua, *Mesianisme*; ketiga, perang Jihat; keempat, *Eskathologisme*; dan kelima, *Revivalisme*. (Sartono, 1973: 5-6). Ideologi *mesianisme*, *millenarianisme* dan *eskathologisme* merupakan ajaran yang bersifat radikal, sehingga ideologi itu mempengaruhi perilaku rakyat pedesaan yang ikut ambil bagian dalam gerakan-gerakan radikal, karena adanya harapan-harapan yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran tersebut. Harapan itu berupa akan datangnya masyarakat atau negara yang adil, aman dan makmur (*millenium*). Negeri impian yang didambakan itu diikuti dengan harapan akan hadirnya seorang Juru Selamat atau seorang Ratu Adil (*mesianisme*) di lingkungan masyarakat.

Protes sosial pertama di Indonesia, khususnya di Jawa, yang dikategorikan sebagai radikalisme petani di dalam sejarah sering didasarkan

pada gerakan-gerakan yang bercorak keagamaan. Sartono, dalam bukunya Ratu Adil, menyebutkan gerakan-gerakan keagamaan itu diberi nama dengan berbagai cara yaitu gerakan Juru Selamat (*mesianisme*), Ratu Adil (*millenarianisme*), pribumi (*nativisme*), kenabian (*prophetisme*), dan penghidupan kembali (*revivalisme*). Banyak gerakan sosial, termasuk kerusuhan, pemberontakan, sektarisme, dapat diklasifikasikan sebagai gerakan keagamaan, karena gejala-gejala tersebut pada umumnya cenderung berhubungan dengan gerakan-gerakan yang diilhami oleh agama, atau menggunakan cara-cara agama untuk mewujudkan tujuan-tujuan gaib mereka. Kebanyakan pergolakan tersebut cenderung mempunyai segi-segi yang bercorak keagamaan. (Sartono, 1984a: 10; Hotman, 1996: 72).

Menurut Sartono, unsur pokok gerakan keagamaan adalah seorang pemimpin keagamaan yang merupakan seorang prophet, atau guru, atau dukun, atau tukang sihir, atau utusan mesias. Pemimpin-pemimpin ini mengaku diilhami oleh wahyu. Sudah diketahui secara umum dalam alam kebudayaan Jawa, harapan-harapan millenarian yang tersembunyi sangat mendorong ke arah munculnya tokoh-tokoh propetic. Mereka itu kebanyakan adalah orang terkenal sebagai guru ilmu, kiai atau orang-orang suci yang pada umumnya memiliki daya kharisma. Elite keagamaan ini dapat mengutarakan dengan kata-kata harapan rakyat biasa, karena mereka kebanyakan merupakan pewaris tradisi-tradisi lisan atau tertulis (*millenarian*). Dengan meningkatnya dampak kekuasaan asing dalam zaman kolonial, ada kecenderungan gerakan-gerakan keagamaan di dunia

menjadi jubah bagi oposisi politik. Kecenderungan mendasar lainnya dari gerakan-gerakan keagamaan ini adalah mendorong gerakan-gerakan tersebut untuk mengembangkan orientasi politik yang lebih ekstrim, dan muncul sebagai gerakan politik yang radikal. (Sartono, 1984b: 13-14).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Sartono. Pada dasarnya, gerakan radikal petani di Jawa pada abad XIX dan XX dilandasi oleh gerakan-gerakan yang bercorak sosial keagamaan dan dikaitkan dengan beberapa ideologi yang bersifat radikal yang mempengaruhi gerakan rakyat yang bersifat radikal pula. Ideologi radikal tersebut meliputi ideologi *Millenarianisme*, *Mesianisme*; perang Jihat; *Eskathologisme*; dan *Revivalisme*. Di Ujung Pangkah, ada dugaan letusan gerakan petani tambak dan nelayan itu digerakkan atau diorganisir oleh para ulama Nahdatul Ulama dan para kiainya mengingat penduduk wilayah pesisiran adalah komunitas santri. Juga ada dugaan bahwa munculnya aksi kolektif di Ujung Pangkah diakibatkan masyarakatnya mempertahankan hak subsistensinya. Satu hal lagi yang berbeda dengan penelitian Sartono adalah bahwa penelitian ini, penulis ingin mengetahui kondisi sosial apa yang mendorong nelayan dan petani tambak berpartisipasi dalam gerakan perlawanan, terjadinya variasi respon untuk mencapai tujuan mereka, proses terjadinya perlawanan dan mengetahui implikasi dari kekuatan dan bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka. Penelitian di bidang ini belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Suhartono (1991: 140) dalam disertasinya yang berjudul "Apanage dan Bekel: Perubahan sosial di pedesaan Surakarta 1830-1920", mengungkapkan bahwa munculnya gerakan petani atau pemberontakan petani itu dilatarbelakangi oleh adanya keresahan-keresahan sosial-ekonomi akibat dominasi kolonial seperti tekanan pajak, beban ikatan feodal persewaan tanah, fragmentasi tanah dan lain-lain. Dengan demikian keresahan itu didukung oleh konflik-konflik yang lebih luas yang tidak lepas dari keanekaragaman yang muncul bersamaan dengan timbulnya hubungan sosial-ekonomi, patron-klien, dan kelompok-kelompok politik di pedesaan.

Menurut lokasi kejadiannya, keresahan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu di pusat kerajaan dan di pedesaan. Meski demikian, kedua lokasi itu tidak dapat dipisahkan karena keresahan yang mula-mula timbul di istana, setelah meletus berbagai gerakan, beralih ke pedesaan. Rupanya gerakan itu lebih tepat mencari dukungan petani daripada dukungan priyayi di pusat kerajaan. Oleh karena itu kerusuhan-kerusuhan seperti perkecuan, pencurian, pembegalan, pembakaran dan pembunuhan, serta gerakan sosial keagamaan mengambil tempat di pedesaan karena petani merupakan sebagian besar korban modernisasi sehingga gerakan yang timbul selalu didukung oleh petani. (Suhartono, 1991).

Kasus-kasus gerakan sosial keagamaan dan kerusuhan di daerah Surakarta, dalam pengertian Suhartono, dibagi menjadi tiga kategori menurut tendensi dasarnya.

Kategori pertama ialah gerakan dengan ideologi mesianisme yang mengandung harapan datangnya zaman adil dan makmur. Zaman itu didatangkan oleh Ratu Adil atau Imam Mahdi karena ia memiliki kharisma yang dapat dijadikan dasar kekuasaannya. Gerakan Ratu Adil merupakan kontra ideologi terhadap raja sebagai penguasa yang sudah barang tentu mengancam kedudukan penguasa.

Ideologi mesianisme tidak dapat dipisahkan dari millenarisme, yang menggambarkan suatu masyarakat yang mengalami zaman keemasan dengan penuh kesejahteraan. Peredaran zaman akan terjadi, dan krisis akan berakhir, lalu diganti dengan suatu zaman millenium atau zaman keemasan. Mesianisme dan millenarisme ingin merealisasikan harapannya sehingga tidak sekedar sebagai mitos tetapi dilaksanakan dengan cara magis.

Kategori kedua adalah gerakan yang bercorak Nativisme. Latar belakang munculnya gerakan itu tidak dapat dipisahkan dari besarnya kekuatan asing sehingga menciptakan reaksi kuat untuk melenyapkannya. Keinginan untuk menciptakan keadaan tenteram seperti sebelum datangnya orang asing dimaksudkan untuk menegakkan kerajaan lama dan dinastinya. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa unsur nativisme menyebabkan gerakan semakin radikal dan menjurus ke arah perang suci.

Kategori ketiga ialah gerakan yang bercorak revivalisme. Gerakan ini bertujuan menghidupkan kembali ajaran agama agar rakyat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya. Petunjuk lain adanya gerakan revivalisme di sekitar Surakarta ini adalah tersebarnya tulisan-tulisan Arab

di masjid-masjid. Adapun arti tulisan itu berupa ajakan agar masyarakat rajin beribadah.

Selain kategori gerakan sosial keagamaan seperti yang disebutkan di atas, masih ada pula gerakan protes perseorangan yang terdapat di pedesaan Surakarta. Timbulnya gerakan itu merupakan pelampiasan frustrasi karena tekanan-tekanan dari perusahaan perkebunan. Ideologi yang dianutnya yang disertai keberanian dan kekebalan mendorong pemimpin gerakan melakukan protes terhadap perusahaan perkebunan.

Disamping itu, masih terdapat berbagai jenis kerusuhan yang merupakan manifestasi keresahan-keresahan sosial di pedesaan, dan dalam menghadapi gangguan keamanan itu, pemerintah kolonial merasa tidak berdaya. Sementara itu, alat keamanan yang ada tidak berwibawa sehingga kerusuhan makin meningkat.

Demikian pula, penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Suhartono. Menurut Suhartono (1991), munculnya pemberontakan petani disebabkan oleh tekanan-tekanan sosial ekonomi terhadap petani pada 1830-1920, dominasi kolonial, serta adanya gerakan sosial keagamaan di daerah pedesaan. Bentuk-bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh petani dalam wujud perkecuan, pencurian, pembegalan, pembakaran dan pembunuhan. Dalam penelitian ini, Suhartono menemukan berbagai bentuk aksi kolektif, tapi belum melakukan penelitian tentang apa implikasi berbagai bentuk aksi kolektif itu terhadap pencapaian tujuan mereka.

Suhartono, dalam penelitiannya yang berjudul: "Bandit-bandit pedesaan Jawa, Studi historis 1850-1942", mengatakan pada dasarnya perbanditan timbul sebagai akibat perubahan sosial yang ditimbulkan pemerintah kolonial melalui tanah-tanah partikelir maupun tanah perkebunan. Petani memberikan reaksi karena tekanan pajak dan kerja wajib yang berat menyebabkan kemiskinan, penghisapan dan penekanan. Masuknya kultur Barat ke pedesaan juga menyebabkan petani kehilangan orientasi dan lepas dari budaya aslinya sehingga mereka mencari jalan keluar, antara lain berupa perbanditan. (Suhartono, 1995: 129). Mereka muncul sebagai kekuatan protes terhadap masuknya perkebunan yang merusak tatanan hidup pedesaan yang otonom. Dengan datangnya perkebunan, berarti petani hilang otonominya, dan mereka tergantung pada perkebunan yang mau tidak mau dunia mereka di pedesaan sudah diambilalih oleh perkebunan. (Suhartono, 1995: vi).

Namun sekali lagi untuk mengembalikan milik pedesaan harus dituntut melalui berbagai cara yang mengarah pada kekuatan. Karena itu bandit melakukan tindakan destruktif, baik yang dilakukan kelompok maupun perseorangan. Meskipun perlawanan yang dilakukan oleh para bandit selalu dapat dipatahkan oleh pihak elit perkebunan dan pemerintah, namun demikian petani tetap saja melakukan protes dalam bentuk perbanditan. Membandit merupakan salah satu senjatanya petani sebagai kaum yang selalu kalah.

Menurut pandangan pemerintah, bandit dianggap sebagai tindakan kriminal dan berdampak negatif bagi pemerintah dan perkebunan. Karena itu perbanditan harus dihilangkan agar jalannya pemerintahan dan perkebunan lancar dan mendapat keuntungan yang besar. Sebaliknya bila dipandang dari pihak petani, bandit dipandang sebagai tindakan heroik dan terpuji karena membela kepentingan rakyat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhartono ini, pengertian yang kedua inilah yang merupakan substansi penelitian.

Penelitian Suhartono yang kedua ini, mengenai perbanditan di Jawa 1850-1942, memunculkan temuan bahwa yang dimaksud bandit bukanlah tindakan kriminal seperti yang dituduhkan pemerintah, tetapi tindakan yang membela kepentingan rakyat, meskipun melakukan tindakan yang destruktif. Tindakan destruktif yang dilakukan oleh para bandit seperti hasil penelitiannya Suhartono merupakan resistensi terhadap kemiskinan, tekanan pajak, kerja wajib di perkebunan-perkebunan, dan tekanan sosio-politik. Namun tindakan destruktif yang terjadi di Ujung Pangkah bukan seperti hasil penelitian Suhartono, tapi lebih dimungkinkan oleh karena masyarakat lokal untuk mendapatkan kembali hak ekonominya yang telah digusur oleh kehadiran perusahaan pertambangan minyak (MNC). Jadi penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan yang telah dilakukan oleh Suhartono. Suhartono juga belum melakukan penelitian seberapa besar kekuatan-kekuatan gerakan perbanditan ini bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari bandit seperti durjana, lun dan bajingan. Ini

merupakan perbedaan lagi antara penelitian Suhartono dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana Suhartono belum mengukur mengenai kekuatan gerakan perbanditan, sedangkan penelitian penulis akan meneliti seberapa besar kekuatan gerakan petani di Ujung Pangkah. (Suhartono, 1995).

Hotman M. Siahaan (1996) dalam disertasinya yang berjudul: "Pembangkangan terselubung petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai upaya mempertahankan subsistensi", menjelaskan bahwa tujuan penelitian yang dilakukan di wilayah kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur itu bertujuan untuk mengetahui respon petani dalam program Tebu Rakyat Intensifikasi yang dibentuk melalui Inpres No. 9 Tahun 1975, yang sejak diterapkan ternyata menimbulkan berbagai bentuk penolakan dan protes sosial petani, baik secara terbuka maupun terselubung.

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana realitas pembangkangan terselubung dalam program Tebu Rakyat Intensifikasi merupakan reaksi yang rasional terhadap hegemoni birokrasi yang gagal mengartikulasikan kepentingan para petani dalam program Tebu Rakyat Intensifikasi, dan sejauh mana pembangkangan terselubung tersebut sebagai upaya mempertahankan batas keamanan subsistensi demi kelangsungan hidupnya.

Dengan mengajukan empat hipotesis, disertai pendekatan teori yang dikemukakan James C. Scott (1985) dalam *Everyday of Forms of Peasant Resistance* dan *Rational-Choice Theory*, yang dikemukakan oleh Samuel L. Popkin (1989:65-72), penelitian ini menunjukkan keempat hipotesis yang

dilakukan tersebut terbukti kebenarannya. Kesimpulannya adalah pertama, pembangkangan terselubung yang dilakukan petani dalam program Tebu Rakyat Intensifikasi sebagai reaksi rasional guna mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap hegemoni birokrasi; kedua, pembangkangan terselubung yang dilakukan petani muncul di dalam tata hubungan produksi antara petani miskin dan petani kaya; dan antara petani dan berbagai institusi yang mendominasi tata hubungan produksi tersebut lewat aplikasi program Tebu Rakyat Intensifikasi; ketiga, dominasi jaringan birokrasi pemerintah di dalam program Tebu Rakyat Intensifikasi, yang gagal mengartikulasikan kepentingan petani, merupakan faktor yang paling menentukan lahirnya realitas pembangkangan terselubung tersebut; dan keempat, pembangkangan terselubung yang dilakukan para petani di dalam program Tebu Rakyat Intensifikasi adalah sebagai upaya untuk mempertahankan batas keamanan subsistensi.

Meskipun penelitian ini menguji dan menerapkan teorinya Scott (1985) *Everyday of Forms of Peasant Resistance* dan teorinya yang dipilih Popkin (1989), *Perspektif Pilihan Rasional (A Rational Choice Perspective)* ternyata peneliti berhasil menemukan teori Pembangkangan Terselubung (*Hidden Resistance Theory*) yang merupakan eklektisasi dari dua teori terdahulu.

Penelitian yang akan penulis lakukan, juga berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hotman M. Siahaan (1996).

Perbedaan itu terletak pada latar belakang munculnya protes sosial petani, teori-teori yang dipilih untuk menganalisis fenomena dan bentuk-bentuk aksi kolektif yang dilakukan petani. Dalam disertasinya, Siahaan, menjelaskan bahwa munculnya protes sosial petani dilatarbelakangi oleh penolakan terhadap implementasi kebijakan Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang Program Tebu Rakyat Intensifikasi. Bentuk-bentuk aksi kolektif itu berupa resistensi terbuka dan terselubung. Sementara munculnya aksi kolektif yang terjadi di Ujung Pangkah dilatarbelakangi oleh ekspansi dan penetrasi kapitalisme global yang mengakibatkan bentuk-bentuk aksi kolektif yang berbeda-beda yang berupa: pertama, aksi kolektif terbuka dengan kekerasan; kedua, aksi kolektif terbuka secara damai, dan ketiga, aksi kolektif yang tersembunyi. Teori-teori aksi kolektif yang dipakai oleh Hotman menggunakan teorinya Scott dalam *Weapons of the Weak* dan *Domination and the Arts of Resistance*, yang intinya berupa perlawanan tersembunyi (*hiddens transcripts*) dan perlawanan publik atau perlawanan terbuka (*public transcripts*). Sedangkan penulis menggunakan teori-teori aksi kolektifnya Sidney Tarrow (1994). Ada satu hal yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ini merupakan celah yang akan penulis isi, yaitu belum ada yang meneliti tentang implikasi perbedaan bentuk-bentuk perlawanan dalam mencapai tujuan gerakan. Untuk itulah yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Sugiyanto Padmo (2000), dalam penelitiannya yang berjudul *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965* menjelaskan bahwa munculnya aksi kolektif petani, dipicu oleh penolakan petani terhadap kebijakan pemerintah lokal di dalam menyewa tanah untuk kepentingan perusahaan perkebunan (tembakau, tebu, dan rosella). Dalam hal ini petani merasa dirugikan. Bentuk-bentuk perlawanan dengan merusak kebun tebu, dan membakar gudang tembakau. Bentuk perlawanan bersifat terbuka maupun tersembunyi, baik secara individual maupun secara berkelompok.

Gerakan petani terutama ditujukan kepada pemerintah (di sekitar tahun 1960-an), sedangkan pada tahun 1964-1965 sasaran gerakan lebih ditujukan ke pihak tuan tanah. Alasan utama gerakan protes petani yang ditujukan kepada pemerintah ialah disebabkan uang sewa tanah yang terlalu rendah, sehingga merugikan petani, tapi menguntungkan perkebunan. Bentuk protes petani di Klaten berupa penolakan terhadap uang sewa, segera mengerjakan tanahnya setelah selesai panen bagi tanah yang terkena jatah areal, maupun sama sekali tidak mengizinkan sawahnya disewa untuk kepentingan perkebunan.

Aksi protes yang ditujukan untuk menentang tuan tanah, antara lain berbentuk gerakan untuk menguasai secara sepihak sawah yang sebenarnya masih berada di tangan orang lain. Dalam melakukan aksinya, petani biasanya dibantu oleh ratusan orang untuk memaksakan kehendaknya kepada tuan tanah. Cara-cara kekerasan semacam ini dinamakan aksi sepihak.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiyanto Padmo (2000), yaitu dalam hal: pertama, munculnya perlawanan petani tambak dan nelayan di Ujung Pangkah diakibatkan oleh kehadiran kapitalisme yang menggusur mata pencaharian petani tambak dan nelayan, bukan persoalan petani yang dirugikan oleh pihak perkebunan akibat sewa tanah yang terlalu rendah. Kedua, bentuk-bentuk perlawanan petani di Klaten dilakukan dalam dua bentuk: tersembunyi dan terbuka. Sedangkan perlawanan petani di Ujung Pangkah dilakukan dalam tiga cara: aksi kolektif dengan kekerasan, aksi kolektif tanpa kekerasan dan aksi kolektif yang bersifat mengganggu. Selain itu, penelitian yang dilakukan berusaha untuk mengetahui kekuatan-kekuatan gerakan petani tambak dan nelayan itu sendiri, dengan menggunakan teorinya Sidney Tarrow (1994). Inilah yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, termasuk penelitian Sugiyanto Padmo.

Jos Hafid (2002), melakukan penelitian di Jawa Timur, laporannya diberi judul: "Perlawanan Petani: Studi Kasus Tanah Jenggawah". Menurut hasil penelitiannya, munculnya perlawanan petani disebabkan petani dituduh menyerobot tanah milik PT. Perkebunan Negara (PTPN), di Jenggawah Jember. Padahal petani telah memiliki surat-surat kepemilikan tanah. Negara bertindak represif, dan konflikpun terjadi. Hal ini dipicu oleh penculikan terhadap dua orang tokoh petani Imam Chudori dan mbok Aminah oleh aparat kepolisian dari Kepolisian Resort Jember sehingga menimbulkan amarah bagi petani. Namun, rombongan penculik lainnya

yang terdiri dari 11 personil dan Polres Jember yang mengendarai mobil berhasil dihadang massa dan mobil dihentikan dan diblokade. Setelah terjadi negosiasi dengan pihak Kodim, akhirnya penculik dibebaskan siang harinya. Namun, sekitar pukul 19.30 pada hari pembebasan kedua terculik, 7 gudang PTP dibakar secara bersamaan. Siapa yang membakar? Hingga kini belum terungkap di pengadilan Kasus Subversi Tanah Jenggawah.

Sama seperti penelitian terdahulu, Jos Hafid menunjukkan bahwa munculnya perlawanan petani di Jenggawah karena dicabutnya surat Petok D oleh pihak penguasa. Bentuk-bentuk aksi kolektif petani diwujudkan dengan cara terbuka *vis-à-vis* penguasa dan dengan cara tersembunyi melalui aksi pembakaran tujuh gudang milik PTP. Namun, Jos Hafid tidak meneliti kekuatan gerakan petani yang dilakukan dalam bentuk terbuka maupun tertutup tersebut. Bidang yang belum diteliti inilah yang akan penulis lakukan. Disinilah letak perbedaan antara penelitian Jos Hafid dengan penelitian yang penulis lakukan.

Disertasi Victor Silaen (2006), berjudul: "Gerakan Sosial Baru di Toba Samosir, Studi kasus gerakan perlawanan rakyat terhadap Indorayon (Periode 1983-2000)". Penelitian ini membahas tentang gerakan perlawanan rakyat Porsea, Toba Samosir, terhadap sebuah industri raksasa bernama PT. Inti Indorayon Utama (Indorayon).

Permasalahan yang timbul adalah kehadiran sebuah proyek pembangunan berskala raksasa bernama Indorayon, di desa Sosorladang, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang ternyata disambut

dengan reaksi protes dan penolakan tak henti-hentinya dari masyarakat setempat. Seiring waktu gerakan protes dan penolakan pabrik pulp dan rayon tersebut mendapat dukungan luas bukan hanya dari berbagai kalangan masyarakat di daerah sekitarnya, tetapi juga dari daerah-daerah lain di luar Provinsi Sumatera Utara, bahkan dari luar Indonesia.

Faktor yang menjadi penyebabnya adalah keberadaan Indorayon itu sendiri yang selama ini telah memunculkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan alam maupun sosial. Dengan kata lain, kehadiran Indorayon cenderung lebih banyak menimbulkan kerugian dari pada keuntungan bagi masyarakat sekitarnya. Karena itu pulalah, masyarakat terus berjuang melawan Indorayon, tak hirau korban dan kerugian yang timbul sebagai resikonya yang kian lama kian bertambah. Sebab bagi mereka, ada sebuah tujuan yang ingin dicapai dan harus dicapai. Yakni agar Indorayon ditutup secara final, atau kalau tidak, Indorayon dituntut untuk memindahkan lokasi pabriknya ke daerah lain yang letaknya jauh dari Porsea. Hal itu dilakukan oleh karena rakyat pedesaan telah mengalami dampak negatif di bidang ekologi, ekonomi dan sosial dari proyek raksasa tersebut.

Dalam upaya melawan Indorayon, gerakan perlawanan tersebut menggunakan beberapa cara: pertama, menjalin hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki tujuan yang sama atau dengan kata lain membangun jejaring seluas mungkin. Corak perlawanan semacam ini adalah penguatan organisasi rakyat di tingkat akar rumput maupun perluasan solidaritas dengan organisasi lain; kedua, melakukan protes-

politik secara akomodatif, berupa aksi-aksi demonstrasi; dan ketiga, melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan terhadap Indorayon melalui jalur hukum ke pengadilan maupun jalur politik ke Komnas Hak Asasi Manusia.

4.2 Gerakan petani di luar Indonesia

Barrington Moore Jr (1966) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya revolusi agraria adalah perluasan pasar dan petani kaya yang menyerap surplus petani miskin. Sejalan dengan argumen Moore Jr adalah pendapat dari Eric Wolf (1969). Dalam penelitiannya yang dilakukan di beberapa negara, seperti Mexico, Rusia dan Kuba, Wolf berkesimpulan bahwa meluasnya imperialisme dan kapitalisme global akan membinasakan moral ekonomi petani dan menyebabkan radikalisme petani kelas menengah.

Senada dengan argumen di atas adalah pendapat Eric J. Hobsbawn (1973-1974: 3-22). Ia menjelaskan bahwa revolusi agraria diakibatkan oleh runtuhnya keamanan ekonomi petani dan memudarnya dasar-dasar kehidupan masyarakat pedesaan. Hal serupa, Jeffrey Paige (1975), berdasarkan penelitiannya di Vietnam dan Guatemala, menemukan bahwa meletusnya revolusi agraria di kedua negara itu disebabkan oleh proses perluasan pasar yang menciptakan strata sosial baru, akibat konflik kepentingan antara petani penggarap dan administrator perkebunan.

Para peneliti gerakan petani yang lain, seperti Barrington Moore Jr, Eric Wolf, Eric J. Hobsbawn dan Jeffrey Paige menjelaskan bahwa munculnya gerakan petani disebabkan oleh ekspansi imperialisme dan kapitalisme dengan segala variasinya, yang pada akhirnya imperialisme menyebabkan radikalisme petani. Meskipun mereka telah memberikan sumbangan yang besar tentang bentuk-bentuk perlawanan petani, akan tetapi belum satupun yang membahas bagaimana kekuatan gerakan petani itu bisa berbeda-beda, sehingga dapat memilih bentuk aksi kolektif macam apa yang paling kuat sehingga perlawanan petani menjadi efektif. Celah inilah yang belum dilihat oleh para peneliti terdahulu dan akan penulis teliti, sehingga terlihat perbedaannya dengan penelitian terdahulu.

Teori lain dikemukakan oleh Charles Tilly (1978) dalam karyanya *From Mobilization to Revolution* dimana argumen dasarnya amat meyakinkan, dan mudah dipahami. Para pakar teori konflik-konflik mengatakan, sebesar apapun ketidakpuasan rakyat, mereka tak dapat ikut campur tangan dalam aksi politik (termasuk aksi kekerasan), kecuali bila mereka menjadi bagian dari suatu kelompok yang terorganisir dengan sumber daya yang cukup. Bahkan sekalipun kemudian mereka atau kelompok-kelompok yang bersaing mungkin berhasil menekan kemauan untuk ikut campur dalam aksi kolektif dengan cara mempertinggi risiko yang harus ditanggung. Selanjutnya, para pakar teori konflik-politik berkata seperti yang dikemukakan Tilly:

Revolusi dan kekerasan kolektif itu lebih cenderung muncul secara langsung dari pusat proses-proses politik dalam suatu masyarakat, ketimbang mencerminkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam masyarakat ...klaim-klaim dan klaim-klaim balasan tertentu terhadap pemerintah yang ada dilakukan oleh berbagai kelompok yang termobilisir adalah lebih penting dibanding ketidakpuasan umum atau kekecewaan dari kelompok-kelompok itu, dan tuntutan (klaim) untuk mendapatkan tempat yang mapan dalam struktur kekuasaan adalah sangat menentukan". (Tilly, 1978: 436; Siahhan, 1996: 42)

Menurut Skocpol (1991), dalam kenyataannya, Tilly menolak memakai kekerasan sebagai objek analisisnya, karena ia berpendapat bahwa insiden kekerasan kolektif sesungguhnya hanya merupakan akibat proses normal dari persaingan kelompok untuk memperebutkan kekuasaan dan tujuan tertentu. Karena itu, objek analisisnya adalah "aksi kolektif" yang diartikan sebagai "aksi sekelompok orang secara bersama dalam mencapai kepentingan bersama." Dalam menganalisis aksi kolektif ini, Tilly menggunakan dua model umum, "model masyarakat politik" dan "model mobilisasi". Unsur pokok dalam model masyarakat politik adalah pemerintah (organisasi yang mengendalikan sarana-sarana kekerasan utama dalam masyarakat) dan kelompok-kelompok yang memperebutkan kekuasaan, termasuk anggota (pesaing yang mempunyai akses rutin terhadap sumber daya pemerintah) dan penentang (semua pesaing lainnya). Model mobilisasi merupakan variabel yang dirancang untuk memperjelas pola aksi kolektif yang dilakukan oleh pesaing tertentu. Variabel ini mengacu pada kepentingan kelompok, tingkat pengorganisasian, besarnya sumber daya yang ada dibawah kendali kolektif, serta kesempatan dan ancaman yang dipakai oleh pesaing-pesaing tertentu dalam hubungannya

dengan pemerintah dan kelompok pesaing lainnya. (Skocpol, 1991:7-8; Siahaan, 1996: 42).

Dalam analisis Tilly, mengenai konflik yang terjadi antara pemerintah dengan berbagai kelompok yang terorganisir, obyek analisisnya adalah aksi kolektif, dengan menggunakan dua variabel: model masyarakat politik dan model mobilisasi. Fenomena yang dia kaji adalah konflik, seperti halnya fenomena yang akan penulis teliti, tapi teori yang dipakai untuk menganalisis adalah berbeda karena unit analisisnya juga berbeda. Tilly membicarakan aspek politik, sedang riset di Ujung Pangkah ini membicarakan aspek sosialnya. Pada variabel mobilisasi, Tilly berbicara tentang tingkat pengorganisasian, tapi dalam penelitian penulis, organisasi dilihat dari kekuatan gerakan sosialnya melalui organisasi dan *organizers*.

Selain itu, Skocpol juga mengutip pendapat Wolf, yang mengatakan pada akhirnya faktor penentu yang dapat memungkinkan terjadinya pemberontakan petani terletak pada hubungan kaum tani dengan lingkup kekuasaan yang ada di sekitarnya. Suatu pemberontakan tidak akan meletus dalam situasi yang benar-benar impoten. "*A rebellion cannot start from a situation of complete impotence; the powerless are easy victims*". Jika para petani berniat bertindak, bukannya diam dengan segala keluhannya, tapi mereka harus mempunyai "pengaruh internal"—yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan kolektif yang terorganisir terhadap orang-orang yang memeras mereka. Pengaruh internal petani ini dapat diterangkan dengan kondisi-kondisi struktural dan situasional yang

mempengaruhi: pertama, tingkat dan jenis solidaritas masyarakat petani; kedua, tingkat otonomi petani terhadap pengawasan dan kontrol sehari-hari dari para tuan tanah dan kaki tangannya; dan ketiga, pengendoran sanksi-sanksi kerja paksa dari negara terhadap pemberontakan petani. (Skocpol, 1991:125).

Dua faktor pertama, kata Skocpol lebih lanjut, yaitu solidaritas dan otonomi petani, harus diselidiki melalui analisis struktur-struktur agraris rezim prarevolusi. Struktur kelas dan struktur politik lokal mempunyai arti tersendiri. Untuk meneliti hubungan kelas di pedalaman, tak cukup hanya mengidentifikasi perbedaan lapisan pemilikan kekayaan yang terpisah dari konteks institusionalnya. Pendekatan ini digunakan Paige, yang mencoba untuk menjelaskan kecenderungan politik dan organisasi sosial para petani penggarap dan non-penggarap dari segi kepemilikan dan sumber pendapatan masing-masing kelas. Dalam penjelasan teorinya, dan bahkan dalam analisis kasusnya, Paige sebenarnya hanya menyajikan kembali semua faktor struktural-sosial dan organisasional-politis yang penting, yang diperlukan untuk menjelaskan politik di daerah agraris. (Skocpol, 1991:168; Siahaan, 1996: 43).

Prasyarat bagi munculnya gerakan petani menurut Skocpol (1991) adalah adanya kemampuan untuk melakukan aksi kolektif yang terorganisir terhadap lawan-lawan mereka, yang dibangun atas dasar adanya solidaritas petani dan otonomi petani. Dalam penelitiannya, Skocpol juga belum

menjelaskan tentang kekuatan gerakan petani (dalam hal ini organisasi-organisasi petani penggarap).

Kerkvliet (1986: 107-23; lihat juga Kerkvliet, 1990) berbeda pendapat dengan temuan Scott. Sementara Scott (1976; lihat juga Scott, 1977: 267-96) menekankan pentingnya unsur-unsur tradisional dalam fondasi kultural yang mendasari perlawanan petani seperti norma resiprositas, hak terhadap subsistensi—hak untuk hidup dan kepercayaan millenium, Kerkvliet lebih cenderung melihat EFPR konsensual sebagai produk dari pengaruh budaya modern, yang dikaitkan dengan gagasan kewarganegaraan dan negara bangsa. Meski mengakui bahwa petani menggunakan nilai-nilai dan norma-norma kultural yang sudah tertanam kuat di masa lampau, Kerkvliet berpendapat bahwa perjuangan kaum tani di Pilipina terinspirasi oleh gagasan tentang hak asasi: hak terhadap martabat manusia dan standar hidup yang layak, yang berbeda dengan hak-hak subsistensi-ekonomi moral tradisional.

Penelitian Kerkvliet di Pilipina menunjukkan bahwa agar kaum tani bisa memiliki tanah, mereka harus melakukan aksi kolektif tersembunyi atau terbuka. Namun, seperti para peneliti terdahulu, Kerkvliet belum melakukan pemahaman mengenai kekuatan gerakan petani dalam bentuk-bentuk aksinya. Kekurangan inilah yang akan penulis lengkapi dengan cara mengetahui kekuatan gerakan petani melalui bentuk-bentuk aksinya di Ujung Pangkah. Ini yang membedakan penelitian Kerkvliet dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Tanya Korovkin (1999) dalam penelitiannya di Ekuador, menerapkan secara kritis teori bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari petani (EFPR) untuk menganalisis usaha-usaha perjuangan tanah di Andes Equador. Ia juga mengkaji keefektifan senjata orang-orang yang lemah yang digunakan oleh para petani pribumi yang tengah berkonflik dengan *Hacienda*. Hubungan antara perlawanan tersembunyi dan munculnya organisasi-organisasi politik juga diteliti. Perhatian khusus ditujukan kepada konteks struktural dan fondasi struktural yang mendasari aksi terbuka dan aksi tersembunyi.

Penelitian Korovkin (1999) ada kesamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan di Ujung Pangkah, Jawa Timur. Kesamaannya bersangkutan dengan aksi kolektif petani; selain itu sama-sama menggunakan (salah satunya) teori EFPR. Bentuk perlawanan petani di Andes, Equador *Hacienda* berupa perlawanan tersembunyi dan terbuka. Namun, ada perbedaan dengan rancangan penelitian penulis, yaitu penulis ingin mengetahui kekuatan gerakan petani dalam wujud bentuk-bentuk aksi kolektif yang terjadi di Ujung Pangkah; sedangkan Korovkin belum melakukannya; meskipun teori tentang kekuatan gerakan telah dipublikasikan oleh Tarrow tahun 1994. Inilah perbedaan antara rencana penelitian penulis dengan yang dilakukan oleh Korovkin.

Menurut Scott (1985), petani tradisional di Asia Tenggara (Thailand) selalu mendasarkan segala tindakannya pada prinsip-prinsip moral.

Keputusan-keputusan penting dalam kegiatan ekonomi maupun sosial didasarkan pada moral subsistensi, bukan pada komersial.

Pandangan Scott ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang ada (J.H. Boeke, 1953; Hans Dieter Evers, 1980; Geertz. 1970; dan D.H. Penny, 1966: 22-44). Inti dari penjelasan itu adalah adanya keengganan orang Jawa untuk meningkatkan produksi di atas kebutuhan subsisten tersebut yang oleh Boeke (1953) diberi penjelasan sebagai akibat dari *social dualism* (dualisme sosial), oleh Geertz dihipotesiskan sebagai *agricultural involution* (pemplungkeran pertanian), berdasarkan tingkat *shared poverty* (kemiskinan terbagi) dan oleh Penny disebut sebagai *subsistence mindedness* (sifat khas petani yang terpana kebutuhan subsisten).

Maksud dari “*social dualism*” menurut Boeke adalah bahwa dalam tingkah laku ekonominya, masyarakat Timur berbeda dengan masyarakat Barat, dimana orang Timur lebih banyak digerakkan oleh dorongan untuk mendapatkan status sosial daripada untuk mencari keuntungan (komersial). “*Agriculture involution*” menurut Geertz adalah perubahan pertanian yang memungkretkan dirinya, sebab orang cenderung menambah usaha produksinya bila belum berkecukupan tingkat subsistensinya, begitu sudah cukup, ia akan cenderung mengurangi gairah produksinya. “*Peasant subsistence mindedness*” menurut Penny, adalah tabiat yang sulit menambah produksinya untuk kepentingan dijual di pasar, lebih memilih hidup pada tingkat pemenuhan kebutuhan subsisten.

Dalam kaitan dengan hal di atas, Umar Juoro (1990) menunjukkan beberapa kesamaan pandangan antara Scott dan Boeke: pertama, keduanya sependapat bahwa prinsip rasionalisasi tidak berlaku di dalam sistem masyarakat tradisional. Keduanya melihat tingkat subsistensi sebagai aspek utama dalam kehidupan petani tradisional; kedua, baik Scott maupun Boeke berpendapat sama bahwa penetrasi kapitalisme merusak organisasi kemasyarakatan yang sudah kohesif berdasarkan interaksi sosial dan prinsip-prinsip moral.

Selain itu, keduanya menyerang perekonomian pasar karena dianggap sebagai pencipta krisis di lingkungan masyarakat tradisional. Namun, baik Boeke maupun Scott berbeda pendapat dalam melihat reaksi petani tradisional terhadap penetrasi kapitalisme. Bagi Boeke, petani tradisional dianggap bersikap pasrah terhadap kerusakan-kerusakan lembaga-lembaga tradisional sebagai akibat dari penetrasi kapitalisme. Sedangkan bagi Scott, penetrasi kapitalisme memunculkan resistensi atau perlawanan dari petani tradisional dalam rangka mempertahankan pola subsistensi. Bagi petani tradisional, demikian menurut Boeke, penetrasi kapitalisme dianggap sebagai ancaman dan kekacauan dalam sistem mereka yang sudah mapan.

Disisi lain, Popkin (1979) menolak pandangan Scott tentang moral ekonomi petani. Berdasarkan hasil-hasil penelitiannya di Vietnam, Popkin memberikan alternatif lain. Alternatifnya sungguh bertolak belakang dengan pandangan Scott. Petani tradisional, menurut Popkin, sesungguhnya

didominasi oleh motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan kelompok. Petani tradisional lebih menggantungkan hidupnya pada keluarga atau kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk menegaskan jaminan substensinya, bukan bersandar pada kelompok besar masyarakat seluruh desa, yang dinilai tidak efektif. Setiap orang di dalam komunitas tersebut pada dasarnya menuntut keuntungan dari tindakan kolektif dengan partisipasi sekecil mungkin.

Pandangan ini lebih lugas ketika Popkin menemukan bukti-bukti bahwa petani kaya di pedesaan senantiasa berusaha melakukan tindakan yang bersifat eksploratif dengan memanfaatkan kedudukan istimewanya dalam kekuasaan politik dan status sosial. Fenomena ini didasarkan atas prinsip-prinsip rasional karena tindakan tersebut pada dasarnya bertentangan secara moral. Pola hubungan patron-klien yang mentradisi memberikan peluang lebih besar lagi bagi petani kaya untuk bergabung dan secara bersama-sama mengeksploitasi lembaga-lembaga pedesaan untuk kepentingan sendiri. Bukti-bukti seperti ini nampaknya bisa ditemui pula dalam sistem pertanian tradisional di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitiannya, William Collier (1974) menunjukkan bahwa di pedesaan Jawa, tengah terjadi differensiasi kelas dan polarisasi sosial ekonomi karena perubahan-perubahan teknologi yang ada. Petani-petani bertanah luas dalam ukuran Jawa, senantiasa berusaha mempertinggi keuntungannya dengan menggeser kebijakan dalam pemanfaatan teknologi

yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, tanpa memperhatikan pembagian pendapatan secara tradisional.

Perubahan-perubahan teknologi tersebut tampak dalam sistem yang baru dalam pertanian yang disebut “tebasan”, yang memungkinkan digunakan sabit (arit) untuk memotong padi dari jenis bibit unggul, serta membayar para penggarap bukan dalam natura, tapi dengan uang tunai. Perubahan-perubahan sistem bertani tersebut telah memungkinkan para petani dan pedagang sementara (penebas) untuk memperoleh keuntungan bersih yang lebih besar dari panen. Dengan demikian perubahan dalam sistem bertani ini menguntungkan para petani (pemilik tanah) dan penebas, sedangkan buruh tani penuai padi menderita kerugian dan bahkan banyak yang tidak bisa ikut menikmati panen tersebut.

Penelitian-penelitian mengenai adanya perubahan-perubahan teknologi ini sebenarnya sudah dimulai oleh W.F. Wertheim (1962: 228) di Jawa dan pada tahun 1900-1930, Wertheim mengemukakan bahwa seorang pemilik sawah yang mengganti ani-ani dengan sabit untuk mengurangi jumlah buruh tani yang ikut serta panen, akan berarti mengucilkan dirinya sendiri dari masyarakat desa. Dikatakannya pula bahwa sistem masyarakat desa adalah suatu sistem pengangguran yang tidak kentara, dan sistem nilai masyarakat desa pada hakekatnya menolak inovasi dan perbaikan teknik, karena hal itu akan membawa kemelaratan dan kesengsaraan bagi sebagian besar penduduk desa.

Dengan demikian pandangan Popkin (1979) dan William L. Collier (1970), apabila dilihat dari aspek kapitalisme, merupakan bantahan terhadap teori *poverty shared* yang dikemukakan oleh Geertz (1982), Boeke (1953) (*social dualism*) dan Penny (1966) tentang *Peasant subsistence mindedness*.

Penelitian yang akan penulis lakukan juga berkaitan dengan aksi kolektif yang dilakukan petani, namun berbeda dengan pola-pola penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sudah melakukan pengkajian tentang apa yang melatarbelakangi munculnya aksi kolektif, apa yang menjadi tujuan aksi kolektif dan bentuk-bentuk aksi kolektif, macam apa yang dipilih oleh petani. Namun satu hal yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu belum adanya peneliti yang melakukan penelitian mengenai kekuatan gerakan dari aksi kolektif itu supaya bisa menarik kesimpulan tentang bentuk aksi kolektif macam apa yang memiliki kekuatan lebih besar daripada lainnya, sehingga bisa menjadi pilihan bagi petani agar perjuangannya menjadi efektif.

5. Konseptualisasi Teori

5.1 Teori gerakan sosial

Pada dasarnya terdapat empat perspektif/ pendekatan yang dominan dalam menganalisis gerakan kolektif: perilaku kolektif, mobilisasi sumber daya, proses politik dan gerakan sosial baru. Dalam perspektif perilaku kolektif, pengamat memandang aksi kolektif sebagai aktivitas yang terkait dengan pemaknaan. Mobilisasi sumber daya, menekankan pentingnya

komponen rasional dan komponen strategi dari fenomena yang tampak irrasional. Permasalahan yang terkait dengan makna penting transformasi, yang telah terjadi di masyarakat industri, dan implikasinya, dapat dieksplorasi melalui pendekatan Gerakan Sosial Baru (GSB). Pendekatan proses politik memfokuskan perhatian pada gerakan sosial sebagai protagonis baru dalam agregasi dan representasi pelbagai kepentingan (della Porta dan Diani, 1999:3-4).

Secara singkat, berikut ini diuraikan keempat pendekatan terhadap gerakan sosial sebagai berikut:

1. Perspektif perilaku kolektif (Le Bon, 1960; Blumer, 1969; Gurr, 1970; Smelser, 1971). Pendekatan ini menekankan aspek krisis perilaku, perasaan dipinggirkan, rasa frustrasi yang muncul sebagai dampak perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kondisi seperti ini mudah dipicu dan berubah menjadi aksi-aksi kolektif spontan, tidak terorganisasi, dan tidak menggunakan saluran-saluran resmi. Dalam bahasa Ted Gurr, misalnya kekerasan-kekerasan muncul karena terjadinya deprivasi relatif. Perasaan terpinggirkan terjadi karena kesenjangan antara nilai-nilai ekspektasi dan nilai-nilai kemampuan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Semakin besar dan serius kesenjangan itu, maka potensi kekerasan akan semakin besar pula. Singkatnya, gerakan sosial muncul sebagai akibat ketidakpuasan. Ketidakpuasan menurut Gurr, menciptakan potensi untuk kekerasan

politik (Klandersman, 2005:369). Ketika norma-norma tradisional tidak lagi berhasil menyediakan struktur yang memuaskan untuk perilaku, maka individu terpaksa melawan tatanan sosial melalui berbagai ketidakpatuhan (*non conformity*). Gerakan sosial berkeembang ketika perasaan ketidakpuasan menyebar secara luas dan ketika institusi-institusi yang fleksibel gagal untuk merespons (della Porta dan Diani, 1999:6).

2. Perspektif mobilisasi sumber daya

Menurut pendekatan ini, gerakan kolektif didefinisikan sebagai aksi rasional, bertujuan dan terorganisir (Zald dan Ash, 1966; Mc Crathy and Zald, 1987a, 1987b), Anthony Oberschall (1973; 1978) dan Charles Tilly (1978). Menurut sudut pandang ini, aksi protes berasal dari perhitungan *costs* dan *benefits*, yang dipengaruhi oleh keadaan sumber daya, terutama oleh organisasi dan oleh interaksi strategis yang diperlukan untuk perkembangan gerakan sosial. Perspektif ini juga memandang, tidaklah cukup mengungkapkan keberadaan ketegangan dan konflik struktural, tapi juga perlu mengkaji kondisi-kondisi yang memungkinkan keadaan tidak puas berubah menjadi mobilisasi. Disinilah letak peran utama organisasi dan aktivis/ pemimpin untuk memobilisasi. Kemampuan mobilisasi bergantung pada sumber daya material (kerja, uang, manfaat konkrit, layanan) atau bergantung pada sumber daya non material (otoritas, keterlibatan moral, keyakinan pertemanan) yang tersedia ada kelompok. Sumber daya ini terdistribusi

pada banyak tujuan, bergantung perhitungan rasional *costs* dan *benefits*. Selain keberadaan ketegangan, mobilisasi bermula dari cara bagaimana gerakan sosial mampu mengorganisir orang-orang yang tidak puas, mengurangi *costs* aksi, menggunakan dan menciptakan jaringan solidaritas, berbagai insentif diantara para anggota, dan mencapai konsensus eksteral. (delta Porta dan Diani, 1999: 8).

Keberadaan jaringan solidaritas sekali lagi mempertanyakan hipotesis yang sudah menyebar luas, yaitu bahwa para anggota gerakan adalah individu-individu yang terasing dan cemas dan berusaha menenggelamkan diri dalam massa sebagai pengganti marginalisasi sosial mereka. Karena itu, menurut pendekatan rasional, mobilisasi dapat dijelaskan lebih dari sekedar perumusan pencapaian *collective good*; mobilisasi juga meningkatkan keberadaan jalinan solidaritas horisontal, didalam hubungan kolektif dan vertikal, yang mengintegrasikan sejumlah kolektivitas yang berlainan. Berdasarkan berbagai riset empiris, kita dapat menduga bahwa "partisipasi dalam huru-hara populer dan aktivis dalam organisasi oposisi, terutama direkrut dari individu-individu yang sudah aktif sebelumnya dan relatif *well-integrated* didalam kolektivitas, sedangkan individu yang terasing di masyarakat, teratomisasi, dan tercerabut kurang terwakili dalam gerakan, setidaknya-tidaknya hingga gerakan ini menjadi substansial" (Oberschall, 1973:135).

3. Perspektif proses politik

Pendekatan ini lebih banyak menaruh perhatian pada lingkungan politik dan lingkungan kelembagaan sempit beroperasinya gerakan sosial. Teori proses politik berfokus pada hubungan antar aktor politik kelembagaan dan protes. Dalam melawan tatanan politik yang ada, gerakan sosial berinteraksi dengan aktor-aktor yang punya posisi kuat dalam tatanan politik tersebut. Konsep “Struktur Kesempatan Politik” (*Political Opportunity Structure*) punya keberhasilan paling besar dalam mendefinisikan sifat-sifat lingkungan eksternal, yang relevan dengan perkembangan gerakan sosial. Peter Eisinger (1973) menggunakan konsep ini untuk membandingkan hasil-hasil protes, dengan bertitik berat pada derajat keterbukaan (atau ketertutupan) sistem politik lokal. Maju mundurnya gerakan sosial, timbul tenggelamnya gerakan sosial, amat ditentukan oleh adanya peluang dan hambatan, didalam sebuah sistem politik yang ada. Dengan kata lain, pendekatan ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial. Sebagai contoh, dalam sebuah negara yang menganut sistem politik yang demokratis, maka akan terbuka kesempatan atau peluang bagi rakyat untuk melakukan berbagai bentuk partisipasi politik. Sebaliknya dalam konstelasi politik otoritarian, akan sulit bagi gerakan sosial untuk mengembangkan dirinya. Tokoh dari perspektif proses politik tersebut adalah antara lain: Mc Adam (1982), Jenkins (1985) dan Tarrow (1989).

4. Perspektif kultural (Gerakan Sosial Baru)

Perspektif ini melihat gerakan-gerakan kontemporer sebagai respons terhadap ketidakcakapan struktur politik dan ekonomi masyarakat pasca industrial. Ia berbeda dengan gerakan-gerakan lain, karena struktur organisasinya yang terdesentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional, dan fokusnya pada isu-isu budaya dan identitas. Gerakan Sosial Baru melakukan penekanan yang berlebihan pada tujuan apolitis para pemrotes kontemporer. (delta Porta dan Diani, 1999).

Perbedaan gerakan masyarakat industri dan gerakan baru juga ditekankan pada tahun 1980-an oleh sosiolog Jerman Claus Offe (1985). Menurut pandangannya, gerakan mengembangkan kritik fundamental, kritik metapolitik terhadap tananan sosial dan terhadap demokrasi perwakilan, dengan menolak asumsi-asumsi institusional tentang cara-cara “berpolitik” konvensional, atas nama demokrasi radikal. Diantara sejumlah inovasi penting dari gerakan baru, bertolak belakang dengan gerakan pekerja, berupa ideologi kritikal tentang modernisme dan kemajuan; struktur organisasi yang terdesentralisasi dan struktur organisasi partisipasif; pembelaan solidaritas interpersonal terhadap birokrasi besar; dan reklamasi ruang-ruang otonom, bukan keuntungan material. Menurut pandangan Offe, gerakan sosial baru ditandai dengan organisasi yang terbuka, cair, partisipasi inklusif dan non-ideologis, dan perhatian lebih besar ditujukan pada transformasi sosial daripada transformasi ekonomi.

Kontribusi lain ke definisi karakteristik gerakan baru dalam *programmed society* diberikan oleh Alberto Melucci (1982, 1989, 1996). Melucci menggambarkan masyarakat kontemporer sebagai sistem yang sangat terdiferensiasi, yang banyak bervariasi dalam penciptaan pusat-pusat aksi individual, tapi pada waktu yang sama membutuhkan integrasi yang lebih erat, memerlukan kontrol terhadap motif-motif aksi manusia. Menurut pendapatnya, gerakan sosial baru berusaha menentang campur tangan negara dan campur tangan pasar ke dalam kehidupan sosial, dengan memproklamirkan kembali identitas individu, dan hak untuk menentukan kehidupan privat dan kehidupan afektifnya sendiri, menentang manipulasi sistem yang *omnipresent* dan komprehensif. Menurut Melucci, berbeda dengan gerakan pekerja, gerakan sosial baru tidak membatasi dirinya pada pencarian keuntungan material semata (*material gain*), tapi menolak gagasan politik dan masyarakat itu sendiri. Karena itu, aktor baru tidak menuntut peningkatan intervensi negara dengan maksud untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan, tapi menentang ekspansi intervensi politik-administrasi dalam kehidupan sehari-hari dan mempertahankan otonomi pribadi. (della Porta dan Diani, 1999:237-238). Dalam penelitian ini, saya menetapkan menggabungkan keempat perspektif ini, pertama untuk menemukan penjelasan yang lebih lengkap dan komprehensif; kedua, gerakan-gerakan sosial yang terjadi sepanjang masa, tidak pernah hanya mewakili satu perspektif saja.

Gerakan protes mencerminkan aspek kehidupan politik—hubungan antara elit dan massa. Para elit ikut bertanggung jawab membuat dan melaksanakan kebijakan yang mengikat masyarakat. Sepanjang abad ke 20 akhir, mereka menghadapi masalah akut yang sukar untuk dipecahkan. Masalah itu termasuk penggusuran, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, disintegrasi bangsa, kekerasan komunal, konflik agama, dan kehancuran lingkungan. Gerakan protes diorganisir untuk melawan otoritas elit. Para pembuat kebijakan publik didesak untuk merumuskan solusi kreatif atas permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

Hubungan antara penguasa (elit) dan rakyat melibatkan tiga dimensi analitik, (Andrain and Apter, 1995:2): kepercayaan kultural (*cultural beliefs*), struktur dan perilaku. Kepercayaan kultural menekankan tujuan dan interpretasi aturan (*rule*). Kondisi-kondisi struktural menekankan organisasi-organisasi yang melaluinya para tokoh politik membangun kekuatan mereka. Dimensi perilaku menjelaskan bagaimana individu-individu menafsirkan pesan-pesan politik dan menjalankan organisasi politik.

Dengan menggunakan kerangka berpikir yang diajukan oleh Andrain dan Apter (1995) tersebut, yang telah mengeksplorasi Teori Kesempatan Politik (*Political Opportunity Structure: POS*) yang sebelumnya ditawarkan oleh Sydney Tarrow (1994). Teori ini pada dasarnya mencoba menjelaskan bagaimana lingkungan politik eksternal mempengaruhi mobilisasi dan keberhasilan gerakan sosial.

Menurut Tarrow (1994:4) yang mendasarkan diri pada tulisan Charles Tilly, gerakan sosial adalah “tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan dan penguasa”. Tarrow melakukan elaborasi terhadap definisi tersebut dengan menekankan bahwa gerakan-gerakan tersebut (a) menyusun aksi mengacau (*disruptive*) melawan kelompok elite, penguasa, kelompok-kelompok lain, dan aturan-aturan budaya tertentu; (b) dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite; (c) berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif; dan melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial.

Teori Kesempatan Politik menawarkan penjelasan yang logis untuk mencari jawaban atas pertanyaan: mengapa individu-individu berpartisipasi dalam aksi kolektif, baik dalam bentuk nir kekerasan, maupun dengan kekerasan?

Teori Kesempatan Politik berasumsi, bahwa partisipasi bermula dari sebuah komitmen kepada *public good* dan harapan untuk sukses. Kalau individu-individu menunjukkan usaha-usaha mereka untuk mencapai hasil yang berharga—misalnya, keadilan, hak asasi manusia, kebebasan, persamaan, martabat—dan jika mereka paham bahwa partisipasi mereka membantu menjamin tercapainya tujuan, maka mereka akan berpartisipasi dalam aksi kolektif (gerakan protes). Kekecewaan terhadap kinerja

kebijakan elit, serta kemarahan terhadap sumber-sumber ketidakadilan akan menstimuli keterlibatan atau partisipasi mereka dalam aksi kolektif.

Selain asumsi tersebut di atas, nilai-nilai kultural membentuk suatu komitmen terhadap *public good* dan membentuk perasaan individu akan efikasi politik. Dengan menyoroti pentingnya permasalahan tertentu misalnya tentang ketidakadilan, pencemaran lingkungan, pesan-pesan kultural membenarkan isu-isu yang muncul dalam agenda politik. Komunikasi yang bermuatan nilai (pesan) tidak hanya menggambarkan kondisi-kondisi yang diinginkan, tapi juga mentransmisi norma-norma kelayakan (*feasibility*).

Berikutnya adalah mengenai struktur sosial politik. Kekuatan organisasi sosial politik akan mempengaruhi pada konsepsi-konsepsi *public good* dan derajat efikasi politik. Khususnya ketika suatu lembaga yang kuat—pemerintah, korporasi privat, lembaga keagamaan, punya kontrol yang kuat (hegemonik) atas media komunikasi, maka dengan mudah ia mendapat dukungan atas prioritas nilai-nilainya daripada di bawah kondisi-kondisi pluralis. Negara koersif yang kuat juga menentukan layak tidaknya pencapaian tujuan. Ketika badan-badan pemerintah tetap koersif dan secara konsisten mengimplementasikan sanksi yang sangat represif, maka kontrol oleh negara ekstentif ini akan menghalangi para pemrotes pragmatis (para pelaku aksi kolektif) dan menentang rejim *incumbent*.

Sebaliknya, jikalau gerakan protes mampu menghimpun para anggota yang simpatik, maka ia akan mampu menarik sekutu dari luar gerakan, dan

di-*back-up* oleh struktur di luar negara. Ketika *costs* dari represi negara menurun, maka pembangkangan (*dissent*) atau oposisi menjadi meningkat.

Selanjutnya, mengapa para partisipan memilih taktik tertentu untuk mencapai tujuan mereka? Menurut Teori Kesempatan Politik (POS) terdapat dua alasan dalam membentuk pilihan ini. Yang pertama adalah alasan ekspresif dan yang kedua adalah instrumental.

Alasan ekspresif. Sebagian aktivis menjunjung tingginya kebutuhan akan taktik akomodatis sebagaimana yang terjadi pada mereka; bagi mereka, pembentukan aliansi, non kekerasan, legitasi dan pengendalian pada prosedur-prosedur hukum punya nilai ekspresif. Di sisi lain, sebagian aktivis memandang konfrontasi kekerasan sebagai strategi pemurnian melawan situasi kejahatan dan situasi yang tidak adil. Kekerasan akan membawa manfaat-manfaat ekspresif yang timbul dari menentang sistem yang eksploitatif, sistem opresif dan sistem penyebab degradasi.

Alasan instrumental. Sebagian besar pemrotes menganggap taktik sebagai alat (instrumen) yang berguna untuk mencapai preferensi kebijakan mereka. Para penganut pragmatis ini mengubah taktik mereka ketika sebuah strategi baru menjadi lebih efektif. Keputusan semacam ini sebagian berasal dari respon sekutu-sekutu kelompok dan pejabat pemerintah terhadap aksi gerakan protes. Jika sekutu dan pejabat memberikan respon secara menguntungkan terhadap taktik non kekerasan, taktik akomodatis, taktik yang direncanakan dengan seksama, maka para pemrotes akan mempergunakan taktik tersebut. Akan tetapi, jika

akomodasi sejalan dengan ketidakacuhan atau penolakan, maka taktik konfrontasi kekerasan akan menjadi lebih populer.

Perihal kekerasan ini, Diego Muro Ruiz (2002) meninjau beberapa teori kekerasan yang pada dasarnya terdiri dari dua kubu utama, antara mereka yang melihat kekerasan sebagai suatu reaksi individu atau kelompok yang rasa keadilan tersakiti dan mereka yang memandang kekerasan sebagai suatu tindakan yang berkesadaran atau tindakan yang disengaja dan tindakan instrumental. Pandangan ini berargumentasi bahwa kekerasan adalah suatu pilihan strategis untuk meraih tujuan-tujuan tertentu. Namun dalam rangka untuk kepentingan penulisan disertasi ini, saya memilih teori yang relevan dengan fenomena kekerasan (aksi kolektif yang menggunakan kekerasan) yang terjadi di Ujung Pangkah, yaitu teori kekerasan yang menjelaskan mengapa kekerasan terjadi pada saat protes dan alasan-alasan yang menyertainya.

Konsep-konsep kekerasan yang terjadi pada saat protes

Ada banyak alasan dan penjelasan di balik mengapa protes politik melibatkan kekerasan. Dalam sebagian kasus, kekerasan merupakan strategi yang dipakai oleh para protes, sedangkan dalam kasus yang lain, kekerasan terjadi secara lebih spontan sebagai akibat dari ketegangan yang tinggi selama protes. Dikatakan bahwa meletusnya kekerasan “secara umum bergantung pada derajat dan konsistensi kontrol sosial dan sejauh mana lembaga sosial dan lembaga politik menawarkan alternatif-alternatif

perdamaian bagi pemenuhan keluhan/ protes ‘kelompok’”. (Friedman, 1983:62). Kekecewaan hanyalah salah satu prasyarat bagi kekerasan politik; kepercayaan masyarakat dan sikap masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan mengapa suatu protes melibatkan kekerasan. Di bawah ini beberapa dari banyak alasan mengenai terjadinya protes dengan kekerasan yang akan dibahas secara lebih mendalam.

Barley (1968 dalam Gufield, J., 1970:229) dengan mengacu pada protes masyarakat di India mendiskusikan tiga bentuk kekerasan dan dari beberapa bentuk inilah dia memberikan alasan-alasan mengenai terjadinya kekerasan selama protes. Ketiga bentuk kekerasan itu meliputi *Violence of Remonstrance*, *Violence of Confrontation* dan *Violence of Frustration*, jenis kekerasan yang pertama dan terakhir lebih relevan dengan sejarah protes politik di Australia. “*Violence of Remonstrance* mengacu pada kerusuhan dan bentrokan masyarakat yang timbul dari aktivitas agitasional (menghasut) dengan target pejabat/ otoritas pemerintah dalam bentuk kekerasan”. Kekerasan terjadi disebabkan interaksi antara protestor/ pelaku protes dengan perwakilan otoritas pemerintah, yang umumnya diwakili oleh aparat kepolisian. Barley mengatakan bahwa dalam bentuk ini, kekerasan tidak diorganisir, tapi aktivitas-aktivitas yang mengarah ke protes paling mungkin diorganisir dan jenis kekerasan ini tidak meletus tanpa ada *warning*. *Violence of Remonstrance* termasuk pemakaian kekerasan dalam protes politik yang paling umum di Australia (misalnya, protes anti-perang).

Violence of Frustration (bentuk kekerasan yang relevan tapi kurang prevalen atau kurang umum di Australia) tidak punya target yang pasti, selain masyarakat secara keseluruhan. “Jenis kekerasan ini bersifat liar dan tak terkendali..., tanpa ada yang mengorganisir, bersifat tiba-tiba dan spontan”. (Barley, 1968 dalam Gulfield, 1970:300). Contoh terbaru di Australia adalah Redfern Riots, Kerusuhan Redfern, Februari 2004. Yang lainnya menjelaskan pemakaian kekerasan sebagai sebuah strategi yang sudah dipertimbangkan masak-masak untuk gerakan sosial dan *social campaigners*. Kaum anarkis baru dari gerakan Anti-globalisasi mewakili sebuah kelompok yang memanfaatkan kekerasan strategis sebagai *springboard* atau batu loncatan. Black Bloc (kelompok Anti-globalisasi) percaya bahwa manuver-manuver yang radikal (yaitu, manuver dengan kekerasan) punya “greget” yang lebih kuat dibanding dengan manuver tradisional”. (Brown, 2002:36).

Menurut *US Task Force on Violent Aspects of Protest and Confrontation*, para “militan” (istilah yang dipakai oleh Task Force) mengemukakan lima argumen yang mendukung pemakaian kekerasan. Para militan berargumen bahwa kekerasan di pihak mereka akan menstimulasi kelompok-kelompok yang “mlempem” untuk mengambil tindakan yang lebih kuat atau berdaya serang. “Taktik yang ekstrim akan menggoncangkan hati orang-orang yang semula moderat untuk melakukan evaluasi diri sendiri kembali”. Kedua, para militan percaya bahwa

konfrontasi menjadi alat untuk *political education*, pendidikan politik; “ketika konfrontasi membawa respon pemerintah dengan kekerasan, elemen-elemen masyarakat yang semula tidak punya komitmen bisa melihat sendiri keadaan “sistem” yang sebenarnya. Ketiga, dinyatakan bahwa timbulnya sikap resisten dan aksi resisten terhadap aparat kepolisian merupakan persiapan yang diperlukan untuk perlawanan yang lebih serius di masa mendatang. “Para militan” juga percaya bahwa protes tanpa kekerasan tidak dimengerti oleh kelompok pemuda yang berada di luar kelas terdidik dan kelas menengah dan karena itu untuk memenangkan pertarungan mereka, diperlukan aksi agresif yang kokoh. Alasan lain untuk mendukung pemakaian kekerasan disandarkan pada keyakinan bahwa “bagaimana pun represi akan terjadi sewaktu-waktu, dan untuk mematahkan usaha-usaha pihak lain adalah dengan cara menghentikan permainan sebelum permainan itu dimulai”. Terakhir dan mungkin kurang penting, agar bisa menjadi resister yang lebih revolusioner, seseorang perlu mengalami oposisi fisik melawan kekuasaan lembaga, seperti aparat kepolisian. (Friedman, 1983: 65.).

Singkatnya, keputusan untuk memakai kekerasan atau meletusnya kekerasan yang tak terencana pada waktu proses, bergantung pada “sifat situasi, kegentingan situasi, dan kecerdikan orang-orang”. (Blummer, 1969 dikutip dalam McLaughlin, 1969: 20.).

Teori *Everyday Forms of Peasant Resistance* (EFPR— Teori bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari petani).

Teori ini dikembangkan oleh Scott (1985), Kerkvliet (1986), dan Adas (1986:64-86), berdasarkan pengalaman pedesaan mereka di Asia. Penekanannya pada perlawanan petani terhadap meluasnya ekonomi pasar atau bentuk-bentuk perjuangan tersembunyi “Brechtian” meminjam istilah Scott. (1986:7).

Di bawah ini, teori EFPR diterapkan sehubungan dengan upaya-upaya/ perjuangan tersembunyi dan terbuka petani tambak dan nelayan dalam rangka mempertahankan area/ wilayah yang dijadikan sumber mata pencaharian mereka. Disini perlu ditekankan hubungan antara komunitas nelayan dan petani tambak dengan perusahaan pertambangan minyak milik asing. Perhatian khusus ditujukan kepada fondasi-fondasi kultural yang mendasari perlawanan tersembunyi petani tambak dan nelayan di Ujung Pangkah.

Protes kaum tani diungkapkan dan tujuan-tujuan mereka kadang dicapai menurut pola-pola yang tidak begitu heroik dan tidak banyak menarik perhatian orang. Karena ketidakmampuan atau ketidakmauan mereka untuk melakukan protes politik secara terbuka, mereka sering melakukan dan terlibat dalam bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari: yang berupa tindakan menentang secara tersembunyi terhadap elit-elit lokal. Para teoritis EFPR berpendapat bahwa tindakan perlawanan petani ini

mencerminkan penolakan petani untuk menerima legitimasi struktur dominasi yang ada bahkan meskipun tidak ada gerakan protes yang terorganisir. (Scott, 1986:6; lihat juga Scott, 1990).

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah apakah bentuk-bentuk tindakan di atas (menentang secara tersembunyi terhadap elit-elit lokal) itu dianggap sebagai perlawanan. Oleh karena menurut Joseph (1990:4) mengingatkan bahaya dari menyamakan: pertama, tindakan-tindakan yang dilandasi kepentingan diri yang kurang terdokumentasi secara rapi; dengan kedua, perlawanan, yang pendapatnya mengaburkan perbedaan antara kenakalan dan protes pada suatu titik dimana keduanya kehilangan daya analitiknya.

Scott menjelaskan : “Dengan mengkombinasikan perspektif-perspektif yang tumpang tindih, hasilnya merupakan semacam dikotomi antara perlawanan yang sesungguhnya, di satu pihak, dan aksi kecil-kecilan, insidental atau bahkan sebagai gejala sekunder suatu aksi kejahatan, di pihak lain. Perlawanan real, begitu argumentasinya, bersifat: pertama, organik, sistemik dan kooperatif; kedua, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri; ketiga, tidak berkonsekuensi revolusioner; dan/ atau keempat mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi itu sendiri. (Scott, 2000: 385).

Berlawanan dengan itu, kegiatan kecil-kecilan insidental atau yang bersifat gejala kejahatan sekunder adalah: pertama, tidak teratur, tidak

sistematik dan terjadi secara individual; kedua, bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri; ketiga, tidak berkosekuensi revolusioner; dan/atau keempat, menyiratkan dalam maksud atau arti mereka, akomodasi terhadap sistem dominasi.

Meskipun sebagian besar tindakan perlawanan di kalangan kelas subordinat atau kelompok-kelompok subordinat mencakup unsur kepentingan diri (*self-interest*), tapi tidak semua tindakan yang dilandasi dengan kepentingan diri yang ditujukan kepada anggota masyarakat lokal yang kaya bisa digambarkan sebagai perlawanan. Tapi, para teoritis EFPR tampaknya setuju bahwa agar suatu tindakan bisa memenuhi syarat sebagai perlawanan, maka tindakan-tindakan harus didukung oleh sebuah konsensus diantara sebagian besar warga lokal—yang tentu cukup sulit untuk diukur—mengenai legitimasi moral praktik-praktik sosial tertentu. Kerkvliet (1993:486-87) berpendapat bahwa dalam kasus pengambil alihan tanah di Pilipina, misalnya, terdapat sebuah konsensus tentang keberadaan norma-norma pemberian hak menurut “tanah mana yang seharusnya ditanami yang akan menguntungkan warga lokal yang sangat membutuhkan warga lokal dan bukan hanya untuk profit”.

Tampaknya dalam banyak peristiwa, pada dasarnya perlawanan petani dikaitkan dengan proses-proses ekspansi kapitalis, proletarianisasi dalam konteks transformasi pertanian kapitalis, digabungkan dengan mesinisasi pertanian dan tingginya angka pengangguran dan kurangnya pekerjaan di kota, pertentangan petani itu semakin dikaitkan dengan marjinalisasi

ekonomi, yang sangat mungkin bisa memicu perjuangan-perjuangan kaum tani memperebutkan tanah, secara terang-terangan atau tersembunyi.

Sementara itu menekankan pentingnya unsur-unsur “tradisional” dalam fondasi-fondasi kultural yang mendasari perlawanan petani (seperti norma resiprositas, hak terhadap subsistensi/ hak untuk hidup dan kepercayaan milenium/ kepercayaan akan datangnya milenium). (Scott, 1976, 1977).

Lebih lanjut, Scott (1986 dalam Korovkin, 1999) berpendapat bahwa “tindakan individu yang melawan dan mengelak, yang sering diperkuat oleh budaya perlawanan rakyat yang begitu hebat, dan didukung oleh banyak kaum petani, berhasil mengacaukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin mereka di ibukota”.

Selanjutnya, bagaimana hubungan antara perlawanan tersembunyi dan bentuk-bentuk perjuangan terbuka? Beberapa studi yang ada menunjukkan arah yang berbeda. Dalam analisisnya atas pengalaman kolonial di Asia, Adas (1986:82) mengatakan bahwa “*denial protest*” atau protes penolakan (seperti sikap melawan, berpura-pura tidak mampu, atau melarikan diri ke tempat-tempat yang jauh) berfungsi sebagai katup penyelamatan akibat kekecewaan sosial, yang membuat kaum petani menjadi lebih terfragmentasi dan lebih rentan untuk mengalami represi. Protes “balas jasa” (pengerusakan tanaman, pembakaran rumah, dan sebagainya) menurut pendapat Adas, lebih mungkin menyebabkan perjuangan politik terbuka.

Di pihak lain, Smith (1989) menghubungkan perjuangan politik petani yang meliputi pelanggaran batas-batas tanah secara tidak sah (*trespassing*), pencurian kecil-kecilan (*pilfering*), dan penggunaan padang Hacienda di Peru secara sembunyi-sembunyi untuk menggembalakan ternak petani, secara instrinsik dikaitkan dengan mobilisasi politik petani. Pandangan ini cocok dengan studi Kerkvliet tentang penyerobotan tanah di Pilipina. Memang Kerkvliet (1993:481) pernah mengatakan bahwa tindakan perlawanan kecil-kecilan petani bisa menyediakan suatu landasan bagi pengambil alihan tanah secara terorganisir, dan juga menekankan bahwa tindakan demikian bukan dipimpin oleh para perorganisir luar tapi dipimpin atau digerakkan oleh pimpinan/ tokoh lokal.

5.2 Aksi kolektif dan gerakan sosial

Aksi kolektif sudah menjadi ciri masyarakat manusia sejak konflik sosial ada, sejak masyarakat manusia mulai ada. Tapi aksi kolektif demikian biasanya mengekspresikan tuntutan-tuntutan dari rakyat jelata secara langsung, lokal dan tegas, dengan merespon keluhan-keluhan, menyerang lawan dan hampir tidak pernah menemukan sekutu-sekutu pada kelompok lain atau elit politik yang lain. Hasilnya berupa sederetan ledakan yang jarang diorganisir dan biasanya berlangsung singkat, diselingi periode kepasifan.

Teori aksi kolektif tertarik untuk membicarakan bagaimana individu-individu menjadi yakin untuk bertindak secara kolektif (*collective behavior*). Tapi hal ini tidak bermasalah dibanding dengan yang dipikirkan

oleh banyak teoritis aksi kolektif, karena aksi kolektif terjadi di sepanjang waktu. Gerakan sosial benar-benar punya masalah aksi kolektif, tapi aksi kolektif itu juga bersifat sosial: mengkoordinasi populasi yang tidak terorganisir, otonom dan tersebar kedalam aksi bersama dan aksi yang berkelanjutan. Mereka menyelesaikan aksi kolektif itu dengan merespon kesempatan politik melalui penggunaan bentuk-bentuk aksi kolektif yang sudah dikenal dan aksi kolektif modular dengan cara memobilisasi orang-orang didalam jaringan sosial dan melalui pengertian budaya bersama.

Menurut Sidney Tarrow (1994), kekuatan dari aksi kolektif berasal dari karakteristik—*challenge*, *uncertainty* dan *solidarity*. Ketika perlawanan, ketidakpastian dan solidaritas merupakan sifat-sifat yang dijumpai dalam semua bentuk aksi kolektif, maka sebagian bentuk memaksimalkan perlawanan, sebagian yang lain menimbulkan ancaman berupa ketidakpastian yang besar dan lainnya lagi menekankan solidaritas.

Beberapa teoritis aksi kolektif memberikan penggolongan yang berbeda tentang bentuk-bentuk aksi kolektif/ perlawanan misalnya Scott (1985, 2000): *hidden transcripts*—*public transcripts* (perlawanan tersembunyi—perlawanan terbuka); *formal*—*informal*, *terbuka*—*anonim*, *perorangan*—*kolektif*, dan yang menentang sistem dominasi—yang bertujuan keuntungan marginal. Sementara itu Robin D.G. Kelley (1994) menerapkan pemahaman Scott tentang perlawanan *subaltern* pada politik *kuotidian* Amerika—Afrika Serikat menggolongkan bentuk-bentuk aksi

kolektif/ perlawanan sebagai *hidden transcripts—Public transcripts*. Dipihak lain Korovkin (1999) menamakan *covert resistance—overt resistance*, Kerkvliet(1993) menggolongkan bentuk-bentuk aksi kolektif sebagai *hidden resistance—open resistance*. Hotman M. Siahaan (1996) memberi nama bentuk-bentuk aksi kolektif sebagai pembangkangan terselubung—perlawanan terbuka, dan Tarrow (1994) menggolongkan bentuk-bentuk aksi kolektif berupa aksi terbuka dengan kekerasan, aksi kolektif terbuka nir kekerasan dan aksi kolektif yang mengganggu.

5.3 Beberapa kekuatan gerakan menurut teory Sidney Tarrow

Insiden yang terjadi di Ujung Pangkah mengilustrasikan adanya tiga bentuk aksi kolektif yang akan dikaji dalam penelitian ini. Bentuk aksi kolektif yang pertama adalah aksi kekerasan, yang kedua adalah demonstrasi publik yang terorganisir, yang mewakili ekspresi gerakan konvensional, sedangkan yang ketiga adalah aksi tidak langsung yang sifatnya mengganggu.

Meskipun insiden yang terjadi di Ujung Pangkah berupa tiga bentuk aksi kolektif, termasuk kekerasan (*violence*), yaitu berupa penyerangan terhadap orang lain dan pengerusakan harta benda; aksi yang mengganggu (*disruption*), yaitu dengan cara merusak infrastruktur jalan sehingga aktivitas menjadi terhambat; dan persetujuan (*convention*), yaitu berupa demonstrasi itu berbeda dalam beberapa hal, namun mereka memiliki unsur-unsur kesamaan. Kesamaannya adalah, ketiganya merupakan

ekspresi konfrontasi publik antara penentang (dalam hal ini pihak petani tambak dan nelayan) melawan elit dalam hal ini pihak perusahaan asing yang didukung oleh penguasa.

Singkat kata, dengan menggunakan cara yang berbeda-beda, mereka menantang lawan-lawannya, menciptakan ketidakpastian dan membangun solidaritas. Dengan melihat masing-masing bentuk aksi kolektif secara terpisah, dan hubungan antara ketiganya kita akan mencoba mengetahui kekuatan gerakan mereka.

Kekuatan dan gerakan: dua kata yang jarang muncul bersama-sama dalam wacana yang dipelajari atau wacana populer. Tapi sepanjang sejarah, orang-orang kelas bawah tumpah ruah ke jalan-jalan dan menimbulkan kekuatan yang besar—kekuatan yang sementara sifatnya. Kekuatan gerakan muncul ketika orang-orang kelas bawah bergabung membentuk kekuatan dalam konfrontasi yang menegangkan dengan para elit, penguasa dan lawan. Penggelaran, koordinasi dan pemeliharaan interaksi ini merupakan kontribusi dari gerakan sosial. Gerakan-gerakan akan tercipta ketika kesempatan politik terbuka untuk aktor sosial yang umumnya kurang punya kesempatan politik. Mereka mendorong orang-orang agar melakukan aksi kolektif melalui berbagai pertentangan dan dengan menciptakan inovasi-inovasi di sekitar mereka. Di tingkat base terdapat jaringan sosial dan simbol-simbol kultural yang melaluinya hubungan sosial diselenggarakan. Semakin padat jaringan sosial itu semakin familiar simbol-simbol kultural

tersebut, dan semakin mungkin gerakan-gerakan itu menyebar dan dilestarikan.

Tindakan yang terletak di basis semua gerakan sosial dan pemberontakan adalah *contentious collective action* (aksi kolektif yang mengandung pertentangan). Aksi kolektif yang mengandung pertentangan menjadi basis bagi gerakan sosial, bukan karena gerakan-gerakan selalu mengandung kekerasan atau ekstrim, tapi karena aksi kolektif itu merupakan senjata utama, dan sering menjadi satu-satunya senjata yang dimiliki sebagian besar orang untuk melawan lawan-lawan yang punya peralatan yang lebih baik. Bentuk-bentuk aksi kolektif yang mengandung pertentangan yang dikaitkan dengan gerakan sosial secara historis dan sosiologis adalah berbeda-beda. Mereka punya suatu kekuatan karena mereka menantang lawan-lawan, menghasilkan solidaritas dan budaya politik. Menurut Tarrow, gerakan lebih baik diartikan sebagai tantangan kolektif (*collective challenges*) oleh orang-orang dengan tujuan bersama dan solidaritas yang berinteraksi secara terus-menerus dengan kaum elit, lawan dan penguasa. Definisi ini mempunyai empat ciri empirik: tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas, dan interaksi terus-menerus.

Karakteristik orientasi gerakan sosial menurut Baldrige (1998:306) meliputi empat macam: pertama, orientasi kepuasan dan politik dengan fokus utama: diorientasikan untuk mempengaruhi kekuasaan politik dan reformasi atau revolusioner; kedua, orientasi nilai yang difokuskan pada orientasi mengubah nilai budaya, norma, dan sistem kepercayaan serta

dilakukan dengan persuasi, propaganda dan pendidikan ; ketiga orientasi kesadaran kelompok yang diorientasikan untuk peningkatan kesadaran pribadi, mengubah pribadi masing-masing anggota gerakan dan mewujudkan masyarakat yang lebih baik melalui agama; keempat orientasi perlawanan dengan fokus utama untuk menghentikan perubahan sosial, reaksi konservatif kembali ke kondisi sebelumnya dan melawan negara karena hak sebagai warga terhambat.

Menurut Sidney Tarrow (1994), kekuatan-kekuatan dari sebuah gerakan itu memiliki empat elemen yang berupa kemampuan-kemampuan: pertama, menangkap dan menciptakan kesempatan; kedua, bertindak secara kolektif; dan ketiga membingkai aksi kolektif; keempat, struktur-shuktur pemobilisasi. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing elemen.

a. Menangkap dan menciptakan kesempatan politik.

Pada dasarnya, orang-orang bertindak atau berbuat berdasarkan adanya kesempatan. Tindakan kolektif akan meningkat apabila orang-orang mendapatkan resource atau sumber daya untuk melepaskan kapasitas habitualnya dan menemukan kesempatan untuk menggunakannya.

Terbentuknya suatu gerakan menurut Tarrow (1994:81) merupakan hasil dari rakyat yang menangkap dan menciptakan kesempatan. Kesempatan politik ditangkap dan sekaligus diperluas oleh gerakan sosial, diubah menjadi aksi kolektif dan dilestarikan oleh struktur-struktur pemobilisasi dan kerangka-kerangka kultural. Struktur kesempatan politik

bukan hanya berlaku pada pembentukan gerakan saja. Gerakan-gerakan menciptakan kesempatan bagi gerakan itu sendiri atau bagi lainnya. Gerakan sosial menciptakan kesempatan dengan menyebarkan tindakan kolektif melalui: pertama, jaringan sosial; kedua, membentuk koalisi aktor-aktor sosial; ketiga, menciptakan ruang politik bagi gerakan-gerakan yang sama dan kontra gerakan; dan keempat menciptakan insentif bagi elit untuk merespon.

1) Memanfaatkan jaringan sosial

Salah satu cara gerakan sosial menciptakan kesempatan politik ialah dengan cara menyebarkan tindakan kolektif melalui jaringan sosial. Konsep struktur kesempatan politik akan membantu kita dalam dua hal: pertama, untuk memahami mengapa gerakan sosial kadang meningkat secara drastis, tapi hanya sebentar, mengajukan tuntutan-tuntutan kepada kaum elit atau penguasa, kemudian mereda dengan cepat; dan kedua, membantu kita memahami bagaimana suatu mobilisasi menyebar dari orang-orang dengan keluhan berat/ protes berat dan dengan sumber daya yang kuat di daerah-daerah dan kota dalam keadaan-keadaan yang berlainan.

2) Menciptakan koalisi aktor-aktor sosial.

Yang penting adalah aspek apa yang spesifik dari struktur kelembagaan yang berhubungan dengan gerakan-gerakan. Aspek itu adalah salah satu sumber daya internal: aktor-aktor sosial (*challengers*) yang mampu melakukan koalisi yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menciptakan

tujuan gerakan. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh partai-partai, akan tetapi bisa juga organisasi-organisasi tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang mungkin bisa menampung tuntutan-tuntutan para aktor sosial.

3) Penciptaan ruang politik bagi gerakan dan gerakan tandingan.

Tindakan kolektif mencakup adanya tuntutan-tuntutan dalam cara dramatis yang membuka jalan bagi orang lain untuk melakukan hal serupa. Ekspansi kesempatan ini tidak hanya mempengaruhi sistem aliansi gerakan, tapi juga mempengaruhi apa yang oleh Hanspieter Kriesi (1991) disebut sebagai sistem konflik. Sebuah gerakan yang mengganggu kelompok-kelompok yang berpengaruh dapat memicu sebuah gerakan kontra gerakan.

Gerakan-gerakan yang menggunakan kekerasan akan mengundang oposisi atau perlawanan fisik Gerakan-gerakan yang mengajukan tuntutan-tuntutan kebijakan yang ekstrim bisa diakali oleh kelompok-kelompok yang mengajukan tuntutan yang sama dalam bentuk yang lebih bisa diterima. Gerakan-gerakan yang melakukan aksinya dengan kekerasan juga dapat merangsang gerakan tandingan yang damai. Gerakan tidak hanya menciptakan kesempatan bagi dirinya sendiri, tapi gerakan itu juga menciptakan kesempatan bagi lawan-lawannya.

4) Menciptakan kesempatan bagi elit.

Akhirnya, kelompok-kelompok pemrotes menciptakan kesempatan bagi kaum elit. Baik dalam arti negatif, ketika aksi-aksi mereka menyediakan suatu landasan bagi represi, maupun dalam arti positif, ketika

para politisi yang oportunistik menangkap kesempatan yang diciptakan oleh para *challengers*.

Gerakan-gerakan akan muncul sebagai akibat dari adanya kesempatan baru atau kesempatan-kesempatan yang mengalami perluasan; mereka menandakan kepekaan negara terhadap tindakan kolektif dan dengan demikian akan membuka kesempatan bagi yang lain. Proses demikian akan membuat negara melakukan suatu respon yang pada gilirannya menghasilkan struktur kesempatan baru.

b. Bertindak secara kolektif.

Sifat-sifat yang dijumpai dalam semua tindakan kolektif adalah: pertama, kemampuan menantang lawan-lawan/ elit; kedua, menciptakan ketidakpastian; dan ketiga membangun solidaritas.

1) Kemampuan menantang lawan-lawan/ elit.

Aspek yang paling mendasar dari tindakan kolektif adalah kemampuannya untuk menentang atau melawan lawan-lawan (kaum elit). Akan tetapi, para penantang tidak harus menduduki ruang publik agar bisa menawarkan perlawanan efektif.

2) Menciptakan ketidakpastian

Ketidakpastian tidak hanya disebabkan oleh lamanya protes yang tidak pasti, tapi juga disebabkan oleh ketidakpastian biayanya. Demonstrasi tanpa kekerasan sering kali lebih ampuh daripada kekerasan aktual, karena

demonstrasi tanpa kekerasan ini menimbulkan kemungkinan terjadinya kekerasan tanpa membuat polisi atau penguasa melakukan represi.

Selain itu, ketidakpastian juga timbul dari kemungkinan bahwa suatu aksi akan menyebar kelainnya sehingga dengan demikian akan meningkatkan biaya potensial aksi itu. Itulah sebabnya, mengapa gerakan sosial seringkali mengaku mewakili konstituen yang lebih luas, daripada orang yang hadir dalam protes itu. Misalnya bukannya pernrotes anti aborsi melainkan umat beragama yang menentang aborsi, bukan mereka yang menderita bahaya lingkungan, melainkan “kepentingan planet” yang menderita polusi. Pada ketidakpastian tentang batas-batas aksi tertentu, terdapat kemungkinan bahwa aksi itu akan menyebar kelainnya.

3) Membangun solidaritas

Elemen ketiga yang menentukan tindakan kolektif ialah adanya solidaritas. Tindakan kolektif tidak hanya mensyaratkan adanya kemampuan menentang lawan-lawan dan kemampuan membangun ketidakpastian baik dengan kendala-kendala yang tak pasti maupun hasil yang tak pasti, akan tetapi tindakan kolektif juga harus mengandung solidaritas. Misalnya, pemogokan akan berhasil kalau para pelaku pemogokan memanfaatkan solidaritas yang ada sebelumnya. Sebuah pemogokan yang tidak mempunyai jenis solidaritas ini akan berisiko merusak efektivitas sendiri. Sebaliknya, tindakan kolektif akan memperkuat solidaritas.

c. Membingkai aksi kolektif.

Pada bagian ini, yang terpenting adalah bagaimana wacana simbolik terbentuk dan menyediakan kekuatan kepada gerakan sosial. Untuk itu, diperlukan:

1) Penggunaan simbol-simbol budaya

Anderson mengajarkan bahwa konstruksi simbolik merupakan bagian penting dari politik. Dari pendekatan terhadap konstruksi makna ini, muncul asumsi bahwa simbol-simbol aksi kolektif tidak dapat dibaca seperti halnya sebuah “teks”, yang terlepas dari strategi dan hubungan konflik gerakan sosial yang mendifusikannya lintas waktu dan tempat. Dari banyak simbol-simbol budaya para aktor gerakan sosial memiliki simbol-simbol yang mereka anggap dapat memperantarai diantara banyak fondasi kultural dan kelompok yang menarik baginya, sumber budaya resmi gerakan mereka dan masih mencerminkan kepercayaan dan aspirasi mereka.

Lalu, bagaimana kekuatan simbolisme dalam tindakan kolektif?

Pertama simbol-simbol budaya tidak otomatis tersedia sebagai simbol-simbol yang menghadirkan mobilisasi, tapi membutuhkan aktor-aktor yang bisa mengubah simbol-simbol itu menjadi suatu bingkai aksi kolektif.

Untuk menghubungkan teks dengan konteks, kita membutuhkan sebuah konsep yang lebih cocok dengan sifat interaktif gerakan sosial dan masyarakat mereka. Untuk itu dikenal sebuah konsep yang disebut “kerangka aksi kolektif”. Kerangka aksi kolektif sebagai sebuah kategori pemahaman kognitif khusus, demikian menurut David Snow, terkait dengan

bagaimana gerakan sosial mengkonstruksi suatu makna. Sebuah kerangka aksi kolektif menurutnya adalah: Skemata interpretatif yang menyedehankan dan memampatkan “dunia diluar sana” dengan menguraikan dan mengkodekan secara “selektif objek-objek, situasi, peristiwa, pengalaman, dan serangkaian tindakan di dalam lingkungan” seseorang saat ini atau di masa lampau.

Kerangka aksi kolektif berfungsi sebagai alat penguat yang “menggaris bawahi” dan menekankan keparahan keadaan sosial dan ketidakadilan sosial atau didefinisi sebagai ketidakadilan dan imoral yang sebelumnya dilihat sebagai suatu kesialan namun mungkin bisa ditoleransi.

Sebagaimana telah dikatakan, Snow percaya bahwa kerangka-kerangka seperti ketidakadilan merupakan sumber daya yang kuat untuk melakukan mobilisasi, tapi Tarrow tidak mengatakan bahwa *organizers* mengkonstruksi mereka dari keseluruhan materi yang ada. Mereka mengarahkan kerangka gerakannya ke aksi dan membentuknya pada titik perpotongan antara budaya penduduk, target dan nilai-nilai dan tujuan mereka sendiri.

2) Pembentukan konsensus dan mobilisasi.

Mobilisasi konsensus terdiri atas usaha-usaha secara sadar untuk menyebarkan beberapa pandangan aktor sosial kepada publik. Organisasi gerakan adalah sebagian aktor yang mencoba melakukan hal ini. Dalam melakukan hal ini, mereka bersaing dengan banyak organisasi gerakan lain, dengan pemerintah, gereja, dengan media dan dengan berbagai kecenderungan kultural yang menentang tujuan mereka atau yang tidak relevan dengan tujuan mereka.

Alat-alat untuk memobilisasi konsensus, antara lain, adalah penggunaan media untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas. Inilah yang menjadi alasan utamanya. Meskipun radio dan pers memegang peranan penting dalam penyebaran informasi, tetapi televisilah yang mempunyai peran yang strategis, karena kemampuannya yang khas untuk menangkap berbagai situasi yang kompleks dalam gambar-gambar visual yang terkait dengan siasat atau taktik suatu revolusi.

Penampilan gerakan sosial yang ditayangkan dengan pemberitaan televisi akan menguntungkan dalam tiga cara: pertama, televisi membantu protes-protes menjadi diperhatikan oleh negara; kedua, televisi secara visual dapat membedakan tujuan-tujuan damai dari suatu gerakan sosial dengan kekejaman polisi; dan ketiga, televisi juga merupakan media komunikasi di dalam gerakan sosial. Ia membantu menyebarkan pengetahuan tentang apa yang sedang dilakukan gerakan lewat demonstrasi visual, bagaimana mahasiswa merespon ketika diserang dengan pentungan maupun popor senjata.

3) Mengkonstruksi tindakan kolektif

Yang terpenting di sini adalah bagaimana orang-orang gerakan mampu membingkai tuntutan akan hak-hak mereka.

Bagaimana *organizers* membingkai tuntutan-tuntutan komunitas petani tambak dan nelayan akan hak-haknya. Dalam konteks ini adalah hak-hak untuk bisa hidup sehat, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih dan bebas dari pencemaran. Hal inilah yang dijadikan isu sentral masyarakat. Di sini telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat untuk hidup sehat.

d. Struktur-struktur pemobilisasi.

1) Membangun organisasi yang kuat dan fleksibel

Pada dasarnya terdapat tiga elemen dari organisasi gerakan, yaitu pertama, organisasi formal ; kedua, organisasi aksi kolektif ; dan ketiga, struktur pemobilisasi yang disebut sebagai organisasi yang kompleks atau organisasi formal yang mengidentifikasi tujuan-tujuannya dengan preferensi gerakan sosial atau *counter movement* dan upaya-upaya untuk mengimplementasikan tujuan itu.

Masalah bagi penyelenggara gerakan (*movement organizers*) adalah bagaimana menciptakan organisasi yang cukup kuat untuk menggempur lawan-lawan, tapi cukup fleksibel untuk mengadakan perubahan sesuai dengan keadaan dan mempergunakan energi yang ada di basis.

2) Melakukan kampanye dan koalisi

Organisasi gerakan perlu, melalui aktifitas-aktifitas organisasi, menumbuhkan ikatan-ikatan dengan kelompok-kelompok yang memiliki pandangan serupa. Gerakan-gerakan ini mencoba mengkompensasi kelemahan basis konstituensi mereka dengan mengumpulkan anggota mereka di tempat-tempat strategis dan dalam waktu yang strategis pula untuk menyampaikan visi dan misi mereka (kampanye). Dalam konteks ini (bagi petani tambak dan nelayan) isu-isu tentang pencemaran lingkungan menjadi isu sentral.

Selain itu, diperlukan pula sebuah koalisi yang bersatu secara terus-menerus di seputar isu-isu tertentu. Hal ini diperlukan apabila kelompok demikian jarang mengorganisir dan menyelenggarakan demonstrasi yang besar untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka.

3) Rekrutment ke dalam gerakan

Amat diperlukan rekrutmen calon-calon partisipan ke dalam gerakan dari organisasi-organisasi yang sudah ada. Rekrutmen bisa dilakukan secara kolektif atau individual dengan tujuan untuk menyebarkan pesan kampanye. Hal ini bisa dilakukan melalui organisasi keagamaan, organisasi petani dan nelayan, serta organisasi lingkungan hidup. Semakin banyak organisasi sebagai reservoir untuk rekrutmen dalam spektrum gerakan yang luas, hal ini akan menjadi fondasi yang sangat bagus bagi masyarakat gerakan.

4) Menghubungkan elit dengan massa.

Gerakan-gerakan sosial (baru) menghubungkan elit dengan massa lewat berbagai mekanisme formal dan koneksi informal yang mempergunakan ikatan-ikatan sosial orang-orang, kebiasaan kerja dan kebiasaan hidup mereka dan semangat mereka untuk merencanakan dan melaksanakan aksi kolektif.

Penggerak gerakan sosial adalah hubungan-hubungan yang lebih longgar agar bisa memelihara kontak dengan para pendukung dan memobilisasi mereka ketika kampanye aksi kolektif digelar. Singkat kata,

apa yang harus dilakukan oleh para *organizers* adalah bagaimana mengkonstruksi atau menggunakan hubungan-hubungan yang longgar antar jaringan aktivitas yang punya ikatan-ikatan solidaritas yang bersifat independen, seperti ikatan-ikatan familial, lingkungan tempat tinggal, dan lain-lain.

Kekuatan dari sebuah gerakan memiliki empat elemen berupa kemampuan-kemampuan, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Karakteristik Bentuk-Bentuk Perlawanan Nelayan dan Petani Tambak dilihat dari Kekuatan Gerakan menurut Teori Sidney Tarrow (1994)

No.	Karakteristik kekuatan dari Gerakan	Bentuk-bentuk perlawanan	
		Aksi perlawanan tidak langsung;	Aksi perlawanan terbuka nir-kekerasan.
1.	Menangkap dan menciptakan kesempatan: a. memanfaatkan jaringan sosial b. membentuk koalisi aktor-aktor sosial c. penciptaan ruang politik d. penciptaan insentif bagi kaum elite untuk merespon
2.	Bertindak secara kolektif: a. kemampuan menantang lawan-lawan/ elite b. menciptakan ketidak pastian c. membangun solidaritas
3.	Membangkit aksi kolektif: a. penggunaan simbol-simbol budaya b. membangun konsensus dan mobilisasi c. mengkonstruksi tindakan kolektif
4.	Struktur-struktur pemobilisasi: a. membangun organisasi yang kuat dan fleksible b. melakukan kampanye dan koalisi c. rekrutmen ke dalam gerakan d. menghubungkan elite dengan massa

6. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan alasan gejala yang diteliti merupakan gerakan sosial yang dinamis. Sebagaimana dikatakan Strauss dan Corbin (2003:4-5) kajian tentang gerakan sosial lebih tepat dilakukan dengan metode kualitatif, karena sifat masalah yang ingin dijelaskan dan diungkapkan tidak mungkin dilakukan dengan metode kuantitatif. Pemilihan metode kualitatif ini dengan melalui pertimbangan bahwa sifat masalah yang dinamis itu menunjukkan gerakan sosial itu tidak pernah berhenti, tetapi mengikuti perkembangan sosial, ekonomi dan politik tertentu. Studi ini tidak sekedar hanya untuk mencari penjelasan serta mengkaji dan mengungkap ide-ide gerakan, menangkap dan menciptakan kesempatan, bertindak secara kolektif, aliansi-aliansi yang dibangun, membingkai aksi kolektif, akan tetapi meletakkannya dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Selain itu, kerangka konseptual yang menjadi referensi dalam penelitian ini meliputi beberapa teoretisi, dengan demikian penelitian ini menunjukkan karakteristiknya yang kualitatif.

Selain itu, materi dalam penelitian ini ada dinamika sosial perilaku tokoh masyarakat lokal, apakah itu tokoh keagamaan, pemuda, pengurus organisasi, yang berkaitan dengan proses tindakan yang hanya ditunjukkan oleh gejala-gejala, berupa pemikiran dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Peristiwa-peristiwa perilaku tokoh masyarakat

sedemikian rumit dan baru bisa dipahami dengan baik apabila data dan informasinya dipaparkan secara lengkap dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan, termasuk dengan analisis interpretatifnya. (Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman). Alasan penguat dipilihnya metode kualitatif dalam penelitian ini adalah karena gerakan sosial mengkaji realitas ganda, tidak tunggal, seperti ide-ide, menggerakkan pengikut, melakukan negosiasi, memobilisasi jaringan dan membentuk aksi kolektif hanya mungkin dilakukan melalui wawancara dan observasi partisipasi. Selain itu melalui observasi partisipasi bisa memperoleh gambaran tentang adanya dinamika anggota-anggota pengurus organisasi, tokoh-tokoh masyarakat dan aktivitas gerakan kemasyarakatan berkaitan dengan kelangsungan hidup gerakan sosial.

6.1 Lokasi

Lokasi penelitian ini terdapat di empat desa: Ujung Pangkah Barat, Ujung Pangkah Timur, Banyu Urip dan Ujung Pangkah Kota. Mengapa desa-desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian? Pertama: desa-desa tersebut merupakan tempat-tempat terdapatnya insiden perlawanan petani tambak dan nelayan terhadap kehadiran perusahaan multinasional (MNC). Kedua: desa-desa tersebut merupakan tempat tinggal komunitas petani tambak dan nelayan serta berdekatan dengan kantor perusahaan asing, pergudangan, dan dermaga. Khusus di desa Ujung Pangkah Kota, di situ

terletak kota kecamatan, dimana terdapat berbagai organisasi seperti Persatuan Petani Tambak dan Nelayan Ujung Pangkah (PPNUP), Forum Komunikasi Masyarakat Ujung Pangkah (FKMU) dan berbagai organisasi lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan lain-lain. Hal tersebut berkait dengan sumber data.

6.2 Sumber data

Informan sebagai penyedia data, utamanya diambil dari komunitas petani tambak dan nelayan. Selain itu, informan diambil dari organisasi-organisasi kelompok kepentingan seperti organisasi pemuda, Persatuan Petani Tambak dan Nelayan, Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, organisasi Lingkungan Hidup (Walhi), tokoh-tokoh masyarakat (pemimpin keagamaan dan tokoh informal lainnya).

Dalam menentukan informan ini, penulis pertama kali mendapatkan informasi dari seorang pedagang yang penulis tumpangki untuk kost. Dari dia, penulis diberi tahu orang-orang atau tokoh-tokoh serta organisasi-organisasi yang terlibat dalam aksi perlawanan terhadap kehadiran pertambangan minyak asing. Utamanya adalah seorang tokoh pemuda, yang sekaligus Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Ujung Pangkah, yang bernama Ilham. Orang inilah yang memberikan informasi awal tentang gerakan perlawanan nelayan dan petani tambak, yang sekaligus sebagai motor penggeraknya, sehingga penulis mengetahui organisasi apa saja dan tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat dalam aksi perlawanan tersebut.

6.3 Pengumpulan data

6.3.1 Interview

Informasi-informasi aktual didapatkan secara langsung dari informan. Data dihimpun melalui dua cara, yaitu wawancara mendalam dan melalui pengamatan. Pengumpulan data antara lain dilakukan melalui kegiatan lapangan. Mula pertama dilakukan pengumpulan data di lapangan, lalu diklasifikasikan dan dituangkan. Seluruh istilah, klasifikasi, dan terminologi berasal dari aktor yang diteliti. Proses pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan para tokoh organisasi (pengurus), tokoh masyarakat di Ujung Pangkah. Wawancara banyak dilakukan secara tidak formal. Dalam wawancara dan observasi, alat rekam dan daftar pertanyaan tidak dipakai. Catatan baru dibuat setelah itu, berbagai temuan yang ada dicatat dalam bentuk *field-note* (catatan lapangan). (Anton Baker, 1984:107-120).

Penelitian menjadi lebih mudah dan lancar ketika peneliti sudah berkenalan dan menjadi lebih akrab dengan Ilham, ketua Forum Komunikasi Masyarakat Ujung Pangkah, seorang lulusan IKIP Negeri Surabaya. Ia seorang pengurus dan penggerak perlawanan masyarakat nelayan dan petani tambak di Ujung Pangkah. Melalui Ilham inilah peneliti diperkenalkan dengan seluruh anggota pengurus organisasi pemuda, organisasi nelayan, pengurus organisasi petani tambak, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan tokoh-tokoh masyarakat

Ujung Pangkah yang aktif dan terlibat dalam perlawanan menentang kehadiran perusahaan pertambangan tersebut.

Satu persatu pengurus organisasi yang penulis sebut dimuka, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, penulis telusuri melalui wawancara mendalam. Maksud dari wawancara mendalam adalah untuk mengontruksi gagasan-gagasan, mendeskripsikan tahapan-tahapan gerakan perlawanan, menjelaskan konflik-konflik yang ada dalam gerakan dan menggambarkan suasana atau dinamika gerakan perlawanan.

6.3.2 Observasi

Selain interview, penulis melakukan observasi di lapangan. Observasi yang dilakukan adalah antara lain mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan organisasi lokal, meskipun tidak secara keseluruhan ikut aktif dalam setiap aktivitas organisasi, seperti halnya pengurus organisasi gerakan tersebut. Untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pengurus organisasi, penulis menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dalam gerakan perlawanan ini. Di sini penulis menjelaskan jati diri penulis dan mengapa ikut dalam beberapa aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi gerakan perlawanan. Kegiatan yang diikuti penulis antara lain ikut rapat-rapat, diskusi-diskusi yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi yang ada. Sehingga penulis mengetahui gambaran yang lengkap mengenai organisasi gerakan, yang berkaitan dengan bagaimana mengevaluasi karakteristik tindakan politik mereka, seperti

bagaimana memperkuat mata rantai gerakan mereka, bagaimana menggerakkan pengikut, melakukan negosiasi, dan memobilisasi jaringan antar organisasi.

6.3.3 Analisis isi (konten analisis)

Cara yang dilakukan oleh penulis dalam upaya pengumpulan data adalah menganalisis atas bacaan yang diterbitkan oleh organisasi lokal, termasuk organisasi di luar Ujung Pangkah seperti Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) cabang Jawa Timur, surat kabar dan majalah, risalah rapat-rapat, surat terbuka dan dokumen-dokumen yang terkait dengan gerakan perlawanan, mengingat fokus penelitian ini adalah gerakan perlawanan petani tambak dan nelayan. Data utama tentang gerakan perlawanan saja yang didapatkan secara langsung. Tidak ketinggalan, pengumpulan informasi yang relevan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan.

6.3.4 Guide interview

Untuk melengkapi data penelitian, peneliti menggali sejumlah informasi tambahan dari pengurus organisasi lokal yang mempunyai kaitan dengan kebutuhan informasi utama studi ini. Atas izin ketua-ketua pengurus organisasi, peneliti diizinkan untuk menggali informasi tentang berbagai persoalan perlawanan yang telah, akan, dan sedang dilakukan. Hal ini peneliti gunakan untuk *cross check* atas hasil-hasil wawancara sebelumnya.

6.4 Data yang dibutuhkan

Pengumpulan data dilakukan pada waktu penelitian di lapangan, baik melalui interview, observasi, dan studi kepustakaan. Data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, 2 dan 3 dirancang berupa serangkaian pertanyaan berdasar kerangka konseptual/ teoritik Charles Andrain dan David Apter (1995). Untuk menjawab rumusan masalah nomor 4 diperlukan data yang dirancang berdasarkan kerangka konseptual/ referensi dari Sydney Tarrow (1994).

Data yang dibutuhkan untuk rumusan masalah nomor 1, kondisi sosial apa yang mendorong nelayan dan petani tambak berpartisipasi dalam aksi perlawanan? Data yang dibutuhkan adalah data kondisi sosial sejak munculnya perlawanan nelayan dan petani tambak setelah kehadiran dan beroperasinya perusahaan tambang minyak. Kondisi sosial itu aspeknya berupa kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik pada waktu itu dan kondisi sosial setelah kebijakan yang dibuat oleh perusahaan yang didukung oleh pemerintah.

Data yang dibutuhkan untuk rumusan masalah nomor 2, mengapa terjadi variasi respons bagi nelayan dan petani tambak untuk mencapai tujuan mereka? Data yang dibutuhkan adalah urutan peristiwa yang menyebabkan nelayan dan petani tambak memilih bentuk-bentuk perlawanan yang berbeda-beda. Data yang dibutuhkan adalah apa yang melatarbelakangi nelayan dan petani tambak memilih jalan A atau jalan B

dalam melakukan perlawanan terhadap kehadiran perusahaan tambang minyak di kawasan penangkapan ikan mereka.

Data yang dibutuhkan untuk rumusan masalah nomor 3, bagaimana proses terjadinya perbedaan perlawanan terhadap kehadiran industri perminyakan perusahaan multinasional? Data yang dibutuhkan adalah urutan peristiwa munculnya perlawanan petani tambak dan nelayan secara internal komunitas itu disertai faktor penyebabnya, sampai masuknya pengaruh yang dilakukan oleh kalangan pemuda terhadap gerakan perlawanan nelayan dan petani tambak, serta pengaruh dan dukungan dari tokoh masyarakat, sehingga mampu mengubah taktik perlawanan dari bentuk perlawanan tersembunyi menjadi bentuk perlawanan terbuka.

Terakhir, data yang dibutuhkan untuk rumusan masalah nomor 4, apa implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan mereka? Data yang dibutuhkan adalah apakah sebuah gerakan dinyatakan efektif atau tidak efektif dalam upaya mencapai tujuan mereka. Untuk itu diperlukan referensi dari Sydney Tarrow (1994) dalam mengukur kekuatan gerakan, untuk mengetahui kekuatan gerakan tersebut. Sehubungan dengan itu, disusunlah angket data karakteristik kekuatan gerakan dengan mengacu pada referensi Sydney Tarrow (1994) berikut ini.

Angket Data Karakteristik Kekuatan Gerakan

Catatan : Daftar pernyataan di bawah ini berlaku untuk semua kelompok :
 A : Aksi perlawanan tidak langsung
 B : Aksi perlawanan terbuka nir kekerasan

Petunjuk : Jawablah setiap pernyataan berikut ini dengan memberi tanda **Ya** atau **Tidak** pada kolom yang sesuai dengan pengamatan anda.

NO.	KARAKTERISTIK KEKUATAN GERAKAN	DATA YANG DIBUTUHKAN		
		Pernyataan	Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Menangkap dan menciptakan kesempatan:			
	a. Memanfaatkan jaringan sosial	(1) Para pengurus organisasi (<i>organizers</i>) melakukan kunjungan ke kelompok-kelompok lain, organisasi dan elitnya termasuk tokoh informal.		
	b. Membentuk koalisi aktor-aktor sosial	(2) Para pengurus organisasi (<i>organizers</i>) menyebarluaskan visi dan misi mereka ke kelompok-kelompok lain, baik organisasi maupun elitnya dan tokoh informal.		
	c. Menciptakan ruang politik	(1) Aktor-aktor sosial membangun koalisi dengan organisasi lain dan elitnya yang memiliki visi dan misi yang sama dalam upaya untuk mencapai tujuan gerakan.		
	d. Menciptakan kesempatan bagi elit	(1) Pengurus organisasi gerakan (<i>organizers</i>) mampu mengajak dan mempengaruhi kelompok lain, elitnya dan tokoh informal untuk melakukan aksi kolektif.		

NO.	KARAKTERISTIK KEKUATAN GERAKAN	DATA YANG DIBUTUHKAN		
		Pernyataan	Jawaban	
			Ya	Tidak
2.	Bertindak secara kolektif:			
	a. Kemampuan menantang lawan-lawan	(1) Aksi kolektif itu mampu menantang lawan-lawan dalam wujud nyata yang meresahkan elit.		
	b. Menciptakan ketidakpastian	(1) Aksi kolektif menimbulkan ketidakpastian waktu. (2) Bila terjadi penyebaran aksi kolektif akan menimbulkan ketidakpastian biaya.		
	c. Membangun solidaritas	(1) Untuk mewujudkan solidaritas, pengurus organisasi perlu meng-himpun orang banyak untuk mewujudkan aksi kolektif.		
3.	Membangkit aksi kolektif:			
	a. Penggunaan simbol-simbol budaya	(1) Pengurus organisasi gerakan (<i>organizers</i>) menggunakan simbol-simbol budaya (pakaian, warna, musik, bahasa, bendera, benda) dalam aksi kolektif tersebut untuk menciptakan identitas kolektif.		
	b. Membangun konsensus dan mobilisasi	(1) Organisasi gerakan menggunakan media (TV, radio, dll) untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam rangka mobilisasi konsensus.		
	c. Mengkonstruksi tindakan kolektif	(1) Organisasi gerakan mampu memilih tema-tema yang dijadikan isu sentral (misal: soal ketidakadilan, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia, dll) yang bisa membangkit tuntutan komunitas sehingga menimbulkan aksi kolektif.		

NO.	KARAKTERISTIK KEKUATAN GERAKAN	DATA YANG DIBUTUHKAN		
		Pernyataan	Jawaban	
			Ya	Tidak
4.	Struktur-struktur pemobilisasi:			
	a. Membangun organisasi yang kuat dan fleksible	(1) Organisasi gerakan merumuskan tujuan-tujuan gerakan dan mensosialisasikan agar mendapat dukungan yang luas dari masyarakat dan cukup flexibel dalam mengadaptasi perubahan.		
	b. Melakukan kampanye dan koalisi	(1) Organisasi gerakan melakukan pertemuan dengan anggotanya maupun dengan kelompok lain/ organisasi lain dan elitnya dan sekaligus merintis koalisi dengan kelompok/ organisasi lainnya.		
	c. Rekrutmen ke dalam gerakan	(1) Organisasi gerakan melakukan rekrutmen anggota baik dari kelompok sendiri maupun organisasi lain untuk tujuan penyebarluasan pesan organisasi gerakan.		
	d. Menghubungkan elit dengan massa	(1) Organisasi gerakan memelihara kontak antara elit dengan massa baik secara formal maupun informal.		

6.5 Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain (Guba, 1996). Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan menyusun kesimpulan yang dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data seperti ini merupakan aktivitas dan cara berpikir, tentang sesuatu, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu jalinan yang linier. Teknik analisis deskriptif interpretatif digunakan untuk menjelaskan makna data sehingga menghasilkan kejelasan dan mudah dipahami oleh orang lain. Teknik analisis komparatif digunakan terutama untuk menganalisis bentuk-bentuk perlawanan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh petani tambak dan nelayan, serta dinamikanya.

Apabila pada rumusan masalah belum terjawab sepenuhnya karena datanya kurang, maka peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melengkapinya dengan mewawancarai lagi nara sumber, dan kelengkapan data sekunder lainnya sampai seluruh rumusan masalah ditemukan jawabannya. Kesimpulan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk temuan-temuan, yang digunakan dalam keperluan diskusi-diskusi untuk membandingkannya dengan penelitian terdahulu.



BAB II

**KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT UJUNG
PANGKAH**

BAB II

KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI

MASYARAKAT UJUNG PANGKAH

1. Karakteristik Masyarakat Pesisir

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat wilayah pesisir bekerja sebagai petani terutama sebagai nelayan dan petani tambak.¹ (Walet (kecamatan Ujung Pangkah dalam Angka Tahun 2004). Wilayah pesisir yang dimaksud adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedang kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Batasan di atas menunjukkan bahwa garis batas nyata wilayah pesisir tidak ada. Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan situasi dan kondisi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai. Sebaliknya yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit. (Supriharyono, 2001:2).

¹ Komposisi masyarakat terdiri dari: 85% nelayan dan petani tambak, 12% sektor jasa, dan 3% peternak burung.

Menurut Rais (1995), wilayah pesisir adalah suatu zone yang kearah darat dibatasi sampai dimana pengaruh laut masih ada, dan kearah laut dimana pengaruh darat masih ada. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan, wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, dimana kearah darat mencakup lahan darat sejauh 15 km dari garis pantai dan kearah laut meliputi perairan laut sejauh 15 km dari garis pantai.

Ditinjau dari ekosistem, wilayah pesisir terdiri dari beberapa ekosistem, seperti ekosistem pantai, ekosistem tambak, ekosistem mangrove (bakau) dan ekosistem pemukiman. Sementara itu mengenai pengertian wilayah pesisir terdapat berbagai batasan, namun penekanannya pada lingkup pengelolaan atau pemanfaatannya.

Wilayah pesisir di daerah tropis, sebagai ekosistem terdapat beberapa macam sub-sistem alami, yang mempunyai potensi ekologis sangat penting terutama dalam menunjang produktivitas sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Menurut perhitungan potensi laut Indonesia sebenarnya dapat menghasilkan tangkapan lestari sekitar 6,0-6,7 juta ton ikan/ tahun. Namun dalam pelaksanaannya kini setiap tahunnya baru bisa memanen sekitar 65-75%-nya saja, atau dengan nilai besaran ekspor ikan sekitar US\$ 2 milyar. Dengan pengembangan sektor perikanan, menurut Program PROPENAS nilai tersebut diharapkan dapat mencapai sekitar US\$ 10 milyar mulai tahun 2003. Karenanya sumbangan sektor perikanan diharapkan dapat meningkat dari posisi saat ini yang hanya sekitar 1,88% GDP. Pemasukan tersebut belum termasuk pemasukan dari sektor lainnya di

wilayah pesisir, seperti minyak dan gas bumi, industri, perhubungan, pelabuhan, pariwisata.

1.1 Ekosistem pesisir

Gambaran kondisi perairan laut dimana lokasi studi ini dilakukan berada banyak dipengaruhi kondisi setempat seperti banyaknya sungai yang bermuara di pantai sepanjang Ujung Pangkah dan Gresik terutama sungai Bengawan Solo, beserta anak-anaknya. Di Ujung Pangkah sendiri tercatat sungai Bengawan Solo memiliki 11 (sebelas) anak sungai meliputi kali Srewehan, Poleng, Turi, Lebakan, Gendruwo, Dadakan, Sumbalan, Pandikan, Kyai Munir, Umum dan Kali Kaji Kusnan dengan muaranya sungai Bengawan Solo.

Di daerah penelitian ini terdapat tempat pengendapan hasil angkutan sedimen dari sungai Bengawan Solo. Menurut teori, bumi dibangun oleh jenis batuan yakni: pertama, batuan beku, batuan yang langsung dari magma; kedua, batuan sedimen (endapan), batuan hasil rombakan; dan ketiga, batuan metamorf, batuan akibat perubahan tekanan dan suhu. Sungai Bengawan Solo, merupakan sungai yang terpanjang di Pulau Jawa, dengan demikian banyak sedimen yang terangkut menyebabkan terjadinya sebuah delta. Sedimen dari sungai-sungai yang keluar dari muara akan terbawa oleh arus ke kiri maupun ke kanan sehingga pantai di sekitar muara akan menjadi dataran yang relatif dangkal berlumpur, dan di sekitarnya banyak ditumbuhi pohon bakau (mangrove). Dari tahun ke tahun sedimen

itu terus bertambah banyak, sehingga delta itu semakin luas, inilah yang oleh masyarakat lokal disebut tanah “oloran”. Tanah oloran tersebut dimiliki oleh pemerintah desa dan juga oleh perorangan. Areal tanah oloran inilah dikembangkan menjadi daerah pertambakan.

Daerah tersebut memiliki potensi ekologis sangat besar, terutama dalam menunjang produktivitas sumber daya perikanan di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan Ujung Pangkah boleh dikatakan “dimanja” oleh alam, karena memiliki sungai Bengawan Solo dengan 11 (sebelas) anak sungainya yang membentuk delta yang luas yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Potensi perikanan pada sektor perikanan paling tidak berasal dari empat ekosistem pesisir, meliputi (1) *estuaria*, (2) hutan bakau (mangrove), (3) padang lamun (*seagrasses*) dan (4) terumbu karang (*coral reefs*).

1.2 *Estuaria*

Pada muara sungai Bengawan Solo terdapatlah *estuaria*. *Estuaria* adalah perairan yang semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas yang tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Dengan kata lain, *estuaria* adalah tempat dimana bertemunya air tawar (ke sebelas anak sungai Bengawan Solo) dan air asin (laut), yang menyebabkan banyak plankton sehingga di tempat inilah menyebabkan ikan berada di wilayah itu. *Estuaria* tidak saja subur akan ikan jenis kerapu, kakap putih, kakap merah, tetapi juga subur akan rajungan.

Produktivitas plankton di perairan *Estuaria* sangat tinggi. Tingginya plankton yang merupakan makanan ikan (termasuk hewan laut komersial lainnya), ini menyebabkan tingginya produktivitas ikan-ikan di daerah pesisir. Akan tetapi, dibalik kesuburan perairan di daerah *estuaria*, karena sedimen juga mampu mengadopsi logam-logam berat, maka tidak menutup kemungkinan di daerah *estuaria* juga terjadi "*pollutant trapped*" atau perangkap bahan pencemar. Apabila terjadi akumulasi konsentrasi bahan pencemar, kondisi semacam ini akan membahayakan lingkungan hidup di daerah *estuaria*. Selain hewan laut komersial tercemar oleh *pollutant* yang berbahaya apabila dikonsumsi, *pollutant* tersebut bisa mengakibatkan migrasi ikan.

Menurut penuturan seorang nelayan setempat, sekaligus ketua nelayan Ujung Pangkah Kulon, Shohibul Hajjah (50), *estuaria* tidak saja kaya akan ikan dan hewan laut komersial lainnya, akan tetapi apabila terjadi hujan dan mengakibatkan banjirnya sungai Bengawan Solo, maka *estuaria* ini yang menyebabkan pertemuan air tawar dan air asin suhunya menjadi hangat, dan ikan-ikan laut akan "menyerang" ke daerah *estuaria* ini, yang menyebabkan ikan-ikan tersebut terperangkap di lingkungan *estuaria*. Pada saat itulah para nelayan keluar semua, untuk menangkap ikan. Panen semacam ini senantiasa terjadi setiap kali sungai Bengawan Solo banjir, dan setiap kali melaut pada saat seperti tersebut di atas yang dijalani kurang dari tiga jam, nelayan dapat menghasilkan ikan laut antara 150 kg hingga 200 kg untuk satu kapal yang diawaki sebanyak tiga atau empat orang nelayan.

1.3 Potensi mangrove

Di sepanjang garis pantai semenanjung, hampir seluruhnya ditutupi oleh vegetasi mangrove dengan ketebalan jalur hijau yang berkisar antara 10-20 meter. Mangrove yang dikenal sebagai hutan bakau, diartikan sebagai komunitas tumbuhan atau hutan yang tahan terhadap kadar garam yang terdapat di daerah pasang-surut dan umumnya tumbuh di daerah tropis.

Seperti ekosistem *estuaria*, hutan mangrove juga merupakan ekosistem pesisir yang mempunyai produksi hayati yang juga tinggi. Tingginya produktivitas tersebut, memungkinkan tumbuh suburnya hewan-hewan pemakannya. Karenanya banyak daerah mangrove yang dimanfaatkan untuk tempat budidaya perikanan. Selain itu daerah mangrove juga dimanfaatkan untuk usaha budidaya ikan, kerang hijau dan kepiting, yang biasanya dilakukan dengan sistem keramba. Budidaya ini dilaporkan mempunyai produksi yang cukup tinggi, misalnya di Thailand produksi kerang hijaunya dapat mencapai 180 ton/ha/thn.

Vegetasi mangrove yang keberadaannya tidak merata dengan berbagai ketebalan, tumbuh dan dapat dijumpai di sepanjang garis pantai, kondisinya saat ini cenderung telah rusak terutama akibat dikonversi menjadi tambak tradisional. Secara ekologi, mangrove mempunyai peranan penting antara lain dalam menjamin kestabilan garis pantai, kestabilan produksi perikanan baik di pantai-laut maupun pertambakan yang ada

didekatnya, sebagai *barrier* atau penyangga bagi kehidupan yang ada di darat maupun di laut, akar-akarnya merupakan perangkap sedimen, memperlambat kecepatan arus, mencegah erosi, tempat pemijahan ikan (*spawning ground*), tempat pengasuhan ikan (*nursery ground*), tempat pembesaran (*rearing ground*) dan tempat mencari makan (*feeding ground*).

1.4 Potensi padang lamun

Padang lamun (*seagrass beds*) juga merupakan salah satu ekosistem yang terletak di daerah pesisir atau perairan laut dangkal. Meskipun tidak merupakan jalur hijau, di sana sini (garis pantai) ditemukan tumbuhan ini. Komunitas lamun yang hidup, merupakan komunitas tumbuhan berbiji tunggal (monokotil). Keunikan dari tumbuhan lamun dan tumbuhan laut lainnya adanya perakaran yang ekstensif. Karena tipe perakaran ini menyebabkan daun-daun tumbuhan lamun menjadi lebat, dan ini besar manfaatnya dalam menopang keproduktivan ekosistem padang lamun.

Selain bermanfaat untuk bidang perikanan, padang lamun diketahui juga mempunyai potensi lain, diantaranya: pertama, *seagrass* mempunyai daya untuk menangkap sedimen, dan menjernihkan air; kedua, *seagrass* merupakan sumber makanan bagi kebanyakan hewan; ketiga, *seagrass* merupakan substrat bagi organisme (phytoplankton) yang menempel; keempat, akar-akar yang ekstensif mampu mengikat sedimen sehingga terhindar dari bahaya erosi.

2. Penggolongan Pekerjaan di Kalangan Petani Tambak dan Nelayan

2.1 Masyarakat petambak.

Pada dasarnya masyarakat petambak dapat digolongkan menjadi lima lapisan. Kelompok tersebut terdiri dari (1) *juragan* atau pemilik tambak, (2) *pendhego* (*pandega*), (3) *penebas* atau pemborong, (4) *perewang* dan (5) *pemburi*. Apabila digambar dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Juragan adalah seseorang yang memiliki sejumlah tambak. Orang semacam inilah yang disebut sebagai pemilik tambak. Karena seorang *juragan* itu memiliki tambak yang cukup luas, maka ada *juragan* yang mengerjakan sendiri tambaknya, ada pula yang tidak mungkin mengerjakannya sendiri, tetapi ia dibantu oleh beberapa orang pembantu yang disebut *pendhego* atau *pandega*. Kebanyakan *juragan* cukup duduk manis di rumah, menerima setoran penghasilan tambak secara harian oleh *pandego*, dan setoran hasil panen tambak.

Pendhego atau *pandega* sebenarnya adalah karyawan dari pemilik tambak atau *juragan*. Pekerjaan *pandega* adalah mengurus tambak, dari

pengurusan tambak, pengisian air tambak, penyebaran bibit, pemeliharaan ikan hingga pemanenan. Penghasilan *pandega* ini diperoleh secara harian, dari hasil tambak berupa berbagai ikan laut dan ikan air payau yang masuk ke tambak seperti jenis udang, ikan cukil (ikan kakap yang kecil), dan jenis kepiting. Hasilnya dibagi 50% untuk *pandega*, 50% untuk pemilik tambak. Sedangkan apabila musim panen ikan tiba, maka hasil panen dibagi sesuai akad perjanjian antara pemilik tambak dan *pandega*. Biasanya sebesar 25% untuk *pandega* dan 75% untuk *juragan*, dengan catatan hasil panen tersebut setelah dikurangi harga bibit dan biaya-biaya lain.

Penebas adalah seseorang atau beberapa orang yang memborong panen ikan pada musim panen. Panen ikan bagi pemilik tambak bisa dipanen sendiri atau ditebas atau diborong oleh orang lain yang disebut *penebas*. Apabila dipanen sendiri itu dilakukan oleh pemilik tambak dibantu oleh *pandeganya* sendiri. Bila panen ikan diborong oleh *penebas*, maka *penebas* ini dibantu oleh beberapa orang sekitar 10 hingga 15 orang untuk memanen yang disebut *perewang*.

Perewang dengan *penebas*, mempunyai hubungan yang bersifat tetap, dalam arti bila *penebas* kemana-mana untuk menebas selalu diikuti "tim" *perewang*. *Perewang* inilah yang mengambil ikan dari lahan tebasan. Bila pengambilan ikan di area tebasan sudah dianggap habis, maka selesai sudah tugas *perewang* ini. Mereka mendapatkan upah berupa sejumlah uang yang diperoleh dari *penebas*.

Setelah pekerjaan *perewang* selesai, maka di belakang *perewang* telah ada sekelompok orang yang disebut *pemburi*. *Pemburi* artinya orang-orang yang ada di belakang (Jw: *mburi* = belakang). Maksudnya orang-orang yang berada di belakang *perewang*. Orang-orang ini pekerjaannya mencari sisa-sisa ikan yang tertinggal di lahan tambak. Ibarat orang makan yang tidak habis, maka sisa-sisanya diambil oleh *pemburi*. Mereka mendapatkan ikan berupa bandeng, hingga udang putih, sampai udang windu. Itu tergantung dari isi tambak yang dipanen. Kadang-kadang terjadi “kerjasama” antara *perewang* dengan *pemburi*. *Perewang* sengaja meninggalkan sisa ikan atau udang di dalam lumpur yang telah diberi tanda, seperti daun atau apa saja yang telah diketahui oleh *pemburi*, kemudian pada saatnya diambil oleh *pemburi*. Untuk itu, *penebas* perlu mencermati agar tidak dirugikan pihak lain.

2.2 Masyarakat nelayan

Penggolongan sosial masyarakat nelayan lebih sederhana bila dibandingkan dengan penggolongan masyarakat petani tambak. Pada dasarnya, penggolongan masyarakat nelayan terdiri dari dua yaitu: pertama, *Juragan*, adalah orang yang memiliki modal berupa perahu, atau beberapa perahu, mesin perahu dan peralatan alat tangkap atau jaring; dan kedua, *perewang* adalah orang bekerja pada juragan untuk menangkap ikan di laut. Orang semacam ini modalnya adalah tenaga kerja yang ia punyai. Disebut juga sebagai nelayan buruh, di berbagai daerah, istilah lokal untuk nelayan

buruh berbeda-beda. Di kalangan masyarakat nelayan Bugis-Makasar, nelayan buruh disebut *Sawi*, di Pesisir Timur Jambi disebut nelayan kelasi; di pantai Utara Jawa Barat disebut *bendhega*, di kalangan nelayan Jawa disebut *pandeg*, di masyarakat nelayan Madura disebut *pandhiga*, di Ujung Pangkah disebut *perewang*.

Kusnadi (2002) membuat penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan berdasarkan tiga sudut pandang: pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring dan perlengkapan lain), masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Dalam masyarakat pertanian, nelayan buruh identik dengan buruh tani. Secara kualitatif di desa nelayan, jumlah nelayan buruh lebih besar dibandingkan dengan nelayan pemilik.

Selanjutnya kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Disebut nelayan besar karena jumlah modal yang diinvestasikan ke dalam usaha perikanan relatif banyak, sedangkan pada nelayan kecil justru sebaliknya. Sementara yang ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih

dibandingkan dengan nelayan tradisional. Masyarakat nelayan lokal membedakan dua macam alat tangkap: bagi nelayan tradisional, alat tangkapnya berupa jaring yang bersifat pasif, tidak bergerak, dibentangkan, sedangkan nelayan modern menggunakan alat tangkap berupa jaring yang bersifat aktif, yang digerakkan oleh mesin berupa seperti kantong dengan mata jaring kecil, contoh: *trawl* (pukat harimau).

2.3 Karakteristik nelayan dan petani tambak dan potensi sumber daya

Menurut Revrison Baswir (1997), usaha nelayan dan petani tambak merupakan bagian usaha kecil dalam kegiatan perekonomian kita. Usaha kecil dalam kegiatannya memiliki ciri-ciri umum keterbelakangan, yaitu: pertama, kegiatannya cenderung tidak formal, dan jarang memiliki rencana usaha; kedua, struktur organisasinya bersifat sederhana; ketiga, jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar; keempat, kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan; kelima, sistem akuntansinya kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memiliki sama sekali; keenam, skala ekonominya terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya; ketujuh, kemampuan pemasaran dan diversifikasi pasarnya cenderung terbatas; dan kedelapan, margin keuntungannya sangat tipis.

Sejalan dengan pemikiran Baswir di atas, adalah Smith (1981) yang menjelaskan bahwa tingkat sosial-ekonomi yang rendah merupakan ciri-umum kehidupan nelayan dimanapun berada. Tingkat kehidupan mereka sedikit di atas pekerja migran atau setaraf dengan petani kecil. Sementara

itu Retno Wahyuni dan Santiasih (1993) menjelaskan, bila dibandingkan secara seksama dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan kecil atau nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin.

Hal semacam itu ditunjukkan oleh Mubyarto (1984:16), ketika mengamati pemukiman penduduk di desa-desa pantai kabupaten Jepara Jawa Tengah. Keluarga nelayan umumnya lebih miskin daripada keluarga petani atau pengrajin. Hal ini sudah dicoba dibuktikan oleh analisa Emerson sebagaimana dikemukakan dalam studi yang disebut di atas :

“Golongan nelayan di daerah kerja PPWP telah benar-benar ketinggalan dibandingkan dengan golongan lain di luar usaha perikanan ataupun dengan golongan nelayan di Propinsi Jawa Tengah pada umumnya”. (Emerson, 1979:13).

Ketiga penulis di atas memiliki pengamatan yang sama tentang tingkat sosial ekonomi nelayan, yakni memiliki tingkat sosial-ekonomi yang rendah. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi nelayan dan petani tambak di Ujung Pangkah. Kesan kemiskinan akan terhapus pada saat kita mengamati pemukiman penduduk di Ujung Pangkah. Meskipun terjadi penurunan penghasilan akhir-akhir ini akibat *overfishing* dan maraknya *mini-trawl* yang beroperasi secara gelap, serta faktor kedekatan yang relative dengan pelabuhan Gresik yang sudah tercemar limbah akibat banyaknya industri yang dibuang ke laut dan sungai-sungai, namun para nelayan (*perewang, beela*) dalam satu bulan masih bisa berpenghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pasca kenaikan BBM, 1 Oktober 2005).

Sejalan dengan tingkat sosial-ekonomi nelayan dan petani tambak di Ujung Pangkah, di bawah ini dikemukakan karakteristik nelayan dan petani tambak, khususnya yang berkaitan tingkat pendidikan, aktivitas ekonomi dan pendapatan penduduk, selama proyek berlangsung dan produksi perikanan laut dan tambak.

Dari berbagai penelitian terungkap, bahwa secara umum ada korelasi positif antara pendapatan dan tingkat pendidikan. Artinya makin tinggi pendidikan seseorang mempunyai kecenderungan makin tinggi pula pendapatannya.

Sungguhpun dari segi pendidikan sebagian besar nelayan tidak tamat SD (tingkat pendidikan relative rendah), faktor pendidikan tidak secara nyata berpengaruh langsung atau berkorelasi positif pada pendapatan mereka. Artinya dengan tingkat pendidikan yang lebih besar dari usaha mereka, karena mobilitas vertikal nelayan terbatas. Hal ini disebabkan karena sebagian besar sarana penangkapan (perahu, mesin dan jaring) yang mereka miliki belum memadai, maka yang diperlukan adalah kesehatan fisik untuk mencari lokasi penangkapan ke tengah laut dimana terdapat banyak ikan, apalagi yang berkualitas ekspor.

Dengan demikian, konsep mengenai adanya korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan pendapatan di atas tidak berlaku bagi sebagian besar nelayan, kecuali kegiatan penangkapan oleh perusahaan yang sudah menggunakan perahu dan alat tangkap yang lebih modern, memang memerlukan tenaga dengan pendidikan yang lebih tinggi untuk mengoperasikan sarana penangkapan tersebut.

Aktivitas ekonomi penduduk pada awal kehadiran perusahaan penambangan minyak yaitu pada tahap konstruksi, yang berupa kegiatan mobilisasi tenaga kerja, diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan penduduk, terutama di lokasi yang dekat dengan kegiatan pembuatan lubang bor, pemasangan pipa, kabel-kabel dan pembangunan fasilitas produksi pengolahan gas.

Di sisi lain, masih pada tahap konstruksi, kegiatan mobilisasi peralatan dan material lewat laut saat pembuatan lubang bor, kegiatan pengeboran dan pembangunan anjungan dapat mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari ikan, mengingat lokasi rencana kegiatan merupakan bagian dari *fishing-ground* nelayan setempat. Dengan demikian kegiatan ini mengganggu aktivitas nelayan dan berakibat menurunkan pendapatan nelayan.

Sementara itu, kegiatan pembangunan *base-camp* pada tahap konstruksi, baik untuk keperluan pembuatan lubang bor dan pembangunan saluran pipa akan memberikan dampak positif kepada penduduk karena memberikan peluang kepada mereka untuk membuka usaha kecil-kecilan berupa warung, kios guna meningkatkan pendapatan keluarganya.

Pada tahap konstruksi, bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah relatif besar, terutama tenaga kerja lokal. Namun proyek pertambangan ini bukan merupakan proyek padat karya, tetapi padat modal dan teknologi, sehingga ketika tahap konstruksi telah selesai dan memasuki tahap operasi,

yang dibutuhkan adalah tenaga trampil dan tenaga terdidik yang memiliki keahlian khusus yang berasal dari luar (non lokal), sehingga proyek ini menimbulkan kecemburuan bagi tenaga lokal. Penduduk setempat yang mayoritas sebagai petani tambak dan nelayan belum memiliki keahlian tersebut. Pada saat terjadi demobilisasi tenaga kerja, terjadi lagi penurunan aktivitas ekonomi masyarakat karena adanya penurunan aktivitas proyek. Sebagai konsekuensinya, pendapatan sebagian penduduk yang sebelumnya meningkat karena adanya proyek menjadi menurun lagi.

Produksi perikanan laut dan tambak

Aktivitas ekonomi bagi penduduk kabupaten Gresik meliputi beberapa sektor yaitu perikanan laut dan tambak (terutama di kecamatan Ujung Pangkah, kecamatan Sidayu dan kecamatan Panceng), pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan industri. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani tersebar pada seluruh kecamatan. Nelayan ada di 8 kecamatan, yaitu kecamatan Manyar, Kebomas, Gresik, Bungah, Sidayu, Panceng, Sangkapura dan Ujung Pangkah. Sedangkan penduduk yang mengusahakan tambak ada di 8 kecamatan, yaitu kecamatan Cerme, Manyar, Kebomas, Duduk Sampeyan, Bungah, Sidayu, Panceng dan Ujung Pangkah. Penduduk yang bekerja sebagai karyawan industri ada di 5 kecamatan, yaitu : kecamatan Manyar, Gresik, Kebomas, Driyorejo dan Menganti.

Usaha penangkapan ikan di laut.

Data produksi perikanan dari hasil usaha penangkapan di laut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Produksi Hasil Penangkapan di Laut (dalam Ton)
Tahun 1990-2000

No.	Tahun	Kec. Sidayu	Kec. Ujung Pangkah	Kec. Panceng
1	1990	1.010,30	4.311,30	4.542,00
2	1991	682,90	3.061,50	3.901,50
3	1992	1.012,30	4.264,20	4.449,50
4	1993	1.054,20	4.312,40	4.497,90
5	1994	1.008,20	4.250,82	4.898,50
6	1995	1.106,15	4.355,84	4.903,20
7	1996	1.108,30	4.868,40	3.820,14
8	1997	1.112,42	4.872,52	3.824,26
9	1998	1.113,82	4.874,92	3.826,90
10	1999	1.073,02	4.973,44	3.330,34
11	2000	1.134,02	5.034,44	3.391,34

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik (1990-2000).

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa produksi perikanan hasil usaha penangkapan selama kurun waktu 10 tahun mengalami fluktuasi penurunan dan peningkatan. Pada tahun 1991 produksi penangkapan di tiga kecamatan tersebut di atas mengalami penurunan karena data yang tercatat hanya sampai akhir triwulan III, jadi data tersebut bukanlah merupakan data setahun, melainkan data selama 9 bulan. Namun dari tiga kecamatan penghasil ikan laut terbesar di kabupaten Gresik, Ujung Pangkah berada

pada posisi teratas, hal ini disebabkan dimanja oleh alam, yang tidak dimiliki oleh kecamatan lain, bahkan di pantai-pantai seluruh Jawa Timur, karena Ujung Pangkah memiliki muara, dengan 11 (sebelas) anak sungai yang membentuk delta yang kaya akan sumber daya ikan, dimana produksinya tidak pernah menurun sejak tahun 1995.

Pada dasarnya penyebab terjadinya penurunan produksi penangkapan di tiga kecamatan tersebut di atas adalah sudah terjadi pembuangan limbah industri yang di buang ke laut langsung maupun ke sungai-sungai, yang menyebabkan migrasi ikan-ikan. Selain itu, penurunan produksi juga disebabkan di daerah pantai atau pesisir sudah terjadi padat tangkap (*over fishing*), daerah penangkapan (*fishing ground*) yang semakin jauh ke tengah laut, di sisi lain kemampuan nelayan untuk menuju *fishing-ground* tersebut tidak diimbangi oleh kekuatan kapal dan mesin yang dimiliki nelayan, dimana kondisi kapalnya dengan tonase kecil.

Usaha budidaya tambak dan kolam

Pada tahun 1991, produksi perikanan hasil budidaya di tiga kecamatan tersebut mengalami penurunan, karena data yang tercatat hanya sampai akhir triwulan III, jadi data tersebut bukanlah merupakan data setahun melainkan hanya data selama sembilan bulan.

Di bawah ini disajikan data produksi perikanan dari hasil usaha budidaya tambak dan kolam dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Produksi Ikan Hasil Budidaya Tambak (dalam Ton)
Tahun 1990-2000

No.	Tahun	Kec. Sidayu			Kec. Ujung Pangkah			Kec. Panceng		
		Tambak Payau	Tambak Tawar	Kolam	Tambak Payau	Tambak Tawar	Kolam	Tambak Payau	Tambak Tawar	Kolam
1	1990	3.145,10	17,40	13,10	4.077,30	140,60	17,90	-		
2	1991	2.198,20	14,30	11,30	3.071,80	109,40	15,40	-		
3	1992	3.123,60	21,30	12,60	4.066,10	-	15,60	-		
4	1993	3.200,40	73,70	14,00	4.168,10	-	17,30	-		
5	1994	3.448,60	22,13	4,55	4.380,05	-	2,10	-		
6	1995	3.516,90	20,40	3,55	4.525,56	-	3,25	-		
7	1996	3.226,60	15,40	8,55	4.751,83	-	5,60	-		
8	1997	3.268,75	47,52	7,95	4.794,03	-	5,20	-		
9	1998	3.400,07	71,16	8,00	4.931,48	-	5,36	-		
10	1999	3.401,18	87,27	8,10	4.973,51	-	6,70	4,90	1,00	0,20
11	2000	2.476,18	85,26	8,13	5.142,47	1.135,61	6,81	59,40	1,26	0,04

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik (1990-2000).

Produksi perikanan hasil usaha budidaya tambak dan kolam payau di kecamatan Sidayu mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2000. Hal ini disebabkan gagal panennya tambak udang yang disebabkan karena serangan penyakit "white spot".

Di kecamatan Ujung Pangkah, produksi perikanan hasil usaha budidaya tambak payau tidak pernah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan petani tambak di kecamatan Ujung Pangkah melakukan diversifikasi biota dibudidayakan (tidak hanya udang windu tetapi udang putih dan ikan bandeng/ polikultur). Jadi meskipun ada serangan penyakit "white spot" terhadap udang windu akan tetapi udang putih dan ikan bandengnya masih bisa dipanen.

Berbeda dengan Ujung Pangkah dan kecamatan Sidayu, di kecamatan Panceng usaha budidaya tambak payau baru dimulai tahun 1999.

Usaha budidaya tambak payau disini tidak banyak mengalami hambatan disamping karena lahannya masih baru petaninyapun langsung menerapkan sistem budidaya polikultur. Produksi budidaya tambak tawar dan kolam sering mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun karena adanya perubahan fungsi lahan dari tambak tawar dan kolam menjadi lahan tambak payau dan sebaliknya.



BAB III
KEHADIRAN PERUSAHAAN
MULTINASIONAL DI UJUNG
PANGKAH

BAB III
KEHADIRAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL
DI UJUNG PANGKAH

1. Perusahaan Multinasional

Globalisasi ekonomi dunia telah dan akan terus mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hubungan-hubungan ekonomi domestik maupun internasional. Pertumbuhan perdagangan internasional, arus keuangan internasional yang masif, dan kegiatan perusahaan multinasional yang semakin mengikat ekonomi-ekonomi nasional satu sama lain, kesemuanya menjadikan globalisasi sebuah ciri penting, yang semakin kontroversial dalam ekonomi dunia. Meskipun beberapa ekonom terkemuka percaya bahwa keuangan internasional tanpa regulasi menampakkan sebuah ancaman serius terhadap ekonomi dunia, hampir seluruh ekonom dan pendukung pasar bebas percaya bahwa globalisasi menjanjikan adanya dunia dengan kesejahteraan dan kerja sama internasional yang semakin meningkat; mereka berpendapat bahwa tiada halangan apapun yang diperbolehkan menghambat arus bebas, jasa dan modal. (Gilpin, 2001:237).

Para pengkritik globalisasi, di sisi lain, memandang sebuah dunia yang berbeda mereka takut bahwa meningkatnya perdagangan, investasi asing, dan arus keuangan akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi negatif yang kuat bagi masyarakat mereka. Banyak pihak membayangkan

kejayaan sistem kapitalis yang kejam bercirikan eksploitasi, dominasi dan bertumbuhnya ketidakmerataan di dalam dan di antara masyarakat-masyarakat nasional. (Gilpin, 2001:237). Perusahaan multinasional asing yang merupakan ujung tombak implementasi globalisasi dianggap menjarah dan mengurus sumber daya alam nasional dan secara umum merusak ekonomi nasional.

Bagi yang pro globalisasi, mengatakan bahwa perusahaan multinasional makin penting peranannya terhadap perkembangan ekonomi nasional suatu negara. Perusahaan multinasional asing memegang peranan besar dalam produksi dan membuka lapangan pekerjaan baru di negara-negara maju. Dari data-data komparatif terakhir yang dapat dikumpulkan sampai dengan tahun 1996, perusahaan asing menghasilkan 15.8% dari total fabrikasi yang dihasilkan di Amerika (lihat tabel 3.1), atau naik dari 13.2% pada tahun 1989 dan dari 8.8% pada tahun 1985. Perusahaan asing menciptakan 11.4% lapangan pekerjaan fabrikasi, naik dari 10.8% pada tahun 1989. Inggris, Swedia dan Kanada menunjukkan kecenderungan yang sama. Yang paling menonjol di Irlandia, perusahaan asing menyumbang 66% dari total produksi dan 47% lapangan kerja.

Akan tetapi perusahaan multinasional asing tidak selalu dominan di semua negara, di Jerman dan Prancis misalnya mereka memberikan kontribusi yang hampir sama dengan perusahaan domestik nasional. Di Jepang, kekuatan ekonomi kedua di dunia, perusahaan asing masih sangat sedikit dan mereka hanya mempekerjakan 0.8% dari jumlah total lapangan

kerja di Jepang. Burukkah bila perusahaan asing memegang peranan penting dalam ekonomi nasional? Kenyataannya tidak demikian.

1) Bukti pertama, dalam soal gaji, perusahaan asing membayar pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional. Di Amerika misalnya, perusahaan asing membayar 4% lebih tinggi pada tahun 1989 dan 6% lebih tinggi pada tahun 1996 dibandingkan perusahaan domestik (lihat Tabel 3.1).

2) Bukti kedua, perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis. Di Amerika, jumlah lapangan kerja yang diciptakan perusahaan asing mencapai 1.4% per tahun dari 1989 sampai dengan 1996, bandingkan dengan 0.8% yang diciptakan oleh perusahaan domestik. Di Inggris dan Perancis, lapangan kerja di perusahaan asing naik 1.7% per tahun, sebaliknya lapangan kerja di perusahaan domestik malah menyusut 2.7%. Hanya di Jerman dan Belanda, perusahaan asing tidak banyak beda dengan perusahaan domestik.

3) Bukti ketiga, perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan, pelatihan dan bidang penelitian (*research and development*) di negara dimana mereka menanamkan investasinya. Jumlahnya mencapai 12% dari total pengeluaran *research and development* di Amerika, di Perancis 19% dan mencapai 40% di Inggris.

4) Bukti keempat, perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik. Tahun 1996, perusahaan asing di Irlandia mengekspor 89% dari produksinya, bandingkan dengan 34%

yang dilakukan perusahaan domestik. Di Belanda perbandingannya adalah 64% dan 37%, Perancis 35.2% dan 33.6%, dan Jepang 13.1% dan 10.6%. Tapi keadaannya terbalik di Amerika, perusahaan domestik nasional mengekspor 15.3% dari total produksi mereka, sedangkan asing hanya 10.7%. Negara-negara miskin menerima berkah lebih besar dari adanya investasi asing. Ambil contoh negara Turki, gaji pekerja perusahaan asing adalah 124% di atas rata-rata domestik nasional. Jumlah pekerja juga meningkat 11.5% per tahun dibandingkan dengan 0.6% rata-rata domestik.

Walaupun data-data di Indonesia tidak tersedia, semua tahu bahwa kontribusi modal asing dan keberadaan perusahaan asing di Indonesia terhadap perkembangan ekonomi Indonesia sangat besar, bahkan pada masa krisis moneterpun. Ambil contoh di bidang industri migas. Sejauh ini perusahaan asing hanya diberikan kesempatan untuk investasi langsung di industri hulu. Hasilnya sangat nyata, produksi minyak dan gas bumi dari lapangan yang dikelola langsung oleh perusahaan asing atau yang berbentuk *joint venture* terus meningkat, sedangkan produksi minyak perusahaan nasional Pertamina sendiri malah menurun. Jumlah pegawai perusahaan asing dan perusahaan jasa penunjang asing terus meningkat. Gaji dan fasilitas yang diberikan juga lebih baik dibandingkan gaji rata-rata pekerja perusahaan nasional. Beberapa perusahaan asing industri migas bahkan menjadikan Indonesia sebagai kantor pusat dan mulai meningkatkan investasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian, contoh

perusahaan-perusahaan asing yang giat melakukannya adalah kelompok usaha asing multinasional Unocal, Caltex dan Schlumberger.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perusahaan asing disamping menanam modal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, secara tidak langsung mereka juga membawa pengetahuan manajemen dan etika bisnis yang lebih profesional. Tuduhan bahwa globalisasi dan masuknya perusahaan multinasional asing merusak lingkungan juga tidak selalu benar. Ambil contoh pengelolaan hutan Indonesia yang selama 34 tahun dilindungi pemerintah dan hak kelola sumber daya hutan hanya diberikan kepada perusahaan domestik, ternyata malah merusak hutan dan lingkungan karena berbagai alasan, misalnya manajemen yang tidak profesional dan kasus-kasus Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan. Di lain pihak industri migas yang sudah lama mengalami 'globalisasi' malah tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berarti.

Bagi yang anti globalisasi, menjelaskan bahwa perusahaan multinasional (MNC) merupakan pemain utama dalam ekonomi dunia yang semakin mengglobal ini. Perusahaan multinasional beroperasi di banyak negara dipicu oleh berkurangnya hambatan komunikasi dan jarak, serta semakin mudahnya mobilitas barang melintasi batas negara.

Dengan *go internasional*, perusahaan multinasional juga mendapat keuntungan lain, menghindari pajak tinggi di negara asalnya hingga

menghindari regulasi lingkungan yang ketat di negara asal. Pendeknya, perusahaan yang *go internasional* tidak lepas dari hukum ekonomi yang menyatakan bahwa produsen senantiasa mencari peluang semaksimal mungkin untuk efisiensi produksi, yang berimbas pada naiknya keuntungan perusahaan.

Operasi perusahaan multinasional semakin menggurita, didukung oleh World Trade Organization (WTO) yang terbentuk di Marrakesh tahun 1994. World Trade Organization inilah yang sering dituduh oleh para aktivis anti globalisasi sebagai penyokong kepentingan dagang negara-negara maju, dan mem-*back up* perusahaan multinasional dalam operasinya di seluruh dunia. Aktivis anti globalisasi menuding World Trade Organization sebagai penyebab makin timpangnya kehidupan ekonomi Utara-Selatan. Sementara, aktivis lingkungan hidup mencurigai bahwa kepentingan dagang perusahaan multinasional, yang disponsori dan dibela oleh World Trade Organization, selalu diutamakan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. (Gilpin, 2001:227).

Globalisasi yang digendong oleh neoliberalisme inilah yang sering dikecam oleh kelompok-kelompok pemerhati lingkungan, yang khawatir bahwa operasi perusahaan multinasional bakal merugikan lingkungan hidup. Contoh kasusnya cukup banyak dan bervariasi, mulai dari *genetically modified organism* (GMO) seperti kasus *transgenic cotton* yang melibatkan perusahaan multinasional Monsanto Group di Bulukumba,

Sulawesi Selatan hingga penebangan hutan illegal di pulau Kalimantan dan Sumatra. Kasus yang menarik perhatian pers dan masyarakat tentu saja kasus operasi pertambangan, yang memang dari skala kerusakan lingkungannya cukup dahsyat.

Kasus penambangan tembaga PT Freeport Indonesia di Papua dan penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya di Buyat Bay, Sulawesi Utara, merupakan kasus-kasus yang terkenal dan paling sering disodorkan oleh lembaga swadaya masyarakat untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya operasi pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

PT Freeport Indonesia adalah anak perusahaan multinasional berbasis di New Orleans USA yang bernama Freeport McMoran Copper & Gold, sementara PT New Minahasa Raya antara lain dimiliki oleh Newmont Mining Corporation yang juga berbasis di Amerika. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang paling gencar mengancam praktek PT Freeport di Papua (Irian Jaya), yang telah beroperasi sejak tahun 1960, yang disebut WALHI telah sangat merusak lingkungan hidup di Papua.

Menurut WALHI, dari tahun 1995 hingga tahun 2000 saja, PT Freeport telah memproduksi 420 juta ton sampah industri, yang 95 persennya dibuang di Lembah Wanagon di wilayah Grasberg, Papua. Mengingat skalanya yang luar biasa itu, tidak heran jika aktivitas PT

Freeport telah mengakibatkan kerusakan lingkungan parah di sungai-sungai di wilayah Papua dan terutama danau Wanagon, karena bagian dari sampah industri tembaga dan emas itu ada juga yang dibuang di sungai-sungai sekitar dan danau Wanagon. (The Jakarta Post, 2001:2).

Yang paling mengerikan ialah kejadian bocornya tempat penampungan sampah industri PT Freeport di danau Wanagon. Banjir sampah tak terelakkan lagi, dan telah mengakibatkan empat orang pekerja Freeport hilang dan diasumsikan sudah meninggal. Belum kerusakan lingkungan yang parah akibat kebocoran ini, termasuk banjir yang melanda desa Banti, sekitar 16 kilometer dari danau Wanagon. PT Freeport sendiri membela diri bahwa bocor dan tumpahnya sampah dari tempat pembuangan sampah industri itu diakibatkan oleh lebatnya hujan yang terjadi sebelum 4 Mei 2001 itu. PT Freeport menyatakan bahwa beberapa hari sebelum peristiwa ini, volume hujan turun mencapai 40 mm per hari, atau lima kali dari jumlah volume normal. (The Jakarta Post, 2001:1).

WALHI membawa kasus di atas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan akhirnya Pengadilan Negeri memutuskan pada bulan Agustus tahun 2001 bahwa PT Freeport bersalah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, karena menyembunyikan dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang kejadian di atas. Tidak ada sanksi fatal yang dijatuhkan ke PT

Freeport, kecuali bahwa PT Freeport diminta untuk memperhatikan faktor-faktor lingkungan, seperti yang dianjurkan Bapedal, dalam aktivitas operasi penambangan emas dan tembaga. Secara umum, menurut Chalid Muhammad dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), operasi pertambangan menyumbang 10 persen kerusakan hutan di Indonesia. (*The Jakarta Post*, 2002:2).

Tidak hanya dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, tapi penelitian empiris juga menunjukkan bahwa sebenarnya perhatian perusahaan multinasional terhadap persoalan lingkungan cukup minim. Pusat Antar Universitas—Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, yang mengadakan survei terhadap 90 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dan bergerak di berbagai bidang dari pertambangan hingga elektronik, menemukan bahwa mayoritas perusahaan multinasional hanya memikirkan keuntungan bisnis dan cenderung mengabaikan persoalan lingkungan hidup dalam operasi mereka. (*Majalah Pilar Bisnis*, 2001:62-72). Survei ini menetapkan 18 unsur strategi koefisiensi kebijakan perusahaan terhadap masalah lingkungan, dan mayoritas perusahaan menyatakan bahwa tekanan kebijakan mereka terletak pada penghematan konsumsi energi. Sementara, mayoritas perusahaan paling tidak menaruh perhatian pada pembelian lagi kemasan.

**Prioritas Perhatian terhadap Lingkungan Hidup
yang dilakukan Perusahaan Multinasional**

Prioritas ke ...	Unsur Koefisiensi
1	Penghematan konsumsi energi
2	Pemilihan proses manufacturing meminimumkan limbah
3	Pengembangan produk tidak membahayakan konsumen
4	Pengembangan citra perusahaan melestarikan lingkungan
5	Penggunaan bahan baku dan komponen bisa didaur ulang
6	Pembangunan fasilitas pengolahan limbah
7	Penulisan peduli lingkungan pada misi perusahaan
8	Pembangunan pabrik atau bangunan berwawasan lingkungan
9	Perancangan pabrik dengan memperhatikan aspek lingkungan
10	Pelaksanaan program keselamatan kerja
11	Pengepakan dengan bungkus seminim mungkin
12	Pemeliharaan kesehatan lingkungan kerja
13	Pengaitan isu lingkungan dengan strategi bisnis
14	Pendirian pabrik dengan memperhatikan persyaratan AMDAL
15	Penghematan sumber daya dalam proses produksi
16	Penggunaan teknologi yang bersahabat dengan lingkungan
17	Pengambilalihan tanggung jawab atas sampah
18	Pembelian kembali kemasan

Sumber: PAU — Studi Ekonomi UGM.

Dari survei tersebut di atas, tampak bahwa perusahaan cenderung menghemat ongkos produksi, lewat penghematan energi. Penghematan energi dinilai oleh tim survei sebagai tidak terlalu signifikan untuk menggambarkan perhatian perusahaan multinasional itu terhadap lingkungan. Perhatian pada penghematan energi ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional hanya memikirkan aspek bisnis semata yaitu cara mengurangi ongkos produksi.

Keinginan tidak mau rugi dari perusahaan multinasional juga tampak dari ditematkannya unsur "penggunaan bahan baku dan komponen yang bisa didaur ulang" di tempat yang ke-5. Isu-isu yang sentral dalam lingkungan hidup, seperti penggunaan teknologi yang bersahabat dengan lingkungan dan pendirian pabrik dengan memperhatikan persyaratan analisis dampak lingkungan (AMDAL) justru menempati urutan paling buncit, yaitu 16 dan 14. (Suryana, 2003:137).

Yang mengkhawatirkan, perusahaan justru mementingkan persoalan *public relations* semata, dibanding dengan fakta di lapangan. Hal ini tergambar betapa perusahaan multinasional menempatkan pengembangan citra perusahaan melestarikan lingkungan dalam urutan yang keempat. Penonjolan *public relations* itu berbahaya, karena perusahaan multinasional menjadi tak segan-segan untuk menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya di lapangan, seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus PT Freeport. (Suryana, 2003).

Dari uraian di atas, terdapat beberapa hal menarik yang ingin saya teliti, khususnya yang bersangkutan dengan penetrasi perusahaan multinasional ke dalam komunitas nelayan tradisional, yang mengakibatkan perlawanan masyarakat lokal terhadap perusahaan multinasional yang diduga mengancam pola ekonomi subsistensi nelayan tradisional.

Selain itu, pada tanggal 9 Oktober 2003, terjadi kecelakaan fatal di wilayah pembangunan Freeport/ Rio Tinto. Bagian dinding selatan lubang

galian tambang perusahaan ini runtuh sekitar 2,3 ton batuan dan lumpur menggelontor menerjang para pekerja tambang dan mesin-mesin berat. Menurut Freeport MacMoran, operator pertambangan asal Amerika Serikat itu, terdapat dua pekerja yang tewas, lima luka-luka dan enam lainnya masih belum ditemukan. Kemungkinan besar mereka juga telah tewas.

Perlu dicatat, bahwa Grasberg di Papua Barat adalah produser utama global, tambang itu memiliki cadangan emas terbesar di dunia, dan juga satu diantara tiga produser tembaga terbesar di dunia. Lubang galian itu sendiri awalnya adalah sebuah puncak gunung yang menyadi penyangga batuan Papua Barat. Sekarang ini, ia telah dieksploitasi dengan tingkat penggalian 200.000 ton setiap harinya. Setelah emas dan tembaga diambil, maka sampah buangan ditimbun di sungai-sungai setempat, untuk kemudian dialirkan menuju “tempat pembuangan” di dataran rendah di antara lembah-lembah pegunungan dan laut Arafura. Selama enam tahun terakhir, telah terdapat sedikitnya empat bencana besar yang mana tiga diantaranya telah menelan korban.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) lingkungan hidup Indonesia, menuntut agar pemerintah menghentikan aktivitas-aktivitas perusahaan di wilayah pertambangan. Menurut Direktur WALHI, Longgena Ginting, “Peristiwa itu menjadi bukti bahwa Freeport tidak memiliki kompetensi untuk mengurus produksi pertambangan skala tinggi. Pemerintah harus

mengeluarkan aturan untuk mengurangi kapasitas produksi Freeport.” WALHI juga mengatakan bahwa Freeport sesungguhnya menyadari resiko dari operasi mereka di wilayah curah hujan tinggi dan rawan gempa, tapi hal itu tidak menghentikan langkah perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka “demi nafsu mengejar keuntungan” WALHI meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat menekan pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap semua kontrak penambangan dan memperbaiki sistem pemberian lisensi “yang sampai sekarang telah memberikan hak mutlak kepada perusahaan pertambangan atas kerugian masyarakat”. (Siaran Pers WALHI, 2003).

Freeport mengklaim bahwa mereka memiliki riwayat keamanan dan kesehatan yang baik di wilayah pertambangan. Tetapi bencana pada tanggal 9 Oktober 2003 memberikan gambaran sebaliknya seperti juga kasus-kasus kecelakaan lainnya:

- Pada bulan Juni 1998, surat kabar Indonesia melaporkan bahwa sekitar 20 kaki (sekitar 6 meter) gelombang air limbah dikeluarkan dari danau Wanagon membanjiri desa Waa.
- Pada tahun 1999 terjadi limpahan limbah, tapi tak ada kecelakaan yang dilaporkan.
- Pada bulan Juli 1999, Organisasi Non Pemerintah setempat melaporkan bahwa dua orang pekerja Freeport tewas akibat serangkaian banjir dan longsor dekat kota tambang di Tembagapura.

- Laporan tahun 1999 oleh organisasi lingkungan di Jayapura YALI dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menunjukkan bahwa lima penduduk Papua tewas akibat racun tembaga setelah memakan kerang-kerangan (*mollusc*) dan makhluk hidup di sungai yang terpengaruh pembuangan limbah Freeport.
- Pada bulan Mei 2000, empat pekerja kontrak tewas ketika beban kelebihan limbah batuan dari tambang runtuh menimbun danau Wanagon, yang mengakibatkan munculnya gelombang air, lumpur dan batu-baru ke desa-desa dibawahnya.
- Pada bulan April 2001, WALHI melaporkan bahwa pembuangan limbah dari tambang Freeport/ Rio Tinto telah menyebabkan polusi terhadap 35.820 hektar lahan di wilayah muara sungai dari operasi tambang, dan sekitar 84.158 hektar wilayah lepas laut. Polusi juga mencapai wilayah Taman Nasional Lorentz (lihat DTE 49). Polusi itu menyebabkan rusaknya sumber daya sungai dan hutan, serta menghancurkan hidup komunitas adat Amungme dan Kamoro yang tinggal di muara sungai. (DTE, 1998; DTE, 2002).

2. Tujuan Produksi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Gas Lapangan

Amerada Hess adalah salah satu perusahaan minyak dan gas bumi yang berjalan sejak 80 tahun yang lalu, dan beroperasi di 14 negara di dunia termasuk di Asia Tenggara (Malaysia, Thailand dan Indonesia). Pertama

kali beroperasi sejak September 1997, di Sumatera Selatan. Kini Amerada Hess telah memiliki 6 blok yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kontraktor Production Sharing (KPS) Amerada Hess (Indonesia-Pangkajene) Ltd, selanjutnya disebut AHIPL telah bekerja sama dengan beberapa rekanan Kontraktor Production Sharing lainnya, dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :

AHIPL (operator)	: 66%
Gulf Resources (Pangkajene)	: 22%
Dana Petroleum (Indonesia)	: 12%

telah merencanakan untuk mengembangkan lapangan gas Ujung Pangkah, Blok Pangkah Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur.

Produksi gas dari lapangan ini adalah 100 juta kaki kubik per hari (100 MMSCFD : *Million Standard Cubic Feet per Day*) yang akan dialirkan ke Gresik melalui pipa bawah laut sepanjang 37 km dan pipa darat sepanjang 5 km. Lokasinya terletak di daerah lepas pantai Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Pemrakarsanya adalah AHIPL dengan Pertamina, dengan jenis produksi Gas Alam. Lama produksi sejak tahun 2004/2005 sampai dengan tahun 2025.

Pengembangan lapangan ini menjadi proyek utama dari AHIPL untuk memenuhi kebutuhan suplai gas di Jawa Timur. Produksi rata-rata (*plateau*) sebagaimana ditulis di atas (10 mmscf per hari) dengan persiapan pengembangan antara 18-24 bulan sejak penandatanganan perjanjian jual beli-gas. Produksi *plateau* diperkirakan akan berjalan selama tujuh tahun.

Pertamina telah mengindikasikan bahwa tambahan suplai gas ini adalah sangat dibutuhkan di Jawa Timur untuk mengatasi kekurangan gas pada saat ini.

Kegiatan pengembangan lapangan ini meliputi dua lokasi: (1) Untuk pengembangan Lapangan Gas dilakukan di perairan Timur Laut Ujung Pangkah berhadapan dengan muara Bengawan Solo, di wilayah Kecamatan Ujung Pangkah, dan (2) untuk pengembangan Fasilitas Pengelolaan Gas dilakukan di dua lokasi, yaitu: di kecamatan Manyar dan di kecamatan Gresik (dekat PLN).

Pengembangan Lapangan Gas Ujung Pangkah meliputi kegiatan pembangunan fasilitas 3 anjungan tapak sumur gas, pembangunan fasilitas produksi dan pengolahan gas, pemasangan pipa penyalur gas di laut dan di darat, serta kegiatan eksploitasi dan pengolahan gas. Disamping fasilitas utama untuk pemanfaatan gas bumi tersebut, didalam rencana pengembangan lapangan Ujung Pangkah akan dibangun fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti perumahan dan perkantoran untuk menunjang kegiatan pada saat produksi.

Tujuan utama dan produksi dan pemanfaatan sumber daya alam Gas Lapangan Ujung Pangkah adalah untuk memenuhi suplai gas di Jawa Timur yang saat ini sudah mulai kekurangan sumber energi tersebut. Singkat kata, pentingnya memproduksi cadangan energi di wilayah Ujung Pangkah disebabkan: pertama kandungan cadangan energi sudah positif (ada

peluang); kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (dengan asumsi tidak terjadi pencemaran); ketiga,antisipasi kekurangan pasokan gas untuk pembangkit listrik Jawa Timur disebabkan pasokan yang ada berkurang dan untuk tambahan kebutuhan listrik.

3. Program Pengembangan Masyarakat

Salah satu tujuan memproduksi sumber daya alam Gas Lapangan Ujung Pangkah adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Cara yang dilakukan oleh pihak industri migas adalah dengan membuat program pengembangan masyarakat (*Community Development*) serta melaksanakannya.

Program Pengembangan Masyarakat dimaksudkan untuk mencegah terciptanya kesenjangan sosial ekonomi, serta mencegah terjadinya benturan nilai budaya antara masyarakat industri migas dengan masyarakat setempat. Selain itu, pelaksanaan program pengembangan masyarakat atau *Community Development (CD)* untuk menciptakan motivasi kepada masyarakat untuk secara tulus mendukung kelancaran operasi perusahaan.

Pada dasarnya *Community Development* membantu proses peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lain yang berkepentingan (*stake holder*) agar tercipta hubungan yang harmonis. Selain itu *Community Development* mencegah terjadinya benturan-benturan

nilai budaya lokal dan kesenjangan sosial ekonomi antara usaha migas dengan masyarakat setempat yang terkena dampak.

Tujuan *Community Development* adalah mendukung kelancaran kegiatan perusahaan dan membantu program pemerintah dalam meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pola kemitraan. Selain itu *Community Development* bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi rakyat secara mandiri di wilayah operasi perusahaan dengan mendayagunakan potensi daerah secara berkesinambungan.

Relasi perusahaan dengan masyarakat dalam konteks ideal yang semestinya diterapkan di Indonesia, termasuk Amerada Hess di Ujung Pangkah, menjadikan masyarakat sekitar sebagai penyangga kegiatan usaha berkelanjutan, dengan memerhatikan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Ini merupakan bagian tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang perwujudannya antara lain melalui program pengembangan masyarakat (*community development / CD*).

Dalam kenyataannya, Amerada Hess (termasuk perusahaan terdahulu yang mengundurkan diri, Premiere Oil (Inggris) sudah melakukan program *Community Development*, meskipun besaran dana tidak diketahui.¹

¹ PT Freeport Indonesia mencoba "membeli" dukungan komunitas lokal dengan memberikan 1% keuntungan mereka untuk pengembangan komunitas. Pada bulan Juni perusahaan itu mengumumkan bahwa dana pengembangan masyarakat untuk tahun 2004 mencapai sekitar US\$ 18,3 juta.

(Laode Ida, dalam Kompas, 2002: 4-7). Namun barangkali program memerlukan semacam redesign, dengan pendekatan lebih bisa memastikan partisipasi masyarakat dalam menentukan aneka pilihan program berikut pendekatannya, seraya membangun kesadaran akan rasa memiliki (*sense of belonging*) atas Amerada Hess di Ujung Pangkah. Artinya, program-program yang dikelola melalui *Community Development* harus secara aktif memerankan fungsi komunikasi atau dialogis antara perusahaan dan masyarakat kearah terciptanya rasa memiliki dalam arti yang sesungguhnya. Masyarakat lokal pun akan merasakan dirinya dihargai oleh pihak perusahaan.

Sementara itu, prioritas pelaksanaan program *Community Development* di Ujung Pangkah, prioritas pertama ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan operasi perusahaan. Khususnya dalam hal ini bagi masyarakat di tiga desa, yakni desa Pangkah Kulon, desa Pangkah Wetan, dan desa Banyu Urip. Prioritas kedua diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat yang terkena dampak tidak langsung kegiatan operasi perusahaan.

Pada dasarnya, program *Community Development* harus menciptakan perubahan sosial ekonomi yang berarti bagi masyarakat lokal serta sebagai upaya mengatasi dampak dan kerawanan sosial ekonomi dan budaya masyarakat terhadap kegiatan operasi migas di Ujung Pangkah. Hal ini mengingat komunitas orang-orang yang bekerja di industri perminyakan adalah pendatang, yang memiliki kebudayaan yang berbeda

dengan masyarakat lokal yang memeluk agama Islam yang taat. Pendetang seharusnya memahami budaya lokal masyarakat setempat, agar tidak terjadi benturan-benturan budaya yang bisa mengakibatkan terhambatnya kelancaran operasi perusahaan.

Dalam kenyataannya, telah terjadi benturan budaya lokal dengan budaya pendatang di Ujung Pangkah. Pada bulan puasa sedang berjalan, dimana masyarakat Ujung Pangkah sedang menjalankan ibadah puasa, sering dijumpai orang-orang yang bekerja di industri migas, merokok di tempat-tempat umum, hingga sampai minum-minuman keras. Menurut penuturan Ilham (32) kejadian semacam itu dianggap melukai hati dan perasaan orang-orang lokal, yang mayoritas memeluk agama Islam. Bahkan kelompok pendatang tersebut sempat menyelenggarakan Natalan, yang tidak disukai oleh masyarakat lokal.

Sudah sewajarnya apabila pihak perusahaan melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intens terhadap masyarakat sebagai tanggung jawab sosial, tidak sekedar memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat lokal seperti pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal, akan tetapi dengan membuka forum-forum dialogis agar terciptanya kelancaran operasi perusahaan, dan menjadikan masyarakat sekitar sebagai penyangga kegiatan usaha berkelanjutan.

Tanggung jawab sosial perusahaan yang perwujudannya melalui program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan penambangan migas di Ujung Pangkah sebagai berikut:

(1) Sektor ekonomi: membantu Koperasi dan usaha kecil dan membantu nelayan. Amerada Hess pernah menyelenggarakan pasar murah dengan menjual sembako murah pada tanggal 11 Desember 2001, yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Bagi yang tidak setuju dengan kegiatan proyek penambangan, hal tersebut dianggap dilakukan untuk mengambil hati rakyat agar rakyat/ masyarakat mau menerima kehadiran proyek dan tidak melakukan perlawanan. Bagi yang setuju dengan kegiatan proyek, pasar murah itu disambut dengan baik.

(2) Sektor pendidikan: Amerada Hess memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren. Bantuan berupa beasiswa, perbaikan dan pengadaan sarana sekolah, dan pondok pesantren. Beberapa pondok pesantren menerima bantuan komputer dari perusahaan. Bagi yang setuju dengan kegiatan proyek, komputer diterima, bagi yang tidak setuju dengan proyek bantuan komputer ditolak atau kemudian dikembalikan.

(3) Sektor peribadatan: membantu sarana dan perbaikan sarana ibadah.

(4) Sektor kesehatan: membangun dan memperbaiki sarana kesehatan dan memberi supply obat-obatan kepada dua Puskesmas yang ada di kecamatan Ujung Pangkah.

(5) Sektor pemuda dan olahraga: di sektor ini belum atau tidak dilaksanakan oleh perusahaan. Penyediaan sarana olah raga dan fasilitas yang diperlukan belum dilakukan oleh perusahaan.

(6) Sektor transportasi: meskipun masih terbatas, perusahaan sudah membangun prasarana dan memperbaiki prasarana yang ada agar dapat meningkatkan transportasi untuk berinteraksi di wilayah masyarakat setempat. Misalnya membangun dan memperbaiki jalan/ ruas jalan yang rusak serta membuat penerangan jalan.

(7) Sektor sosial: perusahaan belum memberikan atau menyediakan sarana dan bantuan kepada yayasan-yayasan sosial seperti kepada yatim piatu, penyandang cacat, dan lain-lain;

Sedangkan (8) Sektor lingkungan: pihak perusahaan belum memberikan sosialisasi berupa penyuluhan untuk memelihara lingkungan agar diperoleh kondisi lingkungan yang terpelihara secara berkelanjutan.

Dalam realitanya tanggung jawab sosial perusahaan yang diwujudkan berupa pengembangan sosial ditanggapi beragam oleh masyarakat. Komunitas nelayan dan petani tambak sebenarnya tidak suka terhadap kehadiran perusahaan multinasional itu, disebabkan kehadirannya mengancam mata pencaharian mereka. Dalam posisi seperti ini, komunitas nelayan dan petani tambak menolak kebijakan *Community Development*. Di pihak lain, elite-elite lokal, sebagian, termasuk tokoh masyarakat, elite politik / parpol menyambut baik kebijakan *Community Development*. Mengapa kelompok ini setuju, karena kelompok ini menerima dana CD. Kelompok pemuda tidak puas dan kecewa atas kebijakan CD ini, karena dianggap tidak transparan seberapa banyak dan berapa besar sumbangan

untuk CD ke elite-elite lokal, baik tokoh masyarakat, elite politik / elite parpol, dan kepada siapa saja dana untuk CD itu diberikan. Dalam kaitan ini, Ilham (2005), Ketua Forum Komunikasi Pemuda Ujung Pangkah, berujar:

“Ada kesan kuat, penyaluran dana untuk kepentingan CD tidak transparan, baik dari segi jumlah maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat yang mana. Ini mengecewakan. Tokoh-tokoh masyarakat yang semestinya membela rakyat malah diam saja. Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elite-elite lokal dan pihak perusahaan”.

4. Premiere Oil dan Amerada Hess

Dari hasil pengamatan di lapangan, sejak kehadiran Premiere Oil, yaitu sebuah perusahaan penambangan migas Inggris yang juga rekanan dengan Amerada Hess hingga kemudian diganti dan diteruskan oleh Amerada Hess yang sekarang menjadi operator atas anjungan Ujung Pangkah, sampai medio September 2002, disimpulkan bahwa isu pro-kontra atas proyek masih berlangsung.

Bagi yang setuju dengan kegiatan proyek, terkesan adanya harapan bahwa kehadiran proyek akan dapat membuka lapangan kerja bagi mereka, yang berarti peningkatan taraf hidup. Bagi yang tidak setuju terhadap kehadiran proyek, kelompok ini mengetengahkan isu pencemaran lingkungan dan pelestarian alam yang mengkhawatirkan masa depan usaha mereka sebagai nelayan dan petambak.

Tak pelak hadirnya mega proyek pertambangan migas di Ujung Pangkah telah mendatangkan permasalahan sosial di kalangan warga Ujung Pangkah yang mayoritas penduduknya sebagai nelayan dan petambak.

Gejolak masyarakat sebenarnya telah dimulai sejak rencana pertambangan tersebut dioperasikan oleh Premiere Oil pada tahun 1998. Protes keberatan masyarakat atas rencana pertambangan tersebut ditujukan dan disuarakan terutama dengan surat menyurat baik kepada instansi pemerintah maupun non pemerintah sampai pada demonstrasi, yang intinya adalah menuntut adanya jaminan atas lingkungan yang sehat, jaminan atas keberlangsungan ekonomi dan jaminan atas terpeliharanya nilai-nilai budaya setempat.

Bagi yang tidak setuju kegiatan proyek, terjadinya gejolak masyarakat terutama dipicu oleh: pertama, minimnya sosialisasi atas rencana serta tindakan perusahaan yang dianggap tidak transparan terhadap rencana pelaksanaan proyek tersebut yang akhirnya menyebabkan pemahaman yang tidak sama di kalangan warga Ujung Pangkah; kedua, adanya pertentangan antara perusahaan dan masyarakat, di satu sisi mau tidak mau masyarakat berusaha mempertahankan tambak dan lautnya terhadap ancaman perusakan yang diakibatkan oleh rencana eksplorasi, sedang di sisi lain perusahaan bersikukuh untuk bisa mengeksploitasi sumber yang dinilai potensial tersebut. Kepentingan yang berbeda inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya konflik di tengah masyarakat Ujung Pangkah.

Gejolak sosial yang terjadi di masyarakat Ujung Pangkah sebenarnya adalah bentuk protes warga yang merasa keberatan atas proyek tersebut,

akhirnya terus berlanjut karena merasa aspirasi dan keinginannya belum terpenuhi, sampai pada peristiwa “amuk massa” yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2002, sebagai bentuk dari rasa frustrasi masyarakat serta akumulasi kemarahan karena merasa aspirasi masyarakat tidak dihiraukan, dan ditambah lagi sebuah penilaian yang dilakukan oleh Konjen Amerika Serikat di Surabaya sebagai gerakan teroris bahkan dikaitkan dengan jaringan Al Qaeda.

Namun hal tersebut di atas disikapi dan dijelaskan oleh warga masyarakat Ujung Pangkah: pertama, bahwa gejolak dan protes warga masyarakat Ujung Pangkah adalah murni gerakan rakyat yang ingin mempertahankan hak hidupnya dari ancaman pencemaran tambak dan laut yang merupakan tempat bergantungnya perekonomian masyarakat secara turun temurun, oleh proyek pertambangan; kedua, guncangan sosial yang terjadi sangat terkait erat dan dilatarbelakangi oleh tindakan sembrono dan tidak profesionalnya perusahaan yang terus saja memaksakan *survey seismic* tetap dilanjutkan tanpa mempertimbangkan ke-awam-an, keresahan-keresahan yang muncul di masyarakat yang sebenarnya ada sejak Premiere Oli bereksplorasi, 1998. Sehingga banyak sekali jaring nelayan yang terseret kapal maupun tersangkut kabel *seismic*, sampai berlanjut pada hilangnya akses kontrol masyarakat terutama pasca terbentuknya Badan Permusyawaratan Masyarakat Ujung Pangkah (BPMU) bentukan Amerada Hess. Namun selanjutnya, masyarakat Ujung Pangkah

mendukung segala bentuk usaha yang dilakukan secara arif dan bijaksana dalam mencari dan menemukan solusi bersama.

Sementara itu di pihak Amerada Hess menyatakan bahwa pihak perusahaan (Amerada Hess Indonesia–Pangkajene) Ltd, selanjutnya disebut AHIPL mengaku telah melakukan konsultasi (sosialisasi) dengan masyarakat. Kegiatan sosialisasi masyarakat ini sebagai wujud pelaksanaan dari SK Kepala BAPEDAL No. 08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), telah dilaksanakan pengumuman AMDAL di media massa dan konsultasi (sosialisasi) masyarakat. Hasil dari kegiatan konsultasi masyarakat ini, akan digunakan sebagai bahan masukan untuk membantu pelingkupan studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) rencana kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Ujung Pangkah.

AHIPL sebagai pemrakarsa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi atau konsultasi masyarakat pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

- (1) Tanggal 6 Juli 2002, pengumuman di media massa nasional dan lokal.
- (2) Tanggal 16 hingga 30 Agustus 2002, penyebaran poster dan brosur.
- (3) Tanggal 19 Agustus 2002, Konsultasi Masyarakat di Propinsi Jawa Timur.
- (4) Tanggal 28 Agustus 2002, Konsultasi Masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
- (5) Tanggal 17 September 2002, Konsultasi Masyarakat di desa Pangkah Kulon Kabupaten Gresik yang bersamaan dengan sosialisasi kegiatan

survey seismic. Didalam kegiatan konsultasi public (sosialisasi), pemrakarsa memberikan informasi tentang rencana kegiatan serta dampak positif dan negatif yang mungkin timbul.

- (6) Pada periode bulan Agustus dan September 2002, dilakukan kegiatan survei sosial dan diskusi di wilayah sekitar rencana pemboran sumur eksplorasi dan eksploitasi gas serta di wilayah sekitar rencana jalur pipa gas.

Perlu diberikan catatan bahwa dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap masyarakat, sesungguhnya belum mewakili seluruh pemangku kepentingan, dalam arti belum mewakili keseluruhan masyarakat, misalnya sosialisasi baru menyentuh sebagian masyarakat Ujung Pangkah Kulon, sedangkan masyarakat Ujung Pangkah Wetan dan warga Banyu Urip belum diajak konsultasi. Begitu pula seluruh elemen masyarakat lokal seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi nelayan dan petani tambak, organisasi pemuda, PESATBRI (Persatuan Pengesat dan Pemburi) belum dilibatkan dalam kegiatan konsultasi. Justru organisasi-organisasi lokal semacam ini yang mempermasalahkan perihal kehadiran perusahaan penambangan migas. Seorang staf Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang beralamat di jalan Kidal No. 6 Surabaya bernama Radian Salman, menyarankan agar sebelum melakukan konsultasi dengan masyarakat atau studi Amdal, perlu persoalan dengan warga harus diselesaikan terlebih dulu.

Namun demikian, hasil dari kegiatan konsultasi dengan masyarakat tersebut di atas, diperoleh sejumlah tanggapan, saran dan pendapat dari masyarakat berkepentingan yang berkaitan dengan rencana kegiatan. Dari berbagai masukan yang ada, dapat disimpulkan bahwa adanya beberapa isu sebagai berikut:

- (1) Terjadinya penurunan pendapatan nelayan dan petani tambak.
- (2) Pengeboran dikhawatirkan akan mencemari lingkungan karena adanya limbah lumpur atau minyak, serta akan menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketenangan masyarakat.
- (3) Eksplorasi dikhawatirkan akan mencemari lingkungan karena adanya pengeboran gas.
- (4) Terjadinya perubahan perilaku atau adat istiadat penduduk seperti menurunnya moral masyarakat
- (5) Pembebasan lahan (jika ada) akan menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat atau pemda dengan masyarakat.
- (6) Terjadi migrasi ikan, karena seperti diketahui laut kawasan Ujung Pangkah merupakan kawasan yang kaya akan ikan.
- (7) Menurunnya kualitas air di perairan Ujung Pangkah dan ini akan berdampak pada menurunnya jumlah ikan baik di laut ataupun tambak.

Sedangkan saran yang disampaikan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi proyek sangat mendesak untuk dilakukan baik untuk aparat pemda maupun masyarakat luas khususnya di daerah lokasi eksplorasi. Hal ini karena banyak masyarakat bahkan aparat pemda belum memahami lingkup kegiatan proyek sehingga mereka memiliki persepsi yang salah tentang proyek seperti adanya bahaya ledakan, tumpahan lumpur, minyak dan terganggunya habitat ikan.
- (2) Sosialisasi meliputi wilayah Weri, Kecamatan Paciran, Lamongan, perbatasan Lamongan-Gresik, wilayah Bangkalan, karena banyak nelayan di daerah tersebut yang mencari/ menangkap ikan di kawasan Ujung Pangkah.
- (3) Sosialisasi sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
- (4) Agar dipasang tanda atau rambu-rambu di tempat kegiatan proyek (di laut) untuk menghindari kecelakaan pada nelayan/
- (5) Pihak pemrakarsa agar mempertimbangkan dengan nurani dan itikad baik keluhan, usulan masyarakat seperti dalam proses negosiasi melalui proses yang partisipatif.
- (6) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perlu kiranya proyek ini melibatkan tenaga kerja lokal.
- (7) Mengingat laut di daerah Ujung Pangkah adalah kawasan yang kaya ikan, maka jika proyek ini menyebabkan menurunnya hasil tangkapan ikan seyogyanya pihak pemrakarsa mempertimbangkan pemberian ganti rugi/ insentif yang layak pada nelayan.

- (8) Seyogyanya masyarakat diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat, eksekutif, legislatif pemrakarsa proyek melakukan kesepakatan tentang kriteria kelangsungan proyek, sehingga jika dalam pelaksanaan nanti terjadi dampak negatif akan diatasi bersama.
- (9) Pipa dipasang dibawah dasar laut agar aman tidak mengganggu lalu lintas darat dan laut.
- (10) Proyek ini diharapkan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan karena itu proyek harus memperhatikan kelestarian lingkungan, dan melibatkan masyarakat.
- (11) Berkait dengan tuntutan masyarakat untuk dilibatkan sebagai tenaga kerja, perlu kiranya pihak pemrakarsa mensosialisasi bahwa industri perminyakan pada dasarnya adalah industri padat modal, berteknologi tinggi, dan resiko tinggi karena itu diperlukan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman (profesional) sehingga keinginan penduduk lokal untuk menjadi tenaga kerja harus pula dibekali dengan kemampuan/ ketrampilan yang memadai/ sesuai.
- (12) Sosialisasi perlu dilakukan pula pada masyarakat bahwa kegiatan proyek akan membawa dampak pada peningkatan ekonomi penduduk.
- (13) Agar pemrakarsa dalam memberikan bantuan lebih mengutamakan bantuan tidak langsung (jangka panjang) seperti bantuan di bidang pendidikan, peningkatan usaha pokok penduduk (perikanan).

Sedangkan rangkuman hasil survei sosial dan diskusi mendalam di wilayah sekitar sumur eksplorasi dan eksploitasi gas adalah sebagai berikut : (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Penambangan Gas Lapangan Ujung Pangkah dan Fasilitas Penunjangnya, Blok Pangkah, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Desember 2002, 1-10).

- (1) Sebagian besar masyarakat (65,5%) menyatakan setuju dengan alasan meningkatkan penghasilan daerah (38,78%), membuka lapangan kerja (24,49%), meningkatkan penghasilan penduduk (20,41%), meningkatkan sarana dan prasarana umum (2,04%) dan lainnya.
- (2) Namun demikian hal-hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan berlangsung adalah melibatkan seluruh masyarakat bukan pihak tertentu saja (20%), limbah perlu diperhatikan (10,67%), menggunakan tenaga kerja lokal (9,33%), prosesnya jangan mengganggu masyarakat (8%), transparan dalam proses (5,33%), pasrah (25,33%), tidak menjawab (17,33%, lainnya (4%).

Rangkuman hasil survei sosial dan diskusi mendalam di wilayah sekitar rencana jalur pipa adalah : (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Penambangan Gas Lapangan Ujung Pangkah dan Fasilitas Penunjangnya, Blok Pangkah, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, Desember 2002, 1-11).

- (1) Sebagian besar masyarakat (88,44%) menyatakan setuju dengan catatan bisa meningkatkan penghasilan penduduk, membuka lapangan kerja dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat (63,55%), meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (13,56%), tidak merugikan masyarakat (9,79%), meningkatkan sarana dan prasarana publik (3,5%), dan lainnya (3,7%).
- (2) Walaupun sebagian besar masyarakat setuju, namun mereka memberikan saran selama kegiatan ini berlangsung agar mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat (15,21%), memanfaatkan tenaga kerja lokal dan membuka lapangan kerja (35,1%), pelaksana proyek melakukan *community development* dari oleh dan untuk masyarakat (3,6%), kegiatan pemasangan pipa gas tidak mengganggu aktivitas masyarakat (3,35%), meningkatkan sarana dan prasarana umum (2,13%) dan lainnya (4,61%).

5. Industri Perminyakan: Proyek yang bersifat padat modal dan teknologi

Seperti telah disinggung di bagian muka tulisan ini, bahwa tahapan industrialisasi pada dasarnya diawali dengan tahap pra konstruksi, tahap konstruksi dan tahap eksploitasi. Pada tahap pra konstruksi dan konstruksi bisa menyerap tenaga dalam jumlah relatif besar, itulah sebabnya pada tahap ini disebut sebagai proyek padat karya dalam arti karena penyerapan

tenaga kerja yang banyak. Pada tahap ini dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang besar untuk dipekerjakan pembuatan jalur transportasi seperti pembuatan dan pelebaran jalan ke arah kiri dan kanan jalan, penebangan pohon-pohon agar bisa dilewati kendaraan-kendaraan berat menuju dermaga. Selain itu juga dalam pembuatan *base camp* yang menyerap tenaga kasar yang relatif besar, baik untuk keperluan pembuatan lubang bor dan pembangunan saluran pipa yang melalui jalur darat; dan dampak ikutannya karena juga menciptakan usaha kecil-kecilan berupa warung makan minum, kios-kios penjualan rokok, dan lain-lain.

Namun pada tahap tersebut di atas, tidaklah berlangsung lama, karena pada tahap berikutnya yakni tahap eksploitasi penambangan tenaga kerja yang dibutuhkan relatif sedikit, yakni tenaga skill, sedangkan tenaga non-skill sudah tidak dipakai lagi.

Di bidang ketenagakerjaan inilah lantas menjadi masalah, karena keinginan masyarakat yang begitu besar untuk bisa diikutsertakan dalam berbagai pekerjaan proyek. Akan tetapi keinginan yang menggebu-gebu ini tidak diimbangi dengan kemampuan dan skill yang memadai, selain itu belum juga memahami kultur kerja di lingkungan industri, khususnya industri perminyakan yang bersifat padat modal dan teknologi.

Di bawah ini diberikukan gambaran tenaga kerja pada tahap konstruksi.

Tabel 3.1 Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pembangunan Anjungan dan Pemboran sumur produksi

Posisi	Jumlah (orang)	Asal
Amerada Hess	4	Expatriate + National
Indonesia	1	Expatriate
Drilling Supervisor	1	Expatriate
Night Supervisor	1	Expatriate
OIM	2	Expatriate
Tool Pusher	2	Expatriate + National
Driller	2	Expatriate + National
Assistant Driller	2	Expatriate + National
Derrickman	6	National
Floorman	2	National
Crane Operator	8	National
Roustabout	8	National
Painter	1	Expatriate
Chief Mechanic	2	Expatriate + National
Mechanic	2	Expatriate + National
Motorman	1	Expatriate
Chief Electrician	2	Expatriate + National
Electrician	1	National
Welder	2	National
Materialsman	2	National
Radio Operator	12	National
Catering	1	National
Medic	50	Expatriate + National
Service Company (*)	1	National
BPPKA Doctor	1	National
BPPKA Liaison Officer		
Total	117	

(*) estimate

Di bidang ketenagakerjaan, harapan masyarakat untuk diikutsertakan dalam kegiatan proyek sangat besar. Namun demikian keinginan ini tidak disertai dengan kemampuan dan ketrampilan yang memadai, belum terbiasa dengan kultur kerja di lingkungan industri, terlebih lagi industri perminyakan yang bersifat padat modal dan teknologi.

Kebijakan perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga setempat didalam meningkatkan kesejahteraan, memperkecil kesenjangan dan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya membantu kelancaran proyek, terutama pada *survey seismic* yang dimungkinkan mempekerjakan tenaga non skill dalam jumlah cukup banyak.

Apabila terjadi pola rekrutmen yang bersifat khusus, demikian pula penerapan peraturan perusahaan yang diperlonggar di masa mendatang dapat menjadi kontra produktif. Sebagai contoh, untuk *drilling* di lepas pantai yang akan dilaksanakan, maka persyaratan pengawakan akan lebih ketat, dan jumlahnya sangat terbatas. Apabila akan digunakan karyawan setempat, maka perlu disiapkan sejak dini. Hal ini juga berlaku pula bagi pengawakan unit produksi di masa mendatang.

Sehubungan dengan masalah tenaga kerja sebagaimana diutarakan di atas, maka perlu disosialisasikan kembali bahwa industri perminyakan pada hakekatnya adalah padat modal, teknologi dan sarat resiko, namun dipastikan akan berdampak positif pada kemajuan ekonomi setempat.

Bantuan langsung Amerada Hess seperti yang dilakukan saat ini, yaitu sebagai wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan (*community development*), cukup bermanfaat dan tetap diperlukan. Di waktu yang akan datang lebih diperlukan bantuan tidak langsung berupa proyek yang akan bermanfaat untuk jangka panjang didalam meningkatkan usaha pokok, yaitu perikanan pantai usaha pertambakan. Kehadiran industri perminyakan tidak berarti akan menggusur usaha masyarakat yang telah ada.

Selain itu, khususnya bantuan di sektor pendidikan bagi masyarakat Ujung Pangkah perlu ditangani lebih serius, walaupun hasilnya belum segera dapat dirasakan sesuai keinginan masyarakat. Apabila masyarakat setempat menginginkan peran lebih besar didalam mengelola sumber daya alamnya, maka melalui pendidikanlah keinginan tersebut dapat diwujudkan.

6. Penolakan Nelayan dan Petani Tambak terhadap Kehadiran Perusahaan Multinasional

Terjadinya pencemaran limbah pengeboran minyak yang telah terjadi di kawasan pesisir Ujung Pangkah telah memunculkan reaksi-reaksi protes dan penolakan terhadap kehadiran perusahaan penambangan migas milik asing itu. Isu tentang pencemaran lingkungan ini segera meluas tidak hanya diketahui oleh masyarakat nelayan Ujung Pangkah dan sekitarnya seperti Weru—Kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan dan nelayan Bangkalan, akan tetapi telah berkembang ke lembaga swadaya masyarakat

lokal, organisasi nelayan dan petani tambak, organisasi pemuda lokal, bahkan hingga Lembaga Bantuan Hukum di Surabaya (LBH) dan bahkan diliput oleh media cetak.

Bagi nelayan dan petani tambak, isu tentang pencemaran limbah pada dasarnya dianggap mengancam produksi penangkapan ikan di laut dan mengancam usaha pertambakan. Selain dampaknya merusak lingkungan, yang berakibat menyingkirnya ikan-ikan dari area penangkapan ikan (*fishing ground*) yang berakibat para nelayan menderita kerugian secara ekonomis. Hal inilah yang menyulut reaksi keras dari pihak nelayan dan petani tambak terhadap kehadiran perusahaan penambangan minyak. Protes pun dilancarkan oleh para nelayan dan petani tambak, dengan cara mengadu ke pemerintah setempat di tingkat kecamatan, seperti ke Pak Camat, Dan Ramil serta Kepala Polsek. Mereka mendatangi pejabat-pejabat tersebut secara kolektif yang dipimpin oleh ketua Organisasi Nelayan Ujung Pangkah, Shohibul Hajjah.

Protes itu sendiri, menurut Lipsky sebagai dikuti John Lofland, dapat dianggap sebagai aksi politik yang ditandai dengan kegiatan yang bersifat tidak umum dan dilakukan oleh "kelompok relatif lemah". (Lofland, 2003:5) Disamping sebagai aksi, protes juga dapat dilihat sebagai gerakan (*movement*), dalam arti yang terorganisir pada masyarakat yang menginginkan perubahan tatanan yang ada dengan tujuan penghancuran kepentingan kekuasaan yang sah dengan hadirnya pola baru. (Lofland,

2003:45). Pendapat yang sejalan dengan itu mengatakan, gerakan sosial politik seringkali diidentikkan dengan radikalisme yang bermakna sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang punya hak-hak istimewa dan berkuasa. Karena itu, salah satu aspek yang paling menarik tentang gerakan-gerakan sosial adalah dimensi politiknya, dimana pada dasarnya semua gerakan demikian merupakan ekspresi akan protes terhadap keadaan-keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai kekacauan termasuk pemerasan dan penindasan oleh mereka yang menggunakan kekuasaan. (Siahaan, 1997, hal. 25-26).

Sebagaimana dikemukakan di atas, protes yang dilakukan nelayan dan petani tambak terhadap kehadiran perusahaan penambangan minyak gas Amerada Hess tersebut, yang mengancam produksi perikanan mereka, yang berakibat mengancam kehidupan ekonomi mereka, menjadi cikal bakal gerakan perlawanan masyarakat Ujung Pangkah. Masyarakat nelayan dan petani tambak menghendaki agar Amerada Hess menghentikan usaha penambangan minyak secara total di pantai Ujung Pangkah. Hal itu disebabkan menurut anggapan nelayan dan petani tambak, bahkan apabila penambangan disandingkan dengan perikanan, dalam arti penangkapan ikan di laut dan usaha pertambakan, maka hal yang terakhir itu akan menderita kekalahan. Hal ini mereka alami, ketika dilakukan *seismic* dan kemudian air laut tercemar *lanthung-lanthung* (limbah minyak yang menyebar) maka

akibat ini, usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan di laut mengalami kegagalan. Kegagalan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya nelayan menjadi marah karena produksi penangkapan ikan mereka terancam kegagalan. Padahal pekerjaan sebagai nelayan dan petani tambak merupakan andalan mereka dalam mata pencaharian sehari-hari. Tercatat 85% masyarakat Ujung Pangkah bermata pencaharian sebagai petani tambak dan nelayan, 3% di sektor peternakan budidaya burung walet, selebihnya bergerak di bidang jasa.

Kemarahan warga nelayan dan petani tambak yang diakibatkan bocornya limbah minyak ini kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukan protes kepada pihak perusahaan penambangan, agar menutup usaha penambangan tersebut. Aspirasi ini kemudian disampaikan ke pemerintah kecamatan baik ke Camat, Komandan Kepolisian Sektor, dan Komandan Daerah Militer. Namun pihak pemerintah lokal tidak bisa mengatasi masalah ini.

Perihal gerakan sosial, penulis mengambil definisi Tarrow (1994:4), yang penulis anggap relevan dengan pendekatan gerakan sosial dalam konteks penelitian ini. Tarrow sendiri mendasarkan diri pada tulisan Charles Tilly, gerakan sosial adalah “tantangan kolektif yang diajukan sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan dan

penguasa.² Tarrow melakukan elaborasi terhadap definisi tersebut dengan menekankan bahwa gerakan-gerakan tersebut (1) menyusun aksi mengacau (*disruptive*) melawan kelompok elite, penguasa, kelompok-kelompok lain, dan aturan-aturan budaya tertentu, (2) dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elite, (3) berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif, dan (4) terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai menjadi sebuah gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan sosial diikuti oleh sejumlah individu yang memiliki tujuan dan identitas kolektif yang sama, yang bersama-sama terlibat dalam aksi kolektif yang bertujuan mengacau.

Dalam konteks ini saya tidak membedakan konsep gerakan sosial lama dengan gerakan sosial baru, disebabkan karena saya mengikuti pendapat ilmuwan Brasil Andre Gunder Frank dan Marta Fuentes yang pada tahun 1989 menyatakan bahwa: Gerakan kemasyarakatan “baru” sesungguhnya lama tapi punya ciri-ciri baru.

Akan tetapi, Silaen (2006) dengan merujuk pendapat Achwan, ia membedakan dengan jelas perbedaan antara gerakan sosial “lama dan baru”. Pertama, jika gerakan sosial lama memfokuskan pada keresahan ekonomi, maka gerakan sosial baru memfokuskan pada kaitan antara isu-isu simbolik dan kebudayaan dengan identitas, misalnya bahaya pencemaran lingkungan bagi pengembangan identitas individu. Kedua, gerakan sosial

² Definisi ini mempunyai empat ciri empirik: tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas dan interaksi terus menerus.

lama sering menyandarkan pada ideologi politik tertentu, sedangkan gerakan sosial baru menerima pluralitas ide serta cenderung mengembangkan pandangan pragmatis dalam upaya menciptakan sistem partisipasi politik seluas-luasnya dalam proses pengambilan keputusan.

Penekanan pada isu-isu simbolik, identitas, dan bebas dari ideologi politik tertentu mengandung arti bahwa gerakan sosial baru lebih menaruh perhatian pada *life politics* dibanding *emancipatory politics*. Itulah sebabnya, keanggotaan dalam gerakan sosial baru bersifat terbuka tanpa menghiraukan latar belakang kelas sosial, etnisitas, politik maupun agama Lebih lanjut, gerakan sosial baru sering diprakarsai oleh individu-individu dan kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok yang secara sadar memobilisasi diri untuk bersama-sama memperjuangkan *democratization of every day life*. (Silaen, 2006:40-41). Selanjutnya Silaen menambahkan bahwa perbedaan antara gerakan sosial lama dan baru adalah gerakan sosial baru itu melampaui ikatan primordial, baik agama, suku, golongan dan kedaerahan. Selanjutnya upaya perlawanan gerakan ini tidak menggunakan kekerasan (*non-violence*).

Akan tetapi pendapat Silaen ini mendapat kritik dari Aditjondro (2006), Aditjondro mengatakan bahwa penekanan perbedaan antara gerakan sosial lama dan baru itu dianggap agak berlebihan dan mengandung beberapa kelemahan. (1) bahwa gerakan-gerakan kemasyarakatan yang lebih “kiri”, dalam arti, yang lebih jelas menentang kapitalisme, apalagi

dalam bentuknya yang paling canggih, neo liberalisme, serta merta akar dicap sebagai gerakan kemasyarakatan lama. Hal ini disebabkan karena gerakan kemasyarakatan lama berusaha memberi jawaban terhadap keresahan ekonomi, atau tantangan ekonomi mendesak yang dialami aktor-aktor gerakan kemasyarakatan dilapis “akar rumput”.

Apabila konsep seperti ini digunakan untuk menjelaskan fenomena perlawanan masyarakat nelayan dan petani tambak di Ujung Pangkah, maka gerakan sosial di sana bisa distempel sebagai gerakan sosial lama. Pada kenyataannya gerakan sosial di Ujung Pangkah sebenarnya dipicu oleh karena masyarakat lokal menderita dampak negatif di bidang ekologi, ekonomi dan sosial-budaya, akibat hadirnya penambangan minyak dan gas di lepas pantai Ujung Pangkah.

Bahaya kedua adalah, kalau betul gerakan kemasyarakatan baru tidak hanya berkiblat pada bagaimana menjawab keresahan ekonomi para aktornya, tapi pada *life politics*, demokratisasi dan perubahan sosial secara makro, maka apa yang telah dicapai oleh gerakan kemasyarakatan baru itu harus dinilai secara lebih “keras”. Kemudian seberapa berhasil sebuah gerakan berhasil meletakkan dasar bagi pembangunan sistem ekonomi dan politik yang lebih berkiblat kepada nilai-nilai di atas? Selain itu, seberapa jauh aktor-aktor pendukung gerakan tetap setia kepada nilai-nilai tersebut?

Bahaya ketiga adalah bahwa nilai-nilai primordial dalam ajaran agama dan budaya setempat dapat dianggap mengurangi “ke-baru-an”

gerakan-gerakan masa kini, yang sekarang suka menggunakan predikat “baru”, banyak yang tidak lepas dari nilai-nilai primordial yang tersirat dalam ajaran agama dan budaya setempat. Sebab walaupun setiap insan lahir ke bumi dalam keadaan telanjang, ia segera diselimuti baju budaya orang-orang terdekatnya.

Bahaya keempat, adalah “Gandhi-isme ekstrim” yang tersirat di balik anggapan, bahwa penggunaan cara-cara kekerasan serta merta membedakan gerakan kemasyarakatan baru dengan yang lama. Apakah penggunaan kekerasan untuk melawan perampok di tengah jalan, atau penggunaan parang dan pentungan untuk membela diri terhadap pencuri yang masuk ke rumah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral? Ataukah kita harus menyerah saja terhadap perampok dan pencuri yang ingin mencederai kita, supaya mereka dapat merampas harta benda—atau kehormatan kita—secara bebas dan semena-mena?

Sementara itu Scott (1990:150) menemukan ada banyak keragaman ideologi di dalam sebuah gerakan, yang bisa dibagi di sepanjang garis sayap kiri dan sayap kanan. Fakta perihal banyaknya teori gerakan sosial baru telah gagal memahami perbedaan ini menunjukkan bahwa tesis gerakan sosial baru cenderung menekankan “ekspresi paling fundamentalis” sebuah gerakan tertentu, yang dengan demikian mengakibatkan terdistorsinya pandangan tentang gerakan secara keseluruhan.

Keith Faulks (1999:96) menjelaskan Tipe Ideal Gerakan Sosial

Lama dan Gerakan Sosial Baru sebagai berikut:

Tipe Ideal Gerakan Sosial Lama dan Gerakan Sosial Baru

Karakteristik Tujuan pokok	Gerakan buruh Kontrol terhadap negara	Gerakan sosial baru Terpeliharanya otonomi di dalam masyarakat warga yang semakin luas dan pluralistik
Ancaman/lawan utama Tipe gerakan	Deregulasi kapitalisme Terutama berupa serikat-serikat/gerakan politis yang menyediakan fungsi sosial/ekonomi	Negara teknokratik Terutama berupa gerakan budaya/sosial kemasya-rakatan yang berusaha mendefinisikan kembali kehidupan politik: 'kehidupan personal adalah kehidupan politik'
Isu-isu kunci	Masalah ketidaksamaan/ketimpangan barang-barang materi, keadilan sosial, kemiskinan dan pengangguran	Masalah etika otonomi personal, libertarianisme atau kebebasan, perlin-dungan alam, dan ter-peliharanya perdamaian
Organisasi	Partai dan serikat-serikat yang tersen-tralisasi dan hirarkis	Berupa jaringan longgar individu-individu yang berwawasan memadai.
Taktik/ siasat	Partisipasi dalam pemilihan (<i>election</i>), kampanye dan kegiatan industri yang bertujuan meningkatkan hak-hak sosial dan ekonomi.	Demonstrasi massa, protes secara sporadis, ekspresi kultural gaya hidup dan identitas alternatif.
Orientasi pada dunia internasional	Solidaritas internasional yang diimbangi dengan sentimen nasionalistik/ kebangsaan.	Kesadaran akan adanya jalinan hubungan antara dunia lokal dan global: 'bertindak lokal, berpikir global'.
Pendekatan terhadap demokrasi	Demokrasi sosial/ demokrasi industri	Demokrasi (adanya) perbedaan, demokrasi deliberatif (demokrasi musyawarah)
Pendekatan terhadap kewarganegaraan	Perluasan kewarga-negaraan liberal (hak-hak sipil, politik, dan hak-hak sosial) kepada semua rakyat suatu negara.	Promosi/ perbaikan hak-hak kelompok/ perlindungan hak-hak manusia secara umum.
Basis sosial utama	Kelas pekerja dan intelektual sosialis dari kelas lain	Kelas menengah, khususnya kaum profesional dan pekerja sektor publik, dan kelas pekerja lulusan perguruan tinggi

Gilbert Risk (1997: 238-244) memandang gerakan sosial ini sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah kita sekarang dengan pembangunan dan perbaikan kondisi hidup rakyat. Kelompok-kelompok rakyat ini tidak lagi mempercayai janji pembangunan, dengan melihatnya sebagai bentuk hegemoni baru, mereka juga tidak percaya dengan niat baik para penguasa yang katanya ingin memenuhi kebutuhan rakyat, *wong cilik* tersebut. Sebaliknya, mereka membina dan menata diri mereka sendiri, dengan menemukan bentuk-bentuk baru hubungan sosial dan mencari cara-cara baru yang lebih canggih untuk mengamankan eksistensi mereka. Tindakan mereka amat beragam tetapi mereka punya satu pandangan bahwa semua ukuran "pembangunan" dari beberapa dasa warsa terakhir mengakibatkan pengambilalihan material dan kultural. Tugas utama mereka adalah memulihkan otonomi publik, ekonomi dan otonomi sosial dari masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Persoalannya adalah bahwa setiap masyarakat seharusnya memperoleh kembali haknya untuk mengorganisir eksistensi mereka menurut pola-pola yang dianggapnya tepat, bahwa mereka seharusnya dibiarkan mengumpulkan barang-barang material, mendorong kreativitas, dan memastikan bahwa keputusan diambil atau dibuat oleh mereka yang berkepentingan langsung.

Sejalan dengan pendapat di atas adalah Ponna Wignaraja (1993). Ia mengenali adanya kreativitas baru dan kemampuan transformasi dari gerakan rakyat ketika mereka bersatu padu memberikan reaksi keras

terhadap pendekatan pemerintah kapitalis dan sosialis yang *top down*. Tindakan mereka merupakan manifestasi dari paradigma pembangunan dan demokrasi pluralistik baru ketika mereka mengadakan mobilisasi dalam merespon kediktatoran militer atau pelbagai permasalahan masyarakat lokal. Aset mereka berupa heterogenitas yang begitu besar diantara kelompok-kelompok ketika masing-masing kelompok itu berkembang sebagai suatu respon terhadap masalah-masalah spesifik dan terbentuk oleh kebutuhan dan kondisi-kondisi lokal. Tujuan dari gerakan sosial baru ini adalah untuk memobilisasi sejumlah besar orang, yang dibina dan diorganisir untuk menciptakan ruang politik yang memadai bagi anggotanya, dengan menggunakan demokrasi partisipatif dan devolusi kekuasaan, yang akhirnya mengakibatkan pemberdayaan anggota mereka. Hal ini pada gilirannya akan bermuara pada terciptanya kekuasaan penyeimbang (*counter vailing power*), yang bila cukup kuat, akan membuahkan manfaat material dan keadilan sosial dan persamaan yang lebih besar bagi para partisipan.

Pada awalnya, tindakan-tindakan ini dilakukan pada level lokal, diorganisir di seputar isu-isu lokal. Akan tetapi, Wignaraja membedakan antara gerakan sosial baru ini dan gerakan-gerakan sosial lain yang dia sebut gerakan sosial lama, termasuk gerakan buruh dan petani yang mengusahakan reformasi tanah, serta gerakan pembebasan nasional karena mereka ini ingin terus bekerja di dalam bingkai paradigma pembebasan

konvensional, dan pembangunan ekonomi yang masih konvensional. Gerakan-gerakan sosial lama tersebut terjebak dalam bentuk-bentuk pengambilan keputusan dan otoritas yang hirarkhis dan birokratis. Mereka nyatanya gagal memulai aksi-aksi yang sekiranya mampu menyediakan formasi sosial yang berkesinambungan dalam artian kemanusiaan dan lingkungan. Semuanya ini menegaskan keragaman, kemanusiaan dan kebebasan, yang penting bagi budaya negara-negara Selatan, yang selanjutnya menghasilkan hegemonisasi monolitik yang asing (*alien*) dan mengasingkan (*alienating*).

Dari beberapa tulisan di atas, memang telah terjadi perdebatan dan diskusi paradigmatis tentang ketepatan penyebutan tertentu yang biasanya disebabkan oleh ringkasan singkat, namun telah terjadi kesepakatan atau kesamaan pendapat yang wajar perihal identifikasi dan peran gerakan sosial baru ini. Gerakan sosial baru umumnya dipandang sebagai gerakan yang berbasis lokal, kelompok massa atau sebagai gerakan rakyat yang tujuannya adalah memobilisasi orang-orang agar bersatu padu dalam memecahkan masalah lokal atau masalah tertentu. Masalah ini termasuk upaya-upaya memperbaiki kondisi material, memperjuangkan otonomi lokal dan pengambilan keputusan serta isu-isu lingkungan dan isu-isu lain yang terkait dengan ekspresi material dan ekspresi kultural dari keterpinggiran mereka sendiri. Di samping itu, ada pernyataan bahwa bentuk perjuangan tersebut adalah baru, yang berlandaskan pengambilan keputusan partisipatif

dan mendukung demokrasi langsung, bukan bentuk demokrasi perwakilan atau representatif. Kendali kelompok-kelompok tadi punya beragam tujuan, mereka pada umumnya mengupayakan otonomi lokal ketika mereka berusaha menjauhkan diri dari keputusan-keputusan birokratis yang *top-down* yang menimbulkan jarak yang amat jauh. Gerakan-gerakan rakyat yang sifatnya heterogen, yang berjuang pada banyak *front*, dan kadang bersatu padu dalam aliansi longgar atau aliansi temporer akan menciptakan kantung-kantung otonomi lokal melawan serangan gencar aspek-aspek buruh dan negatif dari *main stream* praktek-praktek pembangunan. Yang lebih penting di sini, adalah bagaimana hal tersebut melawan struktur-struktur kekuatan global yang menentukan struktur praktek pembangunan dan kekuatan teknologi dan organisasi perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga global yang tak representatif itu.

Salah satu masalah dalam pendekatan ini adalah adanya dikotomi palsu yang terbentuk antara gerakan sosial baru dan gerakan sosial lama. Isu riilnya adalah bukan kelompok-kelompok mana yang terlibat dalam persilangan pendapat sekarang tapi isu yang sesungguhnya adalah sifat perlawanan yang mereka berikan dan sejauh mana kelompok-kelompok itu mampu mengatasi struktur-struktur kekuasaan yang ada.

Sebagaimana ditulis oleh Suzanne Dansereau (2000: 6-7): “apabila kita menerapkan sebuah pendekatan yang lebih terpadu (*unified approach*) dalam analisa perbedaan pendapat yang dimunculkan oleh semua kelompok

dari bawah dan meliputi gerakan buruh dan gerakan petani, yang disebut gerakan sosial lama, kita dapat memahami dengan lebih jelas, bahwa apa yang sedang muncul adalah perlawanan populer yang lebih luas dari bawah. Bila diambil dari perspektif yang lebih terpadu ini, kita kemudian dapat memahami bahwa apa yang sedang terjadi adalah masuknya kasus-kasus perbedaan pendapat yang terasing dan beragam ke dalam perlawanan yang lebih sistematis yang bisa dilihat sebagai kekuatan yang lebih hebat dalam membentuk perubahan sosial...”

Oleh karena itulah, dengan mengikuti pendapat Marta Fuentes dan Andre Gunder Frank (1989) yang mengatakan bahwa gerakan kemasyarakatan baru sesungguhnya lama tapi punya ciri-ciri baru. Apabila hal tersebut diterapkan pada gerakan anti-perusahaan pertambangan migas—Amerada Hess di Ujung Pangkah, maka kita saksikan di situ sejumlah gerakan kemasyarakatan yang saling tumpang tindih yang dipicu oleh masyarakat lokal yang menderita dampak negatif di bidang ekologi, ekonomi, sosial dan budaya dari proyek besar tersebut. Oleh karena itu, ada gerakan nelayan, ada gerakan petani tambak, ada gerakan lingkungan, ada gerakan penguatan demokrasi dan ada gerakan anti hegemoni elite.



BAB IV
KONDISI SOSIAL YANG
MENDORONG NELAYAN DAN
PETANI TAMBAK MELAKUKAN
PERILAWANAN

BAB IV

KONDISI SOSIAL YANG MENDORONG NELAYAN DAN PETANI TAMBAK MELAKUKAN PERLAWANAN

1. Partisipasi Nelayan dan Petani Tambak dalam Perlawanan

Partisipasi di dalam sebuah gerakan menurut definisinya adalah kegiatan yang bersifat sukarela. Jadi, terlepas dari pengecualian-pengecualian yang jarang terjadi, orang berpegang pada keyakinan yang sama dalam kausa yang mereka perjuangkan. Sikap yang bagi pengamat luar dianggap sebagai pertanda de individuasi atau konformitas, disebut sebagai keyakinan bersama oleh mereka yang berada di dalam gerakan. Para partisipan gerakan sama-sama berharap, bukan berputus asa. Mereka sama-sama berkeyakinan bahwa gerakannya akan menghasilkan perbedaan (Opp, 1989 h.236; Klandermans 1997, h.XXXIII).

Pertanyaannya adalah mengapa nelayan dan petani tambak berpartisipasi dalam perlawanan. Pertama, telah disebutkan bahwa para partisipan dalam sebuah gerakan adalah sekelompok orang yang memiliki harapan untuk sukses dan memiliki sebuah komitmen untuk kebaikan bersama. Asumsinya adalah individu-individu itu akan mempersembahkan usaha-usaha untuk mencapai hasil yang berharga untuk kebaikan bersama. Ketika rasa keadilan mereka terganggu, mereka akan memperjuangkan

sebuah tindakan untuk melakukan perlawanan. Kesukarelaan dalam perjuangan bersama ini dengan harapan untuk sukses. . Ketika rasa ketidakadilan mereka ditindas, oleh karena kehadiran perusahaan multinasional yang menghilangkan mata pencaharian mereka, mereka memiliki komitmen yang kuat kepada *public good* dan harapan untuk sukses. Untuk itu nelayan dan petani tambak berpartisipasi dalam gerakan.

Kedua, mereka memiliki sebuah pemahaman, memiliki sebuah kesadaran, bahwa partisipasi mereka akan membantu menjamin tercapainya tujuan bersama. Tanpa partisipasi, mereka memahami tujuan tersebut tidak mungkin dicapai. Untuk itulah mereka memutuskan untuk berpartisipasi guna mencapai tujuan bersama. Lantas manfaat apa yang yang didapat oleh para partisipan dalam gerakan perlawanan berkaitan pencapaian tujuan bersama. Sebagian besar partisipan mengkaitkan manfaat personal mereka dengan tujuan kebijakan publik atau bisa mewujudkan kebijakan preferensi mereka. Jika gerakan perlawanan memperoleh kemenangan, sebagian aktivis akan mendapat imbalan. Para pendukung pragmatis mengatakan bahwa manfaat nyata dari beraliansi dengan gerakan protes itu lebih besar daripada kerugian yang diderita di bawah sistem politik yang mapan. Tidak hanya imbalan konkrit, tapi juga imbalan simbolik yang menstimulasi partisipan dalam gerakan perlawanan. Banyak partisipan bergabung dalam sebuah gerakan protes karena mereka merasa karena aktivitas yang mereka geluti itu sifatnya mendidik, menarik dan menyenangkan.

Ketiga, persoalan kekecewaan. Kekecewaan terhadap kinerja kebijakan, baik kepada elite penguasa maupun kepada pihak perusahaan. Ketika perusahaan multinasional datang untuk melakukan kegiatan *seismic*, masyarakat nelayan dan petani tambak dikejutkan oleh kegiatan itu, karena tidak dilakukan sosialisasi sebelumnya. Mereka merasa hak-hak demokrasi dilanggar begitu saja. Belum lagi tumpahan minyak akibat kebocoran pengeboran yang mengakibatkan migrasi ikan, sehingga mengancam mata pencaharian mereka. Sementara itu, pihak pemerintah kurang peduli terhadap keluhan-keluhan yang berasal dari masyarakat. Pihak elite penguasa yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil, ternyata tidak bisa memenuhi rasa keadilan yang dicari oleh rakyat. Kemarahan terhadap sumber-sumber ketidakadilan inilah akan menstimuli keterlibatan atau partisipasi mereka dalam gerakan perlawanan. Nilai-nilai kultural atau pesan-pesan kultural membentuk suatu komitmen terhadap *public good* dan membentuk perasaan individu akan efikasi politik. Efikasi politik adalah kebijakan (politik), baik kepada elite penguasa maupun kepada pihak perusahaan, yang menghasilkan efek yang diharapkan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Masalah yang sedang dihadapi oleh komunitas nelayan adalah permasalahan ketidakadilan, seperti penggusuran, ancaman hilangnya mata pencaharian, dll. Keadaan tersebut membentuk perasaan individu akan efikasi politik. Dan sebaliknya efikasi politik bisa membentuk sebuah komitmen terhadap *public good* (rasa keadilan, kebebasan, dll). Ketika komunitas nelayan dan petani

tambak mengalami tekanan dalam kehidupan mereka, mereka ingin keluar dari tekanan semacam itu. Hal ini akan membentuk perasaan individu menjadi perasaan kolektif (bersama) akan adanya efikasi politik. Komunikasi yang bermuatan nilai-nilai semacam inilah yang mendorong individu untuk berpartisipasi dalam gerakan perlawanan.

Yang terakhir adalah struktur sosial politik. Kekuatan organisasi sosial (politik) akan berpengaruh pada konsepsi *public good* dan derajat efikasi politik. Perspektif proses politik memberikan perhatian yang bersifat sistematis pada lingkungan politik dan institusi tempat gerakan sosial tersebut berlangsung. Maju mundur maupun keberhasilan/ kegagalan gerakan sosial ditentukan oleh peluang dan hambatan di dalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas, atau apa saja yang kemudian lebih dikenal secara luas dengan konsep Struktur Peluang Politik. Singkatnya, perspektif ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasi politik demokrasi, misalnya, terbuka kesempatan (peluang) bagi rakyat untuk melakukan berbagai bentuk partisipasi politik. Dengan demikian elemen-elemen gerakan sosial memperoleh keleluasaan mengembangkan dirinya. Sebaliknya, gerakan sosial akan berjalan lambat di dalam sistem politik yang tertutup dan represif. Negara koersif yang kuat menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan gerakan. Disini perlu diingat pada waktu itu, sejak kehadiran perusahaan penambangan Premier Oil hingga Amerada Hess, adalah masa berakhirnya pemerintahan Soeharto.

Hal ini menimbulkan keterbukaan politik, sehingga partisipasi politik menjadi meningkat. Inilah sebabnya pada era reformasi ini ada keberanian masyarakat untuk mengekspresikan aspirasinya.

2. Munculnya Gerakan Perlawanan Nelayan dan Petani Tambak

2.1 Akar perlawanan

Kontribusi yang diberikan oleh perspektif perilaku kolektif adalah dengan menyatakan bahwa akar dari semua konflik, kekerasan, dan gerakan sosial adalah ketidakpuasan. Hampir selalu terjadi, gerakan sosial dalam bentuk apapun diawali oleh ketidakpuasan, baik terhadap norma-norma yang sedang berlaku, struktur sosial yang tidak adil, sistem politik yang menindas, ekonomi yang eksploitatif, marginalisasi ekonomi, diskriminasi kelompok dan identitas tertentu, dan yang keseluruhannya bisa dilihat dari kacamata ideologi dan perspektif yang berbeda-beda.

Terjadinya perasaan dipinggirkan dan rasa frustrasi yang muncul sebagai dampak perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kondisi seperti ini mudah dipicu dan berubah menjadi aksi-aksi kolektif spontan, tidak terorganisasi dan tidak menggunakan saluran-saluran resmi. Dalam bahasa Ted Gurr, misalnya, kekerasan-kekerasan muncul karena terjadinya deprivasi relatif. Perasaan terpinggirkan terjadi karena kesenjangan antara nilai-nilai kemampuan. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Semakin besar dan serius kesenjangan tersebut, maka potensi kekerasan

akan semakin besar pula. Singkat kata, gerakan sosial muncul sebagai akibat ketidakpuasan. Ia kemudian akan semakin berkembang ketika ketidakpuasan ini meluas dan pada saat yang sama tidak terdapat lagi institusi-institusi yang mampu berperan secara fleksibel yang mampu meresponnya.

Sebagaimana diketahui, munculnya perlawanan nelayan dan petani tambak disebabkan adanya rasa ketidakadilan, karena merasa dimarginalisasikan mata pencahariannya, terancam, tergusur, dan terganggu. Perasaan ketidakadilan inilah yang menjadi akar perlawanan nelayan dan petani tambak. Bert Klandermans (1997:205), misalnya, menguatkan Neidhart dan Rucht (1993) menyatakan deprivasi relatif merupakan bahan baku yang memungkinkan individu untuk bisa dimobilisasi. Tidak dapat disangkal lagi, keluhan dikonstruksikan secara sosial, begitu pula dengan deprivasi relatif, dan ketidakpuasan harus dikonversikan dalam bentuk aksi, tetapi merasakan ketidakadilan adalah akar dari protes dalam bentuk apapun.

Dalam kesempatan lain, Klandermans (2005:376) menjelaskan ketidakpuasan sendiri bukan merupakan alasan yang cukup bagi gerakan sosial untuk berkembang, atau bagi individu untuk berpartisipasi di dalam gerakan sosial. Sumber daya dan peluang penting untuk memahami mengapa populasi tertentu yang mengalami ketidakpuasan melakukan mobilisasi sementara yang lain tidak. Individu-individu memang membentuk identitas yang sama ketika mereka bersama-sama berbagi

ketidakpuasan dan bertidak secara kolektif. Ini tidak berarti menjustifikasi hak eksklusif apapun dari ranah ini. Sebaliknya, tiap-tiap pendekatan itu secara terpisah akan kurang berarti sebagai kerangka eksplanatoris bagi penelitian gerakan sosial.

Di sisi lain, della Porta dan Diani (1999:233) menjelaskan, pada umumnya, menurut mereka, gerakan sosial dibangun untuk merefleksikan ketidakpuasan kinerja kebijakan yang sedang berlangsung. Ditinjau dari segi kebijakan lebih konkrit lagi, menurut mereka, dampak gerakan sosial ini bisa dilihat dari adanya keputusan baru dan apakah keputusan itu benar-benar dilaksanakan. Kebijakan negara yang memberi izin usaha bagi industri pertambangan milik asing mengakibatkan hancurnya perekonomian nelayan dan petani tambak. Padahal, laut itu merupakan sumber penghidupan bagi penduduk nelayan dan petani tambak, yang sudah berjalan secara turun temurun sebagai mata pencaharian tradisional mereka. Perasaan ketidakadilan semacam ini, serta buruknya kinerja kebijakan seperti inilah, nelayan dan petani tambak melakukan aksi perlawanan, karena kehilangan pekerjaan mereka.

2.2 Kondisi sosial ekonomi

Kehadiran perusahaan penambangan minyak milik asing, Amerada Hess, telah menghilangkan sumber mata pencaharian komunitas nelayan dan petani tambak. Perekonomian komunitas nelayan dan petani tambak dihancurkan oleh industri pertambangan berikut limbah minyak yang

tumpah di laut dan mencemari air laut. Terjadi migrasi ikan yang mengakibatkan menurunnya penghasilan nelayan, hingga tidak mendapatkan hasil sama sekali.

Kekhawatiran dari berbagai pihak, kehadiran pabrik ini sangat berpotensi mencemari lingkungan dan kesehatan makhluk hidup, terbukti kemudian. Sejak kehadiran Premiere Oil di tahun 1998, telah berdampak kepada kesehatan lingkungan dan menurunnya pendapatan masyarakat di sepanjang delta. Masyarakat sekitar merasa keberatan khususnya pada tahap konstruksi, aktivitas nelayan menjadi terganggu dan kemudian berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Demikian pula jika pipa dipasang melalui laut, nelayan dapat terganggu kegiatannya dalam melaut, sehingga pendapatan mereka menurun. Mereka akan mengalami gangguan dalam memarkir kapal/ perahunya di tepi pantai dan wilayah tangkapan ikan terganggu. Hal ini dapat menimbulkan keresahan pada nelayan, karena nelayan akan mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi. Mengenai menurunnya pendapatan masyarakat nelayan di sepanjang delta, hal ini dituturkan oleh Shohibul Hajjah (50) sebagai berikut:

“akibat adanya kebocoran pada saat seismic atau pemboran yang memunculkan *lanthung-lanthung* (limbah minyak warna hitam), kami sama sekali tidak mendapatkan ikan karena terjadi migrasi ikan. Sedangkan berubahnya kualitas air (menjadi keruh) pendapatan kami bisa menurun hingga menjadi 30%. Sedangkan sebelumnya, meskipun ada kapal mini-trawl yang beroperasi secara gelap dan dekatnya dengan pelabuhan Gresik, yang sudah tercemar limbah pabrik, namun para nelayan masih bisa *berpenghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan* ”

Kondisi perekonomian yang memburuk ini menimbulkan konflik dan perlawanan dari nelayan dan petani tambak, disebabkan sumber mata

pencapaian mereka terancam. Selama masa konstruksi perusahaan, terjadi berbagai macam pelanggaran, berupa pencemaran lingkungan, pengabaian terhadap hak-hak masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang semakin memburuk ini mendapat protes dan perlawanan yang semakin masif dan meluas.

Dari perspektif perilaku kolektif (le Bon, 1960; Hoffer 1951; Blumer 1969; Smelser 1971; Toch 1966; dan Ted Gurr 1970), yang menyatakan bahwa akar dari semua konflik, kekerasan dan gerakan sosial adalah ketidakpuasan. Disini pragmatism ekonomi nelayan dan petani tambak diganggu. Gerakan sosial dalam bentuk apapun hampir selalu terjadi, diawali oleh ketidakpuasan akibat terjadinya marginalisasi ekonomi. Kondisi sosial ekonomi semacam inilah yang mendorong munculnya gerakan perlawanan nelayan.

Masih dalam aspek kondisi sosial ekonomi, ditinjau dari strategi *Community Development* (CD), dibangunnya industri pertambangan (MNC) ini ternyata tidak terbukti bisa mensejahterakan taraf hidup / menaikkan taraf hidup masyarakat di sekelilingnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena pihak MNC tidak merata dalam pendistribusian alokasi dana untuk CD, sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Pihak MNC telah mengkooptasi elite lokal melalui hubungan yang pragmatis. Karena masyarakat lokal adalah masyarakat santri, pihak MNC berasumsi bahwa dengan mengkooptasi elite-elite lokal melalui hubungan pragmatis (melalui strategi CD), maka elite-elite lokal akan bisa meredam gejolak masyarakat yang

menolak kehadiran MNC. Muncullah kekecewaan masyarakat terhadap elite-elite lokal. Masyarakat menuntut transparansi dana untuk *Community Development*, tidak perlu lewat elite-elite lokal, tetapi bantuan itu langsung kepada masyarakat.

Muncullah kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elite-elite lokal, seperti ulama/kiai, tokoh parpol politik dan tokoh masyarakat. Ulama / kiai yang memiliki pondok pesantren, dan yang telah menerima dana untuk *Community Development* berupa media pendidikan dan lain-lain, oleh masyarakat dituntut untuk mengembalikan ke pihak perusahaan. Selanjutnya, mereka meminta alokasi dana untuk *Community Development* diberikan langsung kepada masyarakat tanpa melalui elite-elite lokal.

Hal yang mengherankan adalah elite-elite lokal lainnya, seperti tokoh parpol / elite politik dan tokoh masyarakat yang dalam era reformasi mewacanakan perjuangan bagi rakyat, tidak memperjuangkan bagi rakyat, diam seribu bahasa, tetapi nyatanya justru berpihak kepada MNC. Disinilah letak keberhasilan MNC dalam menjinakkan elite-elite lokal, melalui hubungan pragmatis, melalui strategi *Community Development*. Kondisi dan situasi seperti ini menimbulkan perasaan bagi nelayan untuk berjuang sendirian (*self struggle*).

2.3 Kondisi sosial politik

Telah dituliskan di bagian depan, bahwa perspektif Struktur Kesempatan Politik memandang lingkungan eksternal sangat

mempengaruhi gerakan sosial. Bagi negara yang memiliki konfigurasi politik demokratis, terbuka kesempatan lebar bagi rakyat untuk melakukan berbagai bentuk partisipasi politik. Sebaliknya, gerakan sosial akan mengalami hambatan dalam sistem politik yang tertutup dan represif.

Ketika komunitas nelayan dan petani tambak melakukan perlawanan (1998-2002) terhadap keberadaan perusahaan multinasional, kondisi sosial politik waktu itu adalah adanya pergeseran konstelasi politik dari otoritarian ke demokrasi (pasca kejatuhan Soeharto). Keterbukaan politik semacam ini mendorong nelayan dan petani tambak untuk berani melakukan perlawanan terhadap elite penguasa. Namun demikian, meskipun terjadi pergeseran konstelasi politik dari otoritarian ke demokrasi, ternyata tidak membawa keuntungan bagi nelayan.

Perubahan konstelasi politik itu kemudian memunculkan perilaku baru: elite partpol/elite politik, dan tokoh masyarakat yang menggantikan peran yang di era Orde Baru diperankan oleh militer. Kemunculan elite baru tersebut justru menjadi bagian dari kekuatan modal (MNC) itu yang bersama elite birokrasi ikut menindas nelayan. Bukti-bukti keberpihakan mereka paling tidak membiarkan (politik pembiaran) terhadap nasib nelayan. Ketidakmampuan elite lokal yang berkolaborasi dengan MNC, untuk mengontrol bawah, yang berbeda dengan militer, akibatnya memunculkan gerakan perlawanan itu. Terjadinya proses deligitimasi elite

lokal di mata warga masyarakat bawah / di mata *grassroot* mendorong terjadinya gerakan perlawanan terhadap penguasa (politik dan modal).

Dalam konstelasi politik otoritarian, yakni selama pemerintahan Orde Baru, hampir setiap konflik dapat diredam secara efektif oleh negara. Fenomena negara dibawah Orde Baru merupakan khas negara korporatis. Peran negara di masa Orde Baru begitu dominan di segala aspek kehidupan, dan secara efektif menjalankan fungsi kontrol terhadap masyarakat yang aksesnya terhadap kehidupan demokrasi sangat buruk. Melalui mekanisme politik pengendalian, negara masuk ke berbagai wilayah publik yang perlahan tapi pasti mampu melumpuhkan berbagai kekuatan pro demokrasi. Partai politik, Ormas, lembaga legislatif, pers, organisasi profesi, mahasiswa, dan berbagai kelompok penekan berhasil dijinakkan dan bahkan ada kalanya dilumpuhkan dengan cara represif.

Setelah Indonesia memasuki apa yang disepakati sebagai era Reformasi, kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi pada negara dengan pelaku utama militer, birokrasi dan kaum konglomerat yang ketiganya menjadi agen kekuatan kapitalisme global, maka muncul kekuatan baru yaitu Elite Parpol. Elite baru inilah yang menjadi kelompok-kelompok penekan yang mengontrol kebijakan negara melalui jalur politik di parlemen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perkembangan politik Indonesia mengalami pergeseran karakter dari negara korporatis (*corporatist state*), menuju *organic state* yang mengarah ke tipe liberal. Akan tetapi keterbukaan politik

ini tetap saja tidak menguntungkan kaum nelayan, karena elite parpol pun terkooptasi oleh kaum pemodal.

2.4 Kondisi sosial budaya

Masalah yang sedang dihadapi komunitas nelayan dan petani tambak adalah adanya ketidakadilan, pencemaran lingkungan, perasaan yang dipinggirkan dan rasa frustrasi sebagai dampak perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Akhirnya gerakan perlawanan itu muncul sebagai akibat rasa ketidakpuasan. Nilai-nilai kultural membentuk suatu komitmen terhadap *public good* dan membentuk perasaan individu akan efikasi politik. Dengan menyoroti pentingnya permasalahan tertentu, misalnya tentang ketidakadilan, pencemaran lingkungan, pesan-pesan kultural membenarkan isu-isu yang muncul dalam agenda politik. Komunikasi yang bermuatan nilai (pesan) tidak hanya menggambarkan kondisi-kondisi yang diinginkan, tapi juga mentransmisi norma-norma kelayakan (*feasibility*) (Andrain, Charles F and Apter, David E 1995, h.314).

Demikian pula dalam setiap gerakan sosial senantiasa ada identitas dan solidaritas, perasaan senasib, yang menjadi basis perlawanan, membangun dan dikuatkan oleh gerakan sosial tersebut. Perasaan adanya “kita” dan “mereka”, misalnya, adalah manifestasi dari ketidakpuasan dan ketidakadilan dari hubungan-hubungan sosial yang tercipta.

Munculnya berbagai organisasi gerakan-gerakan lingkungan, gender, dan orientasi seksual, dll, dinilai sebagai bagian dari pentingnya budaya

politik dan konstruksi identitas kolektif baru yang memungkinkan munculnya aksi-aksi kolektif. Oleh karena itu, gerakan sosial harus membentuk realita bagi pendukung potensialnya, mengidentifikasi adanya ketidakadilan, mengembalikannya pada sistem yang ada atau pihak yang kontra dan memberikan simbol-simbol positif yang biasanya, dan lebih seringnya dengan malu-malu, dapat membuat orang-orang berkumpul bersama (Mc Adam, Tarrow dan Tilly, 1997: 149).

Kondisi sosial budaya yang tidak kondusif bagi nelayan dan petani tambak seperti didera oleh rasa ketidakadilan, rasa termarginalisasi secara ekonomi dan rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan yang sedang berlangsung. Kondisi yang menekan semacam ini, komunitas nelayan dan petani tambak ingin keluar dari kondisi ini, dan kondisi sosial semacam ini yang mendorong nelayan dan petani tambak untuk melakukan perlawanan. Para kulturalis melihat pentingnya tradisi ritual dan simbolisme di dalam membentuk cara dan metode pagelaran perlawanan, bentuk-bentuk mobilisasi dipelajari dan berakar pada beragam tradisi dan budaya. Adanya nilai-nilai di dalam suatu komunitas menjadikan aksi kolektif menjadi sesuatu yang sulit dimengerti tanpa pemahaman terhadap budaya itu. Bukan saja karena perilaku individu bisa lebih mudah dimonitor di dalam komunitasnya, tapi juga karena suatu komunitas yang solid memiliki susunan dan aturan dan sanksi-sanksi sosial yang negatif maupun positif (Mc Adam, Tarrow, dan Tilly, 1997: 156-7).



BAB V
VARIASI RESPONS NELAYAN
DAN PETANI TAMBAK
GUNA MENCAPAI
TUJUAN GERAKAN

BAB V

VARIASI RESPONS NELAYAN DAN PETANI TAMBAK

GUNA MENCAPAI TUJUAN GERAKAN

Pada dasarnya kehadiran perusahaan penambangan minyak asing di Ujung Pangkah direspons dengan dua macam. Pertama, bagi kelompok yang diuntungkan, mereka menyambut baik kehadiran perusahaan asing itu, sebab kehadirannya ternyata bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Kelompok masyarakat ini menerima kehadiran perusahaan asing itu disebabkan mereka bisa terserap sebagai tenaga kerja, bisa membuka usaha kost-kostan bagi pekerja pendatang, bisa membuka warung makan, bisa membuka usaha kecil-kecilan, yang intinya bisa meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

Di pihak lain, utamanya masyarakat nelayan dan petani tambak, merespons dengan melakukan perlawanan, karena merasa di pihak yang dirugikan. Pendapatan mereka semakin menurun dari hari ke hari. Hal ini disebabkan tergusurnya area penangkapan ikan nelayan, karena ditempati oleh perusahaan penambangan minyak untuk kegiatan pengeboran minyak. Karena menjadi nelayan adalah satu-satunya andalan mata pencaharian mereka, yang dijalani secara turun temurun, dan ketika mata pencaharian mereka terancam, ditambah lagi keluhan mereka kepada pihak pemerintah tidak segera direspons dan tidak ada solusi, maka solusi yang dipilih adalah

melakukan perlawanan. Perlawanan yang mereka lakukan adalah dalam tiga bentuk, yakni perlawanan tersembunyi, perlawanan terbuka nir kekerasan, sampai pada perlawanan terbuka dengan kekerasan.

1. Elemen-Elemen Masyarakat yang Menjadi Korban Industrialisasi

Pada dasarnya kelompok-kelompok masyarakat Ujung Pangkah yang menjadi korban secara langsung proyek penambangan migas adalah kelompok nelayan, petani tambak, pemilik sarang burung walet, *pintor* (pencari kepiting), para *buri* (pencari sisa-sisa panen ikan), para tenaga *pengesat* dan *pemburi* (Pesatbri) dan para pedagang hasil laut dan tambak.

Di bawah ini dipaparkan, bagaimana dampak negatif masing-masing elemen masyarakat akibat hadirnya proyek penambangan migas terkait dengan praktek-praktek tradisional mereka.

a. Nelayan

Elemen masyarakat yang pertama kali terkena dampak negatif industrialisasi minyak adalah nelayan. Pada tahap awal (konstruksi), daerah atau lokasi yang ditentukan sebagai sumur minyak justru di daerah *estuary*. *Estuary* adalah sebuah tempat (kawasan, area) bertemunya air tawar (muara sungai Bengawan Solo) dengan air laut, yang sekaligus dikelilingi oleh vegetasi mangrove (bakau); sehingga di wilayah inilah kaya akan ikan dimana terdapat berbagai macam ikan yang memiliki nilai komersial tinggi seperti: rajungan, ikan kakap merah, kakap putih, ikan kerapu, dan lain-

lain. Justru disinilah merupakan area penangkapan ikan (*fishing ground*) bagi nelayan setempat. Karena lokasi pemboran sumur minyak berada di area *fishing ground*, sehingga lokasi tersebut menggusur wilayah penangkapan ikan baik nelayan setempat. Ini berarti, bagi nelayan setempat Ujung Pangkah, keberadaan proyek penambangan ini merupakan ancaman terhadap mata pencaharian mereka.

Selain itu pelaksanaan *seismic* di kawasan *estuary* tersebut, sejak tahap survey (pra konstruksi) hingga tahap *seismic* (tahap konstruksi) menimbulkan masalah bagi nelayan, disebabkan adanya pengusiran terhadap nelayan yang menangkap ikan di sekitar wilayah yang di survey dengan alasan mengganggu. Penutupan jalur lalu lintas perahu nelayan oleh perusahaan dengan pemasangan alat-alat monitor berupa kabel-kabel dan kayu maupun bambu sebagai alat pemancang.

Sebagaimana diketahui, *estuary* yang sekaligus dikelilingi hutan bakau itu, merupakan tempat dimana ikan-ikan, termasuk rajungan melakukan pemijahan yang akhirnya berkembang biak, hal ini yang menyebabkan daerah ini menjadi daerah yang paling produktif dari seluruh daerah produsen ikan di Jawa Timur. Seperti dilaporkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 1990-2000, rata-rata produksi ikan dari hasil penangkapan adalah 5.142,97 ton per tahun, belum termasuk hasil budidaya yang terdapat di tambak-tambak yang luasnya mencapai 50% dari total luas tambak yang ada di Kabupaten Gresik atau 56.000 hektar.

Singkat kata, area penangkapan ikan bagi para nelayan terganggu dan tergusur, dan berakibat penghasilan nelayan menurun drastis hingga nol sama sekali. Belum lagi kerugian yang diderita oleh nelayan adalah peralatan tangkap ikan yang berupa jaring yang terseret kapal milik perusahaan proyek penambangan migas, jaring-jaring yang sobek, serta hilang dan jaring-jaring terlumuri tumpahan minyak, maupun tersangkut kabel *seismic*. Pihak nelayan mengatakan kerugian yang diderita sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Nama-nama nelayan yang menderita kerusakan alat penangkapan ikan¹ sebelum terjadinya kerusuhan dan pengrusakan terhadap asset PT Amerada Hess di Ujung Pangkah adalah: Muadhrom (Pangkah Kulon), Khusnul (Pangkah Wetan), Mubaki (Pangkah Kulon), Aslur (Pangkah Wetan), Basrowi (Pangkah Wetan), Anas (Pangkah Wetan) dan Tohiron (Pangkah Kulon).

Kerugian seperti inilah yang dianggap mengancam perekonomian masyarakat nelayan Ujung Pangkah yang jumlahnya sebanyak 1847 orang dan menjadi pemicu kemarahan mereka.

b. Petani tambak

Elemen masyarakat Ujung Pangkah lainnya yang terkena dampak negatif industri migas adalah petani tambak. Sebagaimana diketahui,

¹ Alat tangkap ikan nelayan berupa jaring, yang dipasang di laut yang bersifat pasif (tidak bergerak), terbuat dari plastik nilon, rata-rata harganya Rp 5.000.000,-. Bandingkan untuk jaring kapal trawl sepanjang 1500 m seharga Rp 500.000.000,-

tambak di Ujung Pangkah menggantungkan suplay air dari laut. Air laut yang masuk ke tambak ini merupakan sumber rezeki bagi petani tambak. Hal ini disebabkan, bersama-sama masuknya air laut ke tambak inilah berbagai jenis ikan dan udang bisa didapatkan oleh petani tambak. Ini merupakan hasil harian yang bisa diperoleh petani tambak. Selain itu, tambaknya sendiri yang luasnya 5.051.929 hektar berisi budidaya bandeng dan udang windu. Malahan petani tambak di Kecamatan Ujung Pangkah melakukan diversifikasi biota yang dibudidayakan, tidak hanya bandeng dan udang windu tetapi juga udang putih. Jadi meskipun ada serangan penyakit "*white spot*" terhadap udang windu, akan tetapi udang putih dan ikan bandeng masih bisa dipanen.

Apabila limbah yang tertumpah di sekitar penambangan hanyut dalam air dan mencemari lingkungan akibatnya merusak habitat ikan dan udang di laut dan di tambak. Seperti telah ditulis di depan, bahwa rencana lokasi proyek penambangan tepat berada di tengah-tengah daerah yang termasuk sensitive baik terhadap terjadinya konflik maupun terhadap limbah serta akibat lainnya yang mungkin akan mengganggu.

Menurut data yang terhimpun di lapangan, rencana *seismic* sebenarnya menjadi sumber konflik di masyarakat warga setempat, karena diadakan di hampir keseluruhan wilayah pertambakan yang ada di Ujung Pangkah yang merupakan sumber kekuatan ekonomi masyarakat. Padahal kondisi obyektif yang ada di masyarakat masih pro dan kontra, tetapi hal itu tetap dipaksakan pelaksanaannya, sehingga memancing emosi warga setempat.

Apalagi *seismic* akan dilaksanakan di sepanjang wilayah pertambakan yang ada di Ujung Pangkah dengan menggunakan bahan peledak, selain itu terjadi adanya intimidasi terhadap petani tambak yang tambaknya akan dilalui oleh jalur *seismic* untuk bisa digunakan bagi kelangsungan rencana *seismic*. Intimidasi tersebut berupa ancaman kalau misalnya warga menolak tambaknya akan diperlukan untuk kepentingan *seismic* maka tambaknya akan disegel.

c. Pemilik sarang burung walet

Pada tahap konstruksi, dilakukan penebangan pohon-pohon besar yang berfungsi sebagai pelindung di sisi kiri kanan jalan untuk keperluan transportasi alat-alat (berat) untuk pembangunan *base camp* maupun pembangunan pergudangan milik perusahaan. Hal ini berakibat cuaca menjadi semakin panas dan membahayakan dan mengancam budidaya sarang burung walet. Apabila udara semakin panas burung walet menjadi tidak nyaman kemudian melakukan migrasi. Dengan minggatnya burung walet ini, rumah-rumah burung walet yang dibangun dengan biaya mahal layaknya rumah bertembok ini akan kosong dan pembudi daya sarang burung walet akan menderita kerugian besar. Belum lagi pada tahap eksploitasi, dimana asap dari migas alam yang mengandung CO₂ dan belum ada alat yang dapat memfilter asap panas. Hal ini akan membahayakan dan mengancam budidaya sarang burung walet dan kesehatan masyarakat sekitar. Dengan

demikian elemen masyarakat pemilih sarang burung walet ini yang menjadi korban ketiga industrialisasi migas setelah nelayan dan petani tambak.

d. *Pemburi* dan *pintor*

Seperti ditulis dimuka, kelompok *buri* adalah lapisan masyarakat petani tambak di Ujung Pangkah yang paling bawah, termasuk *pintor* (pencari kepiting). Kelompok ini juga terancam mata pencahariannya bilamana tambak yang merupakan daerah untuk mendapatkan rezeki terkena polusi; sehingga ikan-ikan dan kepiting mati terkena limbah. *Buri* adalah sekelompok orang yang pekerjaannya mencari sisa-sisa ikan pada waktu tambak panen. Setelah tambak dibuang airnya oleh kelompok *pengesat*, ikan di tambak di panen oleh *pengesat*, maka sisa-sisanya diambil oleh *pemburi*. Begitulah seterusnya. Apabila terjadi penurunan kualitas air di tambak hingga terdapat *polutan* (limbah migas)² banyak ikan mati; kelompok *buri* dan *pengesat* ini akan terancam mata pencahariannya. Begitu pula para *pintor*, akan menjadi korban dari hadirnya industrialisasi migas karena banyak kepiting yang mati akibat menurunnya kualitas air dan akibat adanya pencemaran limbah. Jadi para *pengesat* dan *pemburi* serta *pintor* merupakan kelompok ke 4 (empat) yang menjadi korban industrialisasi migas.

e. Pedagang

Para pedagang, dari saudagar hingga pedagang kecil pekerjaannya adalah membeli hasil-hasil atau produksi ikan tangkapan dari nelayan,

² di tambak

hasil-hasil tambak dari petani tambak, *pengesat* dan *pemburi* hingga *pintor*. Apabila produksi ikan dari laut dan tambak menurun drastis atau kosong sama sekali akibat terkena polusi, maka para pedagang ini tidak memperoleh dagangan karena memang tidak ada yang dibeli. Akibatnya para pedagang juga menderita kerugian, karena tidak mendapatkan keuntungan. Bagi para pedagang, apabila terjadi seperti itu, maka hal itu akan mengancam kelangsungan mata pencaharian mereka. Jadi kelompok pedagang merupakan korban pembangunan kelima dari kelompok-kelompok lainnya.

Itulah kelompok-kelompok masyarakat atau komposisi masyarakat Ujung Pangkah yang terkena dampak negatif industrialisasi migas atau yang menjadi korban pembangunan yang terdiri dari kelompok nelayan, petani tambak, pemilik sarang burung walet, *pengesat-pemburi*, *pintor* dan pedagang.

2. Aktor-aktor Gerakan Perlawanan

Pada awalnya, aktor-aktor yang berjuang melawan perusahaan tambang minyak Amerada Hess adalah kelompok nelayan dan petani tambak saja. Hal ini dimaklumi karena komunitas nelayan dan petani tambak yang langsung terkena dampak negatif dari pencemaran lingkungan, yang menyebabkan ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Hal ini diungkapkan oleh Shohibul Hajjah (50) Ketua Nelayan Ujung Pangkah sebagaimana yang diutarakan kepada peneliti :

“Setelah perusahaan pertambangan melakukan pemboran minyak di pantai Ujung Pangkah, kemudian muncullah *lanthung lanthung* minyak menyebar ke perairan laut Ujung Pangkah. Kemudian yang terjadi adalah para nelayan gagal mendapatkan tangkapan ikan, disebabkan tidak ditemukan ikan, di daerah tangkapan mereka. Ikan-ikan *minggat* dari area penangkapan, akibat dari pencemaran lingkungan atau limbah pemboran minyak berupa *lanthung lanthung*. Akibatnya seluruh nelayan Ujung Pangkah menjadi kecewa dan marah terhadap perusahaan pertambangan minyak.”

Sehubungan dengan itu, Kovenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya Pasal 11, menyatakan bahwa “Negara-negara penandatanganan Kovenan mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya”. Selain itu, disebutkan juga ... rakyat berhak atas kebudayaan yang menghidupi mereka sendiri. Untuk memperoleh hak itu, maka penguasaan atas sumber produksi sebagai dasar kebudayaan itu sendiri juga perlu diperhatikan. Akan halnya Pasal 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal menegaskan bahwa standar hidup yang layak itu berarti terpenuhinya kebutuhan pangan, pakaian dan perumahan dan perawatan medis serta pelayanan sosial yang diperlukan. Ada sembilan hak masyarakat yang harus dilindungi negara menurut Pasal 6-15 sebagaimana tercantum dalam Kovenan tersebut: (1) Hak atas kerja (Pasal 6); (2) Hak atas kondisi kerja yang layak (Pasal 7); (3) Hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh (Pasal 8); (4) Hak atas jaminan sosial (Pasal 9); (5) Hak atas perlindungan bagi keluarga (Pasal 10); (6) Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian dan tempat tinggal (Pasal 11); (7) Hak atas kesehatan (Pasal 12); (8) Hak

atas pendidikan (Pasal 18) dan (9) Hak atas kebudayaan (Pasal 15). Oleh karena itulah, ketika kesejahteraan (ekonomi) mereka terancam, komunitas nelayan dan petani tambak ini berupaya melakukan perlawanan terhadap sumber ketidakadilan ini, ialah Amerada Hess. Meskipun di Ujung Pangkah telah ada organisasi nelayan dan petani tambak, namun perlawanan ini masih terbatas perorangan, artinya aktor-aktor gerakan perlawanan ini masih bersifat "*gethok tular*" belum melibatkan organisasi; namun tindakan perlawanan yang mereka lakukan itu perlu dukungan secara informal oleh sebuah konsensus di antara sebagian (besar) warga nelayan dan petani tambak, yang tentu sulit di ukur mengenai legitimasi moral praktik-praktik sosial tertentu. Ketua organisasi nelayan Pangkah Kulon mengatakan bahwa perlawanan nelayan di Ujung Pangkah pada awalnya belum melibatkan organisasi, namun sudah bersifat kolektif dan dilakukan secara tersembunyi.

Aktor-aktor gerakan lainnya adalah para tokoh masyarakat setempat. Seperti telah dikemukakan dalam tulisan terdahulu, bahwa masyarakat Ujung Pangkah adalah masyarakat agamis. Pola hubungan kiai-santri masih dipertahankan. Ketika para nelayan dan petani tambak menyampaikan keresahannya kepada tokoh masyarakat ini, maka segera direspon dengan cepat. Dukungan moral diberikan kepada para nelayan dan petani tambak. Salah satu tokoh masyarakat yang dikenal luas di dalam perjuangan nelayan dan petani tambak adalah seorang ulama bernama Husen Bawafie. Namun,

tidak semua tokoh masyarakat mendukung perjuangan nelayan dan petani, sebagian tokoh masyarakat ada yang terkooptasi oleh perusahaan maupun negara.

Aktor gerakan lainnya adalah Persatuan Pengesat dan Pemburi (*Pesatbri*). Komunitas kelompok ini adalah bagian tak terpisahkan dari petani tambak. Apabila tambak mengalami gagal panen akibat pencemaran air laut, serta merta nafkah komunitas *Pesatbri* juga termarginalisasi secara ekonomi. Jadi dapat dipahami apabila *Pesatbri* ini memberi dukungan dan menjadi partisipan dalam perjuangan nelayan dan tani tambak melawan Amerada Hess. Sebagaimana dikatakan oleh Koib (43) Ketua Pengesat dan Pemburi Ujung Pangkah, ia menuturkan :

“Lanthung lanthung sudah memasuki area pertambakan, terutama di area pertambakan sebelah utara, paling ujung, sebagian ikan bandeng mati dan lainnya akan terancam mati. Apabila lanthung lanthung datang bersamaan air pasang, kibatnya akan fatal. Oleh karena itu, bersama Shohibul Hajjah dan Ilham Ketua Pemuda Ujung Pangkah, kami bergabung untuk melakukan protes terhadap kehadiran pertambangan minyak di Ujung Pangkah.”

Aktor gerakan lainnya adalah kalangan pemuda. Kalangan pemuda inilah yang dianggap memiliki militansi yang tinggi. Kalangan pemuda ini memiliki sifat militan yang tinggi disebabkan beberapa hal. Mereka adalah anak-anak nelayan setempat, yang pada umumnya mengenyam pendidikan tinggi, dan gemar dalam kehidupan organisasi. Banyak diantara mereka yang juga menjadi anggota Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka memilih jejaring yang kuat dan komunikasi yang intens dengan organisasi lokal dari kecamatan hingga kabupaten dan propinsi. Kalangan pemuda ini membentuk organisasi pemuda yang diberi nama Forum Komunikasi

Pemuda Ujung Pangkah. Forum ini adalah organisasi yang mandiri, terlepas dari kooptasi yang dilakukan oleh negara, meskipun alamat kantornya persis di depan kantor kecamatan Ujung Pangkah. Forum ini diketuai oleh Ilham, seorang Sarjana Pendidikan (Elektro), dan dengan Sekretaris Ainul Fuad, Sarjana Agama. Forum Komunikasi inilah yang menjadi motor penggerak aksi perlawanan nelayan dan petani tambak melawan Amerada Hess.

Selain aktor-aktor di atas, masih ada kelompok-kelompok lain yang ikut bermain di dalam gerakan perlawanan ini, dan kelompok terakhir ini tidak berdomisili di Ujung Pangkah, tetapi berkedudukan di Surabaya sebagai ibukota dari kota Surabaya, dan sebagai ibukota Provinsi. Organisasi/ Yayasan ini bernama Lembaga Bantuan Hukum yang beralamat di jalan Kidul Surabaya. Selain itu masih ada satu lagi organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Kedua organisasi non pemerintah ini bergerak di bidang isu, yang satu dengan gigih menyuarakan isu-isu lingkungan dan yang lainnya mengedepankan isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Akibatnya pada tanggal 20 Agustus 2006, di kantor Kabupaten Gresik, Bupati Drs. K.H. Robbach Ma'sum mensinyalir bahwa Lembaga Bantuan Hukum Surabaya telah memprovokasi masyarakat Gresik termasuk Ujung Pangkah untuk menolak Amerada Hess. Sementara itu, aktivitas WALHI tidak kalah gencarnya. Dengan menggunakan media massa, WALHI gencar menyuarakan kerusakan lingkungan yang

mengakibatkan termarginalisasinya ekonomi masyarakat nelayan. Isu yang berkembang di masyarakat adalah bahwa jika perikanan disandingkan dengan pertambangan, maka perikanan akan mengalami kekalahan. Isu yang ditiupkan adalah rendahnya kualitas air laut akibat polusi minyak yang berdampak migrasinya ikan-ikan di laut, estetika lingkungan yang rusak dan tidak dikembalikan seperti semula akibat penggalian dan pemasangan pipa gas di darat, serta menurunnya kualitas udara dan kebisingan.

Aktor lain yang terlibat dalam perlawanan terhadap Amerada Hess adalah kelompok peternak burung walet. Kelompok ini melakukan perlawanan karena merasa dirugikan usahanya. Sebagaimana dikatakan peternak burung walet yang bernama Azir (48) :

“Semenjak dilakukan pemboran minyak di pantai Ujung Pangkah, suhu udara dirasakan semakin panas. Asap dari migas alam ini diduga sebagai penyebab suhu udara semakin panas di pantai Ujung Pangkah, sehingga membahayakan usaha budidaya sarang burung walet; dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pesisir. Akibat suhu udara yang memanas ini, menyebabkan minggatnya burung walet sehingga peternak burung walet menderita kerugian yang besar.”

Kelompok lainnya adalah kelompok pedagang. Para pedagang ikan dan hasil laut lainnya ini ikut melakukan aksi perlawanan disebabkan karena sumber mata pencaharian mereka yakni berdagang menjadi terancam keberlangsungannya atau mengalami kegagalan. Hal ini akibat dari para nelayan dan petambak gagal untuk mendapatkan ikan dan hasil-hasil laut dan tambak, akibat polutan yang dihasilkan oleh tumpahan minyak dan akibat kebocoran minyak. Mereka khawatir akan gulung tikar karena tidak lagi mendapatkan barang dagangan.

Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok *pintor* atau orang-orang yang pekerjaannya mencari kepiting di pertambakan. Akibat keruhnya air laut, dan karena disebabkan adanya polutan mengakibatkan banyak kepiting yang mati. Mata pencaharian mereka terancam; padahal ini merupakan andalan usaha mereka. Mereka merasa kecewa dan marah atas kondisi semacam ini, kemudian bergabung dengan kelompok nelayan dan petambak untuk melakukan perlawanan terhadap perusahaan Amerada Hess.

Aktor lain yang penting adalah Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Organisasi yang berkedudukan di tingkat lokal atau kecamatan Ujung Pangkah ini memiliki peran yang cukup besar dalam gerakan perlawanan di Ujung Pangkah. Anggota lembaga swadaya masyarakat adalah para santri. Mereka melakukan komunikasi yang intens dan membangun jaringan yang kuat dengan pesantren-pesantren, tokoh-tokoh masyarakat terutama ulama, dalam upaya memberikan dukungan terhadap gerakan perlawanan yang dilakukan oleh nelayan dan petani tambak.

3. Kelompok yang Dirugikan dan yang Diuntungkan

3.1 Industrialisasi dan lingkungan

Industrialisasi dalam arti sempit, dapat diartikan sebagai pembangunan industri atau pabrik-pabrik. Namun dalam arti luas industrialisasi bermakna membangun perekonomian sebuah negara terutama bertumpu

pada pengembangan sektor industri. Dengan kata lain, industri menjadi tulang punggung perekonomian seluruh bangsa dan negara itu. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan dampak industrialisasi dalam arti yang sempit, yakni dampak pembangunan industri.

Terkait dengan masuknya proyek pengembangan lapangan gas di Ujung Pangkah, nyata-nyata telah menimbulkan berbagai dampak baik fisik maupun sosial. Yang menjadi persoalan disini adalah tidak adanya sosialisasi (penyuluhan) yang *massive* dari pihak perusahaan penambangan kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh penambangan tersebut. Selain itu, pihak perusahaan penambangan dianggap tidak transparan terhadap rencana pelaksanaan proyek tersebut yang akhirnya menyebabkan pemahaman yang tidak sama di kalangan warga Ujung Pangkah.

Di bawah ini dipaparkan dampak negatif industrialisasi migas terhadap lingkungan:

- a. Penggusuran nelayan demi pengadaan lokasi industri. Area penangkapan ikan nelayan Ujung Pangkah terganggu dan tergusur. Dilihat dari lokasi pertambangan, maka lokasi yang dipakai oleh penambang adalah daerah/area nelayan tradisional untuk menangkap ikan, maka jika pertambangan minyak dan gas bumi dilanjutkan maka nelayan harus dipindah ke tempat yang lebih jauh ke laut lepas, karena daerah pertambangan adalah daerah terlarang bagi para nelayan. Apabila daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) yang semakin jauh ke tengah laut, akan terjadi kendala, yaitu

kemampuan nelayan untuk menuju *fishing ground* tersebut sangat terbatas karena kekuatan kapal dan mesin yang dimiliki nelayan juga terbatas (kapal dengan tonase yang kecil). Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh nelayan tradisional, karena tidak sekedar kapal saja yang diganti tetapi juga alat tangkap yang harus diganti dan mahal harganya.

Selain berdampak negatif terhadap nelayan, petani tambakpun terkena dampaknya. Petani tambak Ujung Pangkah pada umumnya menggantungkan air dari air laut untuk budidaya udang dan ikan. Disamping petani menaburkan benih juga mendapatkan bibit-bibit ikan dan udang dari laut sehingga tiap hari petani (tambak) bisa mengambil udang dari tambak sambil menunggu waktu untuk panen raya. Pertambangan di perairan Ujung Pangkah akan berdampak negatif pada perubahan air laut dan ekosistem laut karena pencemaran limbah yang ada. Dari air laut yang berlimbah akan menggusur/ mengancam budidaya udang dan ikan yang ada di dalam tambak.

b. Penurunan mutu lingkungan hidup

Kelompok lingkungan yang terkena dampak dari pengembangan lapangan gas Ujung Pangkah berupa komponen fisik, biologi khususnya biota perairan dan flora darat.

1) Komponen fisik:

Khususnya pada tahap konstruksi, kegiatan-kegiatannya berdampak pada kualitas udara dan kebisingan. Kegiatan-kegiatan itu berupa

(a) mobilisasi peralatan dan material lewat darat, pembangunan dan pengoperasian *base camp* untuk pekerja dan gudang, saat pembangunan saluran pipa, (b) mobilisasi peralatan dan material lewat darat, pembangunan dan demobilisasi alat berat saat pembangunan Fasilitas Produksi Pengolah Gas. Pada pasca penanaman pipa gas, terjadi genangan air yang diakibatkan penggalian lubang yang tidak diratakan kembali atau yang tidak diperbaiki.

Kualitas air laut akan menurun. Hal ini terjadi pada kecelakaan pada saat kegiatan *seismic*, pengeboran dan pembuatan anjungan, pembuangan lumpur hasil pemboran, yakni munculnya tumpahan minyak yang menyebar ke mana-mana. Pada saat *seismic* tersebut, nelayan Ujung Pangkah menyaksikan kebocoran minyak itu, oleh masyarakat nelayan, tumpahan minyak yang berwarna hitam itu dinamakan *lanthung-lanthung*. *Lanthung-lanthung* inilah yang menyebabkan minggatnya ikan-ikan, sehingga para nelayan gagal total untuk mendapatkan hasil tangkapannya. Inilah yang menjadi pemicu para nelayan untuk melakukan perlawanan terhadap perusahaan penambangan minyak dan gas.

Hal serupa juga terjadi pada tahap konstruksi, dimana mobilisasi peralatan dan material lewat laut, dan pemasangan pipa di laut. Kegiatan ini mengakibatkan dampak terhadap penurunan kualitas air laut.

Estetika lingkungan terganggu. Hal ini terjadi oleh karena pada saat penggalian lobang untuk menanam pipa yang lewat darat tidak dikembalikan seperti sedia kala dan tidak diperbaiki. Hal ini mengakibatkan menurunnya keindahan lingkungan.

2) Komponen biologi

Perlunya dipaparkan perihal hewan atau tanaman yang banyak menderita kerugian karena polusi dan perusakan lingkungan lain.

(a) Hewan di laut.

Limbah minyak yang tertumpah di sekitar pertambangan hanyut dalam air (laut) dan kemudian mencemari lingkungan. Akibatnya merusak habitat ikan dan udang di laut dan di tambak. Tambak di Ujung Pangkah menggantungkan suplay air dari laut. Akibat pencemaran lingkungan ini banyak ikan yang bermigrasi sampai pada yang mati. Udang di tambak banyak yang mati, sehingga tambak gagal panen. Laut di Ujungpangkah termasuk *nursery ground*, karena di daerah inilah (yang menjadi daerah rebutan antara nelayan setempat dengan perusahaan penambangan migas), selain tempat bertemunya air tawar dengan air asin (*estuary*) juga dikelilingi oleh vegetasi mangrove. Di tempat inilah ikan-ikan melakukan pemijahan yang akhirnya berkembang biak. Karena terjadi kebocoran pada saat *seismic*, maka limbahnya mengancam habitat ikan di situ sehingga terjadi migrasi ikan dan kematian ikan.

(b) Flora darat.

Pembuatan gudang-gudang material dan peralatan untuk kepentingan pada tahap konstruksi, operasi dan eksploitasi, pembuatan galian dan pemasangan pipa di darat yang dilakukan di sisi-sisi jalan dan tempat-tempat tertentu berdampak pada berkurangnya jumlah serta keaneka-ragaman jenis flora darat. Hal ini tampak dalam penebangan pohon-pohon pelindung di tepi-tepi jalan. Tanaman peneduh jalan ini harus dibabat demi untuk pembangunan industrialisasi.

3.2 Pro dan kontra terhadap industri pertambangan

a. Dampak ekonomi bagi nelayan

Sejak dimulainya tahap konstruksi, yang berupa kegiatan mobilisasi peralatan dan material lewat laut, dan kemudian pemasangan kabel-kabel di laut untuk keperluan *seismic* dan pembuatan anjungan, sudah mulai mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari ikan. Hal ini mengingat lokasi rencana kegiatan merupakan area utama *fishing ground* nelayan setempat. Sejak dilihat oleh para nelayan Ujung Pangkah bahwa di laut sudah terdapat *lanthung-lanthung* (limbah minyak kehitam-hitaman) menyebar ke permukaan air laut, nelayan mulai cemas. Sehari-hari "*miyang*" (menangkap ikan di laut) tidak memperoleh tangkapan sama sekali. Sehingga dengan demikian menurunnya kualitas air di perairan Ujung

Pangkah ini berdampak pada menurunnya jumlah ikan baik di laut maupun di tambak. Dengan bermigrasinya ikan-ikan di laut ini jelas merugikan pihak nelayan dan petani tambak, yang dianggap mengancam perekonomian masyarakat Ujung Pangkah.

Namun, memang ada juga anggota masyarakat meskipun kecil yang diuntungkan karena kehadiran perusahaan penambangan minyak dan gas ini, khususnya bagi mereka yang rumahnya disewa oleh konsultan dan pekerja asing, dan juga rumah-rumah penduduk yang kamar-kamarnya disewakan untuk kos-kosan karyawan pendatang. Selain itu, munculnya warung-warung kopi dan makan di sana-sini untuk melayani para pekerja pendatang. Bagi yang setuju dengan kegiatan proyek, terkesan adanya harapan bahwa kehadiran proyek akan dapat membuka lapangan kerja bagi mereka, yang berarti peningkatan penghasilan dan taraf hidup.

b. Dampak sosial bagi masyarakat

Sejak pada tahap konstruksi, pendatang baru sudah mulai bermunculan dan terus bertambah. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar (dan kasar atau *non-skill*) ini diperlukan untuk kegiatan pembangunan *base camp* dan gudang pada tahap konstruksi, baik untuk keperluan pembuatan lobang bor dan pembangunan saluran pipa akan berdampak positif kepada penduduk karena memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka usaha kecil-kecilan berupa warung, kios dan lain-lain guna meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, banyak diantara mereka

yang diuntungkan karena para pendatang dan pekerja ini mencari pondokan untuk tempat tinggal. Bahkan banyak di antara rumah penduduk yang sebagian atau seluruhnya dikontrakkan baik bagi pekerja asing atau pekerja lokal.

Peningkatan pendapatan ini tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat Ujung Pangkah, tetapi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Perbedaan semacam ini akibatnya menimbulkan kecemburuan sosial. Hal inilah yang memunculkan isu pro dan kontra atas kehadiran proyek penambangan migas tersebut. Bagi yang setuju dengan kegiatan proyek, terkesan adanya harapan bahwa kehadiran proyek akan membuka peluang dan lapangan kerja bagi mereka, yang berarti peningkatan hidup. Bagi yang tidak setuju, karena tidak diuntungkan, mengetengahkan isu pencemaran lingkungan dan pelestarian alam yang mengkhawatirkan masa depan mereka sebagai nelayan dan petambak.

Akibat pro dan kontra ini, masyarakat Ujung Pangkah terbelah. Apabila diperhitungkan, lebih banyak masyarakat yang dirugikan daripada yang diuntungkan. Kondisi semacam inilah yang bisa memicu munculnya gerakan perlawanan untuk menolak kehadiran proyek penambangan migas tersebut.

Selain itu, kehadiran para pendatang itu membawa kebiasaan dan budaya sendiri-sendiri, yang berbeda dengan budaya masyarakat setempat yang Islami. Seperti diketahui masyarakat Ujung Pangkah adalah masyarakat dengan jumlah penduduk sebesar 41.418 orang yang

kesemuanya memeluk agama Islam dan religius, hanya 6 orang saja yang memeluk agama Katolik. Oleh karena itu, perbedaan budaya serta kebiasaan antara pendatang dengan masyarakat setempat ini menimbulkan ketegangan. Sebagai contoh misalnya pada bulan puasa, dimana penduduk setempat sedang menjalankan ibadah puasa, diketahui para pendatang pekerja ini menenteng botol minuman keras, merokok serta mabuk minuman keras yang mengganggu ketenteraman warga di tempat-tempat terbuka. Bahkan masyarakat setempat mempertanyakan dan mengeluhkan mengapa para pendatang pekerja ini, tentu saja didukung oleh pihak perusahaan melakukan peringatan hari Natal. Mereka menganggap budaya semacam itu sebagai budaya asing yang tidak memakai nilai-nilai moral dan agama. Mereka meminta jaminan atas terpeliharanya nilai-nilai budaya setempat.

Sesungguhnya pihak warga telah melakukan protes terhadap pihak perusahaan atas kejadian seperti itu, bahkan juga melalui aparat pemerintah setempat. Namun tetap saja tidak dihiraukan dan tidak ada tanggapan baik dari pihak perusahaan maupun tidak lanjut dari pihak pemerintah. Kondisi semacam ini justru menimbulkan sikap negatif dari masyarakat.

Sekaitan itu, kiranya perlu diperhatikan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 (UU LH 1982) yang mengatakan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya

secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup (Pasal 1 (1)). Berikutnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan lebih diperluas menjadi “upaya sadar dan berencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”. Emil Salim mantan Menteri Negara KLH era Orde Baru, mengatakan bahwa seharusnya Indonesia memperhatikan secara konsisten kesepakatan Rio de Janeiro 1992 tentang lingkungan dan pembangunan, yang mengatakan antara lain: pertama, pembangunan dengan pertimbangan lingkungan merupakan tanggung jawab dan peran serta seluruh penduduk (pemuda, perempuan yang peduli pada masalah keperempuanan, petani, buruh, pebisnis, akademisi ilmiah, *local authority*, *local indigeneous population* dan lembaga swadaya masyarakat); kedua, penduduk asli/pribumi dan masyarakat daerah memiliki peran vital dalam manajemen dan pembangunan lingkungan karena pengetahuan dan praktek-praktek tradisional mereka. Sekaitan dengan butir 2) di atas; Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaadmadja juga pernah mengingatkan tentang perlunya menghormati dan memberi kepastian hukum atas hak-hak penduduk asli, karena merekalah yang secara rinci memahami kondisi dan sifat-sifat sumber daya lingkungan setempat. (Silaen, 2006:101-102).

3.3 Respons nelayan dan petani tambak

Seperti ditulis di muka, kehadiran perusahaan multinasional disambut oleh komunitas nelayan dan petani tambak dengan dua cara: menerima dan melawan. Mereka yang menerima adalah kelompok yang diuntungkan secara ekonomi, dan yang melawan adalah kelompok yang dirugikan secara ekonomi. Selanjutnya dalam uraian ini tidak ditulis lagi kelompok yang diuntungkan karena hal itu telah dipaparkan pada tulisan di muka.

Bagi kelompok yang melawan, bentuk-bentuk perlawanan mereka bervariasi. Pertama, melawan secara sembunyi-sembunyi, kedua, melawan secara terbuka nir kekerasan dan ketiga, melawan secara terbuka dengan menggunakan kekerasan. Di bawah ini dijelaskan mengenai berbagai respons yang dilakukan oleh komunitas nelayan dan petani tambak, terhadap kehadiran perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pertambangan minyak.

Perlawanan secara tersembunyi

Terdapat tiga tipe pokok aksi perlawanan yang muncul di lokasi penelitian. Tiga tipe aksi kolektif itu, yang dalam bahasan Tarrow (1994), disebut pertama, aksi langsung yang mengganggu (*disruption*); kedua, demonstrasi publik yang terorganisir (*convention*) dan yang ketiga, kekerasan terhadap orang lain (*violence*). Meskipun *violence* (aksi kekerasan), *disruption* (aksi yang mengganggu), dan *convention* (persetujuan) berbeda dalam beberapa hal, tapi ketiganya memiliki kesamaan umum. Yaitu

ketiganya merupakan ekspresi konfrontasi publik antara penentang dan pihak penguasa dalam area abu-abu antara politik institusional dan individu yang membelot.

Berbeda dengan Tarrow, Scott (1985, terj. 393-394) menjelaskan perihal perlawanan petani : Pun kita jangan lupa bahwa bentuk-bentuk perlawanan petani bukan sekedar hasil dari ekologi sosial kaum tani. Parameter-parameter perlawanan juga ditentukan, sebagian oleh lembaga-lembaga penindas itu bekerja dengan efektif, mereka menghindari bentuk-bentuk perlawanan oleh perorangan, dengan tidak formal, dan bersifat gelap. Jadi, sah sekali—dan bahkan penting—untuk membedakan antara berbagai tingkat dan bentuk perlawanan : formal-informal, perorangan-kolektif, terbuka-anonim, perlawanan yang menantang sistem dominasi dan yang bertujuan keuntungan marjinal.

Terkait dengan aksi perlawanan nelayan dan petani tambak di Ujung Pangkah, sebagaimana telah ditulis di muka, nelayan dan petani tambak melakukan perlawanan terhadap kehadiran perusahaan pertambangan minyak disebabkan wilayah tangkapan ikan di delta muara sungai Bengawan Solo, ditempati untuk pengeboran tambang minyak. Sehingga dengan demikian mereka gagal mendapatkan tangkapan ikan, akibat digusur dan terjadinya pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan migrasi ikan. Hal ini dirasa oleh nelayan merupakan ancaman terhadap mata pencaharian mereka.

Proses marjinalisasi ekonomi ini bagi nelayan, yang dianggap oleh mereka sebagai sumber ketidakadilan, yang mendorong mereka untuk melakukan perlawanan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa nelayan dan petani tambak memilih perlawanan secara tersembunyi, bukan perlawanan secara terbuka. Setidaknya, ada dua hal mengapa komunitas nelayan memilih perlawanan secara tersembunyi, yang pertama adalah berkaca dari pengalaman sejarah dan yang kedua tidak adanya peran organisasi.

Pertama, berkaca dari pengalaman sejarah. Pada umumnya usia nelayan rata-rata di atas 50 tahun, sehingga pada tahun 1965, mereka telah berusia di atas 10 tahun, ketika meletus peristiwa G30S/PKI. Seperti diketahui, pada tahun 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) berusaha untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, namun mengalami kegagalan. Akibatnya, pemerintah melakukan tindakan represif, yang memakan banyak korban, dan korban yang terbanyak dari kalangan petani yang menjadi anggota Partai Komunis Indonesia dan seluruh pendukungnya. Belajar dari pengalaman pahit seperti di atas, maka para nelayan tidak mau memilih perjuangan/ perlawanan terbuka demi keamanan dirinya. Untuk itu dipilihlah sebuah strategi lain: sebuah strategi yang bisa menjamin kerahasiaan mereka, dan sekaligus menjamin keselamatan diri mereka, dari jeratan hukum, maupun tindakan represif lainnya, khususnya dari aparat negara.

Hal senada diperkuat oleh Eckstein (1989) dan Scott (1986), (dalam Korovkin, 1999), mereka berpendapat bahwa ketakutan akan represi politik bersama dengan fragmentasi sosial dan ketersediaan alternatif-alternatif politik, seperti migrasi, merupakan salah satu pertimbangan penting yang mendesak para petani untuk memilih bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi, bukan bentuk perlawanan terbuka.

Kedua, tidak adanya peran organisasi dan kepemimpinan. Aspek yang kedua dari pertanyaan mengapa komunitas nelayan memilih perlawanan tersembunyi? Dalam kasus ini, ketrampilan organisasi yang terbatas dan pengalaman ideologi para partisipan/ nelayan pada umumnya menghambat perjuangan politik terbuka. Agar sebuah protes politik bisa terjadi, diperlukan kepemimpinan politik eksternal (atau kepemimpinan politik dari luar).

Hasil-hasil penelitian di negara lain, seperti yang diadopsi dalam studi-studi politik petani yang lebih tua di Amerika Latin, yang memandang kepemimpinan politik berbasis perkotaan sebagai prasyarat untuk mentransformasikan kerusuhan petani menjadi sebuah gerakan politik—nasionalis atau sayap kiri (Hobsbawn, 1973-1974; Lansbeger, 1974) dalam Tanya Korovkin (1994:4). Di tempat berbeda, studi Kerkvliet (1993:481 dalam Korovkin 1999:5) tentang penyerobotan tanah di Pilipina, ia mengatakan bahwa tindakan perlawanan kecil-kecilan petani bisa membentuk sebuah landasan bagi pengambilalihan tanah secara terorganisir, dan juga

menekankan bahwa tindakan demikian bukan dipimpin oleh para pengorganisir luar tapi dipimpin atau digerakkan para pemimpin tokoh lokal.

Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa agar bisa melakukan perjuangan terbuka, maka gerakan tersebut harus memiliki kepemimpinan, baik dari luar maupun kepemimpinan lokal. Kasus di Ujung Pangkah, menunjukkan tidak adanya figur kepemimpinan yang kuat, dalam internal komunitas nelayan yang mampu mendorong untuk melakukan perjuangan secara terbuka. Selain tidak adanya kepemimpinan tersebut, juga peran organisasi yang lemah sehingga tidak berkontribusi untuk munculnya perjuangan terbuka. Para teorisi Mobilisasi Sumber Daya berpendapat, bahwa semua masyarakat bisa muncul perasaan kecewa terhadap gerakan sosial sewaktu-waktu. Adalah organisasi dan kepemimpinan (lemahnya organisasi dan kepemimpinan) yang menyebabkan berhasil tidaknya gerakan sosial (Mc Carthy and Zald, 1977; Oberschall, 1973, 1993). Ketiadaan peran organisasi dan kepemimpinan inilah yang menyebabkan komunitas nelayan tidak berani untuk melakukan perjuangan secara terbuka.

Perlawanan secara terbuka

Perlawanan tersembunyi terhadap dominasi perusahaan pertambangan minyak berkembang menjadi protes politik terbuka ketika kelompok pemuda yang sebenarnya adalah anak-anak nelayan maupun petani tambak ikut "mencampuri" urusan orang tuanya. Kelompok pemuda dari kalangan terdidik ini disatukan dalam wadah organisasi yang dinamakan Forum

Komunikasi Pemuda Ujung Pangkah (FKPU) yang diketuai oleh Ilham, seorang sarjana pendidikan teknik elektro lulusan Universitas Negeri Surabaya.

Para pengurus/ aktivis dari kelompok pemuda inilah yang mempengaruhi komunitas nelayan dan petani tambak untuk berjuang secara terbuka melawan kehadiran perusahaan pertambangan minyak yang memarjinalkan ekonomi mereka. Lalu, apa yang menjadi faktor krusial dibalik transformasi perlawanan tersembunyi menjadi perlawanan terbuka? Setidaknya ada empat alasan untuk menjelaskan fenomena ini.

Pertama, alasan ekspresif: para pengurus/ aktivis organisasi memilih perjuangan terbuka, bukan perjuangan tersembunyi karena menyakini bahwa taktik akomodatis, yang sesuai ketentuan perundang-undangan, prosedur hukum, terbuka nir kekerasan dianggap sebagai taktik yang terbaik. Bentuk aksi kolektif mereka diwujudkan dalam kegiatan melakukan antara lain : demo, *public meeting*, pertemuan orang-orang dalam jumlah besar, petisi, penyebaran surat selebaran, kampanye di tempat umum dan aksi legal lainnya. Pilihan ini merupakan ekspresi yang terbaik, karena aksi semacam ini tidak mudah direpresi oleh negara.

Kedua, alasan instrumental. Para aktivis berpendapat bahwa sebuah taktik itu sebagai alat untuk mencapai kebijakan yang diinginkan (kebijakan preferensi) mereka. Oleh sebab itu, para pragmatis ini mengubah taktik terdahulu ketika strategi baru dianggap lebih efektif. Para aktivis menganggap perlawanan secara gelap atau tersembunyi dianggap kurang

membawa perubahan dan bersifat konservatif. Oleh sebab itu, ketika kelompok-kelompok lain memberikan dukungan dan pihak pemerintah merespon positif taktik non kekerasan, dan taktik yang direncanakan dengan baik, maka para pemrotes akan memilih taktik ini.

Ketiga, ditinjau dari perspektif proses politik, era pada waktu itu 1998-2002 (masa-masa aksi protes berlangsung) adalah masa dimana ada perubahan konstelasi politik di dalam negeri, dari sistem politik yang otoritarian ke sistem politik yang demokratis, akibat kejatuhan pemerintahan Soeharto. Keterbukaan politik semacam ini mendorong timbulnya proses demokratisasi politik nasional. Sehingga dengan demikian iklim positif semacam ini mendorong para pemrotes untuk berani mengekspresikan aspirasi mereka secara terbuka. Mereka tidak takut lagi melakukan aksi-aksi protes, asal dalam koridor hukum. Singkat kata, timbul dan tenggelamnya gerakan sosial amat ditentukan oleh sistem politik yang berkembang pada masa itu, adanya peluang dan hambatan di dalam sistem politik tertentu (Mc Adam, 1982; Yenkins, 1985; Tarrow, 1989).

Keempat, peran sentral organisasi dan faktor kepemimpinan yang efektif. Terdapatnya berbagai macam organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di Ujung Pangkah, dan berfungsinya serta berkoordinasinya antar berbagai ormas tersebut yang mendukung gerakan sosial yang ada, serta kualitas kepemimpinan yang memadai dari para aktivis organisasi tersebut, mendorong transformasi dari perlawanan tersembunyi ke perlawanan yang terbuka. Hal itu sejalan dengan perspektif Mobilisasi Sumber Daya, yang

mengatakan : faktor organisasi dan kepemimpinan yang kuat atau lemahnya organisasi dan kepemimpinan, menyebabkan berhasil tidaknya gerakan sosial (Oberschall, 1973, 1993; Mc Charty and Zald, 1977; Gamson, 1975; Tilly, 1978).

Perlawanan terbuka dengan kekerasan

Aksi perlawanan dengan menggunakan kekerasan yang terjadi di Ujung Pangkah pada tahun 2002; bukanlah sebuah taktik yang direncanakan dengan seksama dan bukan merupakan bagian dari strategi untuk melawan ketidakadilan. Namun kekerasan yang terjadi disana, terjadi secara spontan sebagai akibat dari ketegangan yang tinggi selama protes, dan akumulasi ketidakpuasan dan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat.

Kekerasan yang terjadi di Ujung Pangkah sebagai bentuk kekerasan yang disebut *Violence of Frustration*, karena tidak memiliki target yang pasti dan terencana, sebagai respons atas ketidakadilan, yang dipicu oleh ketidakterbukaan elit lokal dalam pengelolaan pertambangan minyak. Kekerasan yang terjadi bersifat liar dan tak terkendali tanpa ada yang mengorganisir, bersifat tiba-tiba dan spontan. Kekerasan yang terjadi di Ujung Pangkah adalah kekerasan yang bersifat defensif, bukan ofensif. Kekerasan bersifat defensif, jika dipakai untuk membela diri. Kekerasan bersifat ofensif jika secara aktif untuk menyerang orang lain. Ada kekerasan terhadap manusia, ada kekerasan terhadap alat-alat produksi, harta benda, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian kekerasan tidak bisa disamaratakan.



BAB VI
PROSES TERJADINYA
PERBEDAAN PERLAWANAN
TERHADAP KEMADIRAN
INDUSTRI MULTINASIONAL

BAB VI

PROSES TERJADINYA PERBEDAAN PERLAWANAN TERHADAP KEHADIRAN INDUSTRI MULTINASIONAL

1. Bentuk-bentuk Perlawanan

Kehadiran perusahaan pertambangan minyak asing Amerada Hess di Ujung Pangkah, bagi masyarakat nelayan dan petani tambak, dianggap merugikan mereka. Setelah kekhawatiran mereka tidak segera direspons oleh pihak pemerintah, dan semakin menurunnya penghasilan mereka sebagai nelayan, maka mereka berupaya untuk melakukan perlawanan. Pada dasarnya bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh komunitas nelayan dan petani tambak ada tiga bentuk yaitu pertama, perlawanan dengan cara-cara tersembunyi; kedua, perlawanan terbuka dengan nir kekerasan; dan yang ketiga, terbuka dengan kekerasan.

1.1 Perlawanan tersembunyi

Sejak hadirnya dan beroperasinya industri pertambangan minyak yang menyebabkan marginalisasi sosial masyarakat Ujung Pangkah, langsung disambut oleh komunitas nelayan dan petani tambak dengan perlawanan. Bentuk perlawanan yang mereka pilih adalah secara tersembunyi. Pada masa inilah protes mereka diungkapkan dan tujuan-tujuan mereka kadang dicapai menurut pola-pola yang tidak begitu heroik dan tidak banyak menarik perhatian banyak orang. Inilah pilihan strategi mereka, dikarenakan ketidakmampuan atau ketidakmauan mereka untuk

melakukan protes politik secara terbuka. Dalam bahasa Scott, mereka sering melakukan dan terlibat dalam bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari: yang berupa menentang secara tersembunyi terhadap kebijakan yang dibuat oleh elite-elite lokal. Apa yang dilakukan oleh komunitas nelayan ini merupakan ekspresi kekecewaan mereka akan adanya ketidakadilan.

Tindakan perlawanan nelayan ini, dengan memotong-motong kabel *seismic* yang dilakukan secara gelap dan kemudian membuangnya ke laut, mencerminkan penolakan nelayan untuk menerima legitimasi dominasi elite-elite lokal meskipun tidak ada gerakan protes secara terbuka. Itulah respon pertama yang dilakukan oleh komunitas nelayan dan petani tambak terhadap kehadiran industri pertambangan multinasional. Bentuk perlawanan tersembunyi ini dipilih oleh komunitas nelayan dikarenakan ketidakmampuan atau ketidakmauan mereka untuk melakukan protes politik secara terbuka, mereka memilih melakukan dan terlibat dalam bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari: yang berupa tindakan menentang secara tersembunyi terhadap elite-elite lokal.

Bentuk-bentuk perlawanan semacam ini sebagaimana ditulis oleh Scott (1985), dalam penelitiannya di Sedeka: ... Tidak terjadi huru hara, demonstrasi, pembakaran, tiada kejahatan sosial terorganisir, tiada kekerasan terbuka. Perlawanan yang saya dapati tidak berhubungan dengan gerakan politik yang lebih besar dari luar, atau dengan ideologi atau kader-kader revolusioner, sekalipun jelas bahwa perlawanan-perlawanan sejenis kerap terjadi dan boleh dikatakan di setiap kampung di wilayah ini. Jenis-jenis kegiatan di

sini cuma memerlukan sedikit koordinasi, tak seperti organisasi politik, sekalipun mungkin menarik keuntungan. Pendek kata, ini merupakan bentuk-bentuk perjuangan yang hampir sepenuhnya berasal dari alam kampung.

Bentuk perlawanan tersembunyi ini dipilih sebagai sebuah strategi bagi nelayan dan petani tambak karena dua alasan. Pertama, takut menghadapi perusahaan yang di back-up oleh pemerintah/ aparat. Untuk mencapai tujuan mereka, dalam arti untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka, dan agar tetap terjamin keselamatannya, maka dipilihlah bentuk perlawanan tersembunyi. Apalagi mereka mempunyai trauma sejarah tahun 1965, dimana represi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku G30S/PKI, yang memakan banyak korban di kalangan petani dan simpatisan PKI lainnya. Dalam wawancara peneliti dengan Sohibul Hajah (50), ketua pengurus organisasi nelayan Pangkah Timur, ia menuturkan sebagai berikut:

“Kami bersama-sama teman-teman nelayan Pangkah Timur, melakukan perlawanan gelap terhadap perusahaan tambang minyak dengan cara memotong-motong kabel *seismic* yang berada di bawah laut, untuk menghilangkan bukti-bukti hukum, agar tidak ditangkap oleh aparat, dan yang penting keselamatannya kami bisa terjamin, apalagi kami takut di PKI-kan”.

Kedua, adalah alasan kenapa komunitas nelayan dan petani tambak memilih perlawanan tersembunyi; hal ini disebabkan tidak dimilikinya pengalaman organisasi bagi nelayan. Memang ada organisasi nelayan, namun organisasi itu tidak difungsikan oleh pengurus. Mobilisasi konsensus didapatkan bukan dari atau melalui organisasi, melainkan melalui komunikasi informal. Waktu pembuatan konsensus biasanya setelah melakukan sholat, terutama sholat luhur, untuk kemudian

melakukan pemotongan kabel *seismic* dan mencabut atau merusak patok-patok *seismic*. Seperti dituturkan oleh Sohibul Hajah (50) :

“Komunikasi diantara kami, nelayan, lebih sering dilakukan setelah sholat, untuk menggalang persetujuan, kapan dilakukan pemotongan kabel-kabel *seismic*. Banyak jaring-jaring nelayan yang tersangkut kabel *seismic* dan bahkan terseret oleh kapal-kapal milik perusahaan.”

Ketiga, tidak dimilikinya kepemimpinan yang handal di kalangan nelayan. Mereka rata-rata berpendidikan rendah, bahkan banyak di antara mereka yang tidak tamat Sekolah Dasar. Kepemimpinan ini menjadi penting ketika diri pemimpin harus mampu menggerakkan roda kepemimpinan/ organisasi untuk melakukan mobilisasi konsensus dan aksi secara masif dan terbuka. Selain itu, ketakutan akan represi merupakan salah satu pertimbangan penting yang mendesak para nelayan dan petani tambak untuk memilih bentuk-bentuk perlawanan tersembunyi, bukan bentuk perlawanan terbuka.

Salah satu isu yang mengedepankan adalah apakah bentuk-bentuk tindakan tersebut di atas juga harus dianggap sebagai perlawanan. Oleh karena itu, Joseph (1990:4) mengingatkan bahaya dan menyamakan antara: tindakan-tindakan yang dilandasi kepentingan diri yang kurang terdokumentasi secara rapi dengan perlawanan, yang pendapatnya mengaburkan perbedaan antara kenakalan dan protes pada satu titik dimana keduanya kehilangan nilai analitiknya.

Meskipun sebagian besar tindakan perlawanan di kalangan kelas subordinat atau kelompok-kelompok subordinat mencakup unsur kepentingan diri (*self interest*), tapi tidak semua tindakan kepada anggota masyarakat lokal yang kaya bisa digambarkan sebagai perlawanan. Tapi,

para teoritis *Everyday Forms of Peasant Resistance* (EFPR), tampaknya setuju bahwa agar suatu tindakan bisa memenuhi syarat perlawanan, maka tindakan-tindakan harus didukung oleh sebuah konsensus di antara sebagian besar warga lokal—yang tentu cukup sulit untuk diukur—mengenai legitimasi moral praktik-praktik sosial tertentu. (Korovkin, 1992:2).

1.2 Perlawanan terbuka nir kekerasan

Bentuk perlawanan kedua yang dilakukan oleh komunitas nelayan dan petani tambak adalah melakukan perlawanan terbuka tanpa kekerasan. Hal ini dilakukan setelah pengurus-pengurus organisasi pemuda lokal “mencampuri” dan memengaruhi komunitas nelayan, untuk melakukan aksi kolektif secara terbuka. Perlawanan tersembunyi dianggap tidak efektif dan tidak bisa mewujudkan kebijakan yang diinginkan mereka. Para pengurus organisasi pemuda ini memahami aksi kolektif ini dan menggunakannya untuk memanfaatkan kesempatan politik, menciptakan identitas kolektif, mengumpulkan orang-orang di dalam wadah organisasi dan memobilisasi mereka untuk menentang lawan-lawan yang lebih kuat. Aksi kolektif yang mengandung pertentangan menjadi basis bagi gerakan sosial; bukan karena gerakan-gerakan selalu mengandung kekerasan atau ekstrim, tapi karena aksi kolektif itu merupakan senjata utama, dan sering menjadi satu-satunya senjata yang dimiliki sebagian besar orang untuk melawan lawan-lawan yang punya peralatan yang lebih baik.

Wujud nyata perlawanan terbuka nir kekerasan yang dilakukan oleh nelayan dan petani tambak yang dipelopori pemuda adalah melakukan

demonstrasi di laut dengan menggunakan perahu untuk menyampaikan penolakan terhadap kehadiran perusahaan penambangan minyak di anjungan milik Amerada Hess. Mereka menggunakan 13 perahu bermotor, dengan dimuati rata-rata 10 orang sampai 11 orang. Namun protes tersebut tidak direspon oleh pihak perusahaan.

Selanjutnya protes keberatan masyarakat atas rencana pertambangan tersebut ditunjukkan dan disuarakan terutama dengan surat menyurat baik kepada instansi pemerintah maupun non pemerintah sampai pada demonstrasi, yang intinya adalah menuntut adanya jaminan atas lingkungan yang sehat, jaminan atas keberlangsungan ekonomi, dan jaminan atas terpeliharanya nilai-nilai budaya setempat.¹

Aksi kolektif besar-besaran berupa demonstrasi yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat Ujung Pangkah yang dipelopori pemuda, menuju ke DPRD Kabupaten Gresik dan ke Bupati Gresik, yang isinya menolak kehadiran pertambangan migas Amerada Hess. Tercatat ribuan demonstran menyampaikan tuntutan itu pada tanggal 28 Maret 2002. Setelah tuntutan tersebut diterima oleh yang berwajib, para demonstran membubarkan diri dengan tertib, dan menunggu respons dari DPRD Kabupaten Gresik dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.

¹ Masyarakat lokal mayoritas beragama Islam, mengkhawatirkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial karena “terkontaminasi” budaya asing. Ini ditunjukkan oleh karyawan Premiere Oil; misalnya pada waktu bulan puasa mereka merokok di tempat-tempat umum, membawa minuman keras, dan bahkan mereka mempertanyakan Premiere Oil merayakan hari Natal.

Aksi perlawanan terbuka nir kekerasan merupakan bentuk aksi kolektif yang lebih besar dan tanpa kekerasan mensyaratkan para pengurus organisasi (*organizers*) agar menyelesaikan sejumlah masalah—yang oleh Tarrow (1994) disebut sebagai “biaya transaksi sosial” dalam tindakan kolektif. Mengkoordinasi sejumlah besar orang yang terintegrasi dengan sangat baik yang berhadapan dengan lawan-lawan yang kompak dan kuat membutuhkan koordinasi harapan-harapan para pesertanya. Ini merupakan daya tarik utama dari bentuk-bentuk tindakan kolektif konvensional karena paling mudah bagi orang-orang untuk mempergunakan sebuah bentuk tindakan kolektif yang sudah mereka pahami betul. Salah satu alasan mengenai kelangsungan hidup tindakan aksi kolektif konvensional, yaitu karena ia merupakan bentuk tindakan kolektif familiar, mudah dipergunakan dan dengan nuansa kultural. Hal yang sama berlaku untuk bentuk-bentuk tindakan kolektif penting dewasa ini; meski pun tindakan kolektif konvensional dimulai sebagai gangguan terhadap aturan yang sudah mapan; saat ini tindakan kolektif ini menjadi bagian dari serangkaian bentuk tindakan kolektif yang sudah dikenal secara umum dan dipahami dalam budaya politik negara modern. (Tarrow, 1994:106).

Salah satu wujud dari perlawanan terbuka dengan kekerasan adalah melakukan demonstrasi. Demonstrasi dimulai sebagai aksi yang mengganggu yang kemudian menjadi terlembagakan. Demonstrasi berkembang ketika para penentang bergerak dari satu target ke target yang lain, menyerang lawan atau mengajukan tuntutan-tuntutan. Pertemuan publik dalam jumlah

yang besar yang menyertai *long march*, iring-iringan kendaraan, akan terjadi ketika *crowd* mencapai tempat tujuannya, mengajukan petisi atau bahkan menyerang musuh-musuhnya. Dewasa ini, demonstrasi lebih diakhiri dengan pidato dan nyanyian lagu-lagu.

Demonstrasi publik dihubungkan dengan demokratisasi—atau sekurang-kurangnya demonstrasi itu timbul secara bersamaan dengan kampanye publik terdahulu untuk memperjuangkan hak-hak sosial mereka. Misalnya, pertemuan publik yang dilakukan oleh komunitas nelayan dan petani tambak yang didukung oleh segenap unsur-unsur masyarakat lainnya, dan yang dimotori oleh pemuda untuk mengajukan petisi-petisi mereka, berupa demonstrasi damai di tempat publik. Hal yang penting disini, demonstrasi bisa menyebar dengan cepat karena demonstrasi sangatlah fleksibel. Demonstrasi bisa dipergunakan atas nama sebuah tuntutan, menentang lawan, untuk mengekspresikan eksistensi sebuah kelompok, atau mengekspresikan solidaritasnya dengan kelompok lain atau merayakan kemenangan atau untuk berduka cita atas meninggalnya seorang tokoh. Dengan demikian, demonstrasi telah menjadi bentuk tindakan kolektif yang modular klasik.

Ketika demonstrasi dilegislati, maka ia menghasilkan suatu jurisprudensi dan budaya (Hubrecht, 1990; Champagne, 1990; dalam Tarrow, 1994). Daripada mengizinkan polisi untuk menghajar demonstrans, para *organizers* mulai menggunakan pasukannya sendiri, dan membuat sederetan rute-rute, slogan-slogan sendiri. Banyak gerakan sosial saling mendukung

perjalanan mereka satu sama lainnya, sehingga warna politik sebuah kelompok dapat ditentukan dan rute para pelaku *long march*. Bahkan peran non partisipan seperti pers, penonton dan lawan-lawan menjadi bagian dari ritual demonstrasi (Favre, 1990:18-32; Tarrow, 1994:107).

Negara-negara yang represif hampir pasti menganggap demonstrasi sebagai kerusuhan potensial yang dapat berakibat pada represi yang kejam bagi para demonstran damai. Negara-negara yang konstitusional menerima demonstrasi sebagai suatu praktik yang normal, dan sebagai praktek yang menguntungkan, sebagaimana diindikasikan dengan fakta bahwa banyak demonstrasi sering mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari polisi.

1.3 Perlawanan terbuka dengan kekerasan

Pada dasarnya, munculnya kekerasan disebabkan oleh dua alasan (Friedman, 1983:32), pertama, kekerasan dipilih sebagai bagian dari strategi, dan kedua, kekerasan terjadi secara lebih spontan sebagai akibat ketegangan yang tinggi selama protes. Kekerasan bukanlah satu-satunya bentuk tindakan kolektif yang menimbulkan perlawanan, tapi ketika kebanyakan orang memikirkan tindakan kolektif, maka secara insting mereka akan beralih ke ide kekerasan. Para ilmuwan politik merevisi asumsi populer ini dengan mendasarkan sebagian besar studi tindakan kolektif sistematis mereka pada data kualitatif tentang kekerasan yang dihimpun dan disebar oleh pemerintah. Kekerasan merupakan tindakan kolektif paling nyata, baik di dalam liputan berita kontemporer saat ini

maupun dalam catatan sejarah. Hal ini tidaklah mengejutkan, karena kekerasan menciptakan suatu berita dan berhubungan dengan orang-orang yang bertugas menertibkan kekerasan itu. Hal ini juga karena sebagian besar orang mempunyai ketertarikan yang abnormal terhadap kekerasan dan secara bersamaan menolak dan tertarik dengannya. Akhirnya, kekerasan adalah jenis tindakan kolektif yang paling mudah untuk dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil tanpa ada biaya koordinasi dan kontrolnya.

Mengapa kekerasan merupakan jenis tindakan kolektif yang mudah dilakukan? Sebagaimana ditulis oleh Tarrow (1994), tindakan kolektif massal mempunyai ambang biaya transaksi sosial yang cukup tinggi. Para penyelenggara demonstrasi damai membutuhkan rencana aksi, bendera, pasukan polisi yang terlatih dan juru bicara yang mengendalikan perhatian *crowd* atau massa. Mereka juga harus menjalin kerjasama dengan pihak penguasa atau mendapatkan ijin darinya. Tapi apa yang dibutuhkan para pemicu kekerasan tentu lebih dari sekedar batu bata, alat pemukul atau rantai, bunyi jendela-jendela yang pecah berantakan bunyi tongkat yang mengenai kepala korban dan solidaritas geng. Sebagian besar bentuk tindakan kolektif tradisional bertitik berat pada kekerasan atau ancaman kekerasan karena kekerasan merupakan bentuk tindakan kolektif yang paling mudah dilakukan oleh kelompok-kelompok terisolasi, kelompok lokal. Menarik untuk dicatat, bahwa kekerasan lebih jarang terjadi di negara-negara demokrasi. Negara-negara modern telah meningkatkan tindakan kolektif yang disetujui tapi mengurangi derajat kekerasannya.

Akan hal terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Ujung Pangkah yang meluluhlantakkan asset Amerada Hess senilai 9 miliar rupiah, kekerasan terjadi secara lebih spontan sebagai ketegangan yang memuncak selama protes. Barley (dalam Gulfield, 1970) menyebutkan sebagai *Violence of Frustration*, bentuk kekerasan yang tidak punya target yang pasti, selain masyarakat secara keseluruhan, jenis kekerasan ini bersifat liar dan tak terkendali, tanpa ada yang mengorganisir, tidak direncanakan terlebih dahulu, bersifat tiba-tiba dan spontan. Kekerasan ada yang bersifat ofensif, dan kekerasan bersifat defensif. Kekerasan bersifat ofensif, bilamana secara aktif dipakai untuk menyerang orang lain. Kekerasan bersifat defensif, bila hanya dipakai untuk membela diri.

2. Proses Perlawanan Nelayan dan Petani Tambak

Pada dasarnya, perlawanan yang dilakukan oleh komunitas nelayan dan petani tambak terhadap kehadiran perusahaan pertambangan minyak asing melalui tiga bentuk tahapan, yaitu tahap perlawanan tersembunyi, tahap kedua adalah perlawanan terbuka nir kekerasan dan yang tahap ketiga, perlawanan terbuka dengan kekerasan. Telah disebutkan, bahwa akar perlawanan nelayan disebabkan adanya ketidakpuasan nelayan, karena termarginalisasi, rasa frustrasi akibat perubahan sosial, ekonomi. Keluhan-keluhan ini sebenarnya telah disampaikan ke elite-elite lokal, baik tokoh masyarakat, ulama, tokoh partai, dan bahkan pemerintah lokal. Namun tidak segera direspons. Inilah awalnya, komunitas ini melakukan upaya perlawanan.

Perlawanan tersembunyi

Penyebab masyarakat melakukan aksi kolektif dan akhirnya melakukan perlawanan terhadap Amerada Hess termasuk pemerintah yang mendukungnya, sudah jelas yaitu terancamnya mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan petani tambak. Masyarakat nelayan ini telah mengalami sendiri, kerugian yang diderita akibat tergusurnya mereka dari area penangkapan ikan serta terjadi migrasi ikan karena polusi yang ditimbulkan oleh kebocoran pipa gas. Dalam pandangan nelayan dan petani tambak, kehadiran perusahaan pertambangan tersebut jelas merugikan secara ekonomi, karena pendapatan mereka mengalami kemerosotan.

Akibat dari kenyataan di atas, masyarakat menjadi gelisah. Ancaman terhadap mata pencaharian nelayan dan petani tambak kian jelas. Kegelisahan nelayan dan petani tambak semakin nyata ketika pada tanggal 15 April 2002, pihak perusahaan penambangan melakukan aksi pemasangan patok-patok untuk persiapan *seismic*. Hal ini jelas mengganggu areal penangkapan ikan, karena selain patok-patok yang ditanam di laut dan di tambak, di antara patok-patok itu dihubungkan kabel-kabel berwarna hitam sebesar ibu jari, yang amat mengganggu aktivitas nelayan dalam upaya penangkapan ikan. Kemudian pada tanggal 16 April 2002, pengurus komunitas nelayan melaporkan kejadian ini ke pemerintah setempat, dari pemerintah desa hingga kecamatan, termasuk ke Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer, namun tidak segera direspon. Pada hari itu juga, para nelayan mendatangi pula kantor FKPU (Forum Komunikasi Pemuda

Ujung Pangkah) untuk menyampaikan keberatannya, atas pemasangan patok-patok untuk keperluan *seismic*, yang ternyata berada di jalur lalu lintas nelayan dan daerah utama penangkapan ikan, karena dinilai sangat mengganggu aktivitas nelayan.

Dua hari setelah itu, yaitu pada tanggal 18 April 2002, mereka bertemu setelah sembahyang maghrib untuk melakukan rundingan secara rahasia untuk melakukan tindakan kolektif atau perlawanan secara tersembunyi terhadap tindakan Amerada Hess yang dianggap semena-mena dan merugikan pihak warna nelayan dan petani tambak. Mereka bersepakat (*consensus*) untuk memotong kabel-kabel *seismic* dan kemudian membuangnya ke laut. Kesepakatan tersebut telah dilaksanakan malam hari itu juga dan kemudian diteruskan keesokan harinya dan terus dilakukan pada hari-hari berikutnya oleh para nelayan pada saat mereka “*miyang*” atau pergi melaut untuk menangkap ikan. Pelaku pengerusakan atau pemotongan kabel itu tidak bisa dihitung jumlahnya, namun menurut penuturan Shohibul Hajah ketua nelayan Pangkah Kulon, mayoritas nelayan melakukan aksi tersebut baik dilakukan di siang hari maupun di malam hari secara tersembunyi, namun mengutamakan keamanan pribadi. Kabel-kabel yang sudah dipotong dibiarkan begitu saja dan atau dibuang ke laut untuk menghilangkan jejak hukum. Mereka tidak berani membawa pulang kabel-kabel tersebut, karena takut dijadikan barang bukti. Akibat aksi perlawanan tersembunyi yang dilakukan nelayan tersebut, kegiatan *seismic* menjadi kacau.

Perlawanan terbuka nir kekerasan

Setelah seminggu lamanya, keluhan nelayan tidak mendapat respons dari pihak pemerintah, dan semakin tertekannya secara ekonomi di pihak nelayan akibat merosotnya penghasilan mereka, bahkan terjadi kerusakan jaring-jaring nelayan yang terseret kapal milik perusahaan pertambangan minyak, semakin menambah derita nelayan. Untuk itulah pihak pemuda Ujung Pangkah merespons persoalan nelayan ini dengan mempengaruhi nelayan untuk melakukan perlawanan terbuka. Dalam pandangan pemuda, perlawanan secara tersembunyi dianggap tidak efektif, dalam arti tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan, karena dianggap tidak akan membawa perubahan yang diinginkan.

Selain itu, adanya fakta bahwa di kalangan nelayan dan petani tambak, tidak dimilikinya organisasi yang kuat dan tiadanya kepemimpinan yang efektif, untuk memberikan perlawanan kepada kelompok dominan, menyebabkan perjuangan mereka mengalami kegagalan. Adalah organisasi dan kepemimpinan (atau kurangnya organisasi dan kepemimpinan) yang membuat gerakan sosial sukses atau gagal (Mc Carthy dan Zald, 1977; Oberschall, 1973, 1993). Sebagai misal, rendahnya kemampuan mereka mengelola (memobilisasi) sumber daya untuk melakukan aksi kolektif.

Teori Mobilisasi Sumber Daya bertumpu pada satu pernyataan sederhana: Betapapun, orang-orang mereka tidak puas, geram, kesal, tapi tanpa organisasi dan kepemimpinan, mereka tidak akan mampu memproduksi perubahan sosial secara efektif. Protes yang berlangsung

sementar, kerusuhan, dan sebagainya bisa terjadi tapi tidak menghasilkan perubahan yang bertahan lama. Terlepas perasaan kecewa atau perasaan geram yang mereka alami, tapi seberapa efektifkah mereka mampu memobilisasi sumber daya materi dan non material yang mereka perlukan untuk memperoleh penerimaan sosial atas tujuan-tujuan mereka. Oleh karena itu, dengan *skill* kepemimpinan yang dimiliki oleh kelompok pemuda, maka kelompok pemuda ini berhasil mempengaruhi komunitas nelayan dan petani tambak untuk mengubah perjuangan mereka dari perlawanan tersembunyi ke perlawanan terbuka nir kekerasan.

Maka pada minggu berikutnya, dengan diorganisir oleh kelompok pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Ujung Pangkah (FKPU), yang sebenarnya adalah anak-anak nelayan dan petani tambak itu sendiri, para nelayan melakukan demo di laut untuk melakukan protes terhadap kehadiran perusahaan penambangan tersebut. Dengan menggunakan 13 (tiga belas) perahu yang diawaki oleh nelayan dan pemuda Ujung Pangkah dan rata-rata setiap perahu memuat 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) orang nelayan dan pemuda, mereka berbondong-bondong melakukan demo di laut. Tujuan demo adalah menginginkan kegiatan *seismic* dihentikan. Mereka mendatangi anjungan milik Premiere Oil, selanjutnya menyandera tiga orang *driller* di tempat pengeboran (*drill-site*). Ketiga *driller* tersebut kemudian diusung ke darat, untuk dijadikan jaminan bagi masyarakat nelayan dan petani tambak agar kegiatan *seismic*

dihentikan. Segera setelah ketiga *driller* tersebut sampai di darat, perahu-perahu yang memuat para demonstran ini segera membubarkan diri. Ketiga *driller* tersebut kemudian disandera oleh kelompok pemuda, namun diberi layanan yang baik, diberi makan dan minum setelah 24 (dua puluh empat) jam mereka disandera kemudian ketiga *driller* tersebut dibebaskan, setelah ada jaminan dari Amerada Hess untuk melakukan perundingan.

Sementara itu, pada tanggal 14 Maret 2002, Pemerintah Kabupaten Gresik, menyelenggarakan rapat pembentukan sebuah badan yang mewakili masyarakat Ujung Pangkah yang dihadiri oleh tim eksekutif, tim legislatif dan 125 orang anggota masyarakat Ujung Pangkah. Namun, hasil rapat yang melahirkan Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah (BPMU) itu ditolak oleh masyarakat Ujung Pangkah itu sendiri karena dianggap tidak representatif, apalagi menyetujui masuknya pertambangan migas Amerada Hess. Hal ini menimbulkan gejolak masyarakat lagi. Untuk itulah pada tanggal 28 Maret 2002, dengan menggunakan kendaraan truk, ribuan orang melakukan aksi besar-besaran dari semua elemen masyarakat Ujung Pangkah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Gresik dan Pemerintah Tingkat II Gresik. Mereka mengajukan tuntutan yang berisi penolakan terhadap kehadiran penambangan migas Amerada Hess.

Gejolak yang terjadi di masyarakat Ujung Pangkah terus berlanjut, sesungguhnya adalah bentuk protes warga yang merasa keberatan atas proyek tersebut, karena aspirasinya belum terpenuhi. Kekecewaan warga

menjadi memuncak ketika pada tanggal 7 Juli 2002, mereka mengetahui bahwa akan ada rapat antara perusahaan Amerada Hess dengan “wakil-wakil” masyarakat Ujung Pangkah bertempat di Gresik. Akan tetapi, warga masyarakat menginginkan rapat digelar di balai/ kantor Desa Ujung Pangkah agar dapat terbuka dan didengar langsung oleh rakyat, namun tidak disetujui oleh “wakil” rakyat tersebut. Karena masyarakat sudah marah, kemudian ada salah seorang warga masyarakat menempeleng “wakil” rakyat yang pro Amerada Hess tersebut dan terjadi adu jotos. Aksi protes lalu dilanjutkan dengan aksi pembakaran terhadap aset-aset Amerada Hess. Aksi pengerusakan dengan kekerasan ini menimbulkan kerugian milyaran rupiah di pihak Amerada Hess. Puluhan orang ditangkapi oleh polisi dan militer. Tiga orang dipenjarakan dan beberapa orang wajib lapor.

Insiden di atas mengilustrasikan tiga tipe pokok aksi perlawanan yang dilakukan warga masyarakat Ujung Pangkah. Tipe aksi perlawanan yang pertama adalah aksi yang mengganggu yang dilakukan secara tersembunyi; tipe aksi perlawanan yang kedua, yaitu demonstrasi publik yang terorganisir, yang mewakili ekspresi aktivitas gerakan konvensional; sedang tipe aksi perlawanan yang ketiga adalah aksi kekerasan. Meskipun aksi yang mengganggu (*disruption*), aksi kekerasan (*violence*), dan persetujuan (*convention*) berbeda dalam beberapa hal, tetapi mereka mempunyai kesamaan umum: yaitu, ketiganya merupakan ekspresi konfrontasi publik antara penentang (*challenges*) dan pihak penguasa (*elite*).

Menurut *Sydney Tarrow* (1996: 101), tidak semua gerakan sosial melakukan aksi-aksi publik; mereka menggunakan kombinasi *violence*, *disruption*, dan *convention* secara berbeda-beda. Untuk menimbulkan suatu biaya bagi lawan-lawannya, untuk membawa pendukung, mengekspresikan tuntutan-tuntutan mereka dan mengembangkan hubungan yang strategis dengan sekutu-sekutu mereka. Dalam cara-cara yang berlainan, mereka menantang lawan-lawannya, menciptakan ketidakpastian dan membangun solidaritas. Dengan melihat masing-masing tipe atau bentuk aksi kolektif atau bentuk perlawanan ini secara terpisah, dan kemudian melihat dinamika hubungan mereka, akan membantu kita untuk mengetahui kekuatan gerakan.

Secara ringkas dikatakan oleh Tarrow: kekuatan dari tindakan kolektif berasal dari tiga karakteristik—*challenge* (tantangan, perlawanan), *uncertainty* (ketidakpastian) dan *solidarity* (solidaritas). Perlawanan terhadap penguasa akan menimbulkan ancaman berupa biaya yang besar dan dilakukan dalam cara-cara yang dramatis dan sering mengganggu keamanan. Kekuatan ini sebagian timbul dari akibat-akibat yang tak pasti dan muncul dari kemungkinan bahwa banyak orang lain akan bergabung untuk ikut melakukan perlawanan itu. Solidaritas internal akan memperkuat perlawanan dan memberikan pertanda adanya kemungkinan kerusakan yang lebih besar. Lawan, sekutu dan *by stander* (penonton) memberikan respon, bukan hanya fungsi dari tajamnya pertentangan dan ketidakpastian yang besar dan lainnya lagi menekankan solidaritas.

Perlawanan terbuka dengan kekerasan

Munculnya aksi kekerasan yang terjadi di Ujung Pangkah terhadap aset-aset perusahaan pertambangan minyak asing Amerada Hess, terjadi secara spontan, sebagai akibat dari ketegangan yang tinggi selama protes. Selama tiga bulan lebih, sejak tuntutan terakhir masyarakat nelayan dan petani tambak berkeberatan atas hadirnya perusahaan penambangan minyak tidak direspon oleh perusahaan dan pemerintah. Pemicunya adalah, ketika orang yang “mewakili” masyarakat Ujung Pangkah diundang untuk mengikuti rapat di Kantor Amerada Hess di Gresik, masyarakat mencegahnya untuk datang ke tempat rapat, di Gresik sebaliknya, masyarakat menghendaki rapat antara orang-orang yang “mewakili” masyarakat Ujung Pangkah dengan pihak perusahaan diminta untuk dilakukan di Balai Kelurahan Ujung Pangkah, agar masyarakat Ujung Pangkah bisa langsung mendengarkan secara transparan. Namun permintaan masyarakat Ujung Pangkah itu ditolak oleh “Wakil” dari Ujung Pangkah. “Wakil” rakyat tersebut karena menolak, lalu dipukul oleh salah seorang anggota masyarakat, terjadilah baku pukul, kemudian meletuslah kekerasan yang meluluhlantakkan aset-aset milik perusahaan. Represi dilakukan oleh aparat polisi dan militer, setelah melalui proses peradilan, tiga orang dipenjarakan, beberapa orang lain wajib lapor di Kepolisian Gresik.

3. Bentuk-bentuk Perlawanan dan Hasil-hasilnya

3.1 Perlawanan tersembunyi dan implikasi sosialnya

Perlawanan tersembunyi yang dilakukan oleh nelayan dan petani tambak melawan kelompok dominan mengesankan hal-hal sebagai berikut. Pertama, perjuangan nelayan dan petani tambak terkesan mengabaikan organisasi dan perubahan sosial, dalam arti tidak menghasilkan perubahan. Meski demikian, apakah hanya perjuangan politik kolektif yang bisa menimbulkan perubahan struktural merupakan pertanyaan terbuka. Meski banyak orang masih meragukan apakah perlawanan tersembunyi dapat menghasilkan perubahan ekonomi dan politik, yang jelas perlawanan tersembunyi mampu melahirkan perubahan ekonomi dan sosial itu bersama dengan banyak faktor yang lain. Tindakan petani yang melawan dan mengelak, yang sering diperkuat oleh budaya perlawanan rakyat yang begitu hebat, dan didukung oleh banyak kaum tani, berhasil mengacau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin mereka di ibukota. Senada dengan itu, diakuinya adanya kemampuan hebat petani dalam menolak, memanipulasi dan mengacaukan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kedua, ongkos sosial yang harus ditanggung akibat konflik antara masyarakat nelayan dan petani tambak dengan perusahaan penambangan minyak adalah, merosotnya kepercayaan sosial terhadap lembaga-lembaga pemerintah, elite-elite lokal, tokoh-tokoh masyarakat, elite-elite partai, termasuk elite-elite keagamaan. Disini terlihat, nelayan berjuang sendirian

(*self struggle*) karena tidak ada satu pihak pun yang membela kepentingan petani.

Ketiga, munculnya saling curiga diantara unsur-unsur masyarakat, khususnya antara kelompok yang pro terhadap kehadiran perusahaan pertambangan sebagai kelompok yang diuntungkan, dengan kelompok yang kontra terhadap kehadiran perusahaan pertambangan, sebagai pihak yang dirugikan. Kondisi sosial yang tidak kondusif semacam ini mudah memicu aneka konflik.

Keempat, munculnya kecurigaan terhadap segala bentuk pemberdayaan, yang ternyata tidak mampu memberdayakan/ mensejahterakan masyarakat, termasuk program *Community Development*. Dana *Community Development* tidak langsung menyentuh masyarakat, hanya ke sebagian orang (elite) saja. Momen ini digunakan oleh perusahaan untuk mengkooptasi mereka, itulah sebabnya perjuangan nelayan dan petani tambak hanya sendirian saja (*self struggle*).

3.2 Perlawanan terbuka nir kekerasan dan hasil-hasilnya

Protes terbuka yang dilakukan oleh komunitas nelayan dan petani tambak, yang dimotori oleh kalangan pemuda dan didukung oleh masyarakat Ujung Pangkah, setidaknya ada dua alasan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Pertama, apakah gerakan protes itu mampu mengubah kebijakan publik, terkait isu-isu yang dimunculkan dalam

gerakan protes. Kedua, apakah ada perubahan yang dihasilkan oleh gerakan sosial itu, yang bersangkutan dengan kepentingan gerakan.

Kenyataannya, gerakan itu mampu menghasilkan sebuah ketentuan yang bersangkutan dengan kegiatan industri hulu, dengan keputusan menghentikan kegiatan tersebut selama 26 hari. Selanjutnya hasil nyata gerakan ini adalah ditutupnya kegiatan industri hilir perusahaan tambang minyak ini selama 1 (satu) tahun lebih 45 hari. Namun perlu diketahui bahwa, gerakan sosial nelayan ini, akhirnya terhenti juga mengingat hingga kini, akhirnya kegiatan industri hilir pertambangan minyak beroperasi lagi hingga kini, disertai perbaikan-perbaikan ekonomi, khususnya di bidang *Community Development*.

Perbaikan di bidang *Community Development* itu, sebagaimana dikatakan oleh Zainur Maderi (Liaison Officer, Dit Jen Migas) sebagaimana disarankan kepada pihak Amerada Hess, sebagai berikut:

“Bantuan langsung Amerada Hess seperti dilakukan saat ini, cukup membawa manfaat dan tetap diperlukan. Di waktu yang akan datang lebih diperlukan bantuan tidak langsung berupa proyek yang akan bermanfaat untuk jangka panjang didalam meningkatkan usaha pokok yaitu perikanan pantai. Kehadiran industri perminyakan tidak berarti akan menggusur usaha masyarakat yang telah ada; Bantuan sektor pendidikan perlu ditangani lebih serius, walaupun hasilnya belum segera dirasakan sesuai keinginan masyarakat. Apabila masyarakat setempat menginginkan peran lebih besar didalam mengelola sumber daya alamnya, maka melalui pendidikanlah keinginan tersebut dapat diwujudkan.”

3.3 Perlawanan terbuka dengan kekerasan dan hasil-hasilnya

Pada peristiwa amuk massa yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2002, yang meluluhlantakkan asset-asset Amerada Hess, berakhir dengan represi

oleh pemerintah terhadap gerakan kekerasan tersebut. Dengan ditangkanya dan dipenjarakannya beberapa orang yang dinyatakan bersalah dalam gerakan kekerasan itu, bisa dikatakan gerakan itu berhenti untuk sementara.

Ilham, ketua Forum Komunikasi Pemuda Ujung Pangkah yang sempat ditahan dan diperiksa oleh aparat Kepolisian, tidak terbukti menggerakkan protes dengan kekerasan yang merugikan aset Amerada Hess sebesar 9 miliar rupiah akhirnya dibebaskan, hingga kini masih memimpin gerakan sosial nelayan dan petani tambak. Singkat kata, hasil yang dicapai gerakan perlawanan terbuka dengan menggunakan kekerasan, dengan mudah dapat direpresi oleh negara.



BAB VII
IMPLIKASI BENTUK-BENTUK
PERLAWANAN TERHADAP
PENCAPAIAN TUJUAN
GERAKAN

BAB VII

IMPLIKASI BENTUK-BENTUK PERLAWANAN TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN GERAKAN

1. Tujuan Gerakan

Secara umum, gerakan sosial dibentuk untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada dalam bidang tertentu. Misalnya, kelompok environ mentalist telah menuntut suatu intervensi untuk melindungi lingkungan; pacifist menentang budaya perang; para mahasiswa telah mengkritik penyeleksian dan otoriterisme dalam pendidikan; gerakan feminis melawan diskriminasi terhadap perempuan; para petani, nelayan melawan marjinalisasi sosial akibat penetrasi industrialisasi. Meskipun biasanya dibedakan antara gerakan politik dan gerakan kultural, gerakan politik mengikuti logika lebih instrumental, gerakan kultural lebih simbolik. Semua gerakan mengajukan tuntutan pada sistem politik.

Gerakan sosial harus mampu meyakinkan kepada orang luar, bahwa tujuan-tujuan gerakan mereka adalah benar, berpihak pada kepentingan terbaik masyarakat, dan tidak akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat ini akan mempersuasi publik bahwa seluruh warga masyarakat akan memperoleh manfaat jika gerakan sosialnya mencapai apa yang diinginkan. Persuasi ini akan membuat “penonton neutral”, tidak akan berubah menjadi

opponent dan dapat meyakinkan mereka bahwa mereka mempunyai *positive vested interest* dalam keberhasilan gerakan tersebut.

Sehubungan dengan perubahan struktural dalam kondisi kategori atau kelompok sosial yang dimobilisasi oleh aksi kolektif, maka transformasi kultural merupakan elemen penting lain untuk mencapai dan mengkonsolidasikan keuntungan baru. Meskipun benar bahwa semua gerakan cenderung menuntut perubahan legislasi, tapi juga benar bahwa hal ini bukan tujuan mereka satu-satunya atau bukan tujuan primernya. Pengaruh gerakan sosial juga terkait dengan perubahan kultural yang luas, “*elaborasi new codes*”/ UU baru (Melucci, 1982; 1984a). Walaupun kemampuan gerakan sosial untuk “tematisasi”; “importasi” isu-isu baru ke dalam perdebatan publik, dianggap cukup tinggi, tapi kemampuan mereka untuk realisasi dianggap masih rendah. Karena itu, kita perlu mengkaji dampak sensitisasi gerakan, kemungkinan sebuah gerakan untuk menimbulkan sensitisasi di kalangan aktor sosial, di arena politik atau publik, yang berjalan sesuai dengan arah tujuan gerakan. (Kriesi, et.al. 1995:211).

Selain itu, tujuan gerakan sosial adalah agar mendapatkan dukungan publik. Gerakan sosial lebih menyadari akan kebutuhannya akan dukungan publik, jika dibanding sebagian aktor-aktor yang punya sumber daya lebih baik. Karena mobilisasi protes umumnya hanya sebentar, gerakan sosial tidak bisa merasa puas terhadap reformasi legislasi, yang selalu dapat

diganti di kemudian hari. Gerakan-gerakan sosial harus dapat memastikan bahwa terdapat dukungan yang besar dan luas terhadap tujuan-tujuannya, untuk melemahkan segala upaya yang ingin melibas dirinya. (della Porta dan Diani, 1999:237).

Perlu ditambahkan, bahwa gerakan sosial tidak hanya bertujuan mengubah opini publik. Gerakan sosial juga berusaha meraih atau memenangkan dukungan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan publik. Meskipun mobilisasi massa untuk sementara waktu dapat meyakinkan pihak legislator untuk mengesahkan sebuah hukum, tapi hukum itu juga harus diterapkan. Dalam hal ini gerakan sosial tidak selalu punya sarana akses yang memadai ke bidang-bidang implementasi kebijakan yang kurang *visible* sehingga peluang keberhasilannya bergantung pada bagaimana gerakan sosial itu mempengaruhi lembaga publik yang bertanggung jawab mengimplementasikan hukum yang jadi perhatian mereka. Tujuan penting gerakan sosial awal adalah untuk meyakinkan publik bahwa tuntutan-tuntutan mereka bukan hanya *reasonable* tapi juga amat cocok dengan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Pidato-pidato publik cenderung menekankan bahwa apa yang diinginkan oleh gerakan sosial, maka gerakan sosial itu jauh lebih memperoleh restu (*approval*) dari publik. Populasi umum mendukung sebuah gerakan berdasarkan perasaan "*justice*" atau "*democracy*".

2. Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial

Di bagian ini, memberikan informasi untuk memahami mengapa sebuah gerakan sosial itu sukses dan yang lain menemui kegagalan. Tujuannya adalah menyediakan sebuah kerangka struktural yang dapat dipakai untuk menganalisis gerakan sosial yang lain dan mungkin membantu memprediksi seberapa sukses mereka itu.

Gerakan sosial yang sukses akan menghasilkan perubahan-perubahan yang terlembaga di dalam masyarakat dan perubahan dalam kehidupan pada penikmatnya, yaitu masyarakat. Gerakan sosial yang sukses sebenarnya akan mencapai tujuan-tujuan yang sudah mereka tetapkan dan menciptakan suatu manfaat yang nyata di masyarakat. Kalau tujuan dari gerakan sosial itu adalah perubahan sosial, maka keberhasilan dari gerakan ini dapat diukur dengan signifikansi atau kebermaknaan perubahan yang terjadi. Kalau tujuan dari gerakan sosial itu adalah untuk melawan atau membalik perubahan sosial, maka keberhasilan gerakan dapat diukur dengan apakah perubahan yang tidak diinginkan itu terjadi atau tidak.

Pengkajian berbagai gerakan sosial yang berhasil dan yang gagal dalam sejarah Amerika Serikat mengungkapkan pola-pola organisasi dan pola perilaku tertentu. Meskipun pola-pola tersebut tidak universal bagi semua gerakan sosial yang sukses dalam sejarah, tapi kebanyakan gerakan sosial yang sukses memiliki beberapa karakteristik ini: *kepemimpinan yang efektif, citra yang positif, siasat atau taktik yang diterima masyarakat,*

tujuan-tujuan yang diterima masyarakat (socially accepted goals), dan dukungan finansial dan dukungan politik yang dibudidayakan. (Locher, 2002:270-271).

Kepemimpinan (*leadership*)

Gerakan sosial yang sukses punya pemimpin efektif. Individu pemimpin ini memahami sistem hukum dan sistem politik dan beroperasi secara efektif didalamnya. Mereka berfokus secara ketat pada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kelompok. Mereka pandai menjelaskan kepada *outsiders* apa tujuan kelompok dan mengapa tujuan ini cukup *reasonable*. Kualitas paling penting dari pemimpin gerakan sosial adalah kemampuannya untuk mengilhami orang lain berbuat sesuatu. Pimpinan gerakan harus mampu mendorong orang-orang mengikuti dia dan melakukan apa yang harus dilakukan. Kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh pada keberhasilan gerakan sosial dalam mencapai tujuannya.

Citra (*image*)

Gerakan sosial yang sukses akan dihormati. Gerakan sosial ini berusaha meyakinkan publik, politik, dan pihak penguasa bahwa mereka adalah orang-orang baik, jujur yang menginginkan sesuatu yang baik. Kelompok dan pemimpin kelompok harus mempunyai citra publik yang positif. Hal ini akan mempermudah para pendukung untuk menilai mereka dan para pengamat diyakinkan bahwa gerakan sosial tersebut adalah *reasonable* atau bahkan *honorable* (mulia)

Siasat (*tactics*)

Gerakan sosial yang sukses menggunakan siasat-siasat yang diterima masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Sebagian gerakan sosial terpaksa melanggar hukum yaitu mereka ingin mengubah atau mencari metode-metodenya yang dilanggar dengan mengesahkan hukum baru, ordinasi, atau regulasi tapi secara umum siasat mereka mematuhi pedoman hukum dan pedoman moral di dalam masyarakat. Siasat yang diterima masyarakat memungkinkan gerakan sosial tetap dihormati masyarakat dan citra positifnya akan terbangun.

Tujuan (*goals*)

Gerakan sosial yang sukses meyakinkan orang luar bahwa tujuan-tujuan mereka adalah benar, berpihak pada kepentingan terbaik masyarakat, dan tidak akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Gerakan sosial ini mempersuasi publik bahwa seluruh warga masyarakat akan memperoleh manfaat jika gerakan sosialnya mencapai apa yang diinginkan. Persuasi ini akan membuat publik yang netral tidak akan berubah menjadi *opponent* dan dapat meyakinkan mereka bahwa mereka mempunyai *positive vested interest* dalam keberhasilan gerakan tersebut.

Gerakan sosial yang sukses juga memfokuskan lebih banyak perhatian dan tenaganya pada upaya perubahan hukum bukan berusaha memperoleh publisitas. Banyak kelompok yang sukses dalam ruang pengadilan meminta bantuan aparat hukum untuk berpihak kepadanya.

Kelompok-kelompok yang berusaha mengubah *social laws* dan kebijakan organisasi dengan menyampaikan pesannya secara langsung kepada publik tidak akan efektif. Ada kemungkinan untuk mengubah kepercayaan masyarakat, tapi lebih cepat dan lebih efisien kalau kita memaksakan perubahan hukum. Protes dan aksi turun ke jalan (*marches*) membantu memperoleh publisitas dan juga memperoleh pengikut bagi gerakan, tapi protes dan aksi turun jalan tersebut juga bisa memperkuat oposisi atau perlawanan terhadap gerakan sosial dan membahayakan citra publik kelompok. Satu keputusan peradilan yang sukses, terutama di tingkat daerah atau pusat, punya pengaruh lebih besar dalam mengubah pola hidup masyarakat jika dibanding dengan peristiwa publik tertentu.

Gerakan sosial yang sukses mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang khusus. Gerakan sosial mungkin saja berbicara tentang “mensejahterakan masyarakat” atau “memperbaiki kehidupan masyarakat,” tapi semua upaya sehari-hari mereka berfokus pada langkah-langkah konkrit menuju tujuan spesifik. Semakin cocok tujuan-tujuan ini dengan ideologi sosial yang dominan, semakin mungkin *outsiders* mempersepsi tujuan-tujuan ini cukup *reasonable* dan tepat. Misalnya, kalau sebuah gerakan sosial mampu meyakinkan *outsiders* bahwa tujuan-tujuan politik spesifik mereka dibenarkan oleh cita-cita bangsa Amerika yaitu *freedom*, *liberty*, dan *equality*, maka gerakan sosial itu jauh lebih mungkin memperoleh restu (*approval*) dari publik. Populasi umum mendukung sebuah gerakan berdasarkan perasaan “*justice*” atau “*democracy*” yang samar.

Dukungan (*support*)

Gerakan sosial yang sukses pasti memerlukan dukungan. Banyak kelompok gerakan sosial memperoleh dukungan finansial dari jaringan kelompok yang lain, dari organisasi dan institusi. Gerakan sosial yang paling sukses menyesuaikan pesan-pesan dan strateginya supaya bisa tetap didukung oleh *financial supporter*. Sebaliknya, gerakan sosial yang tidak sukses dengan seenaknya menyerang semua orang yang mereka anggap berdiri di jalannya (menjadi penghambat baginya). Cara ini sering menyebabkan menguatnya oposisi dan penarikan dukungan oleh mereka yang dulu pernah membantunya.

Dengan merujuk Gamson (1975), della Porta dan Diani (1999:28), menyebut keberhasilan gerakan sosial dapat dilihat dari dua aspek, yakni adanya keuntungan baru (*new gain*) dan tingkat penerimaan. Keuntungan baru (*new gain*) berupa perubahan nyata dalam kebijakan publik ikhwal isu-isu yang diangkat oleh protes, sedangkan tingkat penerimaan (*level of acceptance*) adalah perubahan yang dihasilkan oleh suatu gerakan dalam representasi kepentingan Gamson (1975) menggunakan variabel itu ke dalam sebuah tipologi keberhasilan yang membedakan antara, pertama, respon penuh, baik keuntungan maupun penerimaan; kedua, kooptasi pengakuan tanpa keuntungan; ketiga, *pre emptio*, dan keempat, kolaps tanpa keuntungan dan penerimaan sekaligus.

Dari sudut pandang kebijakan publik, Schumaker (1975) dalam Burstein, dkk (1995:285) dan della Porta dan Diani (1999:234-5), menjelaskan bahwa perubahan yang diakibatkan oleh gerakan sosial bisa dievaluasi dengan melihat berbagai tahap proses pengambilan keputusan; munculnya isu-isu baru; penyusunan dan penerapan legislasi baru; dan analisa dampak kebijakan publik dalam mengurangi kondisi orang-orang yang dimobilisasi oleh aksi kolektif. Lima tingkat *responsiveness* atau daya tanggap terhadap tuntutan kolektif di dalam sistem politik dapat dibedakan sebagai berikut :

Gagasan *access responsiveness* menunjukkan sejauh mana penguasa mau mendengarkan persoalan kelompok tersebut ...jika tuntutan dimasukkan ke dalam suatu isu dan ditempatkan pada agenda sistem politik, maka akan muncul tipe *responsiveness* kedua yang disebut *agenda responsiveness*...Ketika suatu usulan disahkan menjadi hukum, maka akan dicapai tipe *responsiveness* ketiga; gagasan *policy responsiveness* menunjukkan sejauh mana mereka yang ada dalam sistem politik mengadopsi legislasi atau kebijakan yang sejalan dengan tuntutan nyata kelompok protes...Jika diambil langkah-langkah untuk menjamin penegakan legislasi secara sungguh-sungguh, maka dicapai tipe *responsiveness* keempat yang disebut *output responsiveness*...Hanya jika keluhan-keluhan dasarnya dapat dikurangi, maka muncul tipe *responsiveness* kelima yang disebut *impact responsiveness* (Schumaker 1975:494-5).

Kebanyakan studi berfokus pada *policy responsiveness*, yaitu sejauh mana mereka yang ada dalam sistem politik mengadopsi legislasi atau kebijakan yang sejalan dengan tuntutan nyata kelompok protes; sebagai studi berfokus pada *access responsiveness*, yaitu sejauh mana penguasa mau mendengarkan persoalan kelompok pemrotes; dan sedikit sekali studi yang menekankan agenda politik, output, dampak kebijakan, dan perubahan struktural (Burstein, et al. 1995:285; della Porta dan Diani, 1999:235).

Sementara itu, Mc Adam (1982) dalam Locher (2002:265), berpendapat bahwa ada tiga faktor yang paling menentukan terciptanya dan berhasilnya sebuah gerakan sosial: pertama, kekuatan organisasi, level organisasi pada orang-orang atau populasi yang protes. Semakin terorganisir sekelompok orang tertentu, semakin besar kemungkinan mereka untuk membentuk gerakan sosial dengan sukses dan semakin besar kemungkinan suksesnya gerakan sosial tersebut. Kedua, *cognitive liberation*, persepsi kemungkinan sukses di dalam populasi yang sama. Semakin mereka percaya bahwa mereka bisa sukses, semakin besar kemungkinan mereka untuk berusaha membentuk gerakan sosial tersebut. Ketiga, kesempatan politik, persekutuan kelompok atau koalisi kelompok-kelompok di dalam lingkungan politik yang lebih besar. Semakin banyak sekutu yang dimiliki oleh kelompok dalam arena politik, semakin mungkin mereka mampu mencapai perubahan di dalam sistem politik.

Gerakan sosial yang tidak sukses gagal untuk mencapai tujuan-tujuan spesifiknya. Mereka kurang terorganisir dengan baik dan kurang memiliki kepemimpinan efektif. Pemimpinnya tidak mampu menarik para *volunters* yang dibutuhkan dan mencari sumber daya yang diperlukan, serta tidak mampu menggunakan sumber daya itu dengan efisien. Citra publik mereka negatif dan siasat mereka dipersepsi *illegitimate*. Hal ini menciptakan permusuhan terhadap gerakan oleh orang-orang yang tidak peduli kepadanya. Gerakan sosial ini juga mengalami kesulitan hukum,

karena siasat mereka yang *illegitimate*, yang menacap pemimpin dan pengikutnya sebagai “penjahat” sebelum gerakan itu dapat meraih citra publik yang positif. Tujuan-tujuan mereka terlalu samar untuk dicapai atau jauh dari *mainstream* norma-norma kemasyarakatan sehingga pihak lain tidak percaya dengan kemanfaatannya. Gerakan sosial ini cenderung mencurahkan lebih banyak waktunya pada *public events* dan hal-hal besar yang sebenarnya tidak perlu, bukannya berusaha melakukan perubahan riil, perubahan yang terlembagakan. Akhirnya, gerakan sosial yang tidak sukses cenderung mengalienasi kelompok gerakan lain, publik, dan bahkan para anggotanya sendiri; lewat kritik, serangan personal atau perilaku yang menciptakan permusuhan dan resistensi, bukan menciptakan *good will* dan kerjasama. (Locher, 2002:282).

3. Hasil-hasil Gerakan Perlawanan

Untuk memahami keberhasilan sebuah gerakan haruslah mempertimbangkan banyak faktor. Seperti dikatakan oleh Oberschall (1973, 1993), kemampuan organisasi untuk menumpuk dan menggunakan sumber daya seperti dana dan tenaga kerja adalah sangat penting. Sementara itu, Mc Adam (1982, 1996), mengatakan keadaan politik, ekonomi dan sosial memungkinkan terbentuknya dan suksesnya gerakan. Semua organisasi yang sukses dituntun oleh sedikit individu yang cerdas yang memahami keadaan sosial mereka yang cukup memadai untuk menciptakan *workable plan*. Sepanjang waktu, gerakan berusaha mengatasi

resistensi, menjaga *respectability* (layak dihormati) dan *honor* (kemuliaan), dan meyakinkan seluruh *outsiders* bahwa tujuan-tujuan mereka adalah jujur dan benar.

Akan tetapi, ketika akan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan gerakan dalam upaya mencapai tujuannya, memunculkan sejumlah masalah yang sangat sulit. Pertama dan terpenting, atribusi kepentingan tertentu pada gerakan sudah ada, dan yang sering terjadi, gerakan yang dinilai sukses dari luar bisa dianggap gagal oleh aktivis gerakan itu sendiri. Faktanya, tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh gerakan sosial sudah berubah. Tujuan-tujuan radikal yang banyak berlangsung selama fase konstruksi identitas kolektif sudah berubah, kemudian melempangkan jalan ke tujuan yang lebih moderat. Kedua, keberadaan pluralitas aktor menyebabkan makin sulit bagi kita untuk mengatribusi keberhasilan atau kegagalan satu strategi tertentu (Diani, 1997). Gerakan sosial itu sendiri merupakan aktor kompleks, terdiri dari banyak organisasi yang menjalankan strategi yang berbeda-beda. Adalah jalinan atau kombinasi dari model-model organisasi dan beragam strategi yang melahirkan keberhasilan. Menurut perspektif ini, di Ujung Pangkah juga terdapat organisasi-organisasi gerakan, seperti gerakan nelayan dan petani tambak, organisasi Lingkungan Hidup, Lembaga Bantuan Hukum, dan lain-lain. Ketiga, kesulitan yang diciptakan oleh pluralitas aktor ditambah dengan kesulitan merekonstruksi dinamika sebab akibat yang mendasari keputusan publik tertentu. Di satu pihak,

peristiwa-peristiwa saling berjalanan sehingga kita sukar mengetahui peristiwa mana yang muncul lebih dulu, terutama dalam momen mobilisasi yang tinggi. Keempat, apakah hasil dari protes sebaiknya dievaluasi dalam jangka pendek atau jangka panjang menjadi masalah lagi. Gerakan sosial sering meraih keberhasilan di tahap-tahap awal mobilisasi, tapi hal ini memicu kepentingan-kepentingan yang berlawanan dan muncul serangan balasan dalam opini publik. Karena itu, meski benar bahwa terdapat konsensus luas tentang banyak isu yang diangkat oleh gerakan sosial (perdamaian, perlindungan alam, perbaikan sistem pendidikan, kesetaraan), tapi mobilisasi bisa menyebabkan polarisasi publik. Hal ini biasanya menghasilkan pertumbuhan dukungan gerakan, tapi seringkali juga memunculkan pertumbuhan oposisi.

Bidang pertama untuk mengukur efek yang dihasilkan oleh gerakan sosial adalah bidang kebijakan aktual. Secara umum, gerakan sosial dibentuk untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang ada dalam bidang tertentu. Kebijakan publik dalam kaitan ini merupakan esensi dari hubungan negara dengan warganya di dalam suatu sistem politik tertentu. Ketika berbicara tentang negara, mau tidak mau kita akan menyinggung secara lebih spesifik kepada kebijakan publik. Seperti ditulis Arief Budiman (1996:89), kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Prosesnya melalui tujuan-tujuan negara dan cara pengambilan

keputusannya, orang-orang yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Batasan ini sejalan dengan definisi Dye (1972), yang menyatakan kebijakan publik sebagai apapun keputusan negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau Meyer (2007:172) sebagai bereaksi atau tidaknya pemerintah.

Michael Lipsky (1970) dalam Meyer (2002) menyatakan protes merupakan strategi politik bagi masyarakat yang diposisikan tidak adil untuk memperjuangkan kepentingan mereka melalui cara-cara yang konvensional. Demikian pula Piven dan Cloward (1971) dalam Meyer (2002) secara langsung menunjukkan kaitan antara kebijakan kesejahteraan pemerintah terhadap kaum miskin, untuk memelihara ketenteraman sosial dan menghindari protes.

Sementara itu, della Porta dan Diani (1999:233) menyatakan hal pertama untuk melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh gerakan sosial adalah perubahan kebijakan yang kemudian ditimbulkannya. Umumnya, menurut mereka, dampak gerakan sosial ini bisa dilihat dari adanya keputusan baru dan apakah keputusan itu benar-benar dilaksanakan.

Namun demikian, pengukuran semacam itu tentu saja problematis dan terkesan positivistik; khususnya bagi ahli-ahli kulturalis seperti dalam perspektif gerakan sosial baru. Bagi mereka, kesuksesan gerakan sosial tidak harus dengan respons-respons yang bersifat struktural atau produk kebijakan tertentu. Efek gerakan sosial juga dilihat dari pengaruhnya di

dalam perubahan kultural yang tidak bisa diukur secara ajeg, yakni dengan memperkenalkan kode-kode baru/ Undang-Undang baru. Gerakan sosial juga memiliki kapasitas dalam mendorong isu-isu tertentu menjadi tema dan dirasa penting di dalam perdebatan publik. Atau gerakan sosial juga bisa memprovokasi sensitivitas aktor-aktor di arena politik dan arena publik secara luas untuk bekerja sesuai dengan tujuan-tujuan gerakan (Melluci dan Kriesi, dkk dalam della Porta dan Diani, 1999:236).

Kemudian berkaitan dengan gerakan perlawanan di Ujung Pangkah, pertanyaannya adalah apa relevansi peranan gerakan perlawanan itu dalam mengubah keputusan dan kebijakan pemerintah. Sebagaimana telah ditulis di muka, bahwa sejak pada tahap awal kehadiran penambangan minyak, pada tahap pra konstruksi, yaitu saat dimulainya kegiatan *seismic*, telah terjadi kebocoran limbah minyak, yang berakibat merosotnya pendapatan komunitas nelayan. Hal inilah yang memicu kemarahan dan ketidakpuasan nelayan terhadap kebijakan ini. Pembangunan industri besar ini ternyata bukannya mampu menaikkan taraf hidup masyarakat sekitarnya, justru memarjinalkan masyarakat.

Perlawanan komunitas nelayan yang dimotori oleh pemuda itu, dan didukung oleh hampir sebagian besar masyarakat Ujung Pangkah, dan beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil pihak pemerintah terkait dengan perlawanan terhadap beroperasinya perusahaan pertambangan sebagai hasil perlawanan masyarakat adalah sebagai berikut:

Yang menyangkut perubahan nyata kebijakan publik untuk merespons tuntutan dan protes: pertama, menutup semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan penambangan minyak. Selama jangka waktu 26 hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2001 sampai dengan 5 Februari 2001, semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dihentikan untuk selama-lamanya, kecuali ada persetujuan dari semua elemen masyarakat Ujung Pangkah. Bilamana sampai batas waktu yang ditentukan keputusan itu dilanggar oleh pihak perusahaan, maka masyarakat dibenarkan untuk membersihkan kapal, *rig* atau lainnya yang berhubungan dengan pertambangan migas dengan caranya sendiri. Kedua, oleh karena mendapat tekanan yang berat dari masyarakat, akhirnya pemerintah menyetujui pengunduran diri perusahaan Premiere Oil. Pihak Premiere Oil Pangkah Limited berkehendak menjual sahamnya ke mitra usahanya Amerada Hess, dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Pertamina Baihaki Hakim pada tanggal 1 Oktober 2001, kemudian baru tanggal 25 Februari 2002, disetujui oleh Direktur Pertamina, setelah sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 8 Februari 2002. Sejak 25 Februari 2002 itulah Amerada Hess menjadi operator dalam eksplorasi dan eksploitasi pengeboran minyak. Selama jangka waktu 5 bulan menunggu keputusan itu, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ditutup. Hasil yang kedua, yang menyangkut bagaimana gerakan membawa hasil nyata di dalam sistem

perwakilan kepentingan. Hasil riil gerakan perlawanan masyarakat adalah berhentinya operasi perusahaan ini selama 1 tahun 45 hari (10 Januari 2001 – 25 Februari 2002), sehingga tenggang waktu tersebut nelayan bisa menjalankan pekerjaannya dengan normal. Selain adanya perbaikan dalam sistem *Community Development*, semenjak Amerada Hess beroperasi lagi.

4. Mengukur Kekuatan Gerakan

Dari beberapa bentuk aksi kolektif tersebut, bentuk aksi kolektif manakah yang efektif dalam mencapai tujuan mereka? Untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka kita akan melakukan analisis data sebagai berikut:

4.1 Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus organisasi lokal untuk memperkuat gerakan perlawanan

Dengan mengacu pada referensi Tarrow (1994), di bawah ini disampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pengurus organisasi lokal untuk memperkuat gerakan perlawanan menghadapi perusahaan multinasional. Upaya penguatan gerakan ini dimotori oleh pengurus organisasi pemuda Ujung Pangkah, dari kalangan terdidik, banyak diantara mereka adalah anak-anak dari nelayan dan petani tambak sendiri. Organisasi pemuda ini menjadi semacam koordinator bagi organisasi-

organisasi lokal lainnya, dalam menggerakkan aksi perlawanan mereka organisasi pemuda ini diberi nama Forum Komunikasi Masyarakat Ujung Pangkah yang berkantor di depan kantor kecamatan Ujung Pangkah. Upaya penguatan gerakan tersebut dilakukan melalui :

4.1.1 Memperkuat jaringan sosial¹

Ilham, ketua Forum Komunikasi Pemuda Ujung Pangkah (FKPU), adalah orang yang menjadi motor penggerak perlawanan nelayan dan petani tambak terhadap perusahaan pertambangan. Tokoh-tokoh organisasi lokal didatanginya untuk memperkuat jaringan organisasi. Tokoh jurusan pendidikan teknik elektro IKIP Negeri Surabaya ini secara intens menjalin hubungan dengan Koib (ketua Pesatbri), Umar Fahri (ketua/koordinator petani tambak), Shohibul Hajjah (ketua nelayan Ujung Pangkah), pengurus organisasi lokal lainnya dan seorang tokoh masyarakat yang seorang ulama yang bernama Husein Bawafie yang sekaligus tabib. Seperti pengakuan Shohibul Hajjah (50), ketua organisasi nelayan Ujung Pangkah sebagai berikut :

“Perlawanan kami, nelayan Ujung Pangkah, sebenarnya pada mulanya sebatas perlawanan kolektif tersembunyi yang dilakukan oleh para nelayan. Hal ini mengingat bagaimana kami harus menjaga keselamatan kami. Namun setelah kami “dicampuri” pemuda yang dipimpin oleh Ilham, kami nelayan Ujung Pangkah mulai percaya diri dan berani memperjuangkan kepentingan kami secara terbuka bersama-sama organisasi lainnya, dalam wujud tindakan protes-protes dan demo”

¹ Gerakan untuk memperkuat jaringan sosial ini dilakukan setelah para nelayan dan petani tambak melakukan aksi perlawanan tersembunyi terhadap perusahaan pertambangan.

Pengurus organisasi melakukan kunjungan-kunjungan ke kelompok-kelompok lain/ organisasi lokal lainnya untuk mempengaruhi kelompok lainnya, seperti organisasi nelayan, petani tambak, persatuan pengesat dan pemburi, lembaga swadaya masyarakat, Remaja Masjid. Selain organisasi tersebut, para pengurus organisasi pemuda juga menemui tokoh-tokoh masyarakat seperti kiai/ulama, ustadz, dan tokoh partai politik. Upaya mempengaruhi ke kelompok-kelompok lain itu dilakukan juga menjelaskan visi dan misi mereka, termasuk ke tokoh-tokoh masyarakat yang sejalan dengan gerakan mereka. Tidak semua tokoh masyarakat didatangi oleh pengurus organisasi karena ada cukup banyak tokoh masyarakat/ tokoh informal yang sudah terkooptasi oleh pihak perusahaan. Misalnya, ada tokoh masyarakat dan pesantren yang telah menerima gratifikasi untuk *community development* yang diberikan oleh pihak perusahaan.

4.1.2 Mobilisasi pengikut

Pengurus organisasi berusaha menghimpun orang untuk mendapatkan dukungan bagi gerakannya. Di sini peran pengurus organisasi menjadi penting untuk membangkitkan dukungan sikap, sebuah proses yang harus dilalui sebuah gerakan sosial untuk mencoba mendapatkan dukungan bagi pandangannya. Upaya semacam ini yang disebut sebagai mobilisasi konsensus. Menurut Klandersmars (1984, h. 586, 2005, xxiii), mobilisasi konsensus dimaksudkan upaya mempengaruhi pikiran orang agar tergerak

untuk mengikutinya. Mobilisasi konsensus maksudnya menumbuhkan sejumlah pendukung potensial, orang-orang yang bersimpati kepada gerakan, yang bersedia mendukung dengan cara tertentu dan tidak harus berarti siap untuk terlibat di dalam segala bentuk aksi kolektif. Selanjutnya, masih ada lagi yang disebut mobilisasi aksi, yang maksudnya menggerakkan sumber daya mereka—uang, waktu dan ketrampilan. Hal ini dimaksudkan untuk mentransformasikan dari simpatisan menjadi partisipan yang aktif. Mobilisasi aksi ini dimaksudkan mampu mengubah sebagian besar simpatisan menjadi partisipan dalam kegiatan-kegiatan mereka.

Media/ forum yang digunakan dalam upaya mobilisasi pengikut adalah dalam (1) kegiatan sosial umum yang meliputi kegiatan arisan uang atau barang, kegiatan sambatan, dan melalui rapat-rapat dusun/ desa; (2) karena masyarakat Ujung Pangkah adalah masyarakat santri, maka biasanya diselenggarakan melalui rapat-rapat Nahdatul Ulama dan melalui kegiatan sosial keagamaan misalnya melalui kegiatan tahlilan, yasinan, pengajian, dan kataman.

Pertemuan-pertemuan semacam itu kemudian diceramahi oleh pengurus organisasi, tokoh-tokoh informal seperti kiai, ulama, ustadz dan tokoh-tokoh pemuda. Sasaran yang dimaksud adalah nelayan yang ada di Ujung Pangkah yang jumlahnya 1.847 orang, petani tambak yang berjumlah 2.152 orang, pedagang yang terdiri 798 orang dan masyarakat umum. Tema-tema atau substansi yang dipilih sebagai materi ceramah adalah tema-

tema/ isu-isu tentang lingkungan hidup, masalah ketidakadilan, pelanggaran hak-hak asasi manusia.

4.1.3 Merancang/ membingkai aksi kolektif

Pihak pemerintah daerah, dalam hal ini bupati Gresik telah berusaha untuk mencari penyelesaian atas konflik yang terjadi antara masyarakat Ujung Pangkah dalam hal ini kepentingan nelayan dan petani tambak dengan pihak perusahaan. Cara yang ditempuh pemerintah daerah bersama perusahaan adalah membentuk sebuah wadah yang dianggap mampu menjembatani kepentingan perusahaan dengan masyarakat nelayan. Wadah yang diberi nama Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah itu ditolak oleh masyarakat. Tokoh-tokoh informal seperti kiai, ulama, tokoh pemuda yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Badan Perwakilan Masyarakat Ujung Pangkah itu satu-persatu mengundurkan diri dan menolak namanya dicantumkan disitu. Dengan demikian tokoh-tokoh informal ini menciptakan budaya tandingan dengan menolak dan tidak menyetujui namanya disebut dan dicantumkan dalam kepengurusan wadah bentukan perusahaan bersama pemerintah daerah tersebut. Singkat kata tindakan tokoh-tokoh informal semacam ini telah menciptakan identitas kolektif.

Sementara itu, para pengurus organisasi gerakan telah menggunakan dan memanfaatkan media seperti koran dan televisi untuk bisa secara intens berkomunikasi dengan masyarakat dalam rangka memobilisasi gerakan.

Tercatat adanya koran masuk desa (KMD) yang dimiliki oleh 4 (empat) organisasi, dan yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Peran televisi dimanfaatkan juga oleh pengurus organisasi, dengan kadang-kadang menyiarkan perkembangan gerakan dan kondisi terakhir masyarakat Ujung Pangkah. Isu-isu sentral yang disampaikan melalui media sama dengan isu-isu sentral yang diceramahkan oleh pemuka masyarakat. Isu tersebut meliputi persoalan ketidakadilan, pencemaran lingkungan, adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan persoalan regional kultural. Tema-tema semacam ini mampu membangkitkan dan menggerakkan masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap gerakan masyarakat.

4.1.4 Melakukan kampanye dan koalisi

Ilham adalah seorang sarjana pendidikan teknik elektro lulusan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Surabaya yang menjadi ketua pemuda dan ketua pengurus Forum Komunikasi Masyarakat Ujung Pangkah. Ia bersama anggota pengurus lainnya menjadi motor penggerak dari gerakan sosial di Ujung Pangkah. Dialah yang membangun koalisi dengan semua organisasi lokal yang ada, dan secara intens melakukan pertemuan rutin dengan anggota-anggotanya, dan secara intens pula menemui tokoh-tokoh informal seperti kiai, ulama, ustadz dan tokoh-tokoh lainnya untuk mendapat dukungan dari gerakannya. Lembaga Bantuan Hukum kota Surabaya yang beralamat di jalan Kidal Surabaya juga dihubunginya, termasuk Wahana Lingkungan Hidup propinsi Jawa Timur.

Kampanye yang dilakukan bersama anggota-anggota gerakan ini, terutama untuk mensosialisasikan tujuan-tujuan gerakan. Ketika terjadi aksi kekerasan massal yang terjadi di Ujung Pangkah di bulan Juli 2002, Ilham sempat mendekam di tahanan kepolisian ressort Gresik karena didakwa sebagai otak penggerak aksi kekerasan massal yang mengakibatkan asset-asset perusahaan dibakar oleh massa yang mengakibatkan kerugian 9 miliar bagi perusahaan pertambangan. Karena tidak cukup bukti, akhirnya Ilham dilepas.

Koalisi yang dilakukan oleh pengurus gerakan dengan organisasi-organisasi lainnya baik yang berada di kecamatan Ujung Pangkah maupun yang berada di luar Ujung Pangkah. Organisasi tersebut meliputi (1) kelompok kepentingan, (2) organisasi kemasyarakatan, (3) partai politik.

(1) Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (*an organization that attempts to influence public policy in a specific area of importance to its members*). (Ethridge and Handelman, 1994:150). Kelompok ini cenderung memfokuskan diri pada satu masalah saja. Dalam konteks gerakan perlawanan di Ujung Pangkah pengurus gerakan melakukan koalisi dengan Wahana Lingkungan Hidup propinsi Jawa Timur dan Lembaga Bantuan Hukum kota Surabaya.

(2) Organisasi kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan telah ada di kecamatan Ujung Pangkah, termasuk didalamnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga swadaya masyarakat yang ada di sana murni didirikan oleh masyarakat setempat, dan tidak dalam kontrol pemerintah. Karena tidak didirikan oleh pemerintah, maka lembaga swadaya masyarakat di Ujung Pangkah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

(3) Partai politik

Pengurus organisasi gerakan juga menjalin koalisi dengan partai politik yang ada di Ujung Pangkah yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Perlu diketahui bahwa di kecamatan Ujung Pangkah terdapat seorang wakil rakyat untuk kabupaten Gresik atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gresik dari Partai Persatuan Pembangunan yang berlatar belakang Nahdatul Ulama yang bernama Anwar Sadat.

Di bawah ini digambarkan dalam format di bawah ini karakteristik kekuatan gerakan yang mengacu pada referensi yang dibuat oleh Sydney Tarrow (1994).

Tabel 5.1 Karakteristik Kekuatan Gerakan menurut Sydney Tarrow (1994)

Karakteristik kekuatan gerakan	Variasi gerakan	
	Perlawanan Tersembunyi	Perlawanan Terbuka Nir Kekerasan
1. Memperkuat jaringan sosial dengan: a. LSM b. Remaja Masjid c. Tokoh masyarakat d. LBH e. Walhi	Tidak Tidak Ya Tidak Tidak	Ya Ya Ya Ya Ya
2. Mobilisasi pengikut: a. Mobilisasi konsensus b. Mobilisasi aksi c. Forum yang digunakan: - arisan - rapat dusun - rapat NU - tahlilan - sambatan - dzikiran - pengajian - kataman	Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Ya Tidak Tidak Tidak	Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
3. Merancang aksi kolektif a. Menciptakan budaya tandingan b. Penggunaan media sebagai alat perjuangan c. Mengetengahkan isu-isu sentral: isu lingkungan hidup, ketidakadilan, pelanggaran HAM.	Tidak Tidak Tidak	Ya Ya Ya
4. Melakukan kampanye dan koalisi a. Kelompok kepentingan b. Organisasi kemasyarakatan c. Kelompok non asosiasional	Tidak Tidak Tidak	Ya Ya Ya
Jumlah tindakan	6	21

Untuk membandingkan kekuatan gerakan antara bentuk perlawanan tersembunyi dengan perlawanan terbuka nir kekerasan yang dilakukan oleh nelayan dan petani tambak, di dalam penelitian ini dibandingkan karakteristik kekuatan gerakan masing-masing, untuk mengetahui apakah

masing-masing bentuk perlawanan melakukan 4 tindakan sesuai referensi Tarrow (1994). Tindakan itu berupa apakah bentuk-bentuk perlawanan itu melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan untuk memperkuat gerakan. Apabila variasi gerakan A misalnya, melakukan tindakan, maka setiap unsur yang dilakukan pada kolom yang dimaksud diberi tanda Ya; sebaliknya, bila tidak melakukan tindakan, maka pada kolom yang dimaksud diberi tulisan: Tidak. Bilamana variasi gerakan A misalnya, melakukan semua tindakan, berarti variasi gerakan telah melakukan tindakan sebanyak 21. Jadi disini dihitung berapa besaran (jumlah) tindakan yang dilakukan oleh bentuk perlawanan yang satu dengan yang lainnya, sehingga bisa diketahui karakteristik kekuatan gerakan masing-masing bentuk perlawanan.

Empat tindakan itu adalah: pertama, memperkuat jaringan sosial, dengan membangun kolaborasi/ kerjasama dengan lima organisasi seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Remaja Masjid, Tokoh masyarakat, LBH, dan WALHI. Dari 5 organisasi tersebut, bentuk perlawanan tersembunyi hanya memperkuat jaringan dengan tokoh-tokoh masyarakat saja, selebihnya tidak berupaya untuk melakukan kerjasama dengan empat organisasi lainnya. Tercatat tokoh-tokoh masyarakat yang pro gerakan nelayan adalah: KH. Dawan Rosyidi; H. Musadad Anwar; KH. Syamsul Anam; H. Sonhaji; H. Modhofir; dan beberapa nama lainnya.

Kedua, melakukan mobilisasi pengikut. Memobilisasi di sini yang dimaksud adalah bagaimana aktivis gerakan mengubah simpatisan menjadi

partisipan, yang menjadi target mobilisasi adalah segmen masyarakat yang secara potensial dapat dimobilisasi, baik mobilisasi konsensus maupun aksi dengan suatu cara tertentu oleh aktivis gerakan. Di dalamnya adalah semua orang yang mempunyai sikap positif terhadap gerakan, tidak terbatas pada kelompok-kelompok yang kepentingannya dipertahankan atau diwakili oleh gerakan. Bahkan orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan gerakan sosial pun dapat bersimpati kepada organisasi tersebut. Inilah yang diistilahkan sebagai "*conscience constituency*" (para pemilih suara hati). Mobilisasi konsensus terdiri atas usaha-usaha sadar untuk menyebarkan beberapa pandangan aktor sosial kepada publik. Pembentukan konsensus akan menghasilkan definisi kolektif atas situasi, tapi ia tidak menghasilkan aksi kolektif dan juga tidak menyediakan suatu tanda-tanda aksi bagi mereka yang ingin membimbing rakyat agar terlibat dalam sebuah gerakan sosial. Karena hal demikian terjadi pada kita, maka mobilisasi konsensus diperlukan.

Singkat kata, usaha pembangkitan dukungan sikap, adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah organisasi gerakan sosial untuk mencoba mendapatkan dukungan bagi pandangannya, kita akan menyebut sebagai mobilisasi konsensus. Sedangkan usaha pembangkitan dukungan perilaku, adalah usaha untuk menarik partisipasi orang, kita sebut sebagai mobilisasi aksi.

Mobilisasi konsensus menyiratkan usaha "memperjuangkan" pikiran orang, sedangkan mobilisasi aksi berarti usaha "memperjuangkan" sumber-

sumber daya mereka—uang, waktu, ketrampilan dan kepakaran mereka. Hal ini berkaitan dengan peralihan dari sebagai simpatisan menjadi partisipan aktif.

Forum yang digunakan untuk mobilisasi pengikut adalah berbagai kegiatan yang meliputi: arisan, rapat dusun, rapat NU, tahlilan, sambatan, dzikiran, pengajian, dan kataman. Arisan adalah kegiatan rutin yang dihadiri sejumlah anggota, untuk membangun sebuah kerukunan bertetangga, atau keakraban antar sesama anggota. Arisan biasanya berupa barang, termasuk arisan kayu untuk pembuatan kapal. Rapat dusun, diselenggarakan *selapan* hari sekali (setiap atau menurut kebutuhan dusun, untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Ketua RT atau RW. Rapat NU dimaksudkan untuk melakukan pertemuan antar anggota Nahdliyin, mengingat masyarakat Ujung Pangkah adalah masyarakat santri. Tahlilan adalah kegiatan kolektif untuk mengirim doa bagi orang yang telah meninggal. Sambatan adalah kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan sesuatu, misalnya memperbaiki perahu, memperbaiki tambak, hajatan, gotong royong (membuat *terob* atau *tarub*).

Dzikiran adalah kegiatan ritual untuk memuji/ mengingat Tuhan. Bisa dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Pengajian adalah kegiatan yang biasanya memberi informasi keagamaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh kiai. Dan yang disebut Kataman adalah kegiatan membaca atau belajar Al-Qur'an agar menguasai secara tuntas dan

dilakukan secara bersama-sama. Forum-forum tersebut di atas digunakan oleh aktivis gerakan untuk memobilisasi pengikut baik mobilisasi konsensus maupun mobilisasi aksi.

Ketiga, merancang aksi kolektif. Dalam hal ini, aktivis atau pengurus organisasi gerakan memanfaatkan atau tidak memanfaatkan simbol-simbol budaya komunitas. Simbol-simbol budaya itu bisa berupa pakaian, warna tertentu, bendera, dalam aksi kolektif untuk menciptakan identitas kolektif. Misalnya, identitas kolektif bagi masyarakat santri (yang profesinya sebagai nelayan dan petani tambak). Ini yang disebut menciptakan budaya tandingan. Selain itu, apakah organisasi gerakan memanfaatkan media atau tidak memanfaatkan media seperti televisi (TV), radio, dan lain-lain, untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam rangka mobilisasi konsensus. Dan yang terakhir, mengedepankan isu-isu sentral, seperti ketidakadilan, marginalisasi, pencemaran lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bisa mendorong meletusnya aksi kolektif.

Keempat, melakukan kampanye dan koalisi. Pengurus organisasi melakukan atau tidak melakukan tindakan mencari dukungan terhadap kelompok-kelompok kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan partai politik agar tujuan gerakan tercapai. Koalisi dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan kelompok kepentingan² (seperti ditulis oleh Marcus

²Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting, untuk anggota-anggotanya. Mereka cenderung memfokuskan diri pada masalah tertentu saja. Keanggotaannya terutama terdiri atas golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas serta terpinggirkan. Tujuan utama adalah memperbaiki nasib dari masing-masing golongan, terutama keadaan ekonominya.

Ethridge dan Howard Handelman, 1994 dalam Miriam Budiardjo, 2008: 383), organisasi kemasyarakatan dan dengan kelompok non asosiasional³ (Gabriel A. Almond dan Bingham Powel, 1992 dalam Miriam Budiardjo, 2008: 387-388) .

³Kelompok non asosiasional adalah jenis kelompok kepentingan yang tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik, dan tidak mempunyai organisasi. Anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin karena mempunyai hubungan ekonomi, massa konsumen, kelompok etnis dan kedaerahan.



BAB VIII
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
TEORITIK

BAB VIII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

1. Kesimpulan

Secara umum, disertasi ini menyimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap kehadiran perusahaan pertambangan minyak asing di Ujung Pangkah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok: pertama, bagi kelompok yang diuntungkan secara ekonomi menyambut baik kehadiran perusahaan itu. Kedua, bagi kelompok masyarakat yang dirugikan, mereka melakukan perlawanan. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan adalah dengan cara tersembunyi, secara terbuka nir kekerasan dan perlawanan terbuka dengan cara kekerasan.

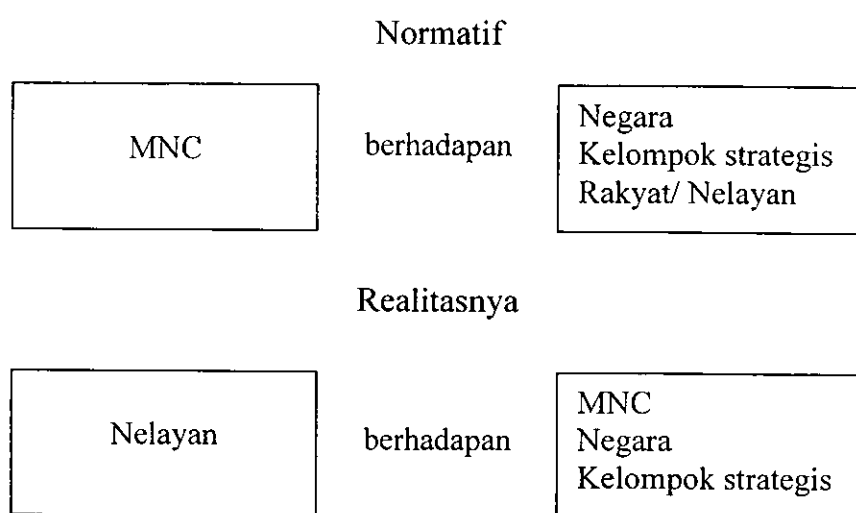
Disertasi ini menjelaskan bahwa kondisi sosial yang mendorong nelayan dan petani tambak untuk melakukan perlawanan adalah, pertama, kondisi sosial ekonomi yang semakin memburuk, akibat digusurnya daerah tangkapan ikan mereka untuk kepentingan pembangunan industri pertambangan minyak asing yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian mereka. Hal ini menjadikan termarginalisasinya kehidupan sosial ekonomi mereka. Merasa diperlakukan secara tidak adil seperti ini, dan tidak segera direspon tuntutan mereka menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpuasan bagi komunitas nelayan dan petani tambak yang masif dan meluas. Kondisi sosial ekonomi yang termarginalisasi semacam inilah yang mendorong munculnya gerakan perlawanan nelayan.

Selain itu masih dengan kondisi sosial ekonomi, strategi *Community Development* sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap upaya ikut mensejahterakan masyarakat, ternyata belum bisa memenuhi seluruh lapisan masyarakat. Bantuan langsung dari pihak perusahaan ditanggapi secara berbeda oleh kelompok-kelompok masyarakat, mengingat kepentingan mereka juga berbeda-beda. Bagi yang menerima, sumbangan itu dirasa bermanfaat dan tetap diperlukan, apalagi bermanfaat di bidang pendidikan dan infrastruktur.

Bagi kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung, mereka menganggap bantuan itu sebagai upaya pihak perusahaan untuk mempengaruhi elite agar mereka menerima kehadiran perusahaan tersebut. Untuk itulah, agar tidak terjadi konflik, atau kesalahpahaman di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kebijakan *Community Development* seyogyanya diarahkan berupa bantuan tidak langsung berupa proyek yang bermanfaat untuk jangka panjang di dalam meningkatkan usaha pokok mayoritas masyarakat yaitu perikanan pantai; sehingga bisa diharapkan kegiatan pertambangan dan perikanan pantai bisa berjalan bersama dan saling memberikan keuntungan.

Senyatanya, harus diakui bahwa peran pemuka-pemuka masyarakatpun menjadi kurang efektif akibat adanya kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Akibatnya, mereka sibuk dengan kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga dukungan terhadap gerakan nelayan dan

petani tambak menjadi minim. Ketika nasib nelayan terpuruk secara ekonomi, tidak ada yang ikut memperjuangkannya. Secara normatif, komunitas nelayan seharusnya "serumah" dengan negara dan kelompok strategis, dalam menghadapi kepentingan Multinational Corporation (MNC), namun dalam kenyataannya komunitas nelayan berjuang sendirian berhadapan dengan MNC, negara dan kelompok strategis, dengan demikian nelayan berjuang sendirian. Gambaran keadaan tersebut dapat dijelaskan dalam bagan seperti berikut:



Kedua, kondisi sosial politik. Maju mundurnya gerakan sosial, timbul tenggelamnya gerakan sosial amat ditentukan oleh sistem politik yang berlaku ketika gerakan sosial itu berlangsung. Bagi negara yang menganut sistem politik demokratis, terbuka kesempatan/ peluang bagi organisasi gerakan untuk mengembangkan dirinya. Begitu juga bagi masyarakat, keterbukaan politik yang lebih lebar, mendorong masyarakat

untuk lebih berani melakukan partisipasi politik. Sebaliknya, dalam sistem politik yang otoriter, kehidupan organisasi sosial akan stagnan, karena ada ketakutan untuk mendapatkan represi oleh negara.

Situasi politik saat gerakan perlawanan komunitas nelayan pada waktu itu adalah berakhirnya pemerintahan Soeharto. Hal ini menimbulkan demokratisasi politik, yang mendorong keberanian masyarakat yang lebar untuk melakukan partisipasi politik. Faktor kepemimpinan (*leadership*) yang efektif disertai menguatnya/ solidnya organisasi gerakan memberikan kontribusi yang besar terhadap munculnya gerakan perlawanan, atau mendorong bagi individu untuk berpartisipasi dalam gerakan. Singkat kata, peluang politik atau kesempatan politik menjadi penting untuk dimanfaatkan oleh aktivis/ pemimpin yang handal untuk memperjuangkan tujuan mereka, dan adanya peran sentral organisasi untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang ada pada mereka.

Ketiga, kondisi sosial budaya. Persoalan di depan mata yang dialami oleh komunitas nelayan dan petani tambak adalah adanya ketidakadilan, perasaan termarginalisasi, sebagai dampak perubahan ekonomi dan sosial, politik dan budaya. Rasa ketidakpuasan dan frustrasi inilah yang mendorong mereka untuk membentuk suatu komitmen terhadap kebaikan bersama perasaan individu akan kebijakan yang diinginkan. Kondisi sosial budaya yang tidak kondusif bagi komunitas nelayan dan petani tambak seperti didera oleh rasa ketidakadilan, rasa termarginalisasi secara ekonomi dan rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan yang sedang berlangsung.

Komunitas nelayan dan petani tambak ingin keluar dari tekanan ini, sehingga kondisi sosial semacam ini mendorong nelayan dan petani tambak untuk melakukan perlawanan. Pentingnya tradisi ritual dan simbolisme di dalam membentuk cara dan metode pagelaran perlawanan, bentuk-bentuk mobilisasi dipelajari dan berakar pada beragam tradisi dan budaya. Singkat kata, diperlukan pemahaman terhadap budaya setempat, adanya nilai-nilai di dalam suatu komunitas yang mendasari dan mendorong munculnya aksi kolektif.

Kehadiran perusahaan multinasional direspon oleh komunitas nelayan dan petani tambak, dalam rangka mencapai tujuan mereka sebagai berikut: Bagi kelompok yang diuntungkan, menerima kehadiran MNC. Bagi kelompok yang dirugikan, menolak dan melawan kehadiran MNC. Bentuk-bentuk perlawanan mereka adalah dengan cara tersembunyi, terbuka nir kekerasan dan terbuka dengan kekerasan. Akar perlawanan mereka adalah ketidakpuasan, rasa frustrasi akibat termarginalisasi secara ekonomi, karena lahan penangkapan ikan mereka tergesur untuk pembangunan industri perminyakan, sehingga mengancam mata pencaharian mereka.

Sekurang-kurangnya terdapat dua alasan mengapa mereka memilih bentuk perlawanan tersembunyi. Pertama, alasan trauma politik tahun 1965. Nelayan pelaku perlawanan tersembunyi, adalah mereka orang-orang tua yang telah berusia 50 tahunan. Mereka mengerti represi yang dilakukan oleh aparat negara terhadap pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965, yang menimbulkan banyak korban, kebanyakan dari kalangan

petani dan nelayan. Trauma itulah yang menyebabkan tidak berani melawan secara terbuka. Maka dipilihlah perlawanan secara tersembunyi, agar keselamatan jiwanya terjamin. Kedua, minimnya pengalaman organisasi dan tiadanya kepemimpinan yang handal, membuat komunitas nelayan memilih perlawanan tersembunyi, bukan perlawanan terbuka. Faktor kepemimpinan dan peran organisasi amat penting, untuk memobilisasi simpatisan menjadi partisipan gerakan perlawanan secara terbuka. Kedua faktor ini tidak dimiliki oleh komunitas nelayan dan petani tambak.

Respons berikutnya adalah bentuk perlawanan secara terbuka. Ada empat alasan yang menjadi faktor krusial dibalik transformasi perlawanan tersembunyi menjadi perlawanan terbuka. Pertama, alasan ekspresif; para organizer memilih perjuangan terbuka, bukan perjuangan tersembunyi karena menyakini bahwa taktik akomodatis, yang sesuai ketentuan perundang-undangan, prosedur hukum, terbuka nir kekerasan dianggap sebagai taktik yang terbaik, dengan alasan tidak akan mudah direpresi oleh negara.

Kedua, alasan instrumental. Para aktivis berpendapat, bahwa sebuah taktik itu sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan (kebijakan preferensi) mereka. Oleh sebab itu, para pragmatis ini mengubah taktik terdahulu ketika strategi baru dianggap lebih efektif. Para aktivis menganggap perlawanan secara gelap atau tersembunyi dianggap tidak membawa perubahan dan konservatif. Ketika sekutu-sekutu mereka

memberikan dukungan, dan pihak pemerintah merespons positif taktik perjuangan terbuka non kekerasan dan taktik yang direncanakan dengan baik, maka para pemrotes memilih taktik ini.

Ketiga, kondisi sosial politik pada waktu itulah yang mendorong organisasi gerakan untuk lebih berani mengekspresikan tuntutan mereka secara terbuka. Era waktu itu adalah era perubahan konstelasi politik di dalam negeri, dari sistem politik otoriterian ke sistem politik yang demokratis, akibat kejatuhan Soeharto. Keterbukaan politik semacam ini dimanfaatkan oleh para aktivis untuk mengekspresikan tuntutan mereka secara terbuka. Mereka tidak takut lagi mengekspresikan tuntutan mereka asal sesuai koridor hukum.

Keempat, faktor organisasi dan kepemimpinan berperan penting dalam mendorong transformasi dari perlawanan tersembunyi menjadi perlawanan terbuka. Berfungsinya organisasi dan kepemimpinan yang handal, mampu memobilisasi simpatisan menjadi partisipan, dan mampu mengelola sumber daya yang ada. Sedangkan perlawanan terbuka dengan kekerasan sebagai salah satu variasi respons, adalah jenis kekerasan yang bersifat liar, tak punya target, tak terkendali, tidak ada yang merencanakan dan mengorganisir, bersifat tiba-tiba dan spontan. Akibatnya, bentuk perlawanan terbuka dengan kekerasan ini akan dengan mudah membuka peluang bagi aparat untuk melakukan represi.

Proses terjadinya perbedaan perlawanan nelayan dan petani tambak, terhadap kehadiran industri perminyakan asing adalah diawalinya rasa ketidakpuasan komunitas nelayan, karena termarginalisasi, rasa frustrasi akibat perubahan sosial ekonomi mereka. Itulah yang menjadi akar permasalahan mengapa mereka melakukan perlawanan. Lawan yang mereka hadapi adalah kelompok dominan, yaitu pihak perusahaan yang *di-back up* oleh negara. Bentuk perlawanan yang mereka pilih adalah perlawanan secara tersembunyi, dengan tujuan mencari keselamatan pribadi nelayan, bisa mengacaukan dan menghambat beroperasinya perindustrian minyak, sehingga secara ekonomi mereka masih bisa bertahan.

Namun bentuk perlawanan secara tersembunyi ini oleh kalangan pemuda, yang tidak lain adalah anak-anak kandung nelayan itu sendiri dianggap tidak efektif, karena tidak akan membawa perubahan yang berarti. Untuk itulah bentuk perjuangan mereka harus diubah, agar tujuan perjuangan bisa tercapai, dengan mengubah bentuk gerakan, yang dulunya secara tersembunyi, kemudian menjadi gerakan perlawanan terbuka. Ajakan itu disambut baik oleh komunitas nelayan. Hal itu disebabkan karena komunitas nelayan tidak memiliki kepemimpinan yang handal, untuk memobilisasi gerakan tidak dimilikinya sumber daya baik material maupun non material untuk mendukung tercapainya tujuan, serta minimnya pengalaman organisasi bagi mereka.

Terjadinya perubahan bentuk perlawanan, dari bentuk perlawanan terbuka nir kekerasan menjadi perlawanan terbuka dengan kekerasan, hal itu terjadi secara spontan, tidak direncanakan secara sistematis, bersifat liar dan tak terkendali. Meletusnya kekerasan itu, akibat akumulasi kekecewaan dan ketegangan, serta rasa frustrasi yang hebat yang dialami masyarakat selama masa protes, akibat tidak transparansinya pengelolaan pembangunan industri perminyakan.

Implikasi bentuk-bentuk perlawanan terhadap pencapaian tujuan gerakan. Ketika membahas hasil-hasil gerakan sosial, dengan menilai apakah tujuan gerakan mencapai keberhasilan ataukah kegagalan, kiranya tepat ketika memutuskan apakah sebuah gerakan telah mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya atau tidak. Namun, pendekatan ini juga bermasalah. Kalau kita mengkaitkan apakah tujuan gerakan tercapai atau tidak, gagal atau berhasil dengan seluruh gerakan, berarti kita berasumsi bahwa gerakan perlawanan merupakan entitas yang homogen. Nyatanya, sering kali ada multiplisitas/ beragam tujuan di antara para partisipan gerakan sosial. Untuk itu, agar bisa menelitei dengan efektif hasil-hasil gerakan sosial sebagai himpunan kelompok, organisasi, dan aksi-aksi yang mempunyai banyak tujuan serta strategi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan mereka. Heterogenitas ini menunjukkan bahwa perubahan tertentu, tidak mesti dipersepsi sebagai keberhasilan oleh seluruh sektor gerakan sosial. Di samping itu, persepsi keberhasilan atau kegagalan dalam

mencapai tujuan gerakan, tidak hanya bervariasi di dalam partisipan gerakan sosial, tetapi juga di antara partisipan gerakan sosial dan pengamat eksternal. Oleh karena itu, apa yang dianggap sebagai suatu keberhasilan oleh sebagian partisipan, mungkin dinilai sebagai kegagalan oleh sebagian partisipan lain.

Contoh mengenai beragamnya gerakan ini adalah gerakan perlawanan masyarakat Ujung Pangkah. Ada gerakan penolakan terhadap kehadiran industri tambang, ada gerakan lingkungan, ada gerakan hak-hak demokrasi, dan lain-lain. Para partisipan yang hanya bertujuan menolak kehadiran industri pertambangan minyak, mungkin melihat tujuan gerakan ini gagal, apakah gerakan itu memilih perlawanan tersembunyi, perlawanan terbuka nir kekerasan, apalagi dengan bentuk perlawanan dengan kekerasan, karena dalam kenyataannya, industri pertambangan tersebut hingga kini masih tetap beroperasi. Akan tetapi, para partisipan yang bertujuan menolak kehadiran industri perminyakan, atau sekurang-kurangnya mengungkapkan bahwa tindakan pemerintah mengizinkan beroperasinya industri perminyakan, berlawanan dengan aspirasi masyarakat, gerakan tersebut dinilai sebagai keberhasilan karena gerakan protes melibatkan banyak sektor di masyarakat, diulas secara luas di banyak media massa, dan telah menjadi respon dari berbagai kalangan. Karena itu, berbagai partisipan gerakan sosial mencapai kesimpulan yang berlainan tentang keberhasilannya. Agar supaya bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang hasil-hasil/ tujuan gerakan, perlunya pendekatan multisegi untuk meneliti gerakan sosial.

2. Implikasi Teoritik

Sebagai peneliti, saya menerima dan merujuk keempat perspektif tersebut dan teori EFPR, dengan memberikan catatan sebagai berikut:

Perspektif Perilaku Kolektif

Tesis utama Perspektif Perilaku Kolektif, menjelaskan bahwa ketidakpuasan individu menjadi faktor pendorong dibalik terbentuknya gerakan sosial. Dengan kata lain, munculnya gerakan sosial sebagai respon spontan karena ketidakpuasan terhadap situasi baru yang disebabkan modernisasi yang berlangsung cepat. Jika banyak orang menginginkan sesuatu, percaya bahwa mereka layak untuk menerimanya, dan percaya bahwa masyarakat mereka tidak akan memungkinkan mereka untuk mencapai sesuatu tersebut sendiri, maka mereka lebih mungkin untuk membentuk gerakan sosial dengan tujuan untuk mengubah masyarakat.

Perspektif Perilaku Kolektif (Deprivasi Relatif), berguna untuk mengkaji kondisi apa saja yang membuat gerakan sosial lebih mungkin terbentuk. Tak seorang pun menyangkal logika yang melekat dalam perspektif ini. Namun, kenyataannya dengan deprivasi relatif hanya salah satu faktor yang menciptakan gerakan sosial. Dukungan luar dan kondisi politik mungkin sama pentingnya dengan perasaan deprivasi. Tidak semua anggota gerakan sosial mengalami deprivasi relatif dan tidak semua orang yang mengalami deprivasi relatif bergabung dalam gerakan sosial. Kenyataannya, banyak organisasi gerakan sosial dipimpin orang-orang

yang tidak mengalami deprivasi relatif. Ada persoalan sosial, ekonomi dan politik yang kompleks yang menentukan seberapa sukses suatu gerakan memproduksi perubahan. Perspektif Deprivasi Relatif tidak memasukkan faktor-faktor ini, sehingga tidak cocok dengan gerakan sosial *real life*.

Perspektif Mobilisasi Sumber Daya

Tesis utama Perspektif Mobilisasi Sumber Daya bertumpu pada pernyataan sederhana: Betapapun orang-orang merasa tidak puas, geram atau merasa benar, tapi tanpa organisasi dan kepemimpinan, mereka tidak akan mampu memproduksi perubahan sosial secara efektif. Terlepas perasaan deprivasi atau perasaan geram yang mereka alami, tapi efektifkah mereka mampu mengelola (“memobilisasi”) sumber daya yang mereka perlukan untuk memperoleh penerimaan sosial atas tujuan-tujuan mereka.

Kritik terhadap Perspektif Mobilisasi Sumber Daya adalah bahwa perspektif ini terlalu bertitik berat pada sumber daya material dan bantuan dari luar dan kurang menaruh perhatian pada lingkungan politik yang memungkinkan berlangsungnya gerakan tersebut; Atau dengan kata lain, Perspektif Mobilisasi Sumber Daya cenderung berfokus pada dukungan sosial dan gerakan-gerakan yang memperolehnya dengan sukses, dan mengabaikan lingkungan politik yang berkembang saat itu. Perspektif Mobilisasi Sumber Daya bertitik berat pada kondisi-kondisi yang harus ada di dalam organisasi agar ia berhasil.

Kelebihan dari Perspektif Mobilisasi Sumber Daya adalah perspektif ini bekerja dengan baik dalam menjelaskan kemunculan dan keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial. Perspektif Mobilisasi Sumber Daya memasukkan deprivasi relatif yang dialami oleh sebagian anggota sebagai faktor minor tapi penting. Perspektif Mobilisasi Sumber Daya berlaku pada seluruh gerakan dalam pola yang sama. Ini merupakan kekuatannya sebagai sebuah perspektif empirik, proses-proses yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan gerakan adalah sama, apakah gerakan itu radikal, liberal, konservatif atau ekstrimis.

Perspektif Proses Politik

Perspektif ini berusaha mengkombinasikan Perspektif Deprivasi Relatif (Perspektif Perilaku Kolektif) dan Perspektif Mobilisasi Sumber Daya ke dalam sebuah perspektif yang lebih historis dan politis. Perspektif Proses Politik berfokus pada faktor-faktor yang memungkinkan terbentuknya gerakan dan memungkinkan gerakan itu mencapai keberhasilan. Perspektif Proses Politik lebih banyak berfokus pada koneksi politik daripada sumber daya material. Sebuah gerakan sosial dipandang sebagai fenomena politik, bukan sebagai fenomena psikologis. Perhatian sistematis pada “struktur peluang politik” yang mempengaruhi kelangsungan gerakan sosial. Struktur kesempatan politik antara lain tingkat keterbukaan, tingkat stabilitas susunan elite yang berkuasa, adanya pengelompokan dan perpecahan elite, dan kapasitas negara serta

kecenderungan untuk menindas. Kritik terhadap perspektif ini adalah: konsep eksplanatorisnya kuat, namun lemah jika dipergunakan pada kasus yang spesifik. Terbukanya peluang tidak selalu menguntungkan bagi gerakan sosial, akan tetapi juga menjadi kesempatan bagi lawan-lawannya untuk melemahkan gerakan.

Perspektif Gerakan Sosial Baru

Perspektif ini melihat gerakan-gerakan kontemporer sebagai respons terhadap ketidakcakapan struktur politik dan ekonomi masyarakat pasca industrial. Ia berbeda dengan gerakan-gerakan lain, karena struktur organisasinya tersentralisasi, menggunakan taktik inkonvensional, dan fokusnya pada isu-isu budaya dan identitas. Gerakan Sosial Baru melakukan penekanan yang berlebihan pada tujuan apolitis para pemrotes kontemporer. Kritik terhadap Perspektif Gerakan Sosial Baru adalah, perspektif ini kurang mampu melihat keterkaitan gerakan-gerakan sosial yang berlangsung sepanjang masa. Menafikan peran organisasi gerakan dan bagaimana organisasi tersebut memelihara dinamika gerakan secara berkelanjutan. Perspektif ini menganggap bahwa perubahan kultural bisa dipisahkan dari isu-isu politik.

Teori Everyday Forms of Peasant Resistance (EFPR—Teori bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari petani)

Teori perlawanan petani Scott muncul dari sebuah metode teoritik yang mengkaitkan teori dengan konteks dan menempatkan “metode

perlawanan Breaction” petani dalam kehidupan sehari-hari agar bisa memahami sepenuhnya kemungkinan-kemungkinan dan hambatan-hambatan di dalam kondisi ketidakadilan. Pendekatan EFPR telah memberikan suatu kunci kepada pemahaman kita akan akar mobilisasi politik petani, karena pada masa inilah protes kaum tani diungkapkan dan tujuan-tujuan mereka kadang dicapai menurut pola-pola yang tidak begitu heroik dan tidak banyak menarik perhatian orang. Karena ketidakmampuan dan ketidakmauan mereka untuk melakukan protes politik secara terbuka, mereka sering melakukan dan terlibat dalam bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang berupa tindakan menentang secara tersembunyi terhadap elite-elite lokal.

Teori EFPR tidak relevan untuk membaca data penelitian di Ujung Pangkah, khususnya perlawanan kaum tani, petani tambak dan nelayan (kaum sub altern), karena Scott sendiri menekankan pentingnya unsur-unsur tradisional dalam fondasi-fondasi kultural yang mendasari perlawanan petani. Yang jelas, kita membutuhkan pemahaman yang lebih baik mengenai kaum petani yang menderita marjinalisasi, yang dari segi kultural sangat kompleks, serta kita butuh pemahaman tentang asal-usul dan implikasi politis dari kompleksitas ini. Akhirnya hal ini mengantarkan kita ke kritik terhadap EFPR: teori ini diduga mengabaikan organisasi politik dan perubahan sosial. Scott menekankan EFPR, tidak menekankan

perjuangan konvensional. Dengan demikian teori Scott merupakan “teori konservatif”. Teori Scott tidak mengharapkan perubahan atau menjelaskan perubahan.

Dari keempat perspektif dalam teori gerakan sosial dan satu teori tentang EFPR, maka perspektif perilaku kolektif merupakan salah satu perspektif gerakan sosial yang dominan dalam melihat munculnya gerakan perlawanan di Ujung Pangkah. Hal ini disebabkan rasa ketidakpuasan masyarakat nelayan dan petani tambak terhadap situasi baru yang memarginalkan nelayan dan petani tambak secara ekonomi. Akan tetapi dalam faktanya, ketidakpuasan bukan satu-satunya penentu munculnya gerakan sosial namun dilengkapi oleh perspektif lain, seperti sumber daya dan peluang-peluang (Politik).

Keterbatasan penelitian ini

Sebagai peneliti, kami menyadari adanya kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini. Kelemahan ini meliputi penggunaan konseptualisasi kerangka teori dan metodologi. Berikut ini kami uraikan kelemahan-kelemahan tersebut. Pertama: persoalan konseptualisasi. Penggunaan kata perlawanan sering kami gunakan secara berganti-ganti, dengan istilah protes, aksi kolektif, aksi kolektif nir kekerasan, aksi langsung, perlawanan secara sembunyi-sembunyi, dan lain-lain, yang memang menurut para

pakar memiliki arti yang berbeda-beda. Namun, dalam penelitian ini kami memfokuskan pada perlawanan.

Dengan mengikuti Tilly, mengemukakan adanya persamaan antara konsep aksi kolektif (kumpulan bertujuan) dan protes, namun menolak pemakaian konsep protes karena dua alasan berikut: Pertama, kata “protes” dan “pemberontakan”, “kekacauan”, “gangguan”, serta istilah-istilah sejenisnya—menunjukkan niat dan posisi politik si pelaku, biasanya dari sudut pandang penguasa. Gagasan aksi kolektif dipakai setidaknya mengacu pada pelaku yang berusaha menghancurkan sistem dan orang-orang yang berusaha melakukan perubahan minor terhadap kekuasaan dan kaum mayoritas seperti yang telah dicita-citakan. Kedua, aksi kolektif mencakup pola-pola perilaku sangat luas yang jaringan dan kekuatannya layak diperhitungkan: tidak hanya perilaku yang oleh penguasa disebut “protes”, “pemberontakan” atau hal-hal sejenisnya akan tetapi juga kegiatan berupa petisi, parade, *bloc voting*, dan berbagai cara kumpul lainnya yang ditoleransi dan bahkan didukung oleh penguasa. Dari perjalanan sejarah kita dapat membedakan aksi-aksi yang dianggap ilegal, aksi-aksi yang diperbolehkan dan bahkan kita juga menjadi saksi diizinkan aksi-aksi pemogokan pada sejumlah negara.

Terlepas dari muatan-muatan yang terkandung didalamnya (yang sering kali menjadi perhatian penguasa), konsep aksi kolektif dan protes berbeda meskipun memiliki kedekatan makna. Pendapat Tilly bisa diterima

akan tetapi protes tidak selalu mengacu kepada “posisi politik” melainkan pada posisi yang berseberangan saja. Alasan kedua yang diajukan Tilly yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari “aksi kolektif” masih dapat diterima, namun tidak setuju ketika dia mengatakan bahwa bentuk-bentuk resmi oposisi tidak termasuk dalam studi konsep protes.

Kutipan di atas menunjukkan, adanya kelemahan dalam hal konseptualisasi yang digunakan dalam penelitian ini. Usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan penelitian ini adalah perlunya kajian tambahan untuk mencari tahu jawabannya tentang penggunaan istilah/ konsep-konsep di atas.

Persoalan yang kedua adalah permasalahan metode penelitian. Kelemahan-kelemahan penggunaan metode kualitatif terletak dalam pelaksanaan wawancara dengan informan, khususnya informasi yang diberikan oleh informan kepada peneliti diragukan kebenarannya. Informan yang menjadi pengurus organisasi (pemuda, lembaga swadaya masyarakat, nelayan, petani tambak), ada yang memberikan informasi/ keterangan yang positif-positif saja, semua berjalan lancar-lancar saja. Informasi semacam inilah yang menimbulkan keragu-raguan peneliti. Jika peneliti percaya dan informasi itu ditelan begitu saja oleh peneliti, bisa jadi kesimpulannya akan bias. Untuk mengatasi keterbatasan ini peneliti melakukan *cross check* di lapangan, untuk mencari tahu kebenaran informasi yang diberikan oleh informan.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adas, Michael, (1986). *From Footdragging to Flight: The Evasive History of Peasant Avoidance Protest in South and Southeast Asia*, Journal of Peasant Studies, Vol. 13, No. 2, pp. 64-86.
- Andrain, Charles F. and Apter, David E, (1995), *Political Protest and Social Change*, New York: New York University Press.
- Baker, Anton, (1984). *Metode-metode Filsafat*, Ghalia Indonesia.
- Balai Asian Jurnal, (1981). *The Miners Plight: A Case Study* Vol. II, No. I, March 1981, pp. 6-10, 14-17, 24.
- Baldrige, J. Victory, (1998). *Sociology: A Critical Approach to Power, Conflict, and Change*, New York, London, Sidney, Toronto: John Wiley and Son, Inc.
- Basrowi dan Sukidin, (2003). *Teori-teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Beissinger, Mark R. (2001), *Violence in Moryl*, Alexander J. (ed). Encyclopedia of Nationalism, Vol. 1, San Diego, Academic Press, pp. 849-867.
- Belena, Abe. (1980). *Pollution Perils 4 Rivers*, Times Journal, Manila, p.9.
- Boeke, J.H. (1953). *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*, New York: Institute of Pacific Relations.
- Brown, S. (2002). *Swinging Back: violence in the anti-corporate-globalization movement*, Sojourners, Vol. 31, No. 4, pp. 36-42.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiman, Arief. (1996). *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burton, John W. (1997). *Violence explained. The Sources of Conflict, Violence and Crime and Their Prevention*, Manchester: Manchester University Press.

- Calinicos, Alex. (1975), *Althusser's Marxism*, London, Pluto Press.
- Cahyadi, Hari, (1993), Louis Althusser, Telaah Negara dan Ideologi, dalam *Diskusi Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Penyunting Tim Redaksi Driyarkoro, Gramedia Pustaka Utama.
- Charmaz, Kathy, (2000) dalam Denzin & Lincoln: *Handbook of Qualitative Research*, Second Edition, Sage Publications, Inc.
- Collier, William L, et al (1973). *Recent Changes in Rice Harvesting Methods*, Bulletins of Indonesian Economic Studies, Vol. IX NO.2.
- _____, (1974). *Agriculture Technology and Institutional Change in Jawa dalam Food and Research Institute Studies in Agricultural Development, Trade, and Development*, Stanford University Press.
- _____, (1978). *Rural Development and the Decline in Traditional Village Welfare Institution in Java*, paper presented at the 1978 Annual Meeting of the Western Economic Association Honolulu.
- _____, (1982). Soentoro, Goenawan Wiradi: *Maket Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaruan Desa di Jawa*, Prisma No. 6.
- Dansereau, Suzanne, (2000). *Resistance And Social Change: New Contribution to Understanding the Potential of Labour Resistance*, paper presented at Development: The Need for Reflexion Centre for Developing Area Studies, Mc Gill University Montreal, Quebec, September 21-23, 2000.
- della Porta, Donatella and Diani, Mario. (1999). *Social Movement: An Introduction*. Oxford: Blackwell.
- DTE 39:6, Nov/98; DTE 47; *Development Agression, Observations on Human Rights Conditions in the Freeport Indonesia Contract on Work Areas With Recommendations*. Naskah disusun oleh Abigail Abrash, Konsultan Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights, Juli, 2002.
- Eckstein, Susan (1989). Power and Popular Protest; in Susan Eckstein (ed.), *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*. Berkeley: University of California Press.
- Ethridge, Marcus & Handelman, Howard (1994). *Politics in Changing Societ: A Comparative introduction to Political Science* New York: St Martins Press.

- Emerson, Donald, (1979). *Bagaimana menaikkan taraf hidup lapisan masyarakat termiskin di desa pantai PPWP Jawa Tengah*, September, 1979.
- Evers, Hans-Dieter (1980). *Sociology of South-East Asia, Reading on Social Change and Development*, Oxford University Press.
- Faulks, Keith (1999). *Political Sociology* Edinburgh University Press, Edinburgh.
- Feierabend, Ivo K; Feierabend Rosalind L and Gurr, Ted R. (1972). *Anger, Violence and Politics*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc-Englewood.
- Friedman, L (ed), (1983). *Final Report of the National Commission on the Causes and Prevention of Violence, Violence in America: Volume I*, Chelsea House, New York.
- Gamson, William. (1975). *The Strategy of Social Protest*. Belmont: Wadsworth Publishing.
- Geertz, Clifford, (1970). *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*, Reprinted, Berkeley University of California Press.
- _____, (1976). *Involusi Pertanian*, Terjemahan, Jakarta: Bhratara.
- Ghee, Lim Teck and Valencia, Mark J. (1990). *Conflict over Natural Resources in South Asia and The Pacific*, Singapore: United Nations University Press.
- Gilpin, Robert, (2001). *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Giugni, Marco (1999). *How Social Movement Matter Past Research Present Problems Future Development*, Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. i – xxxiii.
- Gurfield, J. (ed), (1970). *Protes, Reform and Revolt*, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Gurr, Ted R. (1970). *Why Men Rebel?*, Princeton University Press.
- Hafid, Jos (2002). *Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah*, Pustaka Latin.

- Handchard, Michael (2004). *Weapons of the Weak and Quotidian Politics*, mgh.233@northwestern.edu
- Hobsbawm, E.J. "Peasant and Politics", (1973-74), *Journal of Peasant Studies*, Vol. 1, No. 1, pp.3-22.
- _____, (2000). *Bandit Sosial, Di-Indonesiakan Mob*. Zaki Hussein, Jakarta: Teplok Press.
- Jenkins, J. Craig. (1985). *The Politics of Insurgency: The Farm Worker Movement in the 1960s*. New York: Columbia University Press.
- Juoro, Umar (1990). *Teori Dualisme Boeke Suatu Tinjauan Studi Ekonomi Dualistis dan Ekonomi Agraria Indonesia*, Jakarta: Studi SPES-LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono (1966). *The Peasant' Revolt of Banten in 1888, its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*, The Hague: s'Gravenhage.
- _____, (1973). *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, Singapore: Oxford University Press.
- _____, (1984a). *Ratu Adil*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- _____, (1984b). *Reaksi Rakyat Pedesaan terhadap Modernisasi Lewat Lembaga dan Gerakan Sosial*, Ceramah Bulanan di P3PK-UGM.
- Kelley, Robin D.G. (1994). *Race Rebels: Culture, Politics and the Black Work Class*, New York: The Free Press.
- Kerkvliet, Benedict J. Tria (1986). Everyday Resistance of Injustice in a Philippine Village, *Journal of Peasant Studies*, Vol. 13, No. 2, pp. 107-23.
- _____, (1990). *Everyday Politics in the Philippines: Class and Status Relations in a Central Luzon Village*, Berkeley : University of California Press.
- _____, (1993). *Claiming the Land: Everyday Politics in the Philippines with Comparisons to Indonesia, Peru, Portugal and Rusia*, *Journal of Peasant Studies*, Vol. 20, No. 3, pp. 459-91.
- Klandermans, (2005). *Protes*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

- Korovkin, Tanya. (1999). "Weak Weapons, Strong Weapons? Hidden Resistance and Political Portest in Highland Equador". *Journal of Peasant Studies*, CER LAC Working Paper Series, Nov. 1999.
- Kothari, Rajni, (1979). *The North-South Issue*, Mazingira, No. 10.
- Kriesi, Hanspeter (1991). *The Political Opportunity Structure of Social Movement Research: Its Impact on Their Mobilization*, Occasional Paper No. 91-103, Wissenschaftszentrum Berlin.
- Kuffer, Anna, (2008). *Political Violence as Social Action dalam Social Movements in Action 2008 by Research Initiative in International Activism Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Technology Sidney*.
- Laode Ida, (2002). Freeport dilema Benteng Pengaman dalam Kompas, Rabu, 0103-02, h.7:hal. 4 s/d 7.
- Locher, David A. (2002). *Collective Behavior*, Prentice Hall.
- Lofland, John. (2003). *Protes Studi tentang Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*, terj. Lutfi Ashari, Yogyakarta Insist.
- Majalah Pilar Bisnis, (2001). *Ramahkah Perusahaan Multinasional Pada Lingkungan?* Tahun 4, No. 18. (26 September - 9 Oktober 2001).
- Manalu, D. (2007), *Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik, Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara*. Populasi 18 (1). ISSN: 0853-0262.
- Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. *Designing Qualitative Research*, Sage Publication, California.
- Mc Adam, D., Tarrow, S. & Tilly, C. (1997). *Dynamics of Contention*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mc Andrew, John P. (1983). *The Impact of Corporate Mining on Local Philippine Communities*, Davao City: ARC publications, pp. 53,60-1
- Mc Charthy and Zald. (1997). *Resources Mobilization and Social Movement: A Partial Theory*. American Journal of Sociology.
- Moore Jr., Barrington, (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy; Lord and Peasant in The Making of The Modern World*. Boston: Beacon Press.

- Oberschall, Anthony. (1973). *Social Conflict and Social Movement*. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
- _____, (1993). *Social Movements, Ideologies, Interest and Identities*. New Brunswick/ London: Transaction.
- Padmo, Sugiyanto (2000). *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*, Penerbit Media Pressindo.
- Penny, D.H. (1966). *The Economics of Peasant Agriculture: The Indonesian Case*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, No.5. Oktober, h. 22-44.
- Popkin, Samuel L. (1979). *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, Berkeley: University of California Press.
- _____. (1989). *Memahami Petani secara Rasional*, dalam Prisma No.9 hal. 65-72.
- Risk, Gilbert. (1997). *The History of Development: From Western Origin to Global Faith*, London, Zed Books.
- Ruiz, Diego Muro, (2002). *State of the Art. The Logic of Violence*, Political Studies Association, Published by Blackwell Publisher, 108 Cowley Road, Oxford.
- Schwartz, DC. (1972). "Political Alienation: The Psychology of Revolution's First Stage" in I.K. Feirabend and R.I. Feirabend, *Anger, Violence, and Politics*, New Jersey- Prentice-Hall, Inc-Englewood Cliffs, pp. 58-66.
- Scott, James C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistem in Southeast Asia*, New Haven: Yale University Press.
- _____. (1977). *Hegemony and the Peasantry*, Politics and Society, Vol. 1, No. 3, pp.267-96.
- _____. (1985a). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven: Yale University Press.
- _____. (1985b). *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta: LP3ES.
- _____. (1986). Everyday Forms of Peasant Resistance, *Journal of Peasant Studies*, Vol. 13, No.2, pp.5-35.
- _____. (1990). *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven: Yale University Press.

- _____. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*, (Terj) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. (2000). *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, (Terj) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, Hotman M. (1996). *Pembangkangan Terselubung Petani dalam Program Tebu Rakyat Intensifikasi Sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi*, Disertasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- _____. (2001). "Pembangkangan Terselubung: Kiat subsistensi di Kalangan Petani TRI", dalam *Jurnal Gerbang*, Vol. IV No.9 April-Mei 2001.
- Siegel, Lenry. (1976). *Freeport Mines Indonesian Copper*, Pasific Research, Vol. VII, Tehivary.
- Silaen, Victor. (2006), *Gerakan Sosial Baru di Toba Samosir, Studi kasus gerakan perlawanan rakyat terhadap Indorayon (Periode 1983-2000)*. Disertasi.
- Skocpol, Theda (1991). *Negara dan Revolusi Sosial; Suatu Analisis Komparatif tentang Perancis, Rusia dan Cina*, diterjemahkan kelompok Mitos. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Smith, Nigel J.H. (1981). *Man, Fishes and the Amazon*, New York: Columbia University Press.
- Suhartono, (1991). *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta, 1830-1920*. Penerbit Tiara Wacana
- _____. (1995). *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa*, Studi Historis 1850-1942. Penerbit Aditya Media.
- Supriharyono, (2001). *Konservasi Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dan Laut: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*, Seminar Nasional Biologi 2 Prodi FMIPA ITS Surabaya.
- Suryana, A'an. (2003). *Dari Sabang Sampai Freeport: Neoliberalisme dan Kehancuran Lingkungan Hidup*. dalam Neoliberalisme. Yogyakarta: Penerbit Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Suryo, Djoko (1985). "Gerakan Petani", dalam *Prisma* nomor 11.
- Tarrow, Sidney. (1994). *Power in Movement Social Movement, Collective Action, and Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.

- The Jakarta Post, (2000). *Environmentalist Demand Freeport's Temporary Closure*, Mei 16, 2000.
- _____, (2001). *Court Rules against Freeport on Fatal Accident*, Agustus 29, 2001.
- _____, (2002). *Global Moratorium Sought on New Mining Explorations*, Mei 28, 2002.
- Tilly, Charles (1978). *From Mobilization to Revolution*, Addison-Wesley: Reading Mass.
- Tindall, D.B. (2003). *From Structure to Dynamic: A Paradigm Shift in Social Movement Research? Canadian Review of Sociology and Antropology*, Vol. 40, No. 4, pp. 481-487.
- WALHI, Siaran Pers, 11-11-2003; WALHI; <http://www.walhi.or.id>.
- Wertheim, W.F. and Giap, The Siau (1962). *Social Change in Java 1900-1930*. Pacific Affairs.
- Wignaraja, Ponna. (Ed), (1993). *New Social Movements in the South Empowering The People*, London, Zed Books.
- Winter, Jerry A. (2003). *The Development of the Disability Rights Movement a Social Problem Solver*, Disability Studies Quartely, Vol. 23 No. 1, pp. 33-61.
- Yusef, Anna, (2007). *Political Violence as Social Action dalam Social Movements in Action 2007 by Research Initiative in International Activism Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Technology Sidney*.

Wawancara

- Alfani, (2004). Penduduk desa Tajungrejo, mahasiswa Universitas Airlangga.
- Ardziansyah, (2003). *Pengurus LSM Lokal, Bagian Pendidikan Organisasi Forum Komunikasi Pemuda Ujung Pangkah (FKPU), Anggota Muhammadiyah (Wawancara, 27-1-2003)*.
- Ilham, (2005). Forum Komunikasi Pemuda Ujung Pangkah.
- Madlikan, (2003, 2004). Kepala Bagian Pemerintahan Kecamatan Ujung Pangkah (Wawancara).
- Usman, Fachri, (2002). Tokoh Masyarakat dari Kalangan NU Kabupaten Gresik (Wawancara, 11-11-2002). Pernah bekerja di Amerada Hass 2001-2002.